



**PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 18 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2019**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2018**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2019 disusun sebagai pedoman penyusunan APBD Tahun 2019, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019. RKPD Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah sebagai kelanjutan tahapan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya serta penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah.

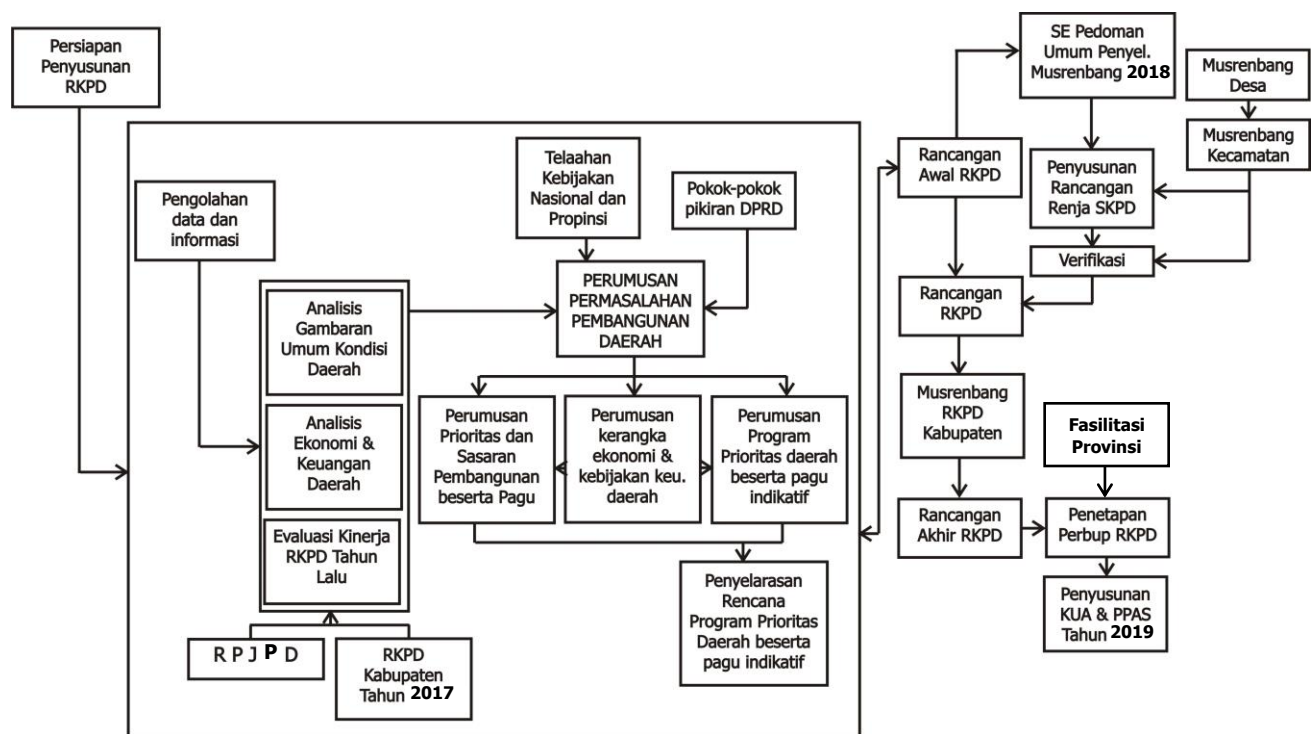
RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 berakhir pada tahun 2018, namun RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 belum ditetapkan. Oleh karena itu, penyusunan rencana pembangunan tahun 2019 mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025, memperhatikan RPJMN Tahun 2015-2019 dan Proyek Strategis Nasional, mempedomani

Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta menjaga kesinambungan RPJMD Tahun 2013 - 2018.

RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2019 secara substansial mendasarkan pada kebutuhan riil untuk mewujudkan tujuan tahap ketiga RPJPD (Tahun 2015-2019) yaitu mewujudkan peningkatan, pengembangan dan penguatan pembangunan yang menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat serta penguatan daya saing perekonomian, dan kebijakan/program-program nasional dan regional Jawa Tengah.

Proses penyusunan RKPD Tahun 2019 diawali dengan persiapan penyusunan RKPD, dilanjutkan dengan penyusunan rancangan awal RKPD yang disusun dengan pendekatan teknokratis, selanjutnya memperoleh masukan dari rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD menjadi Rancangan RKPD sebagai bahan Musrenbang RKPD. Penyelenggaraan Musrenbang dilaksanakan secara bertahap dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten. Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Kudus Tahun 2018 berpedoman pada Surat Edaran Bupati Kudus tanggal 4 Januari 2018 Nomor 050/0013/27.00/2018 perihal Pedoman Umum Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2018. Hasil Musrenbang menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPD Tahun 2019 untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Secara rinci proses penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2019 disajikan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Diagram Alir Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2019

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2019 menjadi dasar dalam perumusan rancangan akhir Renja SKPD Tahun 2019, dan menjadi acuan dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS Tahun 2019. KUA dan PPAS tersebut selanjutnya dibahas oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD untuk disepakati menjadi Nota Kesepakatan KUA-PPAS yang selanjutnya sebagai dasar pengajuan RAPBD Tahun 2019.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2019 disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

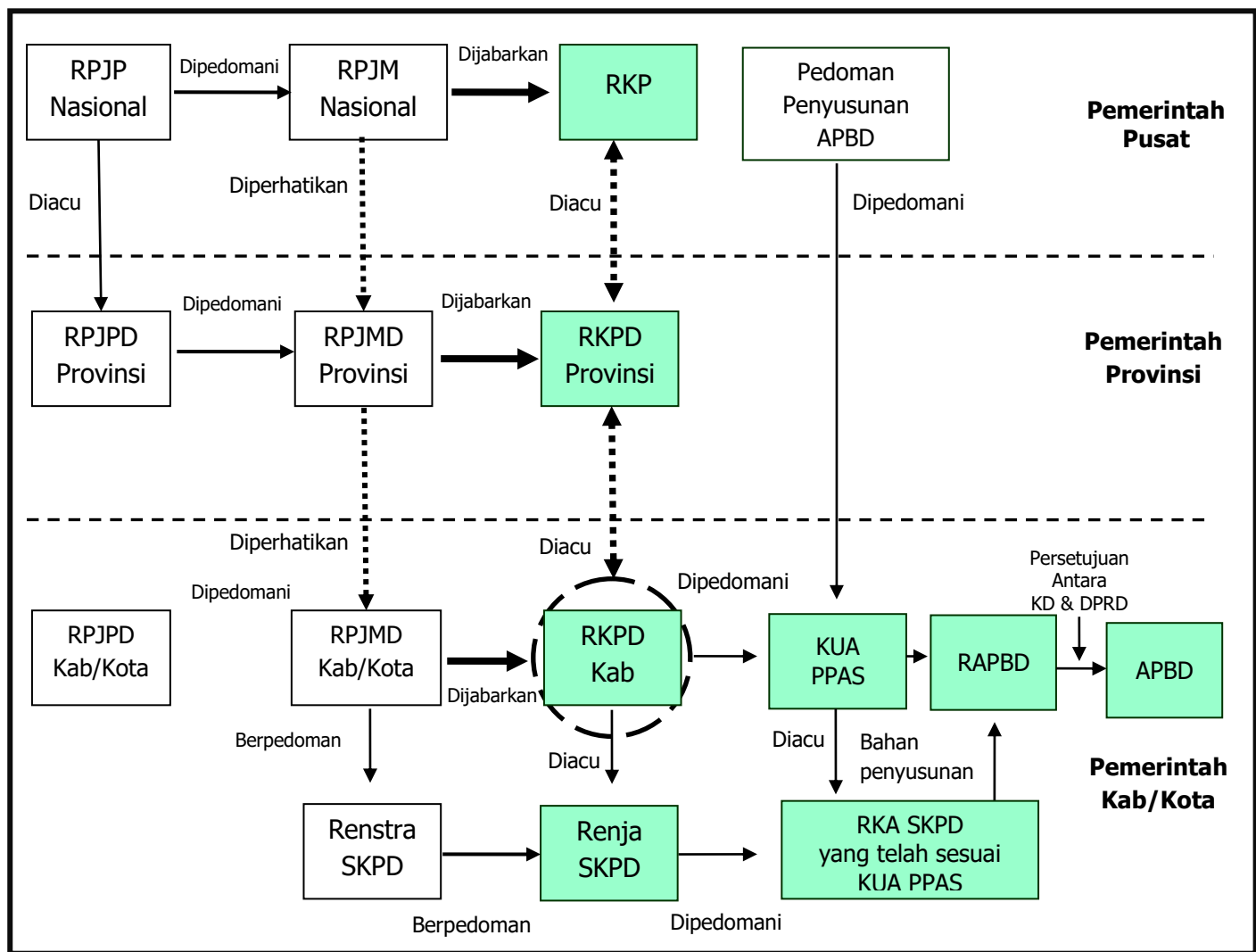
1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Kudus merupakan perencanaan pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan tahapan RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025. RKPD penyusunannya berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan daerah provinsi.

RKPD Tahun 2019 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, penyusunannya mengacu pada RKP Tahun 2019 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. RKPD Tahun 2019 menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBD Tahun 2019.

Pada tingkat Perangkat Daerah, dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dijadikan sebagai pedoman dalam penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah setelah disahkan melalui Keputusan Bupati dan ditetapkan Kepala Perangkat Daerah menjadi Renja Perangkat Daerah akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mengacu pada KUA dan PPAS yang telah disepakati oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD. RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan KUA dan PPAS selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. RAPBD yang telah disetujui Kepala Daerah dan pimpinan DPRD kemudian dievaluasi oleh Gubernur, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi APBD.

Hubungan RKPD Kabupaten Kudus dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah lainnya secara sistematis didiskripsikan dalam bentuk diagram alir seperti pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Hubungan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2019 dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 ke dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2019 dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD tahun-tahun sebelumnya.
2. Menciptakan sinergi program/kegiatan antar wilayah, antar kewenangan urusan pembangunan, antar Perangkat Daerah.
3. Mewujudkan efektivitas alokasi sumber dana.
4. Mengakomodir dinamika kebutuhan prioritas masyarakat.

Sedangkan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;

2. Pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika RKPD ini disusun terdiri dari tujuh bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD yang memuat ketentuan secara langsung dengan penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun daerah.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan keterkaitan RKPD dengan dokumen lain yang relevan seperti RPJP, RKP/program strategis nasional dan RKPD Provinsi.

1.4 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RKPD tahun rencana.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan sistematika RKPD terkait dengan pengaturan serta penjelasan ringkas isi dari setiap bab.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah dari aspek geografi, demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Mencakup telaahan hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Memuat penjelasan terhadap permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi daerah tahun 2016, tahun 2017 dan proyeksi tahun 2018, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2019.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Mengemukakan tujuan serta sasaran pembangunan daerah.

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2019

Mengemukakan prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dikaitkan dengan program yang merupakan jawaban atas permasalahan pada tahun rencana.

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Mengemukakan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja

tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Bab VII Penutup

Mengemukakan tentang kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2019.

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1.1. Aspek Geografi

Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati

Sebelah Timur : Kabupaten Pati

Sebelah Selatan : Kabupaten Demak, Kabupaten Pati dan Kabupaten Grobogan

Sebelah Barat : Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak

Tabel 2.1
Pembagian dan Luas Wilayah Administrasi Tahun 2017
Kabupaten Kudus

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (ha)	Desa	Kelurahan	Dukuh	RW	RT
1	Kaliwungu	3.271	15	0	48	67	442
2	Kota	1.047	16	9	34	110	497
3	Jati	2.630	14	0	52	79	386
4	Undaan	7.177	16	0	33	63	357
5	Mejobo	3.677	11	0	33	69	341
6	Jekulo	8.292	12	0	45	85	445
7	Bae	2.332	10	0	38	51	285
8	Gebog	5.506	11	0	80	82	435
9	Dawe	8.584	18	0	71	110	583
Jumlah		42.516	123	9	434	716	3.771

Sumber : SIPD – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 2018

Sebagaimana tertera pada Tabel 2.1, wilayah Kabupaten Kudus terdiri atas 9 Kecamatan, yang terbagi dalam 9 kelurahan dan 123 Desa. Desa dan kelurahan tersebut dengan 434 dukuh, 716 RW dan 3.771 RT.

a) Letak dan Kondisi Geografis

Letak geografis Kabupaten Kudus berada diantara 4 (empat) Kabupaten, yaitu berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati di sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Pati di sebelah timur, berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Pati di sebelah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Jepara di sebelah barat. Posisi astronomis Kabupaten Kudus sendiri berada antara 110°36' dan 110°50' Bujur Timur dan antara 6°51' dan 7°16' Lintang Selatan. Secara posisi geostatis Kabupaten Kudus masuk dalam kawasan pesisir dan pegunungan, namun tidak terletak di tepi pantai dengan kondisi tanah datar 0° di hampir seluruh Kecamatan di Kabupaten Kudus sampai dengan sangat curam ±40° untuk wilayah Kudus bagian utara, kawasan pegunungan Muria. Fakta lain yang perlu dipertimbangkan adalah kehadiran Gunung Muria di Kabupaten Kudus, yang dapat membentuk cekungan tipe foreland basin, yang terjadi karena gaya pembebanan oleh tubuh gunung api yang mengakibatkan batuan dasar mengalami penurunan hingga di bawah permukaan laut.

b) Topografi

Berdasarkan topografi wilayah Kabupaten Kudus terdiri dari dataran, bergelombang, curam dan sangat curam. Berdasarkan elemen data topografi wilayah Kabupaten Kudus yang terdiri dari dataran meliputi Kecamatan Kota, Jati, Kaliwungu, Undaan, Mejobo, Jekulo dengan luas 28.863,90ha. Bergelombang meliputi Kecamatan Bae dengan luas

6.665,27ha, curam meliputi Kecamatan Gebog dan Dawe dengan luas 3.047,00 Ha dan untuk kawasan sangat curam meliputi Kecamatan Dawe dengan luas 3.939,50 ha.

Wilayah Kabupaten Kudus memiliki topografi yang beragam yaitu ketinggian wilayah yang berkisar antara 8-1600 m diatas permukaan air laut. Wilayah yang memiliki ketinggian terendah yaitu 8 meter di atas permukaan laut terdapat di Kecamatan Undaan, sedangkan wilayah dengan ketinggian tertinggi berada di Kecamatan Dawe, yang berupa dataran tinggi dengan ketinggian 1600 meter diatas permukaan laut.

Kabupaten Kudus memiliki Kemiringan lahan yang bervariasi antara 0° sampai dengan 40° dengan penjabaran sebagai berikut :

- 1) Kemiringan 0 – 2 %, kelerengan ini memiliki bentuk lahan berupa dataran koluvial dengan relief datar. Kelerengan ini terdapat di Kecamatan Undaan, Kota, Jati, Kaliwungu, Mejobo, Jekulo, Gebog dan Bae.
- 2) Kemiringan 2 – 5 %, kelerengan ini memiliki bentuk lahan berupa dataran koluvial dengan relief landai terdapat di sebagian Kecamatan Jekulo, Dawe sebelah selatan, Gebog dan Mejobo.
- 3) Kemiringan 5 – 15 %, Kelerengan ini memiliki bentuk lahan berupa perbukitan struktural dengan relief bergelombang dan agak curam. Kelerengan ini terdapat di Kecamatan Dawe dan Gunung Pati Ayam Bagian Timur.
- 4) Kemiringan 15 – 40 %, Kelerengan ini memiliki bentuk lahan perbukitan struktural dengan relief berbukit kecil dan curam. Kelerengan ini terdapat di daerah Gunung Pati Ayam bagian utara, Kecamatan Gebog, Dawe dan Jekulo.
- 5) Kemiringan > 40 %, Kelerengan ini memiliki bentuk lahan perbukitan struktural dengan relief bergelombang dan sangat curam. Kelerengan ini terdapat di sebagian Kecamatan Jekulo, Dawe, Gebog dan daerah Puncak Muria bagian selatan.

c) Geologi

Kabupaten Kudus memiliki struktur tanah bervariasi mulai dataran rendah, perbukitan sampai dengan pegunungan. Kondisi geologi yang terdapat di Kabupaten Kudus merupakan struktur geologi primer yang terdiri dari kenampakan perlapisan batugamping dan pasir di bagian selatan dari Kota Kudus. Fase tektonik yang terjadi di Komplek Muria erat kaitannya dengan fase tektonik dicekungan Jawa Timur Utara, terutama

Zona Rembang (Van Bemmelen, 1949). Zona Rembang mengalami 2 (dua) kali fasetektonik, yaitu pada Kala Miosen Tengah dan pada Kala Plistosen Bawah. Kabupaten Kudus memiliki struktur tanah yang bervariasi mulai daerah pantai, perbukitan sampai pegunungan. Berikut ini adalah struktur dan karakteristik jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Kudus dan penyebarannya :

- 1) Jenis tanah andosol, tersebar di Kecamatan Jekulo, Gebog dan Dawe
- 2) Jenis tanah grumosol mediteran. Jenis tanah ini tersebar di Kecamatan Jekulo, Gebog dan Dawe
- 3) Jenis tanah latosol merah tersebar di meliputi Kecamatan Jekulo, Gebog dan Dawe
- 4) Jenis tanah planosol coklat, tersebar di Kecamatan Jati, Undaan, Kaliwungu dan Jekulo
- 5) Jenis tanah latosol coklat, tersebar di Kecamatan Jekulo, Gebog, dan Dawe
- 6) Jenis tanah litosol grumosol, tersebar di Kecamatan Jekulo, Gebog, dan Dawe
- 7) Jenis tanah Mediteran, tersebar di Kecamatan Jekulo, Gebog, Dawe, Bae, Kota, Mejobo, Jati dan Kaliwungu.
- 8) Jenis tanah alluvial coklat, jenis tanah ini paling banyak dijumpai di Kecamatan jati, Undaan, Jekulo dan Kaliwungu.

Potensi kandungan golongan C yang terdapat di Kabupaten Kudus yaitu :

- 1) Andesit- Pasir, Penyebaran material andesit – pasir terdapat di perbukitan kaki lereng Gunung Muria, meliputi : Kecamatan Dawe dengan ketebalan rata – rata 2 – 5 meter terdapat di Desa : Kandangmas seluas 5 ha, Cranggang seluas 2 ha, Rejosari seluas 2-3 ha; Kecamatan Jekulo di Desa Terban seluas 40 Ha. Dengan demikian total andesit – pasir di Kabupaten Kudus yang potensial sekitar 50 ha dengan volume 2.705.000 m³ dan beratnya 9.504.300 ton. Estimasi cadangan leusit yang terdapat pada andesit pasir di Desa Menawan Kecamatan Gebog sekitar 5 ha, dengan volume 25.000 m³. Dengan asumsi ρ leusit 2,64 kg/m³, maka total cadangannya sekitar 66.000 ton.
- 2) Kaolin, Kaolin ini berwarna putih berasal dari pelapukan tuff dengan penyebaran terbatas terdapat di Kecamatan Dawe di Desa Kandangmas dan Cranggang dengan tebal 1,5 – 2 meter dengan luas

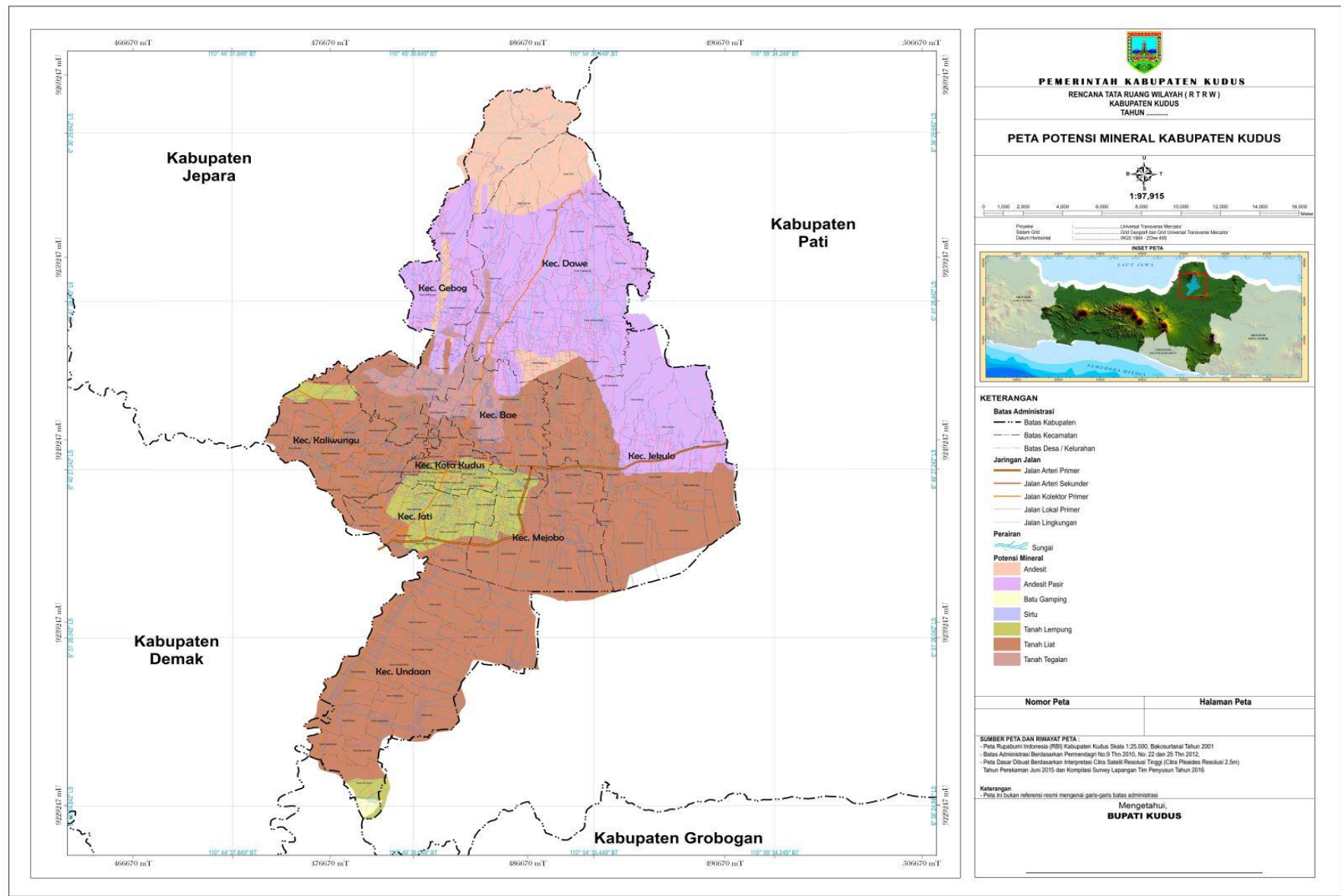
penyebaran 1 sampai 1,5 ha. Estimasi cadangan kaolin di dua Desa berkisar 20.000 m³ dengan bj 11,58 kg/m³, maka cadangannya sekitar 31,600 ton di Desa Kandangmas dan 22.500 m³ atau 35.500 ton di Desa Cranggang.

- 3) Andesit, ditemukan di Kecamatan Dawe meliputi Desa Cranggang, Ternadi dengan luas penyebaran 2 ha, serta volume mencapai sekitar 600.000 m³ atau 1.584.000 ton, sedangkan di Kecamatan Gebog terdapat di Desa Gondosari penyebarannya sekitar 20.000 m³ atau 52.800 ton. Ketebalan berkisar antara 2 – 30 meter. Andesit bersifat kompak, keras dan berwarna abu abu hingga abu abu hitam. Singkapan andesit yang kecil terdapat di Desa Ternadi Kecamatan Dawe dengan luas penyebaran 625 m³ ketebalan 12,5 m sehingga volumenya mencapai 7812,5m³ atau 20.625 ton. Apabila andesit yang ada di Desa Cranggang Kecamatan Dawe ini akan dieksplorasi, maka dapat dilakukan dengan penambangan terbuka, yang dilakukan secara tradisional.
- 4) Andesit Sirtu dan Sirtu didominasi andesit yang berupa fragmen dari gravel sampai onkrah dan sebagian kecil pasir. Ketebalan rata – rata galian andesit – sirtu 0,5 – 6 meter. Bahan galian tersebut terdapat sebagai endapan sungai seperti yang ditemukan di Kecamatan Gebog di Desa Rahtawu dan Gondosari dengan luas penyebaran 25 ha. Tebal lapisan penutup untuk bahangalian ini tidak ada, sedangkan estimasi cadangan sebesar 1.500.000 m³ atau 3.960.000 ton dan 50.000 m³ atau 88.500 ton, untuk Desa Lau andesit sirtu dan sirtu mencapai 375.000 m³ atau 491 ton.
- 5) Batu pasir – lempung, penyebaran bahan galian ini terdapat di Kecamatan Jekulo di Desa Bulungcangkring seluas 25 ha dan Klaling. Estimasi volume 87.500.000 m³ atau sekitar 114.625.000 ton. Secara fisik terlihat lempung berwarna coklat yang disisipi batu pasir. Lapisan penutup bahan galiannya antara 0,5 – 1 meter di Desa Klaling, sedang di Desa Bulungcangkring tidak ada.
- 6) Tanah Liat, Bahan galian yang paling banyak terdapat di Kabupaten Kudus. Deposit terbanyak terdapat di Desa Ngemplak (Kecamatan Undaan) dengan tebal 5m dan luas penyebaran 31,5 ha estimasi cadangan 1.575.000m³ atau 2.063.250 ton, Desa Ngembalrejo (Kecamatan Bae) tebal 3m dengan luas penyebaran 400 ha estimasi cadangan 12.000.000 m³ atau 15.720.000 ton, Desa Terban

(Kecamatan Jekulo) tebal 3,5 m dengan luas penyebaran 900 ha, estimasi cadangan 31.500.000 m³ atau 41.625.000 ton. Lapisan penutup untuk deposit tanah tidak ada.

- 7) Gamping, Batu gamping terdapat di Desa Wonosoco Kecamatan Undaan. Secara fisik batu gamping berwarna putih hingga putih kekuningan dengan ketebalan rata rata 8,5 meter. Volume batu gamping yang tersedia diperkirakan 1.500.000 m² x 8,5 m = 12.750.000 m³ dengan bj 2,05 kg/m³ maka total cadangannya sebesar 26.137.500 ton. Batu gamping itu tidak menunjukkan pelapisan, merupakan hasil aktivitas organisme laut pada saat terbentuknya.
- 8) Tras, terdapat di Desa Menawan (Kecamatan Gebog), Desa Kuwukan, Cranggang, Kandangmas (Kecamatan Dawe), serta Desa Terban (Kecamatan Jekulo). Deposit estimasi cadangan tras terbesar terdapat di Desa Kuwukan dan Cranggang sekitar 129.375.000 ton dan 45.983.000 ton yang selama ini belum diusahakan penambangan dan pemanfaatannya., kecuali di Menawan dilakukan penambangan tradisional sebagai material campuran membuat batako. Ciri tras dari menawan berwarna coklat kekuningan, kompak sampai agak kompak, mudah lepas bila ditekan dengan tangan. Luas penyebarannya 25 ha dengan volume 6.250.000 m³, bj 1,38 kg/m³ maka tonase cadangannya 8.625.000 ton. Ciri tras Desa Terban sifat fisiknya berwarna abu -abu kekuningan, kompak sampai agak kompak, mudah lepas bila ditekan dengan tangan. Luas penyebarannya 50 ha, volumenya 13.020.000 m³, sehingga tonasenya sekitar 17.970.000 ton.

Berikut disajikan peta potensi mineral Kabupaten Kudus;



Gambar 2.2.
Peta Potensi
Mineral
Kabupaten Kudus

Sumber :
Bappelitbangda
Tahun 2018

d) Hidrologi

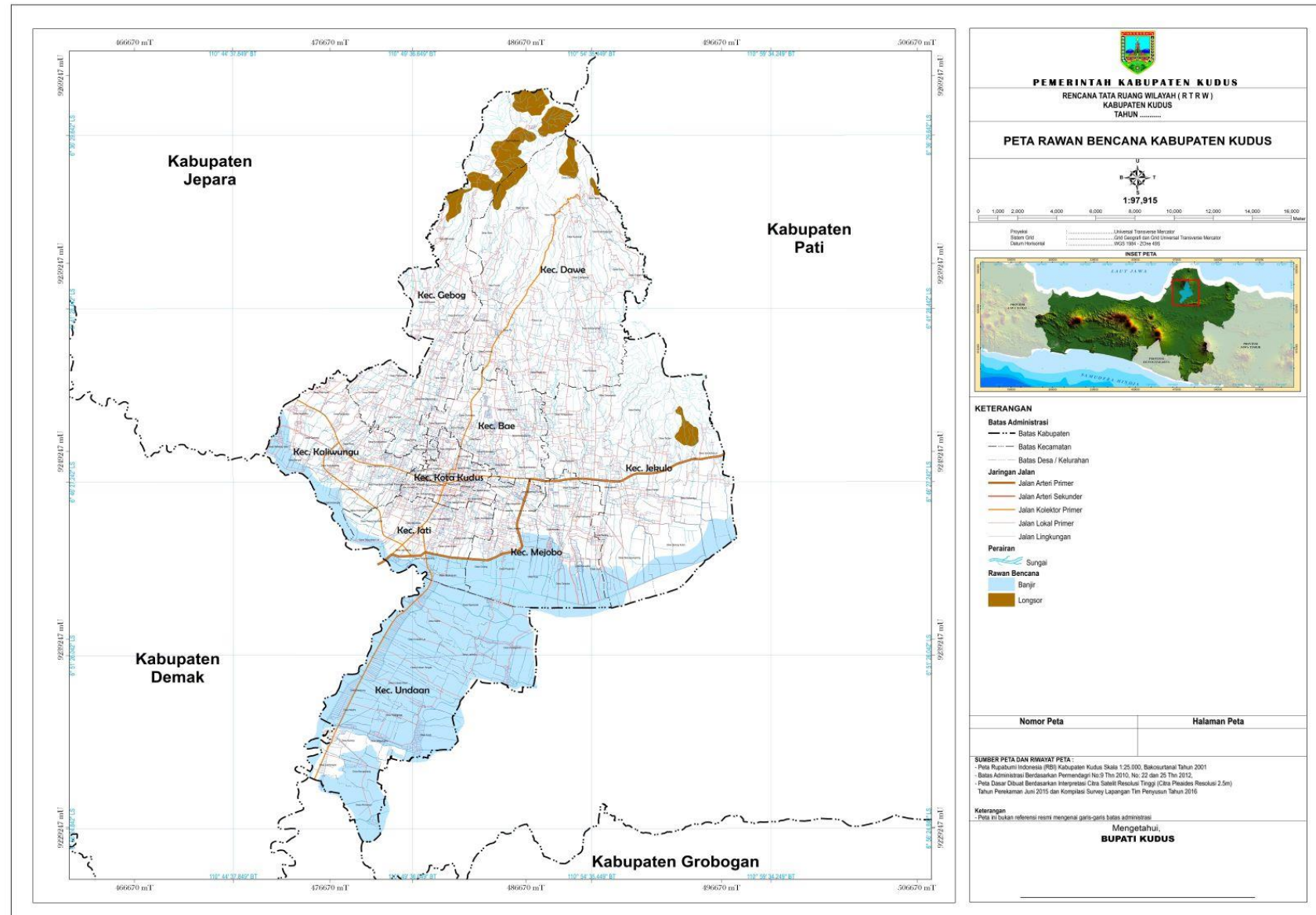
Air tanah merupakan salah satu komponen dalam daur hidrologi (hidrologic cycle), yakni siklus peredaran air di bumi, sehingga keberadaannya akan ditentukan oleh unsur – unsur lain yang terlibat dalam daur tersebut. Komponen yang berperan utama dalam daur hidrologi adalah curah hujan. Curah hujan ini akan menentukan besarnya air permukaan dan air bawah tanah. Hujan yang jatuh ke permukaan mengalami penguapan baik pada tumbuh tumbuhan maupun pada permukaan tanah dan air (sungai, rawa, situ). Sementara hujan juga ada yang meresap ke bawah permukaan tanah dan sebagian diantaranya melimpas di permukaan tanah berupa aliran permukaan. Sistem rencana pengaturan air tanah di Kabupaten Kudus diatur dalam perda RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012 – 2032 yang diatur dalam rencana sistem jaringan prasarana sumber daya air yang diantaranya menyebutkan tentang wilayah sungai Kabupaten yang terdiri dari 3 DAS, jaringan irigasi, jaringan air baku, jaringan air minum, dan sistem pengendalian banjir.

Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak – anak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah yang batas dari darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan (RTRW Kabupaten Kudus). Daerah aliran sungai merupakan bagian dari wilayah sungai Kabupaten (RTRW Kabupaten Kudus pasal 30). Daerah aliran sungai di Kabupaten Kudus sendiri terdiri dari 3 DAS yaitu : DAS Gelis, DAS Serang, dan DAS Juwana. Sungai, danau dan rawa merupakan bagian dari rencana pola ruang kawasan lindung dan bagian dari kawasan perlindungan setempat. Yang mana kawasan perlindungan sesuai perda RTRW Kabupaten Kudus terbagi dalam sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya, kawasan ruang terbuka hijau (RTH).

Kawasan sungai terdiri dari sempadan sungai Gelis, Piji, Logung, Wulan, Juwana dan sungai kecil lainnya yang berada di Kabupaten Kudus (menurut perda RTRW Kabupaten Kudus). Kudus dialiri sejumlah sungai besar seperti Sungai Juwana (di Kabupaten Pati), Sungai Wulan, Sungai Babalan, Logung, Jeratun, Piji, Gelis, Praholo dan Ngembal Kulon. Dari

kesemua sungai itu yang merupakan sungai purba antara lain adalah sungai Juwana, Babalan, Jeratun dan Sungai Wulan. Dua sungai yang sering menyebabkan banjir di Kabupaten Kudus adalah sungai Juwana dan sungai Wulan.

Berikut peta rawan bencana di Kabupaten Kudus.



Gambar 2.3.
Peta Rawan
Bencana Kabupaten
Kudus

Sumber :
Bappelitbangda
Tahun 2018.

Banjir sering menggenang di 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Undaan, Mejobo, Jati, Jekulo dan Kaliwungu menyebabkan genangan air yang dalam skala kecil saja mampu menyebabkan sekitar 1.000 ha lahan pertanian di sejumlah Desa menjadi rawa sehingga hanya bisa ditanami pada musim kemarau. Sungai – sungai penyebab banjir ini termasuk wilayah DAS di Pegunungan Muria dan Kendeng Utara. Pegunungan Muria berada di utara Kudus dan Pati, sedangkan Pegunungan Kendeng Utara berada di Selatan Kudus – Pati.

Kawasan danau atau waduk meliputi waduk Logung dengan luas keseluruhan kurang lebih 200 ha dan embung Ngemplak dengan luas 11 ha di wilayah Ngemplak (Kecamatan Undaan). Sementara waduk Logung yang meliputi Desa Rejosari (Kecamatan Dawe), Desa Kandangmas (Kecamatan Dawe), Desa Tanjungrejo (Kecamatan Jekulo).

Debit sebagai satuan besaran air yang keluar dari DAS dengan satuan meter kubik ini ditentukan oleh beberapa faktor antara lain :

- 1) Intensitas hujan, Curah hujan merupakan salah satu faktor utama komponen musiman yang mempengaruhi debit air. Curah hujan di Kabupaten Kudus cenderung masuk kategori sedang sampai dengan tinggi.
- 2) Penggundulan Hutan, Hutan dalam kaitan hidrologi sebagai penahan tanah yang mempunyai kelerengan tinggi, sehingga air hujan yang jatuh di daerah tersebut tertahan dan meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Air tanah di daerah hulu sebagai cadangan air bagi sumber air sungai. Hutan yang terjaga dengan baik akan memberikan ketersediaan air pada musim kemarau. Itulah sebabnya hutan yang gundul akan menjadi malapetaka bagi hulu dan hilir. Untuk Kabupaten Kudus total luas hutan BKPH yaitu 3.531,2 ha, sebagian besar (45,04%) diperuntukkan sebagai hutan produksi dan sisanya hutan lindung. Kawasan hutan lindung sesuai perda RTRW ditetapkan di kawasan hutan Gunung Muria dengan luas kurang lebih 1.473 ha. Kawasan lindung yang merupakan resapan air ini meliputi Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe.
- 3) Pengalihan hutan menjadi lahan pertanian, Resiko penebangan hutan menjadi lahan pertanian sama besarnya dengan penggundulan hutan. Kebanyakan kawasan hutan yang diubah menjadi lahan pertanian mempunyai kemiringan diatas 25%. Kawasan rawan bencana geologi karena gerakan tanah meliputi Kecamatan Dawe, Gebog dan Jekulo.

Daerah di Kabupaten Kudus yang rawan terhadap pengalihan fungsi hutan adalah di Desa Menawan Kecamatan Gebog.

- 4) Intersepsi, Proses ketika air hujan jatuh pada permukaan vegetasi di atas permukaan tanah, tertahan beberapa saat, untuk diuapkan kembali ke atmosfer atau diserap oleh vegetasi yang bersangkutan. Proses intersepsi terjadi selama berlangsungnya curah hujan dan setelah hujan berhenti. Penggantian dari satu jenis vegetasi menjadi vegetasi lain mempengaruhi hasil air daerah tersebut.
- 5) Evaporasi dan Transpirasi, Evaporasi dan transpirasi merupakan salah satu komponen atau kelompok yang dapat menentukan besar kecilnya debit air di suatu kawasan DAS. Kedua proses ini dapat membuat air baru.

e) Klimatologi

Kabupaten Kudus seperti halnya beberapa wilayah di Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan sebagaimana peta dibawah ini dan tabel 2.2.

Tabel 2.2
Banyaknya Hari Hujan dirinci Per Bulan Tahun 2013-2017 (Hari)
Kabupaten Kudus

No	Bulan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Januari	20	24	21	19	10
2	Februari	14	10	16	21	18
3	Maret	14	8	16	16	15
4	April	13	11	17	10	14
5	Mei	12	5	3	11	10
6	Juni	10	5	2	10	11
7	Juli	8	9	0	1	8
8	Agustus	1	3	0	8	6
9	September	1	1	0	9	6
10	Oktober	5	2	0	13	16
11	November	8	7	17	16	16
12	Desember	17	14	20	19	19
Jumlah		84	123	99	112	149

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, jumlah hari hujan paling banyak di Kabupaten Kudus terjadi pada bulan Desember, dengan jumlah hari hujan sebanyak 19 hari, urutan kedua pada Bulan Februari sebanyak 18 hari hujan. Jumlah total hari hujan yang ada di Kabupaten Kudus pada tahun 2017 sebanyak 149 hari hujan, yang merupakan jumlah hari hujan tertinggi per tahun selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2.3
Banyaknya Curah Hujan dirinci Per Bulan Tahun 2013 - 2017 (mm)
Kabupaten Kudus

No	Bulan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Januari	747	1426	480	186	244
2	Februari	381	192	210	314	550
3	Maret	405	156	283	434	436
4	April	366	186	206	144	348
5	Mei	234	83	33	156	326
6	Juni	146	129	8	136	173
7	Juli	264	151	0	8	105
8	Agustus	7	104	0	123	101
9	September	5	34	0	219	52
10	Oktober	44	16	0	306	403
11	November	195	184	257	260	440
12	Desember	631	274	489	456	564
Jumlah		3.425	2.935	1.966	2.742	3.742

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018

Jumlah curah hujan paling banyak adalah pada bulan Desember sebesar 564 mm, selain itu juga pada bulan Februari dengan curah hujan sebesar 550 mm. Untuk curah hujan paling sedikit ada di Bulan September dengan curah hujan 52 mm. Secara tahunan, curah hujan pada tahun 2017 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, dibanding tahun 2016 sebesar 2.742 mm terdapat kenaikan curah hujan menjadi sebesar 3.742 mm di tahun 2017.

Kudus memiliki iklim tropis. Hampir sepanjang bulan dalam setahun terdapat curah hujan yang signifikan dan terdapat musim kemarau yang singkat dengan suhu rata - rata di tahun 2017 sekitar 27°C. Suhu terhangat di tahun 2017 adalah di bulan Oktober 28,1°C, dan di bulan Juli suhu rata - rata adalah 26,1°C adalah suhu terendah sepanjang tahun. Kelembaban udara di Kabupaten Kudus rata - rata bervariasi antara 73,8 % sampai dengan 76,8 % selama tahun 2017.

f) Penggunaan Lahan

Luas wilayah Kabupaten Kudus tercatat seluas 42.516ha. Wilayah tersebut terdiri dari lahan pertanian seluas 29.903 ha atau 70,33% dan lahan bukan pertanian seluas 12.613 ha atau 29,67%. Lahan pertanian terbagi atas lahan sawah seluas 20.653 ha atau 48,58% dan bukan lahan sawah seluas 8.440 ha atau seluas 19,85%.

Lahan pertanian kurang produktif di Kabupaten Kudus yang sering tergenang banjir seluas 6.461 ha, dan lahan yang produktif berupa sawah yang tidak kena banjir seluas 14.192 ha, sedangkan lahan tidur seluas 885 ha yang tersebar di tiga wilayah Kecamatan akan digunakan untuk pengembangan / budidaya perikanan.

g) Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus, rencana pola ruang wilayah Kabupaten Kudus terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Adapun Kawasan lindung di Kabupaten Kudus meliputi:

- 1) Kawasan Hutan Lindung seluas kurang lebih 1.473 ha berada di Kecamatan Dawe dan Kecamatan Gebog;
- 2) Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya yang merupakan kawasan resapan air. Kawasan ini sama dengan kawasan hutan lindung;
- 3) Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi kawasan seluas kurang lebih 1.069 ha berupa kawasan sempadan sungai, kurang lebih 211 ha berupa kawasan sekitar danau atau waduk, kurang lebih 84 ha kawasan sekitar mata air, kurang lebih 1 ha kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya serta kawasan ruang terbuka hijau;
- 4) Kawasan Cagar Budaya seluas kurang lebih 195 ha;

Kawasan Lindung Geologi, meliputi kawasan rawan bencana alam geologi berupa kawasan rawan bencana gerakan tanah di Kecamatan Gebog, Kecamatan Jekulo dan Kecamatan Dawe serta kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa cekungan air tanah dan kawasan sempadan mata air; dan Kawasan lindung lainnya adalah kawasan perlindungan plasma nutfah yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan.

Adapun Kawasan budidaya di Kabupaten Kudus meliputi : kawasan peruntukan hutan produksi; kawasan peruntukan hutan rakyat; kawasan peruntukan pertanian; kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan industri; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan permukiman; dan kawasan peruntukan pertahanan.

a) Kawasan peruntukan hutan produksi, terdiri dari :

- 1) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas dengan luas keseluruhan kurang lebih 1.008 ha meliputi Desa Ternadi, Desa Kajar Desa Colo Kecamatan Dawe, Desa Japan Kecamatan Dawe, Desa Menawan, Desa Rahtawu Kecamatan Gebog, Desa Gondoharum, Desa Terban, Desa Klaling dan Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo; dan
- 2) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap dengan luas keseluruhan kurang lebih 1.121 ha meliputi Desa Kandangmas

Kecamatan Dawe, Desa Gondoharum, Desa Terban, Desa Klaling, Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo, dan Desa Wonosoco Kecamatan Undaan.

- b) Kawasan peruntukan hutan rakyat, dengan luas kurang lebih 2.285 ha meliputi Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe, Kecamatan Undaan dan Kecamatan Jekulo. Dari luas hutan rakyat, kurang lebih 106 ha merupakan hutan rakyat murni, sedangkan sisanya seluas kurang lebih 2.179 ha terintegrasi dengan kawasan peruntukan tanaman pangan.
- c) Kawasan peruntukan pertanian, meliputi kawasan peruntukan tanaman pangan, yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, seluas kurang lebih 25.334 ha meliputi: Kecamatan Kaliwungu dengan luas kurang lebih 1.047 ha; Kecamatan Jati kurang lebih 782 ha; Kecamatan Undaan kurang lebih 6.464 ha; Kecamatan Mejobo kurang lebih 2.668 ha; Kecamatan Jekulo kurang lebih 4.701 ha; Kecamatan Bae kurang lebih 811 ha; Kecamatan Gebog kurang lebih 3.081ha; Kecamatan Dawe kurang lebih 5.780 ha. Dan Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, seluas kurang lebih 531 ha, meliputi : Kecamatan Mejobo kurang lebih 15 ha; Kecamatan Jekulo kurang lebih 39 ha; Kecamatan Gebog kurang lebih 261 ha; Kecamatan Dawe kurang lebih 216 ha. Kawasan peruntukan agropolitan berada di Kecamatan Undaan berupa kawasan yang diperuntukkan untuk produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam. Kawasan peruntukan hortikultura berupa kawasan yang diperuntukan untuk tanaman sayur-sayuran berada di seluruh wilayah Kecamatan.
- d) Kawasan Peruntukan Perikanan, berupa perikanan darat diarahkan tersebar di seluruh wilayah Kecamatan.
- e) Kawasan Peruntukan pertambangan, berupa kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batuan dengan luas keseluruhan kurang lebih 34 Ha (tiga puluh empat hektar), tersebar di Desa Tanjungrejo dan Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo, Desa Rejosari Kecamatan Dawe, dan Desa Wonosoco Kecamatan Undaan.
- f) Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan peruntukan industri luas keseluruhan sebesar kurang lebih 1.132 ha terdiri atas : Kawasan peruntukan industri besar direncanakan berkembang di sisi luar badan jalan dengan jarak terluar batas lahan pengembangan kurang lebih 500 meter ke kiri dan/atau ke kanan diukur dari as jalan meliputi jalan

Jekulo – Pati dan jalan Kaliwungu – Jepara; Kawasan peruntukan industri menengah direncanakan berkembang pada lokasi meliputi Kecamatan Mejobo, Jati, Kaliwungu, Bae dan Gebog; dan Kawasan peruntukan industri kecil atau mikro tersebar di seluruh kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan berupa penataan dan pengelompokan menjadi sentra atau lingkungan industri kecil.

- g) Kawasan peruntukan pariwisata, Kawasan peruntukan pariwisata luas keseluruhan kurang lebih 35 Ha terdiri : ¹⁾Kawasan peruntukan pariwisata budaya meliputi Kawasan Museum Kretek di Kecamatan Jati, Kawasan Makam Sunan Kudus di Kecamatan Kota, Kawasan Makam Sunan Muria di Kecamatan Dawe, dan Kawasan Tradisional Desa Wonosoco di Kecamatan Undaan; ²⁾Kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi Kawasan Wisata Gunung Muria di Kecamatan Dawe, Gebog dan Kawasan Wisata Agro Kopi dan Jeruk Pamelon di Kecamatan Dawe; ³⁾Kawasan Peruntukan Pariwisata Buatan meliputi : Kawasan Wisata Kuliner di Kecamatan Kota dan Jati; Kawasan Wisata Industri di Kecamatan Kota, dan Gebog; Kawasan Wisata Belanja di Kecamatan Kota dan Jati; Kawasan Wisata Minat Khusus di Museum Kretek Kecamatan Jati; sedangkan Kawasan Wisata Olah Raga berada di GOR Wergu Kecamatan Kota.
- h) Kawasan peruntukan permukiman, Permukiman perkotaan dengan luas keseluruhan kurang lebih 9.884 ha meliputi kawasan perkotaan (seluruh wilayah Kecamatan Kota, Bae, Jati, sebagian Kecamatan Kaliwungu, sebagian Kecamatan Gebog dan sebagian Kecamatan Mejobo) dan ibu kota Kecamatan meliputi Ibu kota Kecamatan Undaan, Ibu kota Kecamatan Dawe, Ibu kota Kecamatan Jekulo, Ibu kota Kecamatan Gebog dan Ibu kota Kecamatan Mejobo; dan Permukiman perdesaan dengan luas keseluruhan kurang lebih 2.653 ha meliputi permukiman di luar Kawasan Perkotaan Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan.
- i) Kawasan peruntukan pertahanan. Kawasan peruntukan pertahanan berupa pemanfaatan ruang untuk pemerintah terkait bidang pertahanan dan keamanan yang meliputi : Kantor Komando Distrik Militer (Kodim) berada di Kecamatan Kota; Kantor Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh Kecamatan; Kantor Kepolisian Resor (Polres) berada di Kecamatan Kota; dan Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) berada di seluruh Kecamatan.

Wilayah Rawan Bencana merupakan kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Kawasan rawan bencana dibagi menjadi kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan banjir. Desa yang termasuk kawasan rawan tanah longsor antara lain : Desa Rahtawu dan Desa Menawan Kecamatan Gebog, Desa Terban Kecamatan Jekulo, Desa Ternadi, Desa Soco, Desa Colo, Desa Japan, Desa Cranggang, Desa Glagah Kulon dan Desa Kuwukan Kecamatan Dawe. Adapun Kecamatan di Kabupaten Kudus yang termasuk Desa rawan banjir antara lain : Kecamatan Undaan, Jekulo bagian selatan, Mejobo bagian selatan, Jati bagian selatan dan Kecamatan Kaliwungu bagian selatan.

Uraian selengkapnya yang berkaitan dengan potensi daerah sebagaimana tertuang pada dokumen Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032.

2.1.2. Aspek Demografi

Banyaknya penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Kudus tahun 2013 – 2017 menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4
Banyaknya Penduduk menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Kudus Tahun 2013-2017

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1	2013	397.758	401.677	799.435	99,02
2	2014	400.798	401.441	802.239	99,84
3	2015	398.835	404.310	803.145	98,64
4	2016	413.317	416.904	830.221	99,14
5	2017	415.830	419.488	835.318	99,13

Sumber : SIPD - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2018

Jumlah penduduk di Kabupaten Kudus pada tahun 2017 tercatat 835.318 jiwa terdiri dari 415.830 laki-laki (49,79 %) dan 419.488 perempuan (50,22%). Jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Apabila dilihat perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, diperoleh rasio jenis kelamin pada tahun 2017 sebesar 99,13%. Dengan kata lain bahwa penduduk perempuan relatif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk dalam kurun waktu 2013 – 2017 sebagaimana tertuang dalam tabel 2.5.

Tabel 2.5
 Kepadatan Penduduk Tahun 2013 – 2017
 Kabupaten Kudus

Tahun	Luas daerah	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa per km2)
2013	425,16	799.435	1.880
2014	425,16	802.239	1.887
2015	425,16	803.145	1.889
2016	425,16	830.221	1.953
2017	425,16	835.318	1.959

Sumber : SIPD - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2018

Tabel diatas menunjukkan kecenderungan peningkatan kepadatan penduduk seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Pada tahun 2013 kepadatan penduduk sebesar 1.880 jiwa/km2, sedangkan pada tahun 2017 tercatat sebesar 1.959 jiwa/km2. Kualitas sumber daya manusia dipengaruhi beberapa faktor, antara lain: tingkat pendidikan yang telah ditamatkan. Semakin tinggi proporsi penduduk yang berpendidikan, akan mendukung partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

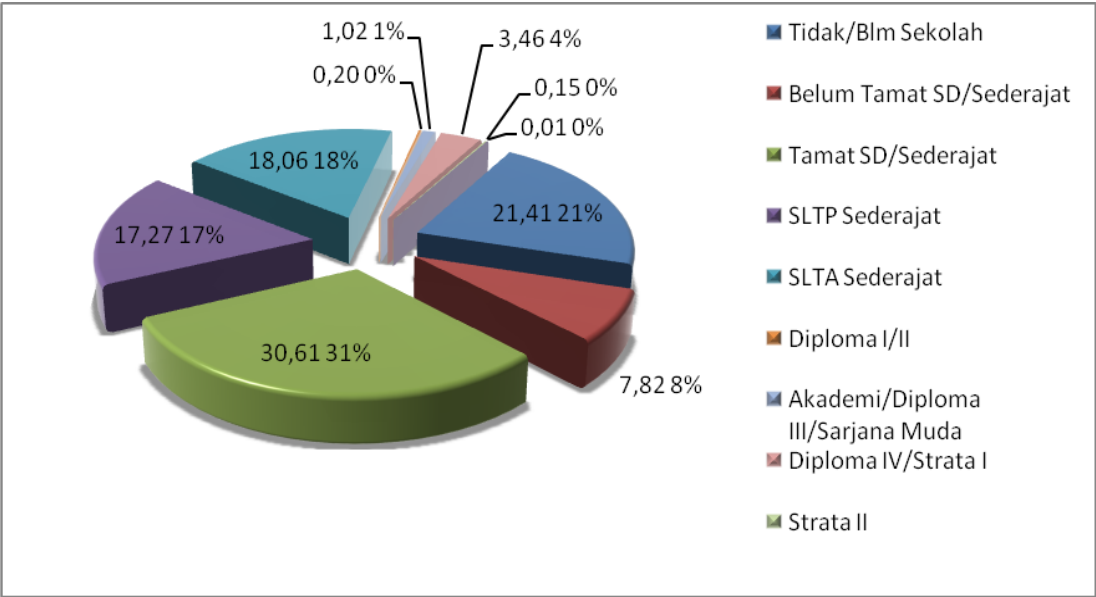
Komposisi dan peningkatan kapasitas penduduk Kabupaten Kudus dari tingkat pendidikan yang telah ditamatkan tertuang pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
 Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

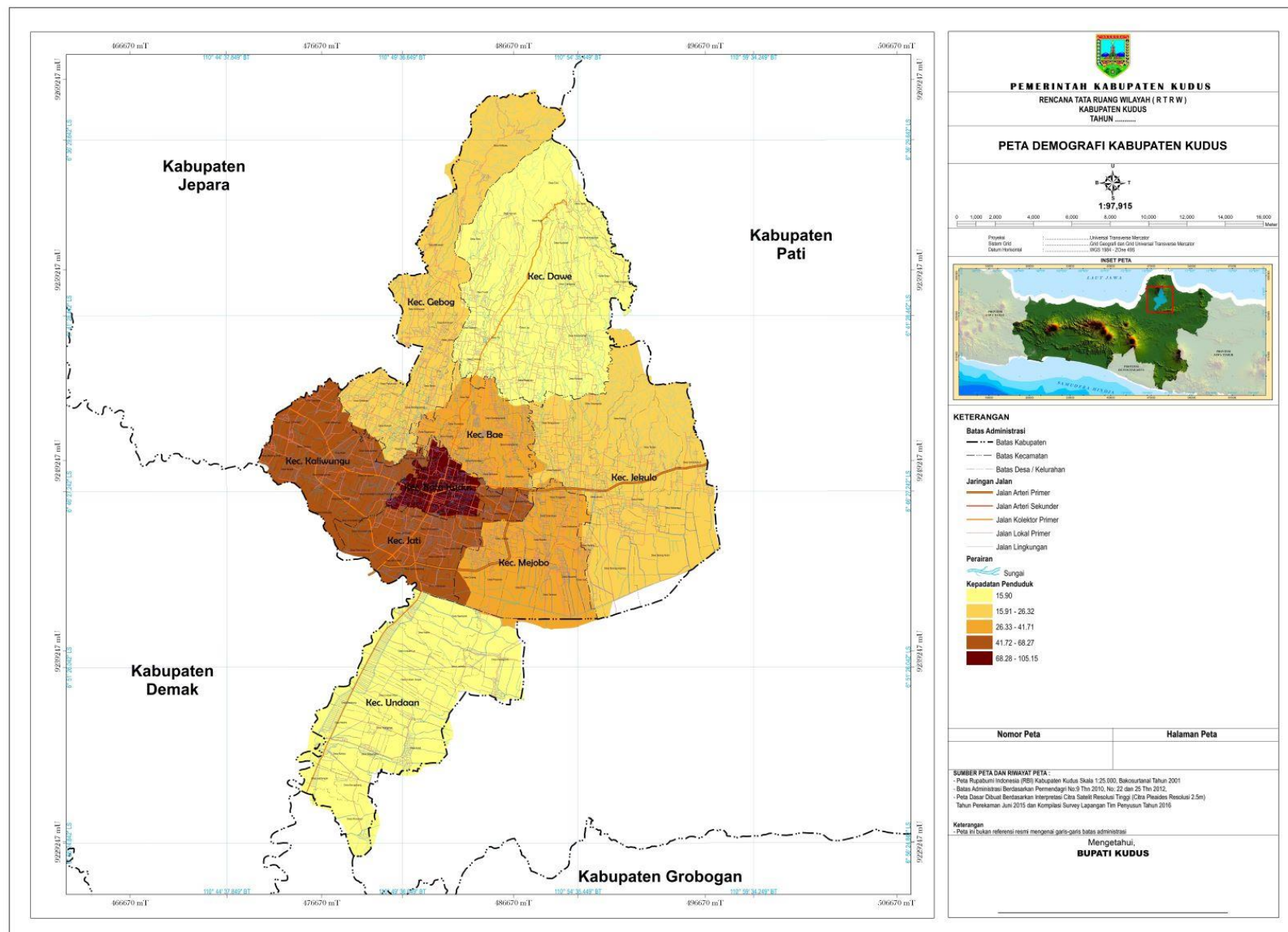
Pendidikan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
Tidak/Blm Sekolah	89.752	89.056	178.808	21,41
Belum Tamat SD/Sederajat	32.880	32.411	65.291	7,82
Tamat SD/Sederajat	118.618	137.086	255.704	30,61
SLTP Sederajat	74.898	69.353	144.251	17,27
SLTA Sederajat	80.243	70.610	150.853	18,06
Diploma I/II	618	1.021	1.639	0,20
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	3.911	4.643	8554	1,02
Diploma IV/Strata I	14.084	14.828	28.912	3,46
Strata II	778	447	1.225	0,15
Strata III	48	33	81	0,01
Total	415.830	419.488	835.318	100

Sumber : SIPD - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2018

Gambar 2.4. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017



Berdasarkan tabel dan gambar di atas, jenjang pendidikan yang mendominasi di Kabupaten Kudus pada jenjang Tamat SD/Sederajat yaitu 255.704 penduduk atau 30,61%. Jumlah penduduk yang lulus SLTA/Sederajat lebih banyak daripada penduduk yang lulus SLTP/Sederajat, Diploma maupun Strata. Banyaknya jumlah lulusan SLTA/Sederajat tersebut menggambarkan berhasilnya pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kabupaten Kudus. Berikut peta demografi Kabupaten Kudus:



Gambar 2.5.
Peta Demografi

Sumber :
Bappelitbangda Tahun
2018.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan. Di Kabupaten Kudus, Karakteristik pembentuk PDRB Kabupaten Kudus, berbeda dengan Kabupaten/Kota lainnya. Hal ini disebabkan Struktur lapangan usaha pada sektor Industri Pengolahan pada rincian sub sektor Industri Pengolahan Tembakau berperan sangat dominan. Hal ini terlihat dari besarnya kontribusi sektor Industri Pengolahan sub sektor Industri Pengolahan Tembakau dibandingkan dengan sub sektor Industri Pengolahan lainnya yang mendukung pada pembentukan PDRB Kabupaten Kudus.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS, dapat diketahui bahwa distribusi persentase lapangan usaha industri pengolahan pada PDRB Kabupaten Kudus Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2017 sebesar 80,82%. Apabila dibandingkan dengan PDRB Kabupaten Atas Dasar Harga Konstan sebesar 79,31% atau lebih rendah dibanding Atas Dasar Harga Berlaku.

Pada tahun 2017 kontribusi PDRB terbesar dihasilkan oleh lapangan usaha ⁽¹⁾ Industri Pengolahan, ⁽²⁾ Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, ⁽³⁾ Konstruksi dan ⁽⁴⁾ Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sementara peranan lapangan usaha lainnya di bawah 2%. Kontribusi terbesar dari tahun ke tahun masih berada pada sektor Lapangan Usaha Industri Pengolahan pada Sub Sektor Industri Pengolahan Tembakau.

Diskripsi PDRB Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Tabel 2.7, sampai dengan Tabel 2.9 dibawah ini.

Tabel 2.7
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 - 2017 (juta Rupiah)

No.	LAPANGAN USAHA	2013	%	2014	%	2015	%	2016*	%	2017**	%
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.682.877,27	2,39	1.814.636,09	2,30	2.023.442,45	2,41	2.125.542,60	2,36	2.200.489,56	2,26
B	Pertambangan dan Penggalan	71.604,66	0,10	87.920,51	0,11	103.044,69	0,12	111.174,33	0,12	120.416,95	0,12
C	Industri Pengolahan	57.497.888,39	81,76	64.574.922,09	81,94	68.428.096,95	81,34	72.837.635,68	80,99	78.813.600,79	80,82
D	Pengadaan Listrik dan Gas	28.594,83	0,04	31.038,32	0,04	33.215,93	0,04	37.495,82	0,04	43.284,59	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.361,45	0,02	14.440,80	0,02	15.722,29	0,02	16.847,47	0,02	18.085,67	0,02
F	Konstruksi	2.156.454,49	3,07	2.435.106,10	3,09	2.678.988,73	3,18	2.983.030,19	3,32	3.287.642,40	3,37
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.763.268,78	5,35	4.103.227,65	5,21	4.479.678,17	5,32	4.837.058,16	5,38	5.308.269,13	5,44
H	Transportasi dan Pergudangan	656.519,07	0,93	761.235,31	0,97	866.613,80	1,03	920.344,37	1,02	1.051.695,55	1,08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	737.052,61	1,05	842.244,87	1,07	940.674,44	1,12	1.037.731,01	1,15	1.131.112,69	1,16
J	Informasi dan Komunikasi	368.587,68	0,52	407.322,74	0,52	438.895,34	0,52	482.572,01	0,54	575.070,00	0,59
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.164.881,08	1,66	1.283.055,08	1,63	1.429.319,79	1,70	1.601.487,00	1,78	1.742.091,01	1,79
L	Real Estate	354.078,40	0,50	399.559,24	0,51	443.841,42	0,53	477.997,76	0,53	520.932,69	0,53
M,N	Jasa Perusahaan	63.296,14	0,09	70.111,12	0,09	79.325,98	0,09	89.750,71	0,10	101.119,20	0,10
O	Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	565.869,31	0,80	606.971,42	0,77	664.035,39	0,79	711.299,18	0,79	753.839,13	0,77
P	Jasa Pendidikan	671.570,81	0,95	768.257,84	0,97	836.661,16	0,99	924.787,77	1,03	1.030.765,71	1,06
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	191.922,22	0,27	222.496,29	0,28	247.618,50	0,29	271.359,63	0,30	301.563,56	0,31
R,S,T,U	Jasa Lainnya	335.698,59	0,48	387.539,49	0,49	417.457,75	0,50	465.813,21	0,52	514.808,65	0,53
	PDRB TOTAL	70.323.525,77	100	78.810.084,96	100	84.126.632,79	100	89.931.926,90	100	97.514.787,29	100
	PDRB TANPA INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU	17.758.445,39		19.825.762,69		21.707.108,90		23.498.105,66		25.503.367,27	

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2018

Tabel 2.8

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 - 2017 (juta Rupiah)

No.	LAPANGAN USAHA	2013	%	2014	%	2015	%	2016*	%	2017**	%
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.411.791,30	2,36	1.411.497,53	2,25	1.494.021,47	2,30	1.538.392,87	2,31	1.565.509,95	2,28
B	Pertambangan dan Penggalian	64.288,45	0,11	68.603,19	0,11	70.090,00	0,11	73.295,18	0,11	76.537,99	0,11
C	Industri Pengolahan	48.686.035,46	81,22	50.761.165,30	81,09	52.435.231,51	80,63	53.266.024,98	79,90	54.446.668,19	79,31
D	Pengadaan Listrik dan Gas	30.036,01	0,05	31.655,01	0,05	32.258,44	0,05	34.185,01	0,05	36.348,61	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.855,53	0,02	13.495,94	0,02	14.200,46	0,02	14.891,14	0,02	15.802,63	0,02
F	Konstruksi	1.915.308,69	3,20	1.999.819,54	3,19	2.124.491,15	3,27	2.334.354,15	3,50	2.506.891,17	3,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.329.984,91	5,56	3.498.312,58	5,59	3.691.332,80	5,68	3.879.205,14	5,82	4.110.046,49	5,99
H	Transportasi dan Pergudangan	646.980,73	1,08	700.315,73	1,12	760.448,65	1,17	806.935,26	1,21	856.922,05	1,25
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	658.605,80	1,10	708.052,77	1,13	760.938,83	1,17	811.291,95	1,22	865.177,26	1,26
J	Informasi dan Komunikasi	377.372,13	0,63	425.455,46	0,68	465.997,21	0,72	506.605,39	0,76	570.409,10	0,83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	943.019,75	1,57	989.663,96	1,58	1.063.315,51	1,64	1.157.361,07	1,74	1.210.369,29	1,76
L	Real Estate	340.359,07	0,57	364.735,88	0,58	392.477,27	0,60	416.219,50	0,62	442.425,31	0,64
M,N	Jasa Perusahaan	54.902,81	0,09	58.809,45	0,09	63.785,82	0,10	69.821,54	0,10	75.769,73	0,11
O	Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	488.250,92	0,81	492.548,43	0,79	518.677,50	0,80	531.195,12	0,80	544.992,64	0,79
P	Jasa Pendidikan	512.406,23	0,85	560.137,27	0,89	600.908,19	0,92	645.035,76	0,97	690.282,21	1,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	160.893,67	0,27	178.862,12	0,29	190.878,15	0,29	207.137,59	0,31	224.608,70	0,33
R,S,T,U	Jasa Lainnya	311.465,06	0,52	337.550,70	0,54	350.884,52	0,54	377.133,75	0,57	410.292,22	0,60
	PDRB TOTAL	59.944.556,52	100	62.600.680,87	100	65.029.937,50	100	66.669.085,39	100	68.649.053,55	100
	PDRB TANPA INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU	15.670.767,26		16.489.673,51		17.429.965,54		18.426.513,81		19.417.572,31	

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2018

2.2.2. Inflasi

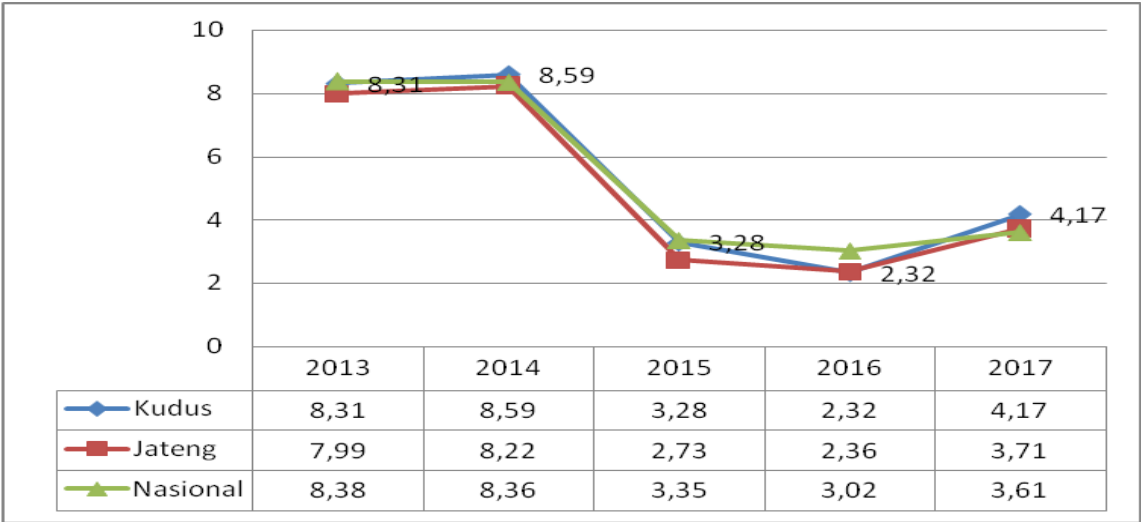
Laju inflasi Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.9
Nilai Inflasi Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kudus	8,31	8,59	3,28	2,32	4,17
2.	Jawa Tengah	7,99	8,22	2,73	2,36	3,71
3.	Nasional	8,38	8,36	3,35	3,02	3,61

Sumber : SIPD – Badan Pusat Statistik Tahun 2018

Gambar 2.6. Inflasi Kudus, Jawa Tengah dan Nasional



Sumber : SIPD – Badan Pusat Statistik Tahun 2018

Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Kudus tahun 2013-2017 relatif terkendali karena masih berada pada dua digit, meski terjadi lonjakan inflasi yang cukup tinggi pada tahun 2013-2014 yang disumbangkan oleh kenaikan harga komoditas sub bahan makanan, sub transportasi komunikasi, sub kesehatan, dan sub pendidikan olahraga.

Pada tahun 2017 inflasi di Kabupaten Kudus tercatat lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional. Laju inflasi Kabupaten Kudus tahun 2017 (year on year) sebesar 4,17%, naik dibanding tahun 2016 yang sebesar 2,32%. Laju inflasi harga konsumen menurut kelompok pengeluaran tahun 2017 di Kabupaten Kudus didominasi oleh 3 (tiga) kelompok besr yaitu : kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 8,36, kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga sebesar 7,50 dan kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar sebesar 5,77.

2.2.3. Penduduk Miskin

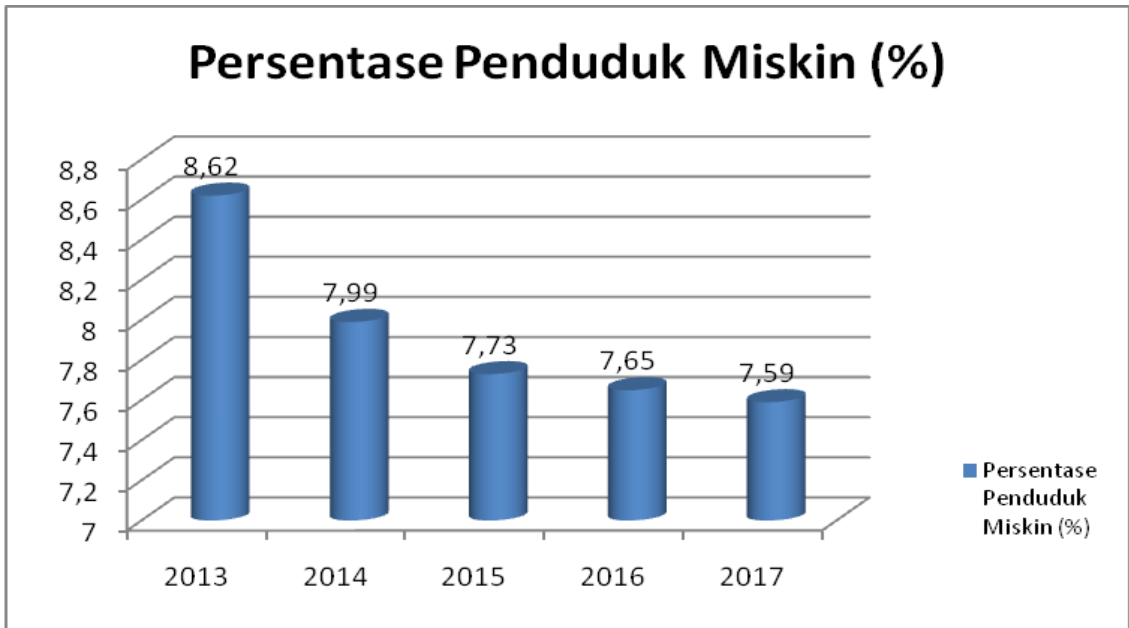
Jumlah penduduk miskin Kabupaten Kudus pada tahun 2013-2017 tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.10
Penduduk Miskin Tahun 2013 – 2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	70.100	65.800	64.100	64.200	64.400
2.	Persentase Penduduk Miskin (%)	8,62	7,99	7,73	7,65	7,59
3.	Garis kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	299.097	314.211	328.404	356.951	373.224

Sumber : SIPD – Badan Pusat Statistik Tahun 2018

Gambar 2.7. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2017



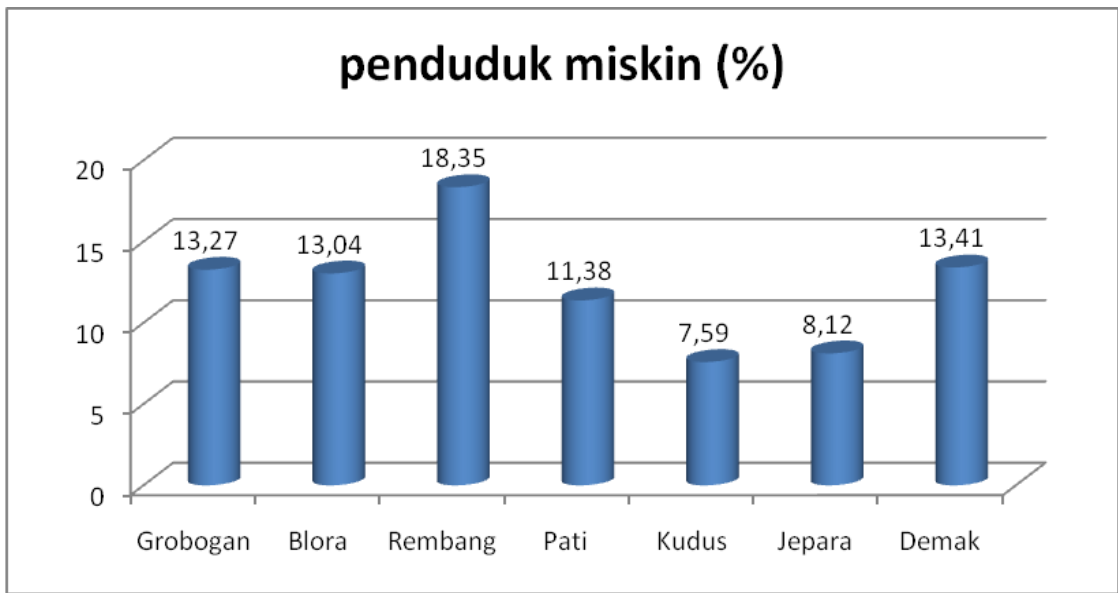
Sumber : BPS, Tahun 2018

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Berbagai program / kegiatan perlindungan sosial dan peningkatan daya beli masyarakat serta pemberdayaan dilaksanakan di Kabupaten Kudus merupakan upaya konkrit untuk mengurangi angka kemiskinan. Keberhasilan pelaksanaan program tersebut dapat dilihat pada jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin tahun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan penurunan. Perkembangan jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin dan garis kemiskinan tahun 2013 sebanyak 70.100 jiwa menurun menjadi 64.400 jiwa di tahun 2017. Apabila dilihat dari tahun 2016 terdapat peningkatan angka dan persentase kemiskinan, namun pada nilai persentase mengalami penurunan, yang disebabkan

adanya peningkatan nilai garis kemiskinan dari Rp.356.951,- menjadi Rp.373.224,-.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus dan Kabupaten sekitar pada tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar berikut ini :

Gambar 2.8. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kudus dan Sekitar Tahun 2017



Sumber : BPS, Tahun 2018

Jika dibandingkan dengan beberapa Kabupaten di sekitarnya, maka jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus pada tahun 2017 berada pada posisi paling rendah yaitu 7,59%.

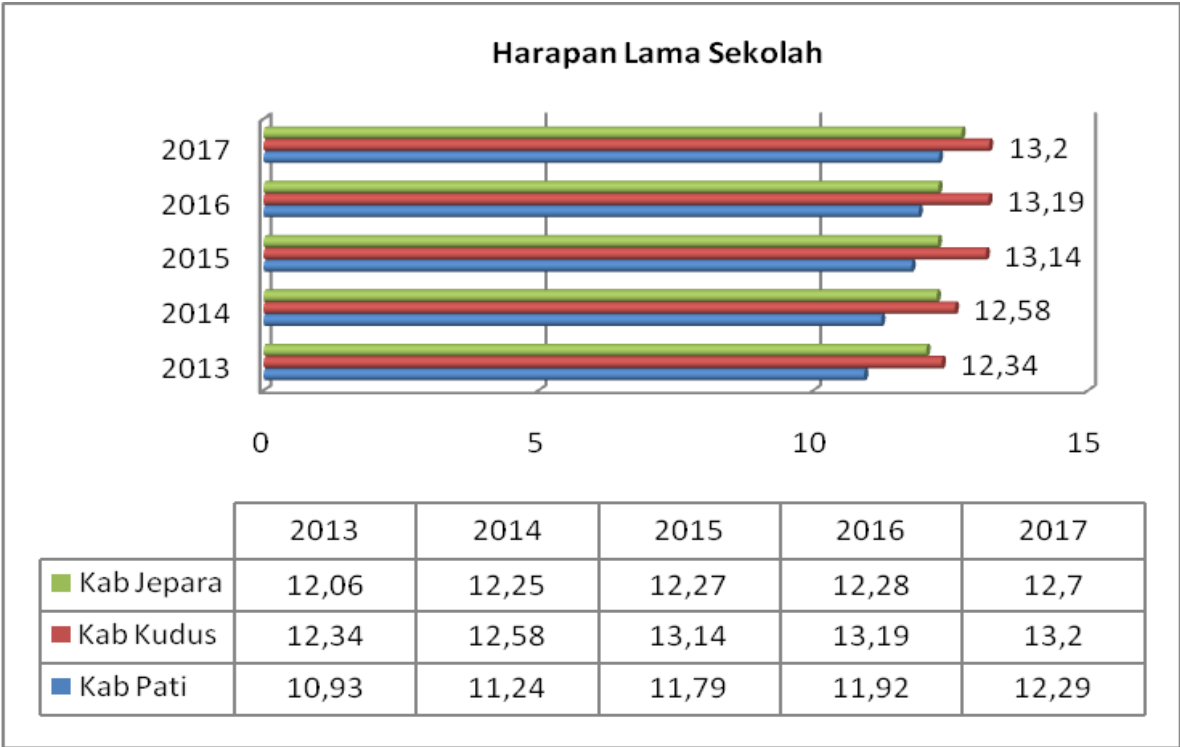
2.2.4. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.4.1. Harapan Lama Sekolah

Indikator angka melek huruf pada IPM metode baru digantikan dengan indikator Harapan Lama Sekolah atau *Expected Years of Schooling* (EYS). Sedangkan indikator rata-rata lama sekolah tetap dipertahankan untuk menggambarkan stok yang terjadi pada dunia pendidikan, namun cakupan penghitungan yang digunakan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) metode baru telah diganti. Pada metode lama, cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas. Sementara pada metode baru, cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas sesuai dengan rekomendasi UNDP. Selain untuk keterbandingan dengan internasional, alasan lain yaitu bahwa pada umumnya penduduk berusia 25 ke atas tidak bersekolah lagi. Walaupun sebagian kecil ada yang masih bersekolah, jumlahnya tidak signifikan. Penduduk usia 25 tahun ke atas merupakan stok pendidikan

yang dimiliki oleh suatu wilayah (IPM Kabupaten Kudus, 2016). Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Gambar berikut ini.

Gambar 2.9. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kudus dan Sekitar



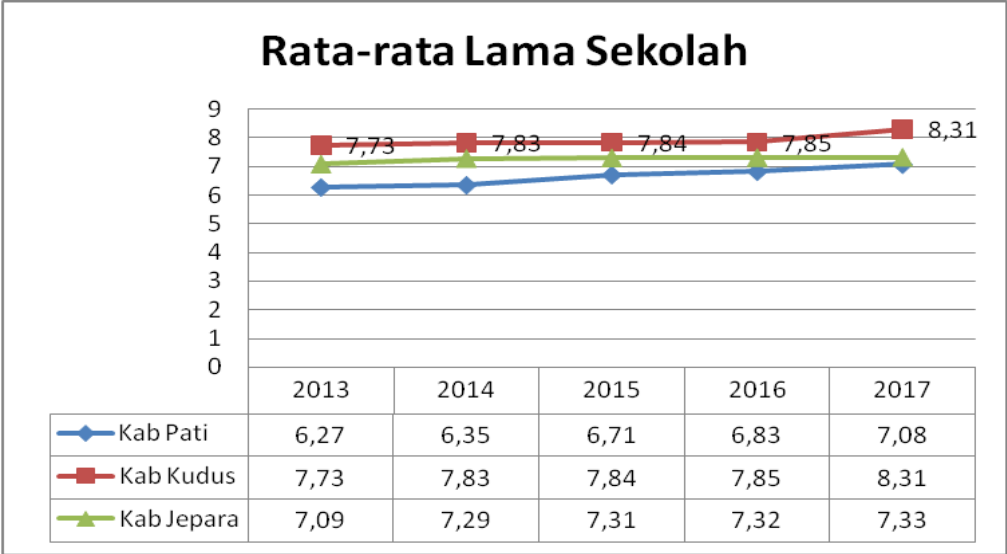
Sumber : BPS, Tahun 2018

Berdasar gambar di atas, angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Kudus relatif lebih tinggi disbanding Kabupaten Pati dan Jepara, dan meningkat dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2013 sebesar 12,34 persen meningkat menjadi 13,2 persen pada tahun 2017.

2.2.4.2. Rata – rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau *Mean Years of Schooling* (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung yaitu penduduk berusia 25 tahun ke atas, dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS mengikuti standard internasional yang digunakan oleh *United Nation Development Program* (UNDP). Perkembangan Rata – rata Lama Sekolah di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 2.10. Rata - Rata Lama Sekolah Kabupaten Kudus dan Sekitar



Sumber : BPS, Tahun 2018

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Kudus dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan dari 7,73 menjadi 8,31 lebih tinggi dibanding Kabupaten Pati dan Jepara.

2.2.5. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Fokus Seni Budaya dan Olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator antara lain jumlah grup kesenian, gedung kesenian, dan gelanggang olahraga sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.11
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2013-2017
Kabupaten Kudus

No	Capaian Pembangunan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	5	5	6	6	11
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.	2	3	4	4	4
3	Jumlah gelanggang olahraga per 10.000 penduduk.	5	5	5	5	5
4	Jumlah organisasi olahraga	36	36	38	38	38
5	Jumlah gedung olahraga	5	5	5	5	5

Sumber : SIPD – Disbudpar dan Disdikpora Tahun 2018

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa jumlah organisasi olahraga mengalami peningkatan dari 36 organisasi di tahun 2013 menjadi 38 organisasi di tahun 2017. Untuk gedung olahraga pada tahun 2017 masih sama jumlahnya dari tahun 2016 yaitu 5 gedung.

Tabel 2.12
Jumlah Klub Olahraga dan Sarpras Olahraga Masyarakat
Tahun 2017 di Kabupaten Kudus

NO	KECAMATAN	Jumlah Klub	Lapangan Olahraga
1	KALIWUNGU	19	25
2	K O T A	48	50
3	J A T I	77	49
4	UNDAAN	53	40
5	MEJOBOWATI	49	58
6	JEKULO	62	13
7	B A E	28	NA
8	GEBOG	26	21
9	D A W E	33	25
	Jumlah	395	281

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2018

Disamping jumlah gelanggang olahraga, di masyarakat juga berkembang olahraga masyarakat sebagaimana Tabel diatas yang menggambarkan geliat olahraga di Kabupaten Kudus. Upaya yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kudus guna meningkatkan kualitas sarpras olahraga diantaranya dengan melalui Pembangunan sarpras olahraga *sport center* yang berlokasi di Kelurahan Wergu Wetan yang sekaligus menjadi wahana wisata bagi masyarakat Kudus yang representatif.

Pada bidang Kebudayaan dapat dilihat kinerja pelayanan urusan kebudayaan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.13
Kinerja Pelayanan Kebudayaan Tahun 2013 – 2017

NO	INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	7	5	17	21	22
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	3	3	4	4	4
3	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	100	100	100	100	100
4	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	146	146	149	149	149
5	Total benda, situs & kawasan yang dimiliki	146	146	149	149	149

Sumber : SIPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018

Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk mengalami peningkatan dari 5 pada tahun 2013, menjadi 11 pada tahun 2017. Hal tersebut juga dialami pada jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk yang semakin meningkat dari 2 menjadi 4 di tahun 2017. Demikian halnya

dengan kinerja pelayanan kebudayaan dalam hal penyelenggaraan festival seni dan budaya meningkat dari 7 pada tahun 2013 menjadi 22 pada tahun 2017.

2. 3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.3.1. Fokus Layanan Wajib Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan wajib pelayanan dasar dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yaitu :

2.3.1. 1 PENDIDIKAN

Layanan urusan pendidikan dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Sekolah, persentase angka putus sekolah, rasio ketersediaan sekolah, dan rasio jumlah guru dan siswa sebagaimana tertera pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.14
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2013-2017

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Murid Usia 7-12 Th (siswa)	83.903	79.348	78.851	78.317	81.803
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Th (orang)	83.707	80.677	79.920	78.482	78.810
1.3	APK SD/MI/Paket A (%)	100,24	104,09	105,89	108,73	107,78
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Murid Usia 13-15 Th	43.852	41.015	40.377	40.182	42.154
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Th (orang)	43.612	42.992	41.711	41.130	41.216
2.3	APK SMP/MTs/Paket B (%)	100,55	102,75	105,49	106,60	107,23

Sumber : SIPD - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan dasar sudah mencapai angka diatas 100%, artinya bahwa semua penduduk usia sekolah 7-12 tahun telah bersekolah pada jenjang SD/MI/Paket A, dan penduduk usia 13-15 tahun telah bersekolah pada jenjang SMP/MTs/Paket B.

Tabel 2.15
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2013– 2017

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Usia 7-12 Th					
1.1	Jumlah Murid Usia 7-12 Th (siswa)	83.724	81.712	81.673	81.274	81.803
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Th (orang)	83.707	80.677	79.920	78.482	78.810
1.3	APS 7-12 Th (%)	100,03	101,28	102,19	103,55	103,19
2	Usia 13-15 Th					
2.1	Jumlah Murid Usia 13-15 Th (siswa)	44.111	43.571	40.377	40.182	42.154
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Th (orang)	43.612	42.992	41.711	41.130	41.216
2.3	APS Usia 13-15 Th (%)	101,15	101,35	103,75	106,48	102,27

Sumber : SIPD - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Tahun 2018

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dan juga sebagai ukuran daya serap, pemerataan dan akses terhadap pendidikan khususnya penduduk usia sekolah. APS SD/MI usia 7-12 tahun pada Tahun 2013 tercapai 100,03% meningkat setiap tahunnya hingga di Tahun 2017 tercapai 103,19%. Kondisi ini menggambarkan penduduk usia sekolah SD/MI telah terlayani secara keseluruhan, bahkan terdapat siswa dari kabupaten lain yang bersekolah di Kabupaten Kudus. Adapun APS SMP/MTs usia 13-15 tahun di Kabupaten Kudus juga cenderung naik, yaitu pada Tahun 2013 mencapai 101,15% naik menjadi 102,27% di Tahun 2017. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dan juga sebagai ukuran daya serap, pemerataan dan akses terhadap pendidikan khususnya penduduk usia sekolah. APS SD/MI usia 7-12 tahun pada Tahun 2013 tercapai 100,03% meningkat setiap tahunnya hingga di Tahun 2017 tercapai 103,19%. Kondisi ini menggambarkan penduduk usia sekolah SD/MI telah terlayani secara keseluruhan, bahkan terdapat siswa dari kabupaten lain yang bersekolah di Kabupaten Kudus. Adapun APS SMP/MTs usia 13-15 tahun di Kabupaten Kudus juga cenderung naik, yaitu pada Tahun 2013 mencapai 101,15% naik menjadi 102,27% di Tahun 2017.

AptS (Angka putus Sekolah) adalah Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur

yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Angka putus Sekolah Tahun 2013 – 2017 di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel dan Gambar di bawah ini.

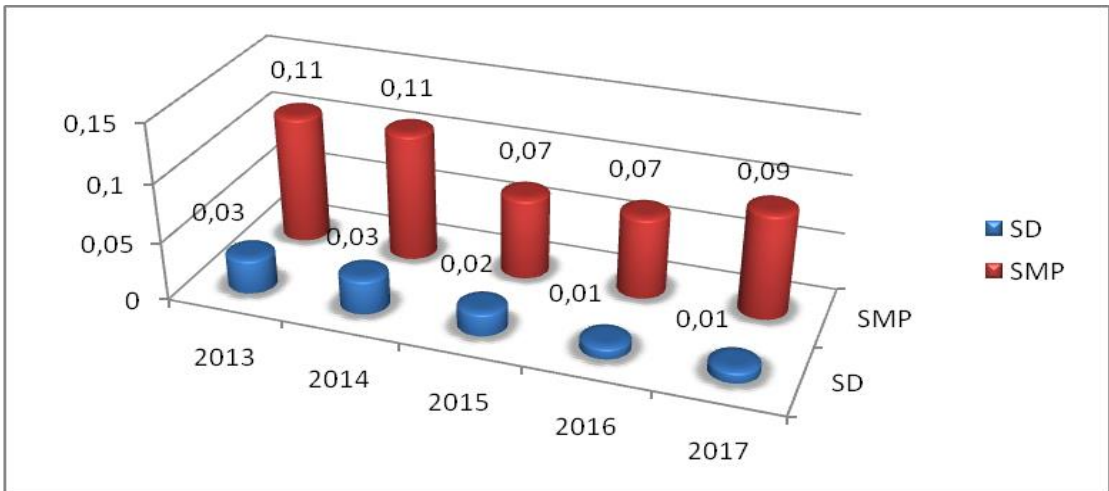
Tabel 2.16
Persentase Angka Putus Sekolah (APtS) Tahun 2013 – 2017

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI	0,03	0,03	0,02	0,01	0,01
2	SMP/MTs	0,11	0,11	0,07	0,07	0,09

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2018

Pada tabel di atas terlihat bahwa Angka Putus Sekolah (APtS) Kabupaten Kudus tahun 2013 – 2017 mengalami penurunan, namun demikian masih diperlukan penanganan angka putus sekolah di Kabupaten Kudus.

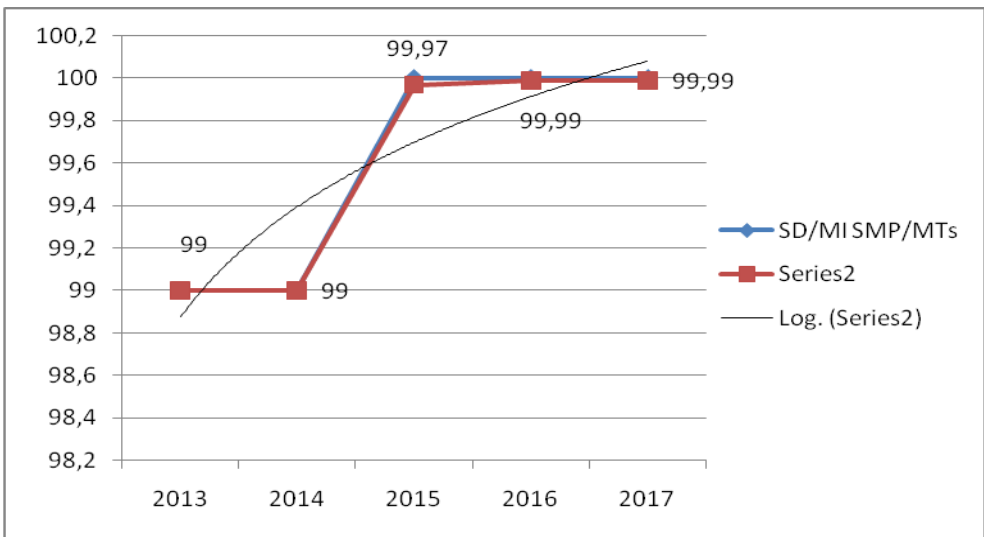
Gambar 2.11. Angka Putus Sekolah (APtS) Tahun 2013 - 2017



Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2018

Angka kelulusan dapat dilihat pada Gambar berikut ini:

Gambar 2.12. Angka Kelulusan (AL) Tahun 2013-2017

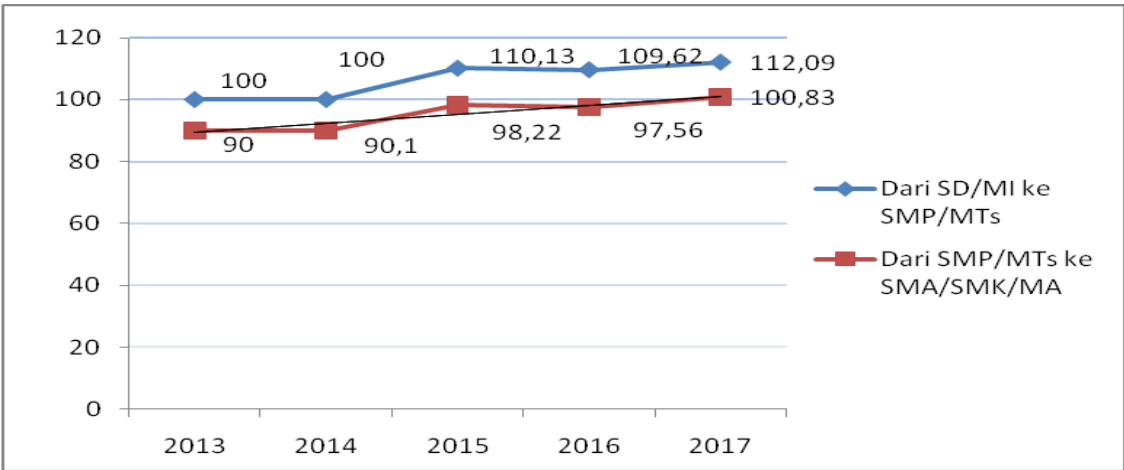


Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2018

Angka Kelulusan (AL) di Kabupaten Kudus pada tahun 2013 – 2017 menunjukkan bahwa di tingkat SD/MI cenderung meningkat dari 99% pada tahun 2013 menjadi 100% pada tahun 2017, di tingkat SMP/MTs meningkat dari 99% pada tahun 2013 menjadi 99,99% pada tahun 2017.

Penduduk yang melanjutkan ke jenjang pendidikan dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA dapat dilihat pada Gambar berikut ini:

Gambar 2.13. Persentase Angka Melanjutkan Sekolah Tahun 2013-2017



Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2018

Berdasar Gambar di atas, diperoleh Angka Melanjutkan (AM) pada tahun 2013 – 2017 dari SD/MI ke SMP/MTs cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 angka melanjutkan sebesar 100% naik menjadi 112,09% pada tahun 2017. Angka kelulusan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA, juga mengalami kenaikan, pada tahun 2013, angka melanjutkan sebesar 90% naik menjadi 100,83 di tahun 2017.

Fasilitas pendidikan tahun 2013-2017 SD/MI dan SMP/MTs dapat diketahui sebagaimana Tabel Fasilitas pendidikan berikut :

Tabel 2.17
Fasilitas Pendidikan Tahun 2013 - 2017

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI					
1,1	Jumlah sekolah kondisi bangunan baik	557	568	551	538	533
1,2	Jumlah sekolah	607	603	600	589	585
1,3	Fasilitas pendidikan SD/MI (%)	77,42	93,79	91,31	91,36	91,09
2	SMP/MTs					
2,1	Jumlah sekolah kondisi bangunan baik	104	107	114	114	106
2,2	Jumlah sekolah	115	112	115	115	114
2,3	Fasilitas pendidikan SMP/MTs (%)	90,77	92,55	98,78	98,79	93,38

Sumber : SIPD - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2018

Fasilitas pendidikan pada jenjang pendidikan SD/MI mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2013 ke tahun 2017. Dimana peningkatan tersebut dari 77,42% menjadi 91,09% di tahun 2017. Pada jenjang SMP/MTs fasilitas pendidikan mengalami kecenderungan naik untuk tahun 2013 ke tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2015 yang awalnya 98,78% menurun menjadi 93,38% di tahun 2017.

Tabel 2.18 Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah Tahun 2013–2017						
NO	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Gedung Sekolah (unit)	607	602	600	591	585
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Th (orang)	83.707	80.677	79.920	78.482	78.810
1.3	Rasio	72,52	74,61	75,07	75,30	74,22
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Gedung Sekolah (unit)	115	111	114	119	114
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Th (orang)	43.612	42.992	41.711	41.130	41.216
2.3	Rasio	26,37	25,82	27,33	28,93	27,65

Sumber : SIPD - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2018

Pelayanan pendidikan dapat dilihat dari rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah. Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI dari tahun 2013 sampai dengan 2016 cenderung fluktuatif. Peningkatan rasio ketersediaan sekolah dari tahun 2013 dari sebesar 72,52 mengalami peningkatan menjadi 74,22 di Tahun 2017. Pada jenjang SMP/MTs rasio ketersediaan sekolah cenderung fluktuatif, dimana Tahun 2013 (26,37) meningkat di Tahun 2016 menjadi 28,93, namun menurun menjadi 27,65 di tahun 2017. Dengan melihat rasio ketersediaan sekolah per penduduk SMP/MTs menunjukkan bahwa pelayanan pendidikan berupa penyediaan sekolah relatif memadai, namun yang perlu mendapat perhatian adalah kesenjangan kualitas sarpras yang cukup lebar di desa dibandingkan di kota.

Rasio Guru terhadap murid dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.19
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2013-2017

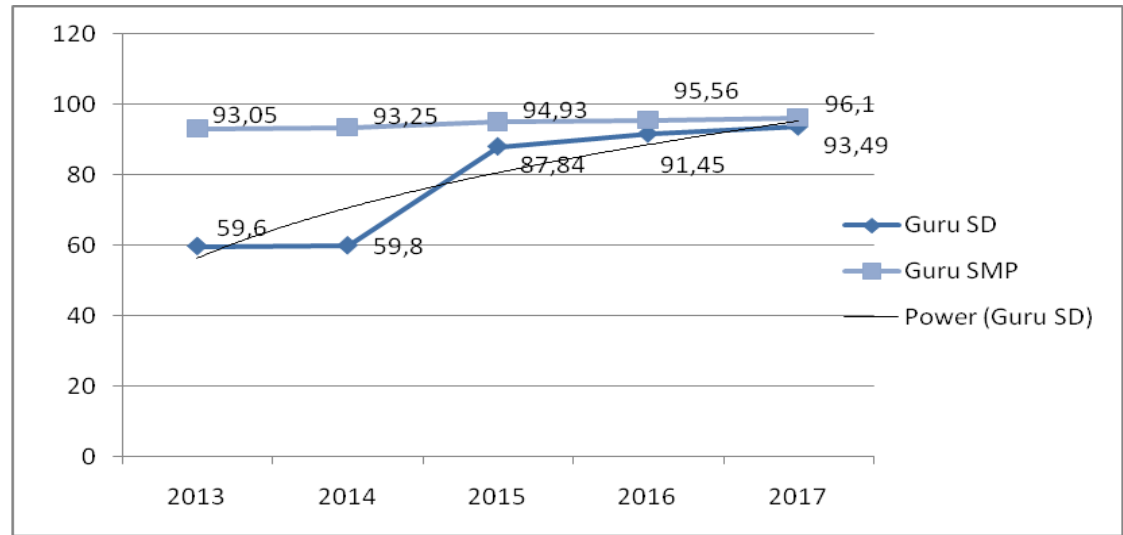
No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Guru (orang)	6.915	6.890	6.810	6.772	6.601
1.2	Jumlah Murid (siswa)	83.813	83.944	84.577	84.501	84.894
1.3	Rasio	0,0825	0,0824	0,0805	0,0801	0,0770
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Guru (orang)	3.110	3055	3.025	3.059	3.013
2.2	Jumlah Murid (siswa)	43.545	43.928	43.803	43.848	43.894
2.3	Rasio	0,0714	0,0695	0,0690	0,0697	0.0686

Sumber : SIPD - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2018

Berdasar tabel diatas, diketahui bahwa rasio guru terhadap murid tingkat SD/MI, SPM/MTs dari tahun 2013 sampai tahun 2017 menunjukkan trend yang berkebalikan dimana jumlah guru cenderung turun namun jumlah murid cenderung naik.

Adapun persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 untuk guru SD cenderung mengalami kenaikan sebagaimana Gambar berikut :

Gambar 2.14. Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Tahun 2013-2017



Sumber : SIPD - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2018

Berdasar Gambar di atas, persentase guru SD cenderung mengalami kenaikan dari 59,60% pada tahun 2013 menjadi 93,49% pada tahun 2017, untuk guru SMP juga mengalami kenaikan dari 2013 sebesar 93,05% menjadi 96,10% tahun 2017.

2.3.1. 2 KESEHATAN

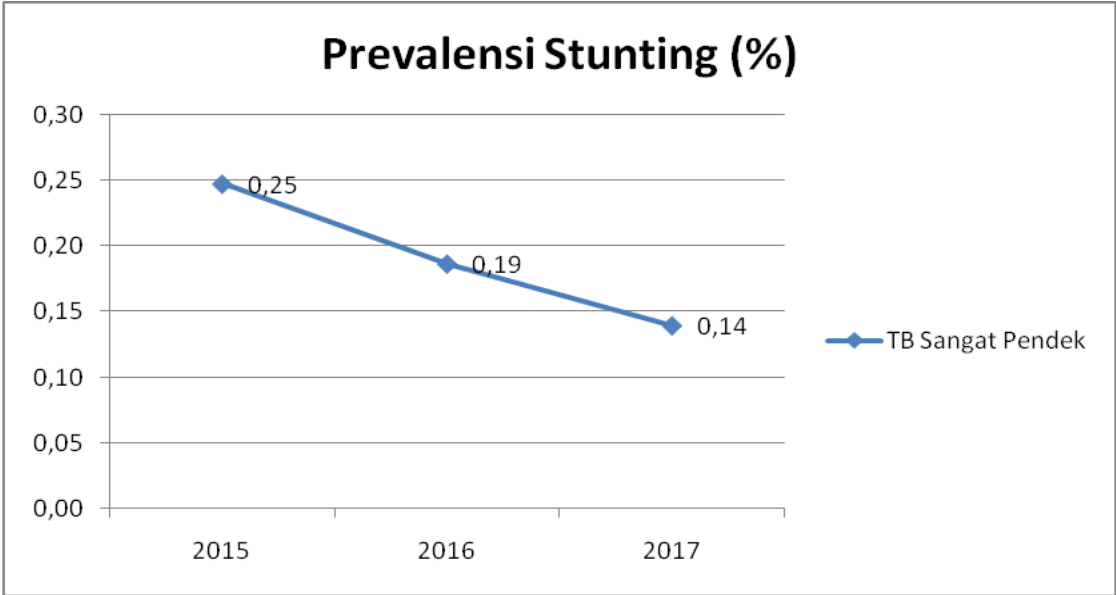
Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik. Upaya perbaikan kesehatan masyarakat dikembangkan melalui Sistem Kesehatan Nasional.

Pembangunan kesehatan tahun 2019 difokuskan pada empat program prioritas yaitu penurunan angka kematian ibu dan bayi, penurunan prevalensi balita pendek (stunting), pengendalian penyakit menular dan pengendalian penyakit tidak menular. Upaya peningkatan status gizi masyarakat termasuk penurunan prevalensi balita pendek menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang tercantum di dalam sasaran pokok Rencana Pembangunan jangka Menengah Tahun 2015 – 2019. Target penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (dibawah 2 tahun) adalah menjadi 28% (RPJMN, 2015 – 2019). Guna mendukung program nasional yang wajib dilaksanakan di semua daerah, Kabupaten Kudus melaksanakan berbagai upaya diantaranya dengan menekan Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan derajat kesehatan masyarakat diantaranya adalah pemenuhan sarana pelayanan kesehatan, perbaikan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai, serta memberikan pelayanan dan pembinaan di Bidang Kesehatan.

Adapun berkenaan dengan isu stunting yang menjadi perhatian Internasional, Pemerintah akan fokus untuk melakukan pengentasan stunting secara serius. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, sehingga tinggi anak terlalu pendek untuk usianya. Kondisi kekurangan gizi ini terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah lahir. Namun stunting baru terlihat setelah anak berusia dua tahun. Stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, dan menurunkan produktivitas.

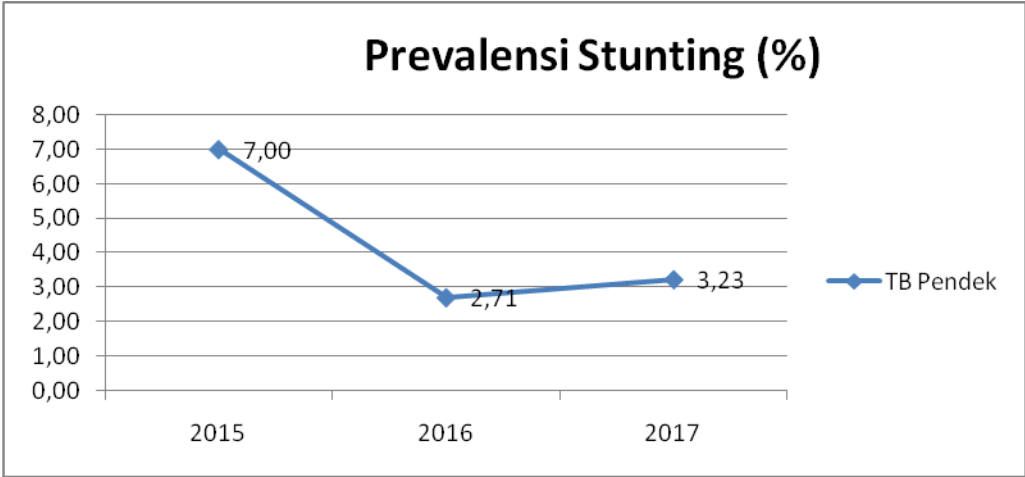
Adapun data stunting di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Gambar berikut ini :

Gambar 2.15. Prevalensi Stunting TB Sangat Pendek Tahun 2015 – 2017



Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2018

Gambar 2.16. Prevalensi Stunting TB Pendek Tahun 2015 – 2017



Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2018

Prevalensi stunting Kabupaten Kudus dengan tinggi badan sangat pendek relative turun ditahun 2017 dibanding tahun sebelumnya, namun prevalensi stunting dengan tinggi badan pendek sedikit mengalami kenaikan. Dua hal di atas menjadi perhatian Pemerintah dalam penanganannya.

Layanan urusan kesehatan dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI), rasio Posyandu per satuan balita, rasio Puskesmas dan Pustu per satuan penduduk, rasio Rumah Sakit per satuan penduduk, rasio dokter per satuan penduduk, rasio tenaga medis per satuan penduduk, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI), cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, cakupan penemuan dan penanganan penderita

penyakit TBC BTA, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, cakupan kunjungan bayi, cakupan Puskesmas dan cakupan Puskesmas Pembantu.

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya ibu yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Data AKI dan jumlah kasus kematian ibu melahirkan

Berikut indikator jumlah kematian ibu maternal dan angka kematian ibu yang berhasil diturunkan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.20
Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan
Angka Kematian BalitaTahun 2013 – 2017 Kabupaten Kudus

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Angka Harapan Hidup (tahun)	76,39	76,40	76,41	76,43	76,44
2	Angka Kematian Ibu Melahirkan	132,68 (21 kasus)	164,87 (26 kasus)	115,48 (18 kasus)	103,5 (16 kasus)	73 (11 kasus)
3	Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	7,1 (112 kasus)	5,58 (88 kasus)	9,75 (152 kasus)	7,24 (112 kasus)	30 kasus
4	Angka Kematian Balita (per 1000 KH)	8,4 (132 kasus)	9,07 (143 kasus)	11,41 (178 kasus)	8,34 (129 kasus)	20 kasus

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, untuk mengukur peningkatan derajat kesehatan masyarakat antara lain dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup. AHH cenderung mengalami peningkatan dari Tahun 2013 sampai Tahun 2016. Kasus kematian ibu pada Tahun 2014 mengalami peningkatan yang signifikan sebanyak 26 kasus (164,87 per 100.000 kelahiran hidup), angka ini lebih tinggi dibanding target nasional maupun target Provinsi Jawa Tengah yaitu 102 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab kematian terbanyak adalah penyebab langsung diantaranya karena penyakit penyerta atau penyakit kronis seperti jantung, TB Paru, hepatitis dan hipertensi. Faktor penyebab kematian yang lain adalah faktor usia, jumlah anak (paritas), eklamsia, perdarahan dan emboli. Tahun 2015 Angka Kematian Ibu cenderung mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2014 yaitu dari

164,87/100.000 kelahiran hidup atau 26 kasus menjadi 115,48/100.000 KH atau 18 kasus. Tahun 2016 ada penurunan AKI menjadi 103,5/100.000 atau 16 kasus. Namun AKI Tahun 2016 masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan target yang diharapkan sebesar 102/100.000 kelahiran hidup.

Faktor penyebab kematian ibu karena perdarahan, infeksi dan adanya 3 terlambat (terlambat merujuk, terlambat sampai ditempat rujukan, terlambat mendapatkan pertolongan). Penyakit penyerta saat kehamilan seperti penyakit pada jantung, paru serta asma, hipertensi, DM juga mempengaruhi kematian pada ibu. Penanganan kasus Kematian Ibu memerlukan kerjasama yang baik antara lintas program dan lintas sektoral terkait. Hal ini dimaksudkan agar ibu hamil benar-benar merupakan kehamilan yang diinginkan dan kondisi ibu sehat. Disamping itu dengan para ibu perlu memperhatikan kasus 4 terlalu (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering dan terlalu banyak), kasus ALKI (Anemia, LILA <23,5 cm, penyakit kronis, IMS) diusahakan tidak hamil lagi atau tidak hamil dulu sebelum kondisi ibu sehat.

Angka Kematian Bayi mengalami peningkatan di Tahun 2013. Pada tahun 2014 mengalami penurunan, sedangkan pada Tahun 2015 mengalami peningkatan kembali. Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Kudus Tahun 2015 sebesar 9,75 per 1000 Kelahiran Hidup (KH) masih lebih rendah dibandingkan target Nasional yaitu 23 per 1000 KH. Tahun 2016 terjadi penurunan Angka Kematian Bayi menjadi 7,24 per 1000 KH. Analisis penyebab kematian bayi tertinggi karena kasus BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) yang membutuhkan intervensi adekuat karena belum ada kematangan organ. Penyebab BBLR adalah persalinan sebelum waktunya atau prematur, disamping itu kasus yang lain adalah asfiksia (kegagalan bayi baru lahir untuk bernapas secara spontan & teratur), sepsis (kondisi medis serius di mana terjadi peradangan di seluruh tubuh yang disebabkan oleh infeksi), kelainan congenital aspirasi. Program kegiatan pelayanan anak memang sudah cukup baik capaian targetnya tapi belum diikuti oleh kualitas layanannya sehingga masih perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan petugas, untuk itu di program anak dilaksanakan pelatihan manajemen asfiksia dan BBLR.

Angka Kematian Balita (AKBa) Tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tahun 2015 AKBa sebesar 11,41 per 100 kelahiran hidup dan tahun 2016 menurun menjadi 8,34 per 1000 kelahiran hidup.

Kecenderungan angka kematian balita dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 mengalami kenaikan dikarenakan faktor lain-lain yang intervensinya memang sulit penanganannya contoh, kanker, talasemia, kelainan jantung walaupun masih ditemukan juga kasus-kasus yang sebenarnya bisa ditangani secara adekuat (memenuhi syarat/memadai) agar tidak timbul kematian misalnya DBD, DIARE, FEBRIS. Efisiensi sumber daya, Analisis program, Program kegiatan pelayanan anak balita memang sudah cukup baik capaian targetnya tapi belum diikuti oleh kualitas layanannya sehingga masih perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan petugas, untuk itu di program anak dilaksanakan pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK).

Tabel 2.21
Jumlah Kematian Ibu Maternal dan Angka Kematian Ibu (AKI)
Tahun 2013-2017

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah kematian ibu maternal	21	26	18	16	11
2.	AKI	132,68	164,87	115,48	103,5	72,6

Sumber : SIPD - Dinas Kesehatan Tahun 2018

Angka kematian ibu melahirkan mengalami penurunan dari 21 kasus di tahun 2013 menjadi 11 kasus di tahun 2017, hal ini mengindikasikan bahwa program di Bidang Kesehatan telah mampu menurunkan jumlah kematian ibu yang melahirkan.

Berkenaan dengan adanya kasus penyakit menular di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.22
Jumlah Puskesmas dan Pustu Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Puskesmas	19	19	19	19	19
2.	Jumlah Pustu	43	43	43	41	41
3.	Jumlah Penduduk	799.435	802.239	803.145	830.221	835.318
4.	Rasio Puskesmas per 1000 penduduk	0,024	0,024	0,024	0,023	0,023
5.	Rasio Pustu per 1000 penduduk	0,054	0,054	0,054	0,049	0,049

Sumber : SIPD - Dinas Kesehatan Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pustu berkurang 2 unit dari 43 unit di tahun 2013 menjadi 41 unit di tahun 2017. Rasio puskesmas per 1000 penduduk tahun 2013 sebesar 0,024 turun menjadi 0,023 di tahun

2017, demikian pula dengan rasio pustu per 1000 penduduk di tahun 2013 sebesar 0,049 turun menjadi sebesar 0,049 pada tahun 2017.

Tabel 2.23
Jumlah Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk
Tahun 2013 – 2017 Kabupaten Kudus

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	1	1	1	1	1
3.	Jumlah Rumah Sakit Swasta:	8	8	8	7	7
	a. Rumah Sakit Umum Swasta	5	5	5	5	5
	b. Rumah Sakit Bersalin	3	3	1	1	1
	c. Rumah Sakit Anak	-	-	2	1	1
4.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	9	10	9	9	9
5.	Jumlah Penduduk	799.435	802.239	803.145	830.221	835.318
6.	Rasio (per 1000 penduduk)	0,011	0,012	0,011	0,011	0,011

Sumber : SIPD - Dinas Kesehatan Tahun 2018

Sampai dengan Tahun 2017 di Kabupaten Kudus terdapat 9 sarana kesehatan (rumah sakit) milik pemerintah dan swasta yang dapat diakses oleh masyarakat. Adapun rasio jumlah rumah sakit dibanding jumlah penduduk pada Tahun 2017 tidak ada peningkatan atau tidak ada penambahan rumah sakit. Sampai dengan Tahun 2017 di Kabupaten Kudus terdapat 9 sarana kesehatan (rumah sakit) milik pemerintah dan swasta yang dapat diakses oleh masyarakat. Adapun rasio jumlah rumah sakit dibanding jumlah penduduk pada Tahun 2017 tidak ada peningkatan atau tidak ada penambahan rumah sakit.

Tabel 2.24
Jumlah Dokter Tahun 2013 – 2017 Kabupaten Kudus

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Dokter	376	422	313	279	314
2.	Jumlah Penduduk	799.435	802.239	803.145	830.221	835.318
3.	Rasio (per 1000 penduduk)	0,470	0,526	0,390	0,336	0,376

Sumber : SIPD - Dinas Kesehatan Tahun 2018

Menurut standart WHO, target Indonesia Sehat 2010, perlu disediakan 40 dokter umum untuk melayani 100.000 penduduk. Berdasarkan data Tabel 2.25, rasio jumlah dokter per jumlah penduduk pada Tahun 2014 dan 2016 mengalami kenaikan bila dibandingkan Tahun 2013. Pada Tahun 2015 mengalami sedikit penurunan dikarenakan jumlah dokter menurun dan jumlah penduduk meningkat, tetapi telah mencapai

rasio ideal tiap dokter terhadap 100.000 penduduk berdasarkan Indonesia Sehat 2010 yaitu 40 per 100.000 jumlah penduduk (satu orang dokter melayani 2.500 penduduk). Tahun 2017 rasio dokter lebih tinggi dibanding dengan tahun 2016.

Tabel 2.25
Jumlah Tenaga Perawat, Bidan dan Tenaga Kesehatan Lainnya
Tahun 2013 – 2017 Kabupaten Kudus

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Perawat	1.083	1.091	1.104	1.400	1.403
2.	Jumlah Bidan	479	482	494	655	650
3.	Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya	487	606	606	606	556
4.	Jumlah Penduduk	799.435	802.239	823.843	830.221	835.318
5.	Rasio (per 1000 penduduk)	2,563	2,716	2,675	3,205	3,123

Sumber : SIPD - Dinas Kesehatan Tahun 2018

Untuk rasio jumlah tenaga perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya dari Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang ada jumlah tersebut tidak mengalami penambahan yang signifikan, karena para tenaga kesehatan tidak memperpanjang ijin praktek di wilayah Kabupaten Kudus yang disebabkan kemungkinan pindah domisili atau diterima bekerja di luar kota.

Tabel 2.26
Status Gizi Balita Tahun 2013 – 2017 Kabupaten Kudus

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Balita Gizi Kurang	3,74%	3,86%	3,34%	3,01%	3,21%
2	Balita Gizi Buruk	0,78%	0,57%	0,87%	0,79%	0,75%
3	Cakupan Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : SIPD - Dinas Kesehatan Tahun 2018

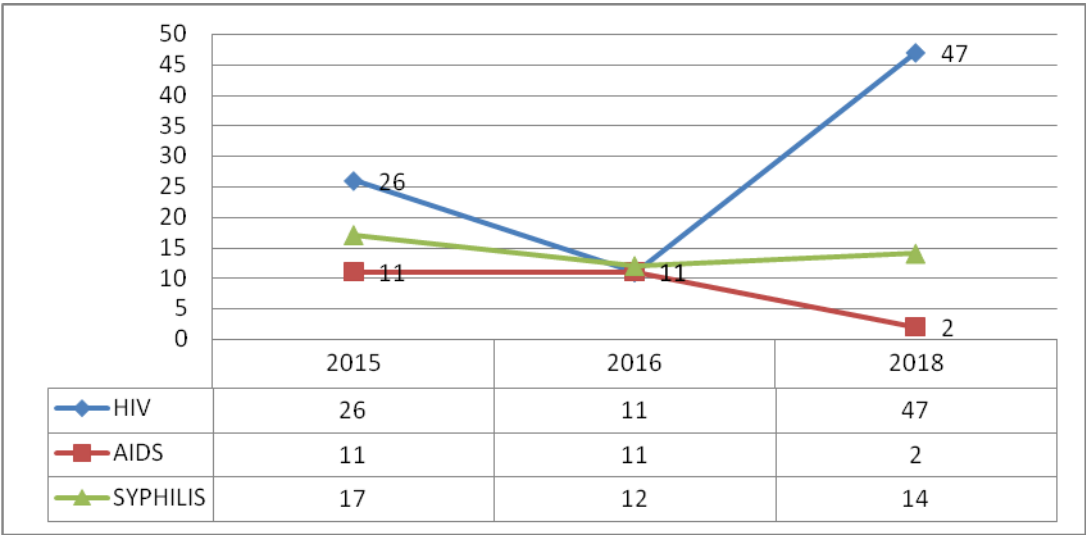
Perkembangan persentase balita gizi kurang mengalami penurunan sampai dengan tahun 2016, dan di tahun 2017 meningkat menjadi 3,21%. Sedangkan persentase balita gizi buruk pada Tahun 2013, 2015 dan 2016 mengalami kenaikan dan menurun pada Tahun 2014 dan 2017. Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan sebesar 100%.

Tabel 2.27
Jumlah Kasus HIV AIDS dan SYPHYLIS Tahun 2015 – 2017

No	Uraian	2015			2016			2017		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	HIV	12	14	26	5	6	11	31	16	47
2	AIDS	8	3	11	8	3	11	1	1	2
3	SYPHYLIS	16	1	17	12	0	12	14	0	14
	Jumlah	36	18	54	25	9	34	46	17	63

Sumber : Profil Kesehatan 2015 - 2017 – Dinas Kesehatan

Gambar 2.17. Jumlah Kasus HIV AIDS dan SYPHYLIS Tahun 2015 – 2017



Sumber : Profil Kesehatan, Dinas Kesehatan

Berdasarkan tabel dan Gambar di atas, jumlah kasus penyakit menular dari tahun 2015 sampai tahun 2017, fluktuatif dan cenderung mengalami kenaikan, yaitu sejumlah 54 kasus di tahun 2015 menjadi 63 kasus di tahun 2017.

Adapun terkait jumlah kasus penyakit tidak menular dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.28
Kasus Penyakit Tidak Menular Di Puskesmas Dan Rumah Sakit Tahun 2015 – 2017

Tahun 2015

No	URAIAN	Neoplasma					Diabetes Mellitus		Peny. Jantung & Pembuluh Darah									
		Ca Servik	Ca Mamae	Ca Hepar	Ca Paru	Ca Lain	ID DM	ND DM	Angina Pekt.	AMI	Dekomp Kordis	Hipertensi Essensial	Hipertensi Lainnya	Stroke		PPOK	Asma Bronkial	Psikosis
														Hemoragik	Non Hemoragik			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	KALIWUNGU	10	23	2	-	-	1	2069	38	213	238	1688	196	142	63	194	254	57
2	KOTA KUDUS	35	79	39	4	256	50	598	91	157	91	1056	29	311	596	106	312	110
3	JATI	35	76	33	14	300	340	622	163	127	93	374	-	205	966	60	389	38
4	UNDAAN	3	1	-	-	-	8	99	-	-	4	354	28	-	-	1	66	4
5	MEJOBBO	5	-	-	-	-	4	210	2	-	20	367	77	3	6	47	54	-
6	JEKULO	3	1	-	-	-	2	337	-	-	37	398	100	2	1	15	134	4
7	BAE	5	2	-	-	-	-	160	1	-	22	397	-	1	20	7	117	7
8	GEBOG	-	1	1	-	-	41	202	-	-	27	434	5	1	59	6	88	6
9	DAWE	-	1	-	-	-	-	136	4	7	7	427	10	-	2	2	26	5
Jumlah		96	184	75	18	556	446	4433	299	504	539	5495	445	665	1713	438	1440	231

Sumber : Profil Kesehatan 2015 – Dinas Kesehatan

Tahun 2016

No	URAIAN	Neoplasma					Diabetes Mellitus		Peny. Jantung & Pembuluh Darah									
		Ca Servik	Ca Mamae	Ca Hepar	Ca Paru	Ca Lain	ID DM	ND DM	Angina Pekt.	AMI	Dekomp Kordis	Hipertensi Essensial	Hipertensi Lainnya	Stroke		PPOK	Asma Bronkial	Psikosis
														Hemoragik	Non Hemoragik			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	KALIWUNGU	13	23	2	-	-	1	2069	40	54	238	1689	196	142	584	194	254	57
2	KOTA KUDUS	15	13	8	-	8	30	259	17	30	117	751	29	78	22	34	80	57
3	JATI	55	142	98	18	548	360	961	237	302	166	2182	-	438	1540	362	621	91
4	UNDAAN	3	1	-	-	-	8	99	-	-	4	354	28	-	-	1	66	4
5	MEJOBO	5	-	-	-	-	4	210	-	14	7	367	77	3	6	47	54	-
6	JEKULO	3	14	-	-	-	2	337	2	-	37	398	100	2	1	15	134	4
7	BAE	5	2	-	-	-	-	160	1	-	22	397	-	2	20	7	117	7
8	GEBOG	-	1	1	-	-	41	202	-	-	27	434	5	-	59	6	88	6
9	DAWE	-	1	-	-	-	-	136	4	7	7	427	10	-	2	2	26	5
Jumlah		99	197	109	18	556	446	4433	301	407	625	6999	445	665	2234	668	1440	231

Sumber : Profil Kesehatan 2016 – Dinas Kesehatan

Tahun 2017

No	URAIAN	Neoplasma					Diabetes Mellitus		Peny. Jantung & Pembuluh Darah									
		Ca Servik	Ca Mamae	Ca Hepar	Ca Paru	Ca Lain	ID DM	ND DM	Angina Pekt.	AMI	Dekomp Kordis	Hipertensi Essensial	Hipertensi Lainnya	Stroke		PPOK	Asma Bronkial	Psikosis
														Hemoragik	Non Hemoragik			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	KALIWUNGU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	KOTA KUDUS	-	50	-	-	-	-	30	30	-	15	17	14	90	100	-	45	55
3	JATI	41	-	36	9	-	248	39	320	242	210	33	1538	528	165	233	263	423
4	UNDAAN	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MEJOBO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	JEKULO	-	4	-	-	-	-	81	102	-	5	42	62	-	4	412	90	58
7	BAE	1	2	-	-	-	-	141	-	-	-	592	-	10	-	-	31	-
8	GEBOG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DAWE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		42	57	36	9	0	248	291	452	242	230	684	1614	628	269	645	429	536

Sumber : Profil Kesehatan 2017 – Dinas Kesehatan

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jumlah kasus penyakit tidak menular di Kabupaten Kudus dari tahun 2015 – 2017 bergerak fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan. Namun demikian diperlukan peningkatan upaya pencegahan penyakit dari berbagai program pelayanan kesehatan yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

2.3.1. 3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.3.1. 3. 1 PEKERJAAN UMUM

Status jalan di Kabupaten Kudus terbagi menjadi tiga golongan dimana masing-masing dikelola secara terpisah seperti terlihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.29
Kondisi Jalan Tahun 2013 – 2017 Kabupaten Kudus

No	Kondisi Jalan	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Baik/ Sedang	meter	457.515	503.890	547.190	470.201,10	536.635,4
		%	73,65	81,11	88,09	73,55	83,95
2	Rusak Ringan	meter	56.825	46.320	37.415	114.566,50	70.866,3
		%	9,15	7,46	6,02	17,92	11,09
3	Rusak Berat	meter	106.840	70.970	36.575	54.494,10	31.760,00
		%	17,20	11,43	5,89	8,52	4,97
	Jumlah	meter	621.180	621.180	621.180	639.261,70	639.261,7

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018

Panjang jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten di Kabupaten Kudus 715.381,70 km. Jalan nasional yang melewati wilayah Kabupaten Kudus adalah jalur Pantura atau disebut juga jalan Daendels, sepanjang 24.590 km atau 3,44% dari total panjang jalan, sedangkan jalan provinsi sepanjang 51.530 km atau 7,20 % dan jalan kabupaten sepanjang 639.261,70 km atau 89,36 %. Berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor : 620/152/2015 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten dan Jalan Kelurahan di Kabupaten Kudus, jalan Kabupaten Kudus mengalami peningkatan panjang jalan menjadi 639.261,70 meter. Dilihat dari kondisinya, pada tahun 2016 jalan kabupaten mempunyai panjang jalan kondisi baik / sedang sepanjang 536.635,4 meter, panjang jalan kondisi kondisi rusak ringan sebesar 70.866,3 meter, dan panjang jalan kondisi rusak berat sepanjang 31.760,00 meter. Terjadi peningkatan kondisi jalan baik/sedang menjadi sebesar 83,95% pada tahun 2017, kondisi jalan rusak

ringan menjadi sebesar 11,09% dan penurunan kondisi jalan rusak berat menjadi sebesar 4,97%.

Tabel 2.30
Jumlah dan Kondisi Jembatan Tahun 2013 – 2017 Kabupaten Kudus

No	Kondisi Jembatan	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Baik	Unit	170	174	176	183	204
		%	77,27	77,68	53,33	54,63	60,90
2	Sedang	Unit	38	36	103	103	103
		%	17,27	16,07	31,21	30,75	30,75
3	Rusak	Unit	12	14	51	49	28
		%	5,45	6,25	15,46	14,63	8,36
	Jumlah	Unit	220	224	330	335	335

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018

Pembangunan jembatan di Kabupaten Kudus dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan baik dari aspek peningkatan kondisi jembatan maupun peningkatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi jembatan. Berdasarkan Tabel di atas diketahui bahwa proporsi jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 60,90% dibandingkan tahun 2016. Sedangkan proporsi jembatan dalam kondisi sedang 30,75% atau sama dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun jembatan dalam kondisi rusak mengalami penurunan sehingga jumlahnya berkurang dibandingkan tahun 2016.

Tabel 2.31
Kondisi Daerah Irigasi Tahun 2013 – 2017

No	Kondisi Daerah Irigasi	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Baik	hektar	6.275,99	7.273,19	7.818,71	7.970,24	8.176,37
		%	61,08	70,65	75,94	77,42	79,42
2	Rusak Ringan	hektar	691,65	517	427,86	407,8	424,74
		%	6,73	5,02	4,16	3,96	4,13
3	Rusak Sedang	hektar	598,24	552,65	461,29	439	457,50
		%	5,82	5,37	4,48	4,26	4,44
4	Rusak Berat	hektar	2.708,77	1.952,56	1.587,54	1.478,35	1.241,24
		%	26,36	18,97	15,42	14,36	12,06
	Jumlah Total	hektar	10.274,65	10.295,40	10.295,40	10.295,39	10.295,39
	Jumlah Pembulatan	hektar	10.275,00	10.295,00	10.295,00	10.295,00	10.295,00
		%	100	100	100	100	100

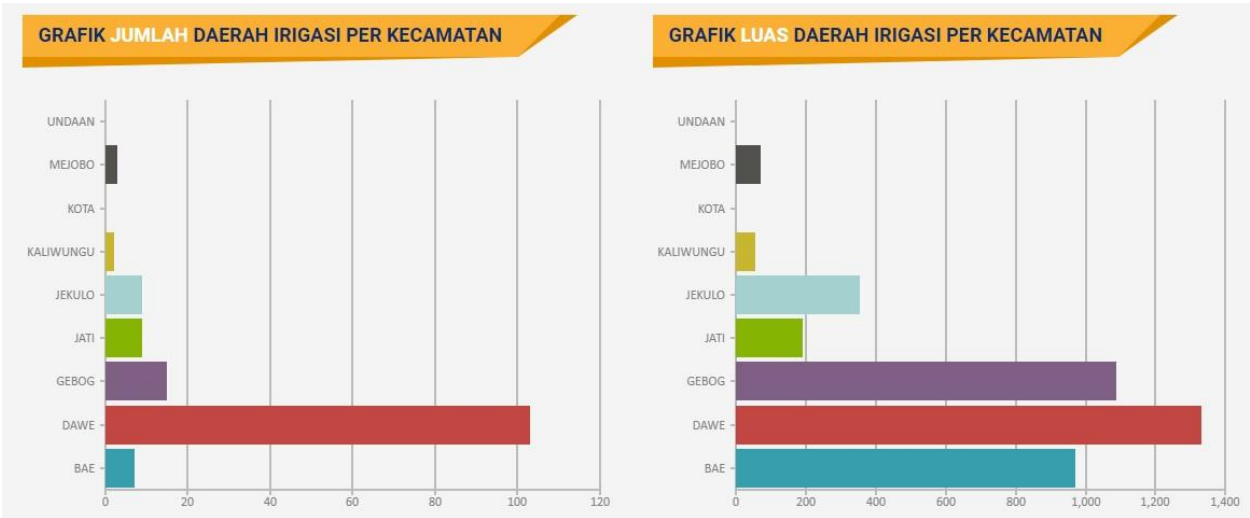
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018

Daerah Irigasi secara keseluruhan di Kabupaten Kudus sebesar 20.213 ha. Dari jumlah total tersebut berdasarkan Tabel di atas, yang

menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kudus sebesar 10.295 Ha. Adapun sisanya sebesar 3.403 ha merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan 6.515 ha merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

Kondisi Daerah Irigasi (DI) menunjukkan peningkatan pada kondisi baik menjadi sebesar 79,42% pada tahun 2017, sedangkan kondisi rusak berat mengalami penurunan. Kondisi Daerah Irigasi (DI) dengan kondisi baik perlu dipertahankan kualitasnya melalui pemeliharaan, sehingga mampu mengairi lahan pertanian secara optimal, sedangkan DI dengan kondisi rusak sedang rusak ringan dan rusak berat perlu dilakukan rehabilitasi sehingga kondisinya menjadi baik untuk meningkatkan ketersediaan air irigasi. Pada tahun 2017 luas lahan pertanian di Kabupaten Kudus adalah 10.295 Ha sehingga rasio jaringan irigasi yang kondisinya baik dengan luas lahan pertanian di Kabupaten Kudus adalah sebesar 79,42%. Pada tahun 2017 panjang drainase terbangun adalah 7.006,30 meter dan panjang talud jalan kabupaten yang dibangun sepanjang 5.909,82 meter.

Gambar 2.18.
Grafik Jumlah Daerah Irigasi Per Kecamatan Dan
Grafik Luas Daerah Irigasi Per Kecamatan



Sumber: <http://irigasi.dinasbpesdm-kudus.com>

2.3.1. 3. 2 PENATAAN RUANG

Penataan Ruang yang dilaksanakan meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana umum yang disusun berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten yang sudah ditetapkan melalui Perda Nomor 16 Tahun 2012. Sedangkan rencana rinci disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang, yang terdiri atas 6 (enam) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan dan 2 (dua) Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Kabupaten. Dokumen tata ruang yang telah disusun tahun 2013 – 2017 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.32
Perencanaan Penataan Ruang Tahun 2013-2017

KEGIATAN				
2013	2014	2015	2016	2017
1. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032 2. Sebanyak 6 (enam) raperda RDTR Kawasan Perkotaan (Persetujuan substansi dari Gubernur)	1. Penyempurnaan 6 (enam) raperda RDTR Kawasan Perkotaan (Persetujuan substansi dari Gubernur) 2. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR 3. Kajian Review Rencana Tata Ruang Wilayah 4. Penyusunan 2 (dua) raperda Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis 5. Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Kudus	1. Rapat Koordinasi Rencana Tata Ruang (Rapat BKPRD, Pokja Perencanaan TR dan Tim Peninjauan Kembali RTRW) 2. Pengajuan Permohonan Persetujuan Substansi ke BKPRD Provinsi dan Pembahasan 6 (enam) RDTR Kawasan Perkotaan Kudus 3. Tersusunnya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Menara dan RTBL Kawasan GOR	1. Tersusunnya Dokumen Rencana Tata Bangunan dan lingkungan (RTBL) kawasan jalan lingkara utara 2. Tersusunnya Software data pemanfaatan ruang berbasis GIS	1. Tersusunnya Dokumen Rencana Tata Bangunan dan lingkungan (RTBL) kawasan Komplek Perkantoran 2. Rapat Koordinasi Ranperda RTRW Kabupaten Kudus

Sumber : Bappelitbangda Tahun 2018

Pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang lebih diarahkan untuk monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang melalui mekanisme perizinan serta sosialisasi regulasi penataan ruang dan pelatihan pengendalian pemanfaatan ruang untuk aparat Pemerintah daerah. Permasalahan dalam pemanfaatan ruang salah satunya adanya alih fungsi lahan karena peningkatan pembangunan ekonomi pada sektor perdagangan, industri, dan perumahan. Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan

ruang lebih diarahkan untuk monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang melalui mekanisme perizinan serta sosialisasi regulasi penataan ruang dan pelatihan pengendalian pemanfaatan ruang untuk aparat Pemerintah daerah. Permasalahan dalam pemanfaatan ruang salah satunya adanya alih fungsi lahan karena peningkatan pembangunan ekonomi pada sektor perdagangan, industri, dan perumahan.

2.3.1. 4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah dilaksanakan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang layak huni dan sehat, pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran, pemberdayaan komunitas perumahan dan pemeliharaan areal pemakaman.

Tabel 2.33
Capaian Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	URAIAN	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Rumah Layak Huni (%)	NA	93,17	94,13	97,82	96,85
2	Rumah Tangga Bersanitasi (%)	93,17	96,13	94,13	95,05	96,88

Sumber :Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2018, Dinas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2018

Berdasarkan Tabel diatas, indikator keberhasilan yang telah dicapai antara lain terwujudnya fasilitas permukiman yang layak huni dengan persentase sebesar 97,82% pada tahun 2016, meningkat dibandingkan tahun 2015 sebesar 94,13%. Capaian persentase rumah tangga bersanitasi pada tahun 2016 sebesar 89,56%, juga meningkat dari tahun 2015 sebesar 88,58%.

2.3.1. 5 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Perkembangan cakupan petugas linmas menunjukkan kepedulian masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sebagaimana tertera pada tabel di atas. Jumlah cakupan petugas linmas rata-rata tiap tahun hampir sama, ada tambal sulam karena ada yang sudah meninggal. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa cakupan petugas kelompok per 100 anggota linmas 0,12 per luas wilayah kerja dalam hekto

are pada tahun 2017. Jumlah linmas pada tahun 2017 sebanyak 5.111 orang.

Tabel 2.34
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Anggota Linmas	5117	5111	5111	5111	5111	5111
Jumlah kelompok per 100 Anggota Linmas	51,17	51,11	51,11	51,11	51,11	51,11
Luas wilayah kerja (Ha)	42.516	42.516	42.516	42.516	42.516	42.516
Cakupan petugas linmas (%)	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Sumber: Satpol-PP Kab. Kudus 2018

Semua tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) dari tahun ke tahun dapat terselesaikan.

Tabel 2.35
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pelanggaran K3 yang terselesaikan	104	126	132	135	279	146
Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP	104	126	132	135	279	146
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber: Satpol-PP Kab. Kudus 2018

Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran yang selanjutnya disingkat PPK adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk wilayah manajemen kebakaran, selanjutnya disingkat WMK oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai wilayah yurisdik urusan pemerintahannya. WMK bertujuan untuk mendukung pengurangan resiko kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran antara lain: pemukiman di perkotaan dan perdesaan, perindustrian/pabrik, bangunan gedung, hutan dan lahan maupun kebakaran lainnya seperti pada kawasan tertentu pertambangan, depo bahan bakar minyak dan/atau bahan yang sangat mudah terbakar, pelabuhan, bandara dan lingkungan yang memiliki potensi kebakaran lainnya.

WMK adalah sebagai suatu public service dalam melayani proteksi kebakaran pada suatu lingkungan yang memiliki daya ancaman kebakaran dan rentan kebakaran daerah yang difasilitasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang secara teknis dilakukan oleh organisasi perangkat daerah/satuan Kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Pembentukan per 1 (satu) WMK ditentukan cakupan luas maksimal masing-masing kawasan. Pada pemukiman perkotaan dengan luas 100 km2 atau 10.000 ha, pemukiman perdesaan dengan luas 250 km2 atau 25.000 ha, pada lingkungan kawasan Industri dan/atau pabrik dengan luas 25 km2 atau 2.500 ha, pada kawasan hutan dengan luas 1000 km2 atau 100.000 ha dan lahan dengan luas 250 km2 atau 25.000 ha, dibentuklah masing-masing 1 (satu) WMK.

Tabel 2.36
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran	-	-	-	-	14.250	-
Luas wilayah kabupaten / kota (Ha)	42.516	42.516	42.516	42.516	42.516	42.516
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota (%)	-	-	-	-	33,52	-

Sumber: Satpol-PP Kab. Kudus 2018

Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK adalah pelayanan pemadam kebakaran pada saat tanggap darurat yang efektif, dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan resiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda.

Tabel 2.37
Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	-	-	-	-	30	-
Luas wilayah kabupaten / kota	42.516	42.516	42.516	42.516	42.516	42.516
Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	-	-	-	-	0,07	-

Sumber: Satpol-PP Kab. Kudus 2018

Dalam kurun waktu tahun 2013 – 2017 prosentase penegakan Perda cenderung fluktuatif.

Tabel 2.38
Persentase Penegakan PERDA

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah penyelesaian penegakan PERDA	66	70	75	97	79	48
Jumlah pelanggaran PERDA	66	70	75	97	79	48
Persentase Penegakan PERDA (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber: Satpol-PP Kab. Kudus 2018

2.4.1. 6 SOSIAL

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam perlindungan sosial dilaksanakan antara lain melalui program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, program pembinaan anak terlantar dan program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Pelaksanaan Urusan Sosial Kudus didominasi oleh belanja tidak langsung antara lain melalui pemberian fasilitasi bantuan sosial dan hibah berupa uang kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang sosial, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara

terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pemberian bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat bersifat tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Kinerja pelayanan sosial pada tahun 2013-2017, sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.39
Kinerja Pelayanan Sosial Tahun 2013 – 2017 Kabupaten Kudus

NO	Uraian	013	014	015	016	017
	Jumlah sarana sosial	8	8	8	8	8
	Jumlah PMKS	4.494	5.607	7.401	7.719	5.307
	Jumlah PMKS terlayani	.474	.629	.007	8.096	3.560
	Jumlah PSKS	97	28	30	30	36

Sumber : SIPD - Dinas Sosial, P3AP2 dan KB Tahun 2018

Kinerja pelayanan sosial pada tahun 2016 berdasarkan tabel di atas, menunjukkan jumlah sarana sosial ada sebanyak 18 unit, jumlah PMKS sebanyak 15.307 jiwa dengan yang terlayani sebesar 13.560 jiwa. Untuk PSKS sebanyak 736 jiwa.

2.4. 1. Fokus Layanan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

2.3.2. 1. TENAGA KERJA

Upaya pembangunan daerah melalui urusan ini, diarahkan bagi perluasan kesempatan kerja/berusaha khususnya bagi penganggur dan mengurus rumah tangga sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi dan daya saing dalam mencari ataupun menciptakan lapangan kerja mandiri. Namun demikian kendala yang dihadapi pemerintah yaitu peningkatan penyerapan tenaga kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan calon tenaga kerja sehingga menyebabkan meningkatnya angka Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di tahun 2017. Meningkatnya persentase angka TPAK disebabkan masih banyaknya penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih menempuh pendidikan / bersekolah.

Gambaran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.40
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (Persen)

No	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	73,06	71,92	71,04	71,35	71,75
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,07	5,03	5,04	4,91	3,56

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2017

Dari data tabel diatas menunjukkan bahwa untuk Kabupaten Kudus tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan tahun 2017 dibanding dengan tahun 2016 sebesar 1,35%. Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak punya pekerjaan.

2.3.2. 2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pada Tahun 2010 jumlah Organisasi Perempuan Kabupaten Kudus mencapai 40 organisasi. Apabila dilihat pada 5 organisasi massa perempuan terbesar di Kabupaten Kudus dengan jumlah anggota terbesar pada Tahun 2016 sebanyak 47.661 orang, sebagaimana tertera pada tabel berikut :

Tabel 2.41
Organisasi Perempuan dengan Jumlah Anggota Terbesar
Tahun 2017 Kabupaten Kudus

No	Nama Organisasi Perempuan	Jumlah Anggota (orang) 2016	Jumlah Anggota (orang) 2017
1.	Muslimat NU	15.000	15.000
2.	DPD II Pengajian Al Hidayah	3.200	3.200
3.	Dharma Wanita Persatuan	6.394	6.394
4.	Aisyiyah	3.427	3.427
5.	Bhayangkari	691	691
6.	PKK	7.712	7.712
	Jumlah	36.334	36.334

Sumber : SIPD - Dinas Sosial, P3AP2 dan KB Tahun 2018

Jumlah keanggotaan dalam organisasi perempuan di Kabupaten Kudus dari tahun 2016 ke tahun 2017 tetap, sebagai contoh anggota muslimat NU dengan anggota tetap 15.000 anggota. Dalam organisasi DPD II Pengajian Al Hidayah dari 2016-2017 tetap 3.200 anggota. Untuk organisasi Dharma Wanita Persatuan dan Aisyiah jumlah anggotanya tetap masing masing 6.394 anggota dan 36.334 anggota. Untuk organisasi Bhayangkari sebanyak 691 anggota di tahun 2017 dan PKK sebanyak 7.712 orang.

Tabel 2.42
Jumlah Keanggotaan Perempuan di DPRD Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah DPRD Perempuan	6	3	3	3	3
2.	Jumlah Anggota DPRD	45	45	45	45	44
3.	Rasio	13,33%	6,66%	6,66%	6,66%	6,82%

Sumber : Sekretariat DPRD Tahun 2018

Pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari partisipasi peran aktif perempuan di semua bidang kehidupan yang dapat diukur diantaranya dari jumlah keanggotaan perempuan di DPRD. Jumlah anggota DPRD yang berjenis kelamin perempuan pada tahun 2017 sebanyak 3 orang dari jumlah anggota DPRD (semua jenis kelamin) sebanyak 44 orang, sehingga rasio keterlibatan perempuan dalam DPRD adalah 6,82 %.

Tabel 2.43
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah KDRT	3	12	9	5	10
2.	Jumlah penyelesaian KDRT	3	12	9	5	10
3.	persentase penyelesaian KDRT	100	100	100	100	100
4.	Jumlah kekerasan terhadap anak	4	19	17	22	12
5.	Jumlah penyelesaian kekerasan terhadap anak	4	19	17	22	12
6.	persentase penyelesaian kekerasan terhadap anak	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial, P3AP2 dan KB Tahun 2018

Salah satu upaya yang dilaksanakan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak diantaranya melalui penyelesaian pengaduan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dari Tahun 2013 sampai Tahun 2017 semua pengaduan dapat diselesaikan seluruhnya. Untuk jumlah kasus KDRT mengalami penurunan dari tahun 2015 sebanyak 9 kasus menurun pada tahun 2016 ini menjadi hanya 5 kasus, dan naik di tahun 2017. Namun pada kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan kepada Dinsos, P3AP2KB Kabupaten Kudus mengalami kenaikan dari sebelumnya pada tahun 2015 sebanyak 17 kasus meningkat menjadi 22 kasus pada Tahun 2016 dan menurun menjadi 12 kasus. Dengan total 22 kasus tersebut berhasil mencapai persentase penyelesaian kasus sebesar 100 %.

2.3.2. 3. PANGAN

Jumlah rata-rata ketersediaan pangan utama (beras) di Kabupaten Kudus pada tahun 2016 adalah 162.115.000 kg, dengan capaian persentaseketersediaan pangan utama sebesar 197%. Ketersediaan pangan beras per kapita jumlah penduduk di Kabupaten Kudus sudah sangat cukup bahkan berlebih untuk per kapita jiwa. Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis pola konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Kudus diperoleh gambaran kualitas konsumsi masyarakat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.44
Pola Konsumsi dan Tingkat Kecukupan Gizi Penduduk Tahun 2013 – 2017

No	Kelompok Pangan	Angka Kecukupan Energi/Standar Nasional (Kkal/kap/hr) 2016	Angka Kecukupan Energi Kab. Kudus (Kkal/Kpt/hr)					Skor PPH maks (%)	Skor PPH Kabupaten Kudus (%)				
			2013	2014	2015	2016	2017		2013	2014	2015	2016	2017
1	Padi-padian	1.075,0	862,1	820,4	1.489,6	1.145,4	887,1	25,0	21,6	20,5	25,0	25,0	20,6
2	Umbi-umbian	129,0	37,5	99,4	23,2	54,5	31	2,5	0,9	2,5	0,5	1,3	0,7
3	Pangan Hewani	258,0	225,3	260,7	214,6	264,9	288	24,0	22,5	24,0	20,0	24,0	24
4	Minyak & Lemak	215,0	184,8	168,9	148,1	179,1	230	5,0	4,6	5,0	3,4	4,2	5
5	Buah/Biji berminyak	64,5	11,3	0,1	21,9	40,6	20,1	1,0	0,3	0,0	0,5	0,9	0,5
6	Kacang-kacangan	107,5	245,2	118,1	147,8	159,3	175,6	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10
7	Gula	107,5	34,8	90,4	52,9	91,7	70,4	2,5	0,9	2,3	1,2	2,1	1,6
8	Sayur dan buah	129,0	110,7	103,7	127,8	104,6	133,4	30,0	27,7	25,9	29,7	24,3	30
9	Lain-lain	64,5	0,6	0,8	6,0	88,9	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
	TOTAL	2.150,0	1.712,2	1.692,6	2.231,8	2.074	1.844,9	100	88,5	90,2	90,4	91,8	92,5

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2018

Dari Tabel di atas, didapat bahwa pada tahun 2016 Standar Nasional Angka Kecukupan Energy (AKE) yaitu 2.150,0 Kkal/kapita/hari. Jika dibandingkan dari AKE masyarakat Kabupaten Kudus tahun 2016 adalah 2.074 Kkal/kapita/hari sedangkan tahun 2017 sebesar 1.844,9 dengan skor PPH 92,5%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Angka Kecukupan Gizi (AKG) dari sisi energi, konsumsi energi masyarakat di Kabupaten Kudus masih dibawah standar nasional. Namun jika dilihat dari kualitas konsumsi, yaitu dari skor Pola Pangan Harapan (PPH), maka skor PPH Kabupaten Kudus dari tahun 2013 s/d tahun 2017 mencapai 92,5% yang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan skor PPH pada tahun sebelumnya. Peningkatan skor PPH tahun 2017 tersebut terdongkrak karena meningkatnya konsumsi sayur dan buah dan minyak dan lemak.

Angka Kecukupan Energi 2.150 Kkal/kapita/hari merupakan angka standar kebutuhan energi nasional bagi setiap individu agar mampu menjalankan aktifitas sehari – harinya. Adapun Angka Kecukupan Energi di Kabupaten Kudus sebesar 2.074 Kkal/kapita/hari. Pola konsumsi masyarakat belum menerapkan diversifikasi makanan dalam mengkonsumsi bahan pangan. Kontribusi konsumsi terbesar masih didominasi oleh kelompok padi – padian terutama beras, dibandingkan kelompok pangan yang lain.

Kebijakan penanganan keamanan pangan diarahkan untuk menjamin tersedianya pangan segar yang aman untuk dikonsumsi agar masyarakat terhindar dari bahaya, baik karena cemaran kimia maupun mikroba yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi dan mendukung terjaminnya pertumbuhan / perkembangan kesehatan dan kecerdasan manusia.

2.3.2. 4. PERTANAHAN

Pelayanan urusan pertanahan dilaksanakan dalam rangka pengadaan tanah untuk waduk Logung, sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Kudus dan Penyusunan data bidang tanah bersertifikat di Kabupaten Kudus. Pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Logung pada tahun 2017 difokuskan pada proses pengadaan tanah untuk pengganti tanah perhutani yang terkena pembangunan waduk Logung. Namun dikarenakan izin prinsip dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih dalam proses sehingga proses pengadaan tanah untuk pengganti tanah perhutani belum bisa dilaksanakan. Adapun sampai dengan tahun 2014 ganti rugi pembayaran tanah untuk pembangunan Waduk Logung sebanyak 699 bidang dengan luas 1.132.898 m², anggaran yang terserap sebesar Rp. 38.374.537.000,- (termasuk konsinyasi). Tanah Perhutani yang terkena Waduk Logung dan akan diganti rugi ada sejumlah 8 petak/8 bidang tanah dengan luas ± 35 ha (hasil pengukuran dari Perhutani tahun 2011) terletak di Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo dan Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Persertifikatan tanah masyarakat di desa yang terkena jalan lingkar Mijen sejumlah 152 bidang. Persertifikatan tanah masyarakat yang terkena jalan lingkar Klumpit sejumlah 7 bidang.

Tabel 2.45
Luas Tanah Bersertifikat Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Luas Wilayah Daratan	42.515,64	42.515,64	42.515,64	42.515,64	42.515,64
2.	Luas Tanah Bersertifikat HGB	679,3406	691,3400	709,8998	724,9400	719,0562
3.	Luas Tanah Bersertifikat HP	1.190,9459	1.198,031	1.206,2344	1.209,8802	1.263,4552
4.	Luas Tanah Bersertifikat HGU	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Luas Tanah Bersertifikat HM	23.332,810	23.592,610	23.916,8399	24.408,760	25.681,3659
6.	Luas Tanah Bersertifikat HPL	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7.	Luas Tanah Bersertifikat HW	12,4363	16,7440	19,6416	22,6270	27,7052
	Total	25.215,533	25.498,731	25.852,6157	26.360,2072	27.691,5825

Sumber : SIPD – Badan Pertanahan Nasional Tahun 2018

Dari tabel diatas, Luas Tanah Bersertifikat Tahun 2013 – 2017 cenderung meningkat dari tahun 2013 yang hanya seluas 25.215,533 ha, menjadi 27.691,5825 ha di tahun 2017.

2.3.2. 5. LINGKUNGAN HIDUP

Urusan Lingkungan Hidup diupayakan untuk pengelolaan persampahan di perkotaan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam, peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Data upaya pelayanan sarana dan prasarana urusan lingkungan hidup dari tahun 2013 - 2017 tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.46
Kinerja Indikator Lingkungan HidupTahun 2013-2017

No	Jenis Informasi	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase penanganan sampah	84,60	84	87,6	87	87,79
2	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,270	0,308	0,614	0,685	0,681
3	Proporsi RTH Publik	5%	5,2%	8,12%	8,1%	9%

Sumber : SIPD - Dinas PKPLH Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pelayanan dari aspek lingkungan hidup dapat dilihat dari pemeliharaan hutan kota pelayanan persampahan perkotaan dan sarana prasarana persampahan yang dimiliki oleh Kabupaten Kudus.

Kinerja urusan lingkungan hidup dapat dilihat dari indikator presentase penanganan sampah, dan tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk dalam Tabel berikut.

Tabel 2.47
Persentase Penanganan Sampah Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Volume sampah yang ditangani (m3/hari)	521,1	510,5	515,4	509	525,96
2.	Volume produksi sampah (m3/hari)	615,6	585,6	588	599,1	599,08
3.	Persentase	84,65	87,18	87,65	85	87,79

Sumber : SIPD - Dinas PKPLH Tahun 2018

Penanganan sampah dalam kurun waktu 5 tahun (2013-2017) mengalami kecenderungan naik dari tahun 2013 sebesar 84,65 % menjadi 87,79 % pada tahun 2017. Untuk tahun 2017 penanganan sampah yang terangkut ke TPA relatif naik dari 521,1 di tahun 2013 menjadi 525,96 di tahun 2017.

Tabel 2.48
Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah TPS	37	48	57	59	59
2	Jumlah daya tampung TPS (m3)	213	215	510,8	568,9	568,89
3	Jumlah daya tampung TPS (ton)	54	128	139	142	149,8
4	Jumlah Penduduk	797.003	821.136	831.343	830.221	835.318
5	Rasio Daya Tampung TPS (m3) Terhadap Jumlah Penduduk	0,267	0,262	0,614	0,685	0,681
6	Rasio Daya Tampung TPS (ton) Terhadap Jumlah Penduduk	0,07	0,16	0,17	0,17	0,18

Sumber : Dinas PKPLH Tahun 2018

2.3.2. 6. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kinerja pelayanan urusan kependudukan dan catatan sipil ditunjukkan dalam rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk, rasio bayi berakte kelahiran, ketersediaan database kependudukan skala

kabupaten, penerapan KTP nasional berbasis NIK, cakupan penerbitan akta kelahiran.

Tabel 2.49
Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk
di Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk	89,32 %	87,61 %	88,43 %	92,40 %	97,42 %
2.	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP	542.372	542.582	557.155	592.362	602.773
3.	Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah	607.372	619.315	630.064	641.073	618.723

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk mengalami kecenderungan meningkat dari tahun 2013 sebesar 89,32% menjadi sebesar 97,42% pada tahun 2017. Pelayanan untuk meningkatkan kepemilikan KTP di Kabupaten Kudus dilakukan melalui berbagai cara yaitu sosialisasi adminduk kepada masyarakat baik secara langsung di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, maupun melalui media cetak dan elektronik, media sosial; pelayanan rekam dan cetak KTP baik di dinas maupun kecamatan; pelayanan jemput bola ke desa, masyarakat berkebutuhan khusus, jompo, lansia dan program perekaman KTP usia pemula bagi SMA/SMK.

Tabel 2.50
Kinerja Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran untuk Bayi Usia 0-5 Tahun
Di Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio Bayi Berakta Kelahiran	83,00%	75,00%	96,02%	97,32%	98,79%
2.	Jumlah bayi berakta kelahiran				76.481	70.431
3.	Jumlah bayi				78.562	71.293

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018

Rasio bayi berakta kelahiran pada tahun 2017 mencapai 98,79% meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kepemilikan akta kelahiran bagi bayi (usia 0-5 tahun) dilakukan melalui berbagai upaya inovasi seperti pelayanan reguler penerbitan akta kelahiran di Dinas; pelayanan keliling jemput bola di desa, kecamatan, pasar, bekerja sama dengan pihak sekolah; pelayanan online berbasis android, pelayanan melalui WhatsApp Group Kades/Lurah, pelayanan Si Bolang Mahir dengan rumah sakit dan puskesmas (Si Buah Hati Lahir, Pulang Membawa Akta Kelahiran dan KK); membuka program Rumah Paman Capil (Rumah Pelayanan dokumen Dukcapil) di desa/kelurahan dengan bekerjasama dengan PKK Desa, karang taruna desa, dan bidan desa.

Tabel 2.51
Kinerja Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten
Di Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018

Database kependudukan skala kabupaten yang dimiliki oleh Kabupaten Kudus merupakan bagian dari subsistem database kependudukan nasional. Dari database kependudukan, dapat digunakan untuk berbagai keperluan pemerintah (perencanaan, penganggaran, pelayanan publik, dll) setelah dilakukan pengolahan. Proses pengolahan/konsolidasi database kependudukan dari daerah kabupaten/kota dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Berdasarkan database kependudukan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus telah menyusun berbagai macam buku kependudukan yang bersumber dari database skala kabupaten ataupun Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang bersumber dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.

Tabel 2.52
Kinerja Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten
Di Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, maka setiap penduduk diwajibkan untuk memiliki identitas resmi tunggal yang berlaku secara nasional yaitu berbasis NIK.

Tabel 2.53
Kinerja Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
Di Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk	89,32 %	87,61 %	88,43 %	92,40 %	97,42 %
2.	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP	542.372	542.582	557.155	592.362	602.773
3.	Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah	607.372	619.315	630.064	641.073	618.723

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018

Tabel 2.54
Kinerja Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran
Di Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Cakupan penerbitan akta kelahiran				63,38%	49,04%
2.	Jumlah penerbitan akta kelahiran				525.847	50.104
3.	Jumlah penduduk				830.221	835.318

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018

2.3.2. 7. **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

Pemberdayaan masyarakat dan desa adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial dan budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintah desa dan kelurahan, lembaga pemberdayaan masyarakat dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dan desa dilakukan dengan melibatkan kader pemberdayaan masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa. Perkembangan jumlah lembaga dan kader pemberdayaan masyarakat sebagaimana pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.55
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2013–2017
Kabupaten Kudus

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran Pemerintahan Desa yang baik	100%	100%	100%	100%	100%
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	786	791	795	795	907
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	14.404	14.404	12.867	12.867	10.933

Sumber : Dinsos P3A, P2KB Tahun 2018, Dinas PMD Tahun 2018

Sesuai data tabel di atas, untuk Jumlah posyandu aktif pada tahun 2017 mengalami peningkatan, namun jumlah PKK Aktif mengalami

penurunan. Sementara untuk jumlah pasar desa cenderung stagnan/tetap, tidak ada perubahan jumlah.

Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 Kecamatan yang terdiri dari 123 Desa dan 9 Kelurahan. Pembagian wilayah Kecamatan menurut jumlah Desa/Kelurahan, jumlah RW, dan jumlah RT sebagaimana tersebut tabel di atas. Untuk jumlah Desa/Kelurahan dari Tahun 2013 sampai Tahun 2017 tidak mengalami perubahan.

Tabel 2.56
Jumlah Kecamatan menurut Desa/Kelurahan, RW dan RT Tahun 2013-2017

No	Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan					Jumlah RW					Jumlah RT				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kaliwungu	15	15	15	15	15	67	67	67	67	67	442	442	442	442	442
2	Kota	25	25	25	25	25	111	110	110	110	110	496	495	497	497	497
3	Jati	14	14	14	14	14	79	79	79	79	79	381	381	386	386	386
4	Undaan	16	16	16	16	16	63	63	63	63	63	357	357	357	357	357
5	Mejobo	11	11	11	11	11	69	69	69	69	69	341	341	341	341	341
6	Jekulo	12	12	12	12	12	85	85	85	85	85	443	443	445	445	445
7	Bae	10	10	10	10	10	51	51	51	51	51	285	285	285	285	285
8	Gebog	11	11	11	11	11	82	82	82	82	82	435	435	435	435	435
9	Dawe	18	18	18	18	18	109	109	110	110	110	581	581	583	583	583
Jumlah		132	132	132	132	132	716	715	716	716	716	3761	3760	3771	3771	3771

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2018

Tabel 2.57
Jumlah Alokasi Dana Desa, Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah, Jumlah Bagi Hasil Retribusi Daerah, dan Jumlah Bagi Hasil Pasar Desa Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah ADD	19.042.300.000	25.208.705.000	97.777.812.800	103.652.039.000	106.017.994.000
2	Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah	3.668.775.000	5.387.787.000	6.742.954.100	7.011.828.000	9.246.862.000
3	Jumlah Bagi Hasil Retribusi Daerah	311.231.000	345.636.000	2.440.228.200	2.455.607.000	2.019.726.000
4	Jumlah Bagi Hasil Pasar Desa	438.190.000	547.303.000	-	-	-
Jumlah Total		23.460.496.000	31.489.431.000	106.960.995.100	113.119.474.000	117.284.582.000

Sumber : BPPKAD Tahun 2018

Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 cenderung meningkat dari Rp 19.042.300.000 menjadi Rp 106.017.994.000. Demikian pula jumlah Bagi Hasil dari Pemerintah Kabupaten yang diberikan kepada Desa, baik berupa Bagi Hasil Pajak

Daerah maupun Bagi Hasil Retribusi Daerah, cenderung meningkat tiap tahunnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas. Untuk Bagi Hasil Pasar Desa, mulai Tahun 2015 menjadi bagian dari Bagi Hasil Retribusi Daerah.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa antara lain mengatur pengalokasian dana Desa yang bersumber dari APBD memberikan implikasi terhadap perubahan struktur APBD Kabupaten Kudus. Hal ini dapat terlihat pada Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Hal tersebut disebabkan adanya kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD setelah dikurangi DAK. Selain itu pengalokasian bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah juga akan memberikan kenaikan yang cukup besar pada Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa. Pada akhirnya terdapat belanja lain akan berkurang sebagai dampak hal tersebut.

Adapun tujuan dari ADD antara lain :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kudus periode tahun 2013-2017 dapat dilihat di Tabel berikut.

Tabel 2.58
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 – 2017

No	Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kaliwungu	15	0	0	1	1
2	Kota Kudus	14	0	0	2	0
3	Jati	13	0	0	1	0
4	Undaan	16	0	0	0	0
5	Mejobo	8	0	0	3	1
6	Jekulo	12	0	0	0	0
7	Bae	10	0	0	0	0
8	Gebog	10	0	0	0	1
9	Dawe	18	0	0	0	1
Jumlah		116	0	0	7	4

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2018

Pada tahun 2013 Kabupaten Kudus telah melaksanakan pemilihan Kepala Desa di 116 Desa secara serentak. Hal ini merupakan terobosan, karena amanat pelaksanaan pilkades serentak baru ditetapkan pada tahun 2014 dengan terbitnya UU No. 6 Tahun 2014. Pelaksanaan pilkades Tahun 2013 mengalami penundaan beberapa bulan, sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Tengah yang hampir berbarengan/bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa. Hal ini sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Juli 2012 perihal Penyelenggaraan Pilkades di Daerah dan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Oktober 2012 perihal Penjelasan Pejabat Kepala Desa. Pelaksanaan hari pemungutan dan penghitungan suara pilkades di Kabupaten Kudus Tahun 2013 dilaksanakan pada tanggal 24 Nopember 2013. Pada tahun 2014 di Kabupaten Kudus direncanakan dilaksanakan Pilkades di 5 Desa yakni Desa Langgardalem dan Desa Kaliputu Kecamatan Kota Kudus, Desa Hadiwarno dan Desa Mejobo Kecamatan Mejobo, serta Desa Loram Kulon Kecamatan Jati. Namun sehubungan dengan adanya surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kementerian Dalam Negeri Nomor 140/7635/PMD tanggal 8 November 2013 perihal Pemilihan Kepala Desa Tahun 2014, bahwa dengan adanya Pemilu Anggota Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maka pilkades Tahun 2014 ditiadakan dan direncanakan dilaksanakan pada Tahun 2015. Namun demikian, sehubungan dengan penetapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka guna menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan pilkades, perlu dilaksanakan perubahan/pergantian Perda beserta Perbup Kudus yang mengatur tentang pilkades. Penetapan Perda

mengenai Pilkades dilaksanakan bulan Juli 2015, sedangkan Perbup mengenai Desa ditetapkan pada akhir Tahun 2015, maka pilkades yang direncanakan pada tahun 2015 tidak dapat dilaksanakan, dan baru dapat dilaksanakan pada awal tahun 2016.

Pada tahun 2016 juga dilaksanakan pilkades antar waktu melalui musyawarah desa pada 2 Desa di Kabupaten Kudus, yaitu Desa Golantepus Kecamatan Mejobo dan Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu. Pilkades antar waktu ini dilaksanakan karena terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, setelah Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan karena meninggal dunia. Pelaksanaan pilkades antarwaktu melalui musyawarah desa ini mendasarkan pada ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya. Pada tahun 2014 dari 116 Kepala Desa baru hasil Pemilihan Kepala Desa pada tahun 2013 telah tersusun dokumen perencanaan RPJMDesa periode Tahun 2013-2019. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tahun 2016 terlihat ada sebanyak 7 kali pilkades yang dilaksanakan di Kecamatan Kaliwungu sebanyak 1 kali pilkades. Sedangkan untuk Kecamatan Kota Kudus sebanyak 2 kali pilkades. Kecamatan Jati sebanyak 1 kali pilkades, Kecamatan Mejobo sebanyak 3 kali pilkades. Pilkades tahun 2017 dilaksanakan di Desa Getassrabi Kecamatan Kaliwungu dan Desa Golantepus Kecamatan Mejobo. Pilkades yang dilaksanakan melalui Musdes (Musyawarah Desa) terdapat di Desa Puyoh Kecamatan Dawe dan Desa Padurenan Kecamatan Gebog.

Hasil Pemilihan Kepala Desa mengandung konsekwensi dan kewajiban bagi Kepala Desa baru untuk segera membuat dokumen perencanaan pembangunan desa selama masa jabatannya sebagai Kepala Desa dengan menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dalam kurun waktu 6 tahun dan membuat rencana pembangunan tahunan sebagai penjabaran pelaksanaan RPJMDesa, dengan menyusun dokumen Rencana KerjaPembangunan Desa (RKPDesa) dengan mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. RPJMDesa maupun RKPDesa perlu disusun dengan cermat dan baik oleh Pemerintah Desa beserta seluruh komponen masyarakat desa dengan fasilitasi Pemerintah Kecamatan, sehingga diharapkan dokumen yang disusun benar-benar dapat menjamin terciptanya pemerintahan yang baik, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan lancar, tertib dan sesuai aturan.

Dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, maka pemerintah daerah selalu mengadakan evaluasi terhadap

pelaksanaan suatu kebijakan, meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur, meningkatkan serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, yang dukung kondisi yang aman, tentram, tertib dan kondusif.

2.3.2. 8. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai peran penting untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, melalui kegiatan antara lain: penyiapan dukungan kelembagaan yang efektif, optimalisasi pendayagunaan tenaga program Keluarga Berencana, penyediaan sarana prasarana, serta manajemen dan pembiayaan. Rasio akseptor KB dari Tahun 2013 sampai Tahun 2017 relatif dinamis. Setelah sempat mengalami penurunan pada tahun 2015, namun pada tahun 2017 ini mengalami peningkatan hingga menyentuh angka 82,31% dibanding dengan tahun 2016 sebesar 80,69%. Hal ini tidak terlepas dari upaya meningkatkan kembali program pelayanan Keluarga Berencana dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Keluarga Berencana bagi para calon akseptor.

Tabel 2.59
Rasio Akseptor KB Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah akseptor KB	112.927	117.277	115.872	121.772	124.583
2.	Jumlah Pasangan Usia Subur	142.575	145.207	148.979	150.917	151.351
3.	Rasio akseptor KB	79,21	80,77	77,78	80,69	82,31
4.	Jumlah PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun	2.308	3.113	3.113	3.113	3.113
5.	Cakupan PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun	1,62	2,14	2,14	2,14	2,14

Sumber : Dinsos P3A, P2KB Tahun 2017

Dari tabel di atas diketahui bahwa rasio akseptor Keluarga Berencana (KB) tahun 2013-2014 mengalami kenaikan, dari 79,21 % naik menjadi 80,77% di tahun 2014. Pada tahun 2015 ini mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 77,78%, pada Tahun 2016 kembali mengalami kenaikan menjadi hanya 80,69%, sedangkan pada tahun 2017 ini mengalami peningkatan menjadi 82,31%. Hal yang menjadi penyebab naik turunnya jumlah akseptor KB dan Pasangan Usia Subur (PUS) yaitu keluarga PUS belum terlayani KB atau unmeet need, dimana perempuan yang telah menikah dalam usia subur tidak menginginkan kehadiran anak atau menunda kehadiran anak namun tidak menggunakan alat kontrasepsi.

Sedangkan cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun cukup dinamis dimana pada Tahun 2013 sebesar 1,62% dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2014 ini menjadi 2,14 %. Angka pada Tahun 2015 masih tetap mengacu pada hasil Pendataan Keluarga 2014 yakni 2,14%. Sedangkan pada tahun 2016 ini cakupan PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun turun drastis menjadi 0,46%. Angka tersebut didapatkan dari hasil Pendataan Keluarga 2015 yang diselenggarakan secara terpusat dan melalui sistem online oleh BKKBN. Pada tahun 2016 tidak dilaksanakan pemutakhiran data keluarga oleh BKKBN, sehingga data hasil Pendataan Keluarga 2015 masih menjadi acuan pada tahun 2017 ini.

Tabel 2.60
Metode Kontrasepsi KB Tahun 2013 – 2017 Kabupaten Kudus

No	Metode KB	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Suntik	14.886	14.654	11.514	12.687	74.451
2.	Pil	5.271	5.081	3.467	3.236	21.282
3.	Kondom	1.067	1.140	765	697	3.400
4.	AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim)	1.250	736	553	728	9.079
5.	Implan/Susuk	2.087	978	951	1.144	12.100
6.	MOW (Medis Operasi Wanita)	511	388	344	458	3.365
7.	MOP (Medis Operasi Pria)	6	8	6	2	906

Sumber : Dinsos P3A, P2KB Tahun 2018

Pada Tabel di atas terlihat metode kontrasepsi yang banyak digunakan oleh peserta KB Baru adalah Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Non MKJP), yaitu metode suntik dan pil, sedangkan untuk metode MKJP yang banyak dipakai adalah Alat Implan/Susuk dan AKDR/Spiral.

Adapun perkembangan keluarga pra sejahtera ke keluarga sejahtera I dari Tahun 2013 – 2017 cenderung dinamis, hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.61
Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah keluarga prasejahtera	23.757	23.231	23.231	29.847	29.847
2.	Jumlah keluarga sejahtera I	39.586	40.904	40.904	133.993	133.993
3.	Jumlah KK	217.721	229.168	229.168	220.041	220.041
4.	persentasekeluarga prasejahtera	10,91	10,13	10,13	13,56	13,56
5.	persentasekeluarga sejahtera I	18,18	17,84	17,84	60,89	60,89

Sumber : Dinas Sosial P3AP2KB Tahun 2018

Jumlah keluarga prasejahtera semakin meningkat tiap tahunnya. Dari tahun 2013 sebesar 23.757 keluarga menjadi 29.847 keluarga di tahun 2017. Sedangkan keluarga sejahtera I naik dari 39.586 di tahun 2013 menjadi 133.993 di tahun 2017.

Lonjakan drastis persentase keluarga sejahtera I ini dipicu oleh perbedaan definisi output tahapan keluarga sejahtera hasil Pendataan Keluarga tahun 2015 yang diselenggarakan secara terpusat oleh BKKBN. Dalam Pendataan Keluarga 2015 output tahapan keluarga sejahtera hanya terbagi menjadi tiga (3) tahapan yaitu Keluarga Prasejahtera, Keluarga Sejahtera I, dan Keluarga Sejahtera II. Berbeda dengan Pendataan Keluarga tahun-tahun sebelumnya dimana tahapan keluarga sejahtera terbagi menjadi lima (5) tahapan. Pada Pendataan Keluarga tahun 2015 definisi Keluarga Prasejahtera mewakili gambaran keluarga secara ekonomi menengah ke bawah, Keluarga Sejahtera I mewakili keluarga menengah dan Keluarga Sejahtera II mewakili keluarga dengan ekonomi menengah keatas.

2.3.2. 9. PERHUBUNGAN

Pelayanan urusan perhubungan dapat dilihat dari keberadaan terminal dan jumlah kendaraan yang transit sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.62
Tipe Terminal dan Jumlah Kendaraan yang Transit
Tahun 2013-2017 Kabupaten Kudus

No	Nama Terminal	Tipe	Jumlah Kendaraan Transit (buah)				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Terminal Jati Kudus	A	94.960	72.641	71.802	49.237	47.268
2	Terminal Jetak	C	37.542	59.125	48.609	35.323	33.910
3	Terminal Kalirejo	C	8.820	11.411	9.490	11.760	10.950
4	Terminal Getas	C	15.224	27.683	34.366	29.660	28.474
5	Terminal Singocandi	C	-	-	-	-	-
6	Terminal Padurenan	C	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah kendaraan yang transit di berbagai terminal mengalami penurunan, padahal kualitas sarana terminal telah ditingkatkan dengan berbagai pembangunan. Hal ini disebabkan adanya pergeseran pemanfaatan kendaraan umum ke kendaraan pribadi baik roda empat maupun roda dua. Penggunaan

kendaraan pribadi juga mengakibatkan menurunnya rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dari tahun 2013 sebesar 1,86 menjadi sebesar 1,47 pada tahun 2017, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.63
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2013 – 2017

No	Nama Terminal	Jumlah Kendaraan Transit (buah)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Panjang Jalan (m)	621.1800	621.1800	621.180	639.261,7	639.261,7
2	Jumlah Kendaraan (unit)	333.873	376.641	348.326	404.520	433.953
3	Rasio Panjang Jalan per Jumlah	1,86	1,65	1,78	1,58	1,47

Sumber: Dinas PUPR, UPPD, Dinas Perhubungan Tahun 2018

Pertumbuhan dan penggunaan kendaraan pribadi yang tinggi berdampak pada meningkatnya volume lalu lintas, sedangkan kapasitas jalan pada ruas jalan utama kabupaten tidak mengalami peningkatan sehingga mengakibatkan terjadinya kepadatan lalu lintas. Pada jam-jam sibuk pagi hari, siang hari dan sore hari tingginya volume lalu lintas dengan adanya aktivitas pendidikan, aktivitas industri, aktivitas perdagangan dan jasa dan hambatan samping berupa kendaraan yang parkir di badan jalan menyebabkan timbulnya kemacetan lalu lintas yang ditandai dengan rasio volume lalu lintas dengan kapasitas jalan (*V/C ratio*) pada ruas jalan utama mendekati atau bahkan lebih dari 0,75 dimana berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) berarti bahwa arus lalu lintas tidak stabil dan hampir seluruh pengemudi akan dibatasi atau terganggu. Berikut data *V/C ratio* ruas jalan utama pada jam sibuk pagi, siang dan sore hari.

Tabel 2.64
Ratio Ruas Jalan Utama Kabupaten Kudus Tahun 2013-2017

No	Nama Jalan	Segmen	Jam Sibuk	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jl. Jend Sudirman 1	Dari S. Polres - S.7	pagi	0,294	0,3	0,309	0,637	0,675
			siang	0,276	0,282	0,29	0,598	0,634
			sore	0,285	0,291	0,3	0,617	0,654
2	Jl. Jend Sudirman 2	Dari S.Polres - S.Pentol	pagi	0,343	0,35	0,361	0,712	0,754
			siang	0,322	0,329	0,339	0,669	0,709
			sore	0,333	0,34	0,35	0,69	0,732
3	Jl. Jend Sudirman 3	Dari S.Pentol - S.Prima	pagi	0,718	0,74	0,743	0,749	0,757
			siang	0,675	0,696	0,698	0,704	0,712
			sore	0,696	0,718	0,721	0,726	0,734
4	Jl. Jend Sudirman 4	Dari S.Prima - S. Ngembal	pagi	0,698	0,72	0,723	0,729	0,737

No	Nama Jalan	Segmen	Jam Sibuk	2013	2014	2015	2016	2017
			siang	0,656	0,677	0,68	0,685	0,692
			sore	0,677	0,698	0,701	0,707	0,715
5	Jl. R Agil Kusumadya 1	Dari S.Kencing - S.Sempalan	pagi	0,669	0,69	0,693	0,698	0,706
			siang	0,629	0,649	0,651	0,656	0,664
			sore	0,649	0,669	0,672	0,677	0,685
6	Jl. R Agil Kusumadya 2	Dari S. Sempalan - S.DPRD	pagi	0,708	0,73	0,733	0,739	0,747
			siang	0,666	0,686	0,689	0,694	0,702
			sore	0,687	0,708	0,711	0,717	0,725
7	Jl. Jend A Yani 1	Dari S.7 - S.BNI	pagi	0,292	0,301	0,302	0,305	0,308
			siang	0,275	0,283	0,284	0,287	0,29
			sore	0,283	0,292	0,293	0,296	0,299
8	Jl. Jend A Yani 2	Dari S.BNI - S.Klenteng	pagi	0,32	0,33	0,331	0,334	0,338
			siang	0,301	0,31	0,311	0,314	0,317
			sore	0,31	0,32	0,321	0,324	0,328
9	Jl. Sunan Kudus 1	Dari S.Baagil - S.7	pagi	0,543	0,56	0,562	0,567	0,573
			siang	0,511	0,526	0,529	0,533	0,539
			sore	0,527	0,543	0,545	0,55	0,556
10	Jl. Sunan Kudus 2	Dari S.Menara - S.Baagil	pagi	0,572	0,59	0,592	0,597	0,604
			siang	0,538	0,555	0,557	0,561	0,567
			sore	0,555	0,572	0,575	0,579	0,586
11	Jl. Sunan Kudus 3	Dari S.Jember - S.Menara	pagi	0,592	0,61	0,612	0,617	0,624
			siang	0,556	0,573	0,576	0,58	0,587
			sore	0,574	0,592	0,594	0,599	0,605
12	Jl. Mayor Basuno	Dari S.Matahari - S.Ploso	pagi	0,669	0,69	0,693	0,698	0,706
			siang	0,629	0,649	0,651	0,656	0,664
			sore	0,649	0,669	0,672	0,677	0,685
13	Jl. Hos Cokroaminoto	Jl. Hos Cokroaminoto	pagi	0,728	0,75	0,753	0,759	0,767
			siang	0,684	0,705	0,708	0,713	0,721
			sore	0,706	0,728	0,73	0,736	0,744
14	Jl. Pemuda	Jl. Pemuda	pagi	0,656	0,676	0,679	0,684	0,692
			siang	0,616	0,635	0,638	0,643	0,65
			sore	0,636	0,656	0,658	0,664	0,671
15	Jl. Pramuka	Jl. Pramuka	pagi	0,667	0,688	0,691	0,696	0,704
			siang	0,627	0,646	0,649	0,654	0,661
			sore	0,647	0,667	0,67	0,675	0,683
16	Jl. Sunan Muria	Jl. Sunan Muria	pagi	0,77	0,794	0,797	0,804	0,812
			siang	0,724	0,746	0,749	0,755	0,764
			sore	0,747	0,77	0,773	0,779	0,788
17	Jl. KH R. Asnawi	Jl. KH R. Asnawi	pagi	0,674	0,695	0,698	0,703	0,711
			siang	0,634	0,653	0,656	0,661	0,668
			sore	0,654	0,674	0,677	0,682	0,69
18	Jl. Veteran	Jl. Veteran	pagi	0,469	0,484	0,486	0,49	0,495
			siang	0,441	0,455	0,457	0,46	0,465

No	Nama Jalan	Segmen	Jam Sibuk	2013	2014	2015	2016	2017
			sore	0,455	0,469	0,471	0,475	0,48
19	Jl. KH Turaikhan	Jl. KH Turaikhan	pagi	0,558	0,575	0,577	0,582	0,588
			siang	0,524	0,541	0,543	0,547	0,553
			sore	0,541	0,558	0,56	0,564	0,571
20	Jl. Sosrokartono	Jl. Sosrokartono	pagi	0,694	0,715	0,718	0,724	0,732
			siang	0,652	0,672	0,675	0,68	0,688
			sore	0,673	0,694	0,696	0,702	0,71
21	Jl. Johar	Jl. Johar	pagi	0,689	0,71	0,713	0,719	0,726
			siang	0,647	0,667	0,67	0,675	0,683
			sore	0,668	0,689	0,691	0,697	0,705
22	Jl. Tanjung	Jl. Tanjung	pagi	0,718	0,74	0,743	0,749	0,757
			siang	0,675	0,696	0,698	0,704	0,712
			sore	0,696	0,718	0,721	0,726	0,734

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2018

Terkait dengan hal tersebut, diperlukan pengendalian lalu lintas dalam bentuk pengamanan dan pengaturan lalu lintas pada jam sibuk dan penyediaan perlengkapan lalu lintas guna ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu lintas di jalan raya. Hal tersebut dapat terlihat dari persentase fasilitas perlengkapan jalan yang meningkat dari tahun 2013 sebesar 57,14% menjadi sebesar 99% pada tahun 2017.

Berikut adalah jumlah prasarana keselamatan perhubungan tahun 2013-2017.

Tabel 2.65
Sarana dan Prasarana Perhubungan Tahun 2013-2017 Kabupaten Kudus

No	Sarana Prasarana	Satuan	Jumlah (buah)				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Alat Uji Kendaraan	Unit	9	9	9	9	9
2	Traffic Light	Simpang	25	25	25	28	31
3	Warning Light	Unit	0	24	43	114	117
4	Rambu-rambu lalu lintas	Buah	2.163	2.338	3.360	4.193	4.195
5	Marka	M2	7.342	39.726	73.442	86.950	92.316
6	Guardrail	M'	570	1.598	3.102	4.762	4.762
7	Persentase fasilitas perlengkapan jalan	%	57,14	57,18	72,85	97,21	99

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2018

Dalam upaya mendukung pelayanan prima kepada pengguna jasa perhubungan serta kebijakan preventif dan represif guna mewujudkan ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan lalu lintas, maka penyediaan sarana dan prasarana menjadi prioritas untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif, efisien, ramah lingkungan, dan dapat

menjangkau ke seluruh wilayah serta menghubungkan antar dan inter moda angkutan.

2.3.2. 10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kinerja urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dalam indicator Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok inoformasi masyarakat di tingkat kecamatan, cakupan layanan telekomunikasi, presentase penduduk yang menggunakan HP/ Telkephone, Proporsi rumah tangga dengan akses internet dan proporsi rumah tangga yang memiliki Komputer pribadi.

Tabel 2.66
Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Di Tingkat Kecamatan

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Ket
1	Jumlah KIM	-	-	-	-	27	
2	Jumlah Kecamatan yang ada dalam Kabupaten/kota	9	9	9	9	9	
3	Cakupan pengembangan dan pengembangan KIM	-	-	-	-	300	

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2017

Dilihat dari tabel diatas bahawa cakupan pengembangan permberdayaan kelompok informasi masyarakat 9 kecamatan yng ada di Kabupaten Kudus baru terbentuk 27 kelompok itupun baru terdata pada tahun 2017, untuk tahun-tahun sebelumnya belum ada data yang tersedia.

Tabel 2.67
Cakupan Layanan Komunikasi

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	Luas wilayah yang tercoverage	NA	NA	NA	NA	340,16
2	Luas wilayah keseluruhan	NA	NA	NA	NA	425,20
3	Cakupan layanan komunikasi	NA	NA	NA	NA	80

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2017

Cakupan layanan komunikasi pada tahun 2013 – 2016 tidak tersedia data. Pada tahun 2017 luas wilayah layanan komunikasi sebesar 80 persen.

2.3.2. 11. KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi.Koperasi berfungsi sebagai wadah gerakan ekonomi rakyat dan agen dalam intermediasi permodalan yang dekat dengan masyarakat.Koperasi dapat dikelompokkan menjadi aktif dan tidak aktif.Koperasi aktif adalah koperasi

yang dalam dua tahun terakhir mengadakan Rapat Anggota Tahunan. Perkembangan koperasi aktif dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.68
Jumlah Koperasi Tahun 2013-2017 Kabupaten Kudus

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Koperasi Aktif	448	457	462	473	474
2.	Koperasi tidak aktif	65	65	65	54	65
3.	Jumlah Koperasi	513	522	527	527	539
4.	Prosentase koperasi aktif	87,33	87,55	87,66	89,75	87,94
5.	Anggota Koperasi	248.96	257.426	297.956	299,145	287.870

Sumber : Dinas Naker Perinkop UKM Tahun 2018

Berdasarkan Tabel dapat dilihat perkembangan jumlah koperasi dari tahun 2013 - 2017 yaitu jumlah koperasi aktif 448 unit di tahun 2013 bertambah menjadi di tahun 2017 menjadi 474 unit. Persentase koperasi aktif meningkat dari 87,33% di tahun 2013 menjadi 87,94% di tahun 2017. Hal ini menunjukkan pelayanan penunjang di daerah melalui koperasi semakin besar dan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya meningkat. Peningkatan kemampuan koperasi dilakukan melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan-pelatihan manajemen dan pemasaran serta fasilitasi dalam hal permodalan, peningkatan teknologi, serta pembinaan dan pengawasan perkoperasian. Sektor usaha kecil merupakan peluang usaha unit-unit ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. Perkembangan jumlah usaha mikro, kecil, menengah / besar serta penyerapan tenaga kerjanya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.69
Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2013 – 2017 Kabupaten Kudus

No	Kategori Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Usaha Mikro dan kecil	13.593	13.624	12.537	12.692	14.410
2.	Usaha Menengah	124	124	1.213	1.223	101
3.	Jumlah seluruh UKM	13.717	13.748	13.750	13.915	14.511
	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Naker, Inkop & UKM Tahun 2018

Tabel 2.70
Jumlah UMKM Menurut Kecamatan Tahun 2013 - 2017
Kabupaten Kudus

No	Uraian	2014	2015	2016	2017
1	Kaliwungu	1.249	1.440	1.440	1.482
2	Kota Kudus	2.180	2.338	2.503	2.503
3	Jati	1.283	1.199	1.199	1.465
4	Undaan	1.591	1.741	1.741	1.541
5	Mejobo	1.076	1.665	1.665	1.665
6	Jekulo	1.848	1.769	1.769	1.790
7	Bae	1.477	1.579	1.579	1.582
8	Gebog	1.412	1.503	1.503	1.958
9	Dawe	515	516	516	525
	Jumlah	12.631	13.750	13.915	14.511

Sumber : Dinas Naker, Inkop & UKM Tahun 2018

Jumlah UMKM di Kabupaten Kudus pada tahun 2017 mencapai 14.511 unit yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 13.915 unit (tahun 2016). Dari jumlah UMKM pada tahun 2017 sebanyak 14.511 unit, terdiri dari usaha mikro dan kecil sebanyak 14.410 unit dan usaha menengah sebanyak 101 unit.

Tabel 2.71
Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Sektor UMKM Tahun 2013-2017

No	Kategori Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Usaha Kecil	114.461	114.790	66.186	66.242	170.693
2.	Usaha Menengah	5.024	5.075	5.388	5.388	5.388
3.	Usaha Besar	73.636	74.372	79.997	79.997	79.997
	Jumlah	193.121	194.237	151.571	151.627	256.078

Sumber : Dinas Naker, Inkop & UKM Tahun 2018

Dalam kurun waktu 2013-2017, terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja pada usaha kecil dari 114.461 orang menjadi 170.693 orang, usaha menengah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dari 5.024 menjadi 5.388, kenaikan tidak banyak dikarenakan usaha menengah menjadi usaha besar makin banyak. Usaha besar makin meningkat juga dari tahun sebelumnya dari 73.636 orang menjadi 79.997 orang.

Tabel 2.72
Jumlah Koperasi Tahun 2013-2017 Kabupaten Kudus

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Koperasi Aktif	448	457	462	473	474
2.	Koperasi tidak aktif	65	65	65	54	65
3.	Jumlah Koperasi	513	522	527	527	539
4.	Prosentase koperasi aktif	87,33	87,55	87,66	89,75	87,94
5.	Anggota Koperasi	248.96	257.426	297.956	299,145	287.870

Sumber : Dinas Naker Perinkop UKM Tahun 2017

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi.Koperasi berfungsi sebagai wadah gerakan ekonomi rakyat dan agen dalam intermediasi permodalan yang dekat dengan masyarakat. Koperasi dapat dikelompokkan menjadi aktif dan tidak aktif. Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan Rapat Anggota Tahunan. Perkembangan koperasi aktif dapat dilihat pada Tabel di atas.

Hal ini menunjukkan pelayanan penunjang di daerah melalui koperasi semakin besar dan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya meningkat. Peningkatan kemampuan koperasi dilakukan melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan-pelatihan manajemen dan pemasaran serta fasilitasi dalam hal permodalan, peningkatan teknologi, serta pembinaan dan pengawasan perkoperasian. Sektor usaha kecil merupakan peluang usaha unit-unit ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. Perkembangan jumlah usaha mikro, kecil, menengah/besar serta penyerapan tenaga kerjanya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.73
Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2013 – 2017 Kabupaten Kudus

No	Kategori Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Usaha Mikro dan kecil	13.593	13.624	12.537	12.692	14.410
2.	Usaha Menengah	124	124	1.213	1.223	101
3.	Jumlah seluruh UKM	13.717	13.748	13.750	13.915	14.511
	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Naker, Inkop & UKM Tahun 2018

Dalam kurun waktu 2013-2017, terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja pada usaha kecil dari 114.461 orang menjadi 170.693 orang, usaha menengah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dari 5.024 menjadi 5.388, kenaikan tidak banyak dikarenakan usaha menengah menjadi usaha besar makin banyak. Usaha besar makin meningkat juga dari tahun sebelumnya dari 73.636 orang menjadi 79.997 orang.

2.3.2. 12. PENANAMAN MODAL

Kabupaten Kudus telah berinisiatif memberikan kemudahan bagi investor melalui penerbitan peraturan yang pro investasi, mendorong Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu (One Stop Service) melalui SIPT (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu) dan SIPTO (Sistem Informasi Perizinan Terpadu Online) guna peningkatan kualitas pelayanan publik. Perkembangan investasi di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.74
Perkembangan Investasi Tahun 2013 – 2017(juta rupiah) Kabupaten Kudus

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	PMA	11.374,80	917,50	3.650	0	0
2	PMDN Fasilitas	0	0	0	0	0
3	PMDN Non Fasilitas	11.568.452,70	8.826.195,29	17.620.465,29	18.611.308,50	11.463.103,50
4	Jumlah	11.579.827,50	8.826.195,29	17.620.465,29	18.611.308,50	11.463.103,50
5	Jml Tenaga Kerja	12.982	17.604	13.354	16.138	16.317

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2018

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat perkembangan total investasi sangat fluktuaktif dari tahun 2013 sampai dengan 2017. Pada Tahun 2017 realisasi investasi sebesar 104,23% atau mengalami penurunan angka dari tahun 2016. Adapun perbandingan kenaikan realisasi investasi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.75
Target dan Realisasi Investasi 2013 – 2017 Kabupaten Kudus

TAHUN	TARGET	REALISASI	(%)
2013	7.511.584.136.741	11.579.827.503.311	154,16
2014	8.262.742.550.415	8.826.195.298.062	106,82
2015	9.089.016.805.457	17.620.465.287.032	193,87
2016	9.997.918.486.002	18.611.308.500.649	186,15
2017	10.997.710.334.602	11.463.103.884.050	104,23

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan aktivitas swasta yang meningkat dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain investasi. Perkembangan realisasi investasi tahun 2016-2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp.11.463.103.884.050,-. Investasi yang paling banyak diminati pada tahun 2017 di Kabupaten Kudus adalah sektor perdagangan. Peningkatan realisasi investasi didukung pula oleh pertumbuhan sektor industri dan konstruksi.

Tabel 2.76
Investor PMA Tahun 2013-2017 Kabupaten Kudus

No	Tahun	Nama Perusahaan
1	2013	Lohongka Indonesia
2	2014	PT. Anna Modern
3	2015	PT. Finexco Prima
3	2016	0
4.	2017	0

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2017

Untuk investasi PMA yang terealisasi pada tahun 2017 belum ada kegiatan PMA di Kabupaten Kudus, hal ini dapat dilihat pada tabel dengan perincian pada Tabel di atas.

2.3.2. 13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga diprioritaskan pada peningkatan pengembangan prestasi pemuda dan olahraga serta peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan non formal. Prestasi yang diraih baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional cukup menggembirakan. Namun demikian pembibitan dan pembinaan perlu terus dilakukan guna mendukung capaian prestasi olahraga di Kabupaten Kudus.

Tabel 2.77
Data Prestasi Atlet dalam Kejuaraan Nasional

No	Tahun	Cabang Olahraga	Nama	Medali	Kejuaraan
1	2014	Atletik	Risa Wijayanti	Perunggu	PON Riau
		Anggar	Yusuf Reinaldi	Emas	PON Remaja
2	2015	Aero Modelling	Javier Umar Ravi	Perunggu	Lioga Nasional
		Anggar	Irfan Oktadila	Emas	Kejurnas PPLP
			Fahrul Pratama	Perunggu	Kejurnas PPLP
		Catur	Galih Eguh	Perak	Petra Chess C Nasional
		Gulat	Kharisma Wati	Perunggu	Kejurnas Junior
			Ainina Khamim	Perunggu	Kejurnas Junior
		Kempo	Hanif Wijaya	Perunggu	Kejurnas

No	Tahun	Cabang Olahraga	Nama	Medali	Kejuaraan
		Panahan	Tekat Aji P	Perunggu	Kejurnas PPLP
3	2016	Anggar	Indra Agus S	Perunggu	PON Jabar
		Atletik	Risa Wijayanti	Emas	PON Jabar
			Diah Ayu	Perak	PON Jabar
		Balap Sepeda	Iwan Setiawan	Emas	PON Jabar
			Maulana FK	Emas	PON Jabar
			Caputri	Emas	PON Jabar
			Edi susento	Perak	PON Jabar
		Billiard	Sumarno	Emas	PON Jabar
		Bola Basket	Habib Titoaji	Peserta	PON Jabar
			Habib Ahmeda N	Peserta	PON Jabar
		Hoki	Pertiwi Setia Rini	Perunggu	PON Jabar
			Zulita Dwi A	Perunggu	PON Jabar
			M. Maulana	Peserta	PON Jabar
			Nowo Setyo P	Peserta	PON Jabar
		Gulat	Suhartatik	Peserta	PON Jabar
		Sepatu Roda	Allan Chandra	Emas	PON Jabar
		Tarung Derajat	Mery Anjani	Emas	PON Jabar
			Diah Puspitasari	Perak	PON Jabar
			Fatah Abdul Majid	Perak	PON Jabar
		Karate	M. Azka Y	Emas	SEA Champ UNY
		Panahan	Rafli Hermawan	Emas	Kejurnas SAS
			Erma Regita	Emas	Kejurnas SAS
		PELTI	Nadia Dhanes	Emas	Turnamen Nasional
		PSSI	Persiku Kudus	Juara 4	Liga Nusantara
4	2017	Panahan	Erna Regita Sari	Perak	Bogor Open
			Triani Putri	Perak	Bogor Open
			Revita Brilian	Perak	Bogor Open
			Aqidatul Izzah	Perunggu	Bogor Open
		FOPI	Lisa Ariyani	Perunggu	Petanque Tripel Open
			Elsa Rosiana	Perunggu	Petanque Tripel Open
			Poppy Setyowati	Perunggu	Petanque Tripel Open
		IPSI	Amar Abdullah	Emas	Kejurnas PPLP 2017
			Safira Maulani	Emas	
				5 Emas	Kejurnas Jateng Open
		Karate	Azka Yafina	Perunggu	Kejurnas INKAI
		Bola Voli	Yogi Hermawan	Emas	Kejurnas Voli Pantai PPLP
			Joko Rimawan	Emas	
			Indah Fertasari	Emas	
			Ragilning Tyas	Emas	
		Tenis Meja	Aminah	Emas	Bupati Cup II

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2018

Tabel 2.78
Jumlah Organisasi Pemuda, Organisasi Olahraga, dan Gelanggang Olahraga
Tahun 2013 – 2017 Kabupaten Kudus

No	U r a i a n	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah organisasi pemuda	23	23	23	27	28
2.	Jumlah organisasi olahraga	36	36	38	38	38
3.	Jumlah gedung olahraga	5	5	5	5	5

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2018

Dari tabel di atas, terlihat bahwa organisasi pemuda pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 28 organisasi. Demikian juga untuk jumlah organisasi olahraga mengalami kenaikan dari yang tadinya berjumlah 36 organisasi menjadi 38 organisasi. Di bidang olahraga terdapat prestasi sebagaimana tabel-tabel di bawah ini, yang perlu dipertahankan oleh Kabupaten Kudus melalui pembinaan atlet dan peningkatan sarpras olahraga.

Tabel 2.79
Data Prestasi Atlet dalam Kejuaraan Internasional

No	Tahun	Cabang Olahraga	Nama	Medali	Kejuaraan
1	2013	Sepatu Roda	Allan Chandra	Emas	Sea Games Myanmar
2	2015	Sepatu Roda	Allan Chandra	Emas	Sea Games Singapura
3	2016	Billiard	Aditiningrum	32 Besar	China Open Internasional
		PBSI	Preveen/Debby	Emas	All England
			Tantowi/Liliyana	Emas	Olimpic
		PELTI	M. Akbar	Emas	Kejuaraan Malaysia
4	2017	Voli Indoor	Doni P.	Tim Pa INA	Sea Games Malaysia

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2018

2.3.2. 14. STATISTIK

Tabel 2.80
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Statistik

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	Buku Kabupaten Dalam Angka (Kudus Dalam Angka)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku PDRB Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku saku sekilas statistik Kabupaten Kudus	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada
4	Buku ASPM	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada

Sumber: BPS, 2018

2.3.2. 15. PERSANDIAN

Tabel 2.81
Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi
Dalam komunikasi Perangkat Daerah

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah	-	-	-	-	1
2	Jumlah total perangkat daerah	-	-	-	-	32
3	Presentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	-	-	-	-	3

Sumber : Dinas Komunikasi dan informatika Kab Kudus, 2018

Untuk tahun 2017 kebelakang tidak bisa menampilkan data dikarenakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Kudus baru terbentuk pada tahun 2017. Di tahun 2017 OPD yang sudah menggunakan sandi hanya Dinas Komunikasi dan Informtika Kab. Kudus untuk LPSE.

2.3.2. 16. KEBUDAYAAN

Pelaksanaan urusan kebudayaan ditujukan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang religius dan berbudaya serta memiliki kompetensi dan daya saing global. Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus melaksanakan kegiatan berdasar pada indikator dari kinerja pelayanan kebudayaan yang meliputi:

- 1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya
- 2. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
- 3. Persentase benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
- 4. Jumlah benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
- 5. Total benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dimiliki.

Pada tahun 2017, telah dicapai penyelenggaraan seni dan budaya sebanyak 22 kali, jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya sebanyak 4 buah, persentase benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan sebesar 100% dengan jumlah benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan dan dimiliki sebanyak 149 buah, melalui pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, Program Pengelolaan Keragaman Budaya dan Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.

Sedangkan kinerja pelayanan Kebudayaan dari Tahun 2013 – 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.82
Kinerja Pelayanan Kebudayaan Tahun 2013 – 2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	7	5	17	21	22
2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	3	3	4	4	4
3.	Persentasebenda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100	100	100	100	100
4.	Jumlah benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	146	146	149	149	149
5.	Total benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dimiliki	146	146	149	149	149

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Kudus pada tahun 2017 terjadi 22 kali dengan sarana penyelenggaran seni dan budaya sebanyak 4 buah. Jumlah benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan ada sebanyak 149 buah pada tahun 2017.

2.3.2. 17. PERPUSTAKAAN

Dalam upaya meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dan sebagai penunjang kelangsungan pendidikan serta untuk meningkatkan budaya baca masyarakat, peran perpustakaan umum sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan dan penyediaan bahan bacaan bagi masyarakat. Peningkatan mutu pelayanan perpustakaan umum diupayakan dengan meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan dan penambahan bahan pustaka serta dengan pelayanan perpustakaan, perpustakaan digital (*e-library*) serta pengembangan katalog induk yang terintegrasi.

Tabel 2.83
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

No	U r a i a n	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun	17.732	13.734	109.445	110.046	251.730
2.	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	550.770	550.770	550.770	617.674	617.674

Sumber : Bidang Perpustakaan Dinas ARPUS Kabupaten Kudus Tahun 2018

Tampak pada tabel 17.1 di atas bahwa jumlah pengunjung perpustakaan per tahun mengalami peningkatan, dari 17.732 kunjungan pada tahun 2013 meningkat menjadi 251.730. Artinya setiap tahun menunjukkan peningkatan kunjungan ke perpustakaan, bahkan pada tahun 2015 dan 2017 mengalami peningkatan kunjungan cukup signifikan, hal ini dipengaruhi meningkatnya minat baca masyarakat.

Tabel 2.84

Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	17.388	18.380	18.380	25.743	25.743
2.	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	21.911	23.099	23.099	33.026	33.026

Sumber : Bidang Perpustakaan Dinas ARPUS Kabupaten Kudus Tahun 2018

Tampak pada tabel di atas bahwa koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah meningkat, dari 21.911 buku pada tahun 2013 meningkat menjadi 33.026 pada tahun 2017. Artinya setiap tahun menunjukkan peningkatan jumlah buku, hanya pada tahun 2015 dan 2017 jumlah buku tetap tidak mengalami peningkatan karena tidak ada pembelian buku maupun menerima bantuan/hibah dari pihak lain.

Tabel 2.85

Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Perpustakaan	333	333	333	563	563
2.	Jumlah Penduduk	550.770	550.770	550.770	617.674	617.674
3.	Persentase	0,6	0,6	0,6	0,9	0,9

Sumber : Bidang Perpustakaan Dinas ARPUS Kabupaten Kudus Tahun 2018

Tampak pada tabel bahwa persentase rasio perpustakaan persatuan penduduk pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 tetap tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 0,6 persen. Sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 mengalami peningkatan menjadi 0,9 persen.

Tabel 2.86

Jumlah Rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun	1.826	1.145	9.120	9.171	20.978

Sumber : Bidang Perpustakaan Dinas ARPUS Kabupaten Kudus Tahun 2018

Tampak pada tabel di atas bahwa jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun mengalami peningkatan, dari 1.826 kunjungan pada tahun 2013 meningkat menjadi 20.978. Artinya setiap tahun menunjukkan peningkatan kunjungan ke perpustakaan daerah seiring dengan meningkatnya minat baca masyarakat.

Tabel 2.87
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

No	U r a i a n	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	17.388	18.380	18.380	25.743	25.743

Sumber : Bidang Perpustakaan Dinas ARPUS Kabupaten Kudus Tahun 2018

Tampak pada tabel di atas bahwa jumlah koleksi judul buku perpustakaan di perpustakaan daerah meningkat, dari 17.388 koleksi judul buku pada tahun 2013 meningkat menjadi 25.743 pada tahun 2017. Artinya setiap tahun menunjukkan peningkatan jumlah judul buku, hanya pada tahun 2015 dan 2017 jumlah judul buku tetap tidak mengalami peningkatan karena tidak ada pembelian buku maupun menerima bantuan buku/hibah dari pihak lain.

2.3.2. 18. KEARSIPAN

Tabel 2.88
Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	44	44	44	44	41
2.	Jumlah jumlah perangkat daerah	44	44	44	44	41
3.	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber : Bidang Kearsipan Dinas ARPUS Kabupaten Kudus Tahun 2018

Tampak pada tabel di atas bahwa persentase Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku dari tahun 2013 sampai 2017 telah 100 %, artinya bahwa semua perangkat daerah di kabupaten kudus telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku.

Tabel 2.89
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	14	14	24	43	45

Sumber : Bidang Kearsipan Dinas ARPUS Kabupaten Kudus Tahun 2018

Tampak pada tabel di atas bahwa peningkatan SDM pengelola kearsipan meningkat, dari 14 SKPD pada tahun 2013 meningkat menjadi 45 SKPD pada tahun 2017. Artinya setiap tahun menunjukkan peningkatan SDM pengelola kearsipan, hanya pada tahun 2014 tidak mengalami peningkatan.

2.3. 3. Fokus Layanan Pilihan

2.3. 3.1 PARIWISATA

Pariwisata mempunyai peran penting dalam Pembangunan Daerah, karena sektor Pariwisata berperan penting dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, bahwa Pariwisata bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Kudus yang memiliki visi *“Terwujudnya Kudus yang semakin Sejahtera”*. Untuk itu pariwisata melaksanakan pemberdayaan masyarakat/rakyat untuk menggerakkan potensi desa dengan program pengembangan destinasi pariwisata.

Kegiatan pariwisata yang dapat dinikmati oleh masyarakat di obyek daerah tujuan wisata, yang dikunjungi wisatawan antara lain: jasa transportasi, jasa atraksi wisata, jasa penginapan, kuliner, dan souvenir. hal ini menunjukkan bahwa manfaat pariwisata menimbulkan efek pemberdayaan masyarakat melalui transaksi ekonomi. Kabupaten Kudus memiliki potensi obyek wisata cukup besar yang mempunyai daya tarik wisata untuk dikunjungi oleh wisatawan. Di Kabupaten Kudus terdapat wisata alam, wisata buatan dan wisata religi. Wisata religi dengan tujuan makam Sunan Kudus dan Sunan Muria. Wisata alam Gunung Muria, air terjun Monthel Colo dan hutan pinus Kajar. Di samping itu terdapat beberapa obyek tujuan wisata buatan yang dikelola pemerintah maupun swasta antara lain Taman Ria Colo, Taman Krida Wisata, Museum Kretek, *Mountain View Residence*, *Waterboom Lau*, dan beberapa wisata budaya di daerah tertentu dan pada waktu tertentu. Tabel berikut ini menginformasikan perkembangan jumlah wisatawan pada berbagai obyek wisata.

Pelaksanaan urusan Pariwisata ditujukan untuk mencapai kinerja pelayanan pariwisata, yang dapat ditunjukkan melalui indikator jumlah wisatawan mancanegara, jumlah wisatawan nusantara, lama tinggal dan

potensi wisata. Sedangkan kinerja pelayanan Pariwisata dari Tahun 2013 – 2017 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.90
Kinerja Pelayanan Pariwisata Tahun 2013 – 2017
Kabupaten Kudus

NO.	INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah wisatawan mancanegara	46	56	66	46	196
2.	Jumlah wisatawan Nusantara	1.178.789	1.346.728	1.502.946	1.518.681	1.550.803
3.	Lama tinggal	2 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari
4.	Potensi wisata	16	18	20	20	25

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018

Pada tahun 2017, jumlah wisatawan mancanegara mencapai 196 orang, jumlah wisatawan Nusantara mencapai 1.550.803 orang dengan lama tinggalnya 3 hari serta jumlah potensi wisatanya menjadi 25 lokasi, meliputi wisata alam dan buatan, baik milik Pemerintah maupun Swasta. Pencapaian pelayanan tersebut dilaksanakan melalui Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Program Pengembangan Kemitraan.

Potensi wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kudus sebanyak 6 lokasi, dengan perkembangan kunjungan wisata pada tahun 2013 – 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.91
Perkembangan Kunjungan Wisata Tahun 2013 – 2017 Kabupaten Kudus

NO.	OBYEK WISATA	Pengunjung (orang)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Menara Kudus dan Makam Sunan Kudus	259.139	491.782	539.154	500.957	625.486
2	Colo dan Makam Sunan Muria	719.486	756.588	826.832	806.146	661.545
3	Tugu Identitas	45	992	906	806	0
4	Taman Krida Wisata	87.848	29.486	40.670	28.543	99.096
5	Museum Kretek dan Rumah Adat	112.317	67.936	93.867	125.683	87.315
6	Situs/Museum Patiayam	0	1.413	1.583	2.592	77.557

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018

Dari Tabel di atas dapat dilihat, bahwa obyek wisata Colo dan makam Sunan Muria menempati posisi teratas berdasarkan jumlah pengunjung dari tahun 2013 sampai dengan 2017 yaitu sejumlah 625.486 orang, berarti bisa dikatakan obyek wisata Colo dan Makam Sunan Muria merupakan salah satu unggulan obyek wisata Kabupaten Kudus.

Selain itu ada penambahan obyek wisata baru yaitu obyek wisata Air Terjun Gompeng Kuwukan, Desa Kuwukan, Kecamatan Dawe yang cukup diminati oleh wisatawan domestik.Diharapkan obyek wisata Situs patiyam ada peningkatan jumlah kunjungan wisata karena bertambahnya sarana prasarana pendukung wisata di tempat Museum Fosil Patiyam karena ada penambahan temuan fosil dan fasilitas Patung Gajah Purba Steogodon. Selain itu adanya penunjang lain di sektor Pariwisata berupa rumah makan sebanyak 18 buah dan hotel berjumlah 31 buah.

2.3. 3.2 PERTANIAN

Layanan pilihan urusan pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan dan peternakan. Layanan urusan pertanian dilaksanakan melalui pengelolaan lahan dan air yang diarahkan untuk mendukung peningkatan dan pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Perkembangan produksi komoditas pertanian sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.92
Perkembangan Produksi Komoditas Pertanian
Tahun 2013 – 2017 Kabupaten Kudus

No	U r a i a n	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Padi	140.201	127.319	170.286	171.278	164.163
2.	Jagung	14.448	17.081	18.250	27.661	26.010
3.	Ketela pohon	37.674	34.042	28.745	50..543	33.195
4.	Ubi jalar	215	552	1.284	1.607	1.189
5.	Kacang tanah	3.364	1.275	654	530	479
6.	Kedelai	143	262	453	236	164
7.	Kacang hijau	959	2.420	4.528	2.466	4.496

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2017

Tanaman perkebunan yang ada di Kabupaten Kudus adalah jenis tanaman perkebunan rakyat seperti tebu, kapuk, kelapa, kopi dan kapas. Produksi tebu tahun 2017 sebesar 2.943.347,3 kwintal mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 3.544.631,6 kwintal. Perkembangan luas tanam, produksi dan produktivitas tebu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.93
Luas Tanam, Produksi dan Produktivitas Tebu Tahun 2013 – 2017
Kabupaten Kudus

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Luas tanam (Ha)	3.631,85	3.630,43	5.783,89	5.536,20	5.528,99
2.	Produksi (Kw)	3.642.771,3	3.790.233,5	3.725.443,2	3.291.563,5	2.943.347.300
3.	Produktivitas (kw/Ha)	650,8	730,4	638,4	634,1	535,8

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2017

Peternakan yang berkembang di Kabupaten Kudus adalah ternak besar (sapi dan kerbau) dan ternak kecil (kambing) dan unggas. Produksi ternak mengalami peningkatan terutama ternak unggas sebagaimana tercantum pada Tabel 2.88 berikut :

Tabel 2.94
Jumlah Ternak Kabupaten Kudus Tahun 2013-2017

No	Jenis Ternak	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Sapi (ekor)	9.758	10.213	10.253	9.747	9.029
2.	Kerbau (ekor)	1.896	2.214	2.170	2.263	1.793
3.	Kambing (ekor)	30.077	30.174	34.597	28.190	25.969
4.	Ayam buras (ekor)	386.237	351.809	375.306	419.368	384.911
5.	Ayam ras pedaging (ekor)	1.602.450	5.250.500	5.794.773	6.721.241	9.810.500

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat penurunan populasi untuk semua komoditas ternak kecuali ayam ras pedaging. Prosentase penurunan berkisar antara 7,36 s.d 20,77%. Prosentase penurunan populasi ternak terbesar terjadi pada populasi ternak kerbau. Hal ini disebabkan semakin bertambahnya permintaan akan daging ternak kerbau yang tidak diimbangi dengan pertambahan populasi ternak. Selain itu penurunan diakibatkan semakin berkurangnya populasi betina produktif sehingga semakin rendahnya angka kelahiran ternak. Peningkatan populasi ternak ayam ras pedaging yang sangat tinggi disebabkan peralihan pola pemeliharaan ternak dari system konvensional kandang terbuka ke kandang close house yang memungkinkan penambahan jumlah ternak yang dipelihara dengan satuan luasan kandang yang sama dan diikuti dengan kenaikan tingkat produktivitas ternak

Urusan pertanian dalam mendukung PDRB terdiri dari sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan dan peternakan. Adapun besarnya peranan masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.95
Peranan Sub kategori terhadap Nilai Tambah Kategori Pertanian, Peternakan,
Perburuan, dan Jasa Pertanian (Persen) Tahun 2013 – 2017

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	92.26	91.63	91.83	91.55	91.24
	a. Tanaman Pangan	39.26	34.86	36.19	35.80	35.56
	b. Tanaman Hortikultura	22,56	25,09	24 57	24,53	23,67
	c. Tanaman Perkebunan	11.56	12.68	12.52	12.51	12.26
	d. Peternakan	16.55	16.82	16.48	16.66	17.69
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	2.32	2.19	2.07	2.04	2.06
2.	Kehutanan dan Penebangan Kayu	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07
3.	Perikanan	7.66	8.28	8.09	8.38	8.68

Sumber : PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 -2017 BPS Tahun 2018

*Angka Sementara, ** Angka sangat Sementara

Untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, Dinas Pertanian dan Pangan melakukan pembinaan melalui tenaga penyuluh yang berjumlah 56 orang yang terdiri dari PNS dan THLTB. Sarana penyuluhan antara lain Balai Penyuluhan Pertanian yang tersebar di 9 kecamatan.

2.3. 3.3 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Urusan energi dan sumberdaya mineral dibedakan menjadi dua bidang. Bidang energi diarahkan untuk pembinaan dan pengembangan energi yang dilaksanakan melalui rehabilitasi/pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan/KWh meter serta pembayaran langganan Lampu Penerangan Jalan Umum (20), sedangkan sumber daya mineral dilaksanakan melalui pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan.

Tabel 2.96
Perkembangan LPJU Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah LPJU	17.906	18.224	18.715	19.653	20.146
2	Biaya Rekening LPJU	15.852.899.434	26.439.492.075	34.422.586.898	29.342.299.689	29.099.992.000
3	Pendapatan PPJU	27.617.404.940	32.500.914.046	37.282.813.061	33.913.494.478	44.972.069.055

Sumber : Dinas PKPLH - BPPKAD Tahun 2018

Pada tabel diatas, diketahui bahwa Lampu Penerangan Jalan Umum yang terpasang di Kabupaten kudas pada tahun 2016 mencapai 19.653 unit, yang memiliki biaya rekening LPJU sebesar Rp. 29.342.299.689 dan pendapatan dari PPJU sebesar Rp. 33.913.494.478.

Tabel 2.97
Rasio Elektrifikasi Tingkat Desa, Jaringan Listrik Perdesaan, serta Pengembangan Energi Terbarukan (Biogas) Tahun 2013-2017

No	U r a i a n	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio Elektrifikasi Tingkat Desa (%)	100	100	100	100	100
2	Pembangunan Jaringan Listrik Perdesaan (desa)	-	2	1	1	NA

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017

Seperti yang terurai dalam tabel 2.91, rasio elektrifikasi tingkat desa tahun 2017 sebesar 100%.

2.3. 3.4 **PERDAGANGAN**

Urusan Perdagangan diprioritaskan pada peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri melalui pengembangan pasar dan distribusi barang/produk serta meningkatkan promosi dan kerja sama pemasaran. Layanan urusan perdagangan dapat diketahui dari banyaknya pasar yang ada. Di Kabupaten Kudus terdapat 32 pasar yang terdiri 5 pasar Daerah, 24 pasar Desa, dan 3 pasar hewan.

Adapun beberapa pasar rakyat yang tidak dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, tetapi dikelola desa sendiri 6 buah pasar rakyat, antara lain adalah Pasar Menawan, Pasar Sudimoro, Pasar Jarum, Desa Megawon, Pasar Jepang Desa Jepang, Pasar depan Pabrik Nojorono Desa Kaliwungu dan Pasar Ternak Desa Jurang.

Adapun mengenai daya tampung pasar rakyat/jumlah pedagang pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dapat dirinci pada tabel berikut ini.

Tabel 2.98
Jumlah Pedagang di Pasar Rakyat Tahun 2013 – 2017

No.	Jumlah Pedagang Pasar Rakyat				
	2013	2014	2015	2016	2017
1.	9.279	9.763	10.159	10.266	13.200

Sumber : Dinas Perdagangan Tahun 2017

Dari tabel diatas, jumlah pedagang di pasar rakyat pada tahun 2017 mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 jumlah pedagang sebanyak 9.279 pedagang, kemudian bertambah di tahun 2014 menjadi 9.763 pedagang, tahun 2015 menjadi 10.159 pedagang, tahun 2016 sebanyak 10.266 pedagang dan tahun 2017 sebanyak 13.200

pedagang. Kegiatan rehabilitasi dan pembangunan tentunya membawa dampak positif terhadap peningkatan perekonomian daerah. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah pedagang dan jumlah konsumen di pasar-pasar tersebut.

Pedagang Kaki Lima yang merupakan golongan pedagang kelas bawah adalah bagian penting dalam menggerakkan roda ekonomi daerah. Namun di wilayah Kabupaten Kudus ini, pertumbuhan PKL dan Asongan semakin meningkat di setiap tahunnya, yang tumbuh di pinggiran jalan raya dan semakin lama semakin banyak jumlahnya, yang pada akhirnya mempengaruhi kelancaran lalu lintas kendaraan roda 4 (empat) maupun kendaraan roda 2 (dua) yang melewati jalur tersebut. Dalam perkembangannya, Pemerintah Kabupaten Kudus telah berupaya untuk melakukan penataan dan pembinaan PKL di Kabupaten Kudus, antara lain melalui pembinaan, pendataan dan pengaturan terhadap PKL dan pedagang Asongan.

Tabel 2.99
Data Pedagang Kaki Lima Tahun 2013 – 2017

No	Jumlah Pedagang Kaki Lima				
	2013	2014	2015	2016	2017
1.	0	1.226	1.161	1.996	2382

Sumber : Dinas Perdagangan Tahun 2017

Berdasarkan hasil pendataan di lokasi PKL, diperoleh data jumlah Pedagang Kaki Lima sebanyak 2.382 untuk tahun 2017 yang tersebar di wilayah. Jumlah pedagang kaki lima ini mengalami kenaikan dari tahun 2016 yang hanya 1.996 Pedagang Kaki Lima.

Tabel 2.100
Data Pasar Modern Tahun 2017 Kabupaten Kudus

No	Kecamatan	Alfamart	Indomart	Mini Market Lainnya	Mall	Total
1	Kota	19		1	2	22
2	Jati	5	5	1	2	13
3	Bae	10				10
4	Mejobo	1	3			4
5	Dawe	1	1			2
6	Kaliwungu	7	4	2		13
7	Undaan	1	2			3
8	Gebog	1	1			2
9	Jekulo	1	4			5
	Jumlah	46	20	4	4	74

Sumber : Dinas Perdagangan Tahun 2018

Keberadaan Toko Swalayan di Kabupaten Kudus terdapat 74 unit yang terdiri dari 4 unit Mall yaitu Hypermart, Matahari Kudus Plaza, Ramayan Mall dan Ada Swalayan, dan 70 Unit usaha minimarket wara laba yang tercatat yaitu Alfamart 46 unit, Indomaret 20 unit, dan minimarket 4 unit lainnya 4 unit yang tersebar di 9 Kecamatan di Kabupaten Kudus.

Tabel 2.101
Perkembangan Realisasi Ekspor Non Migas Kabupaten Kudus
Tahun 2013 - 2017 (US\$)

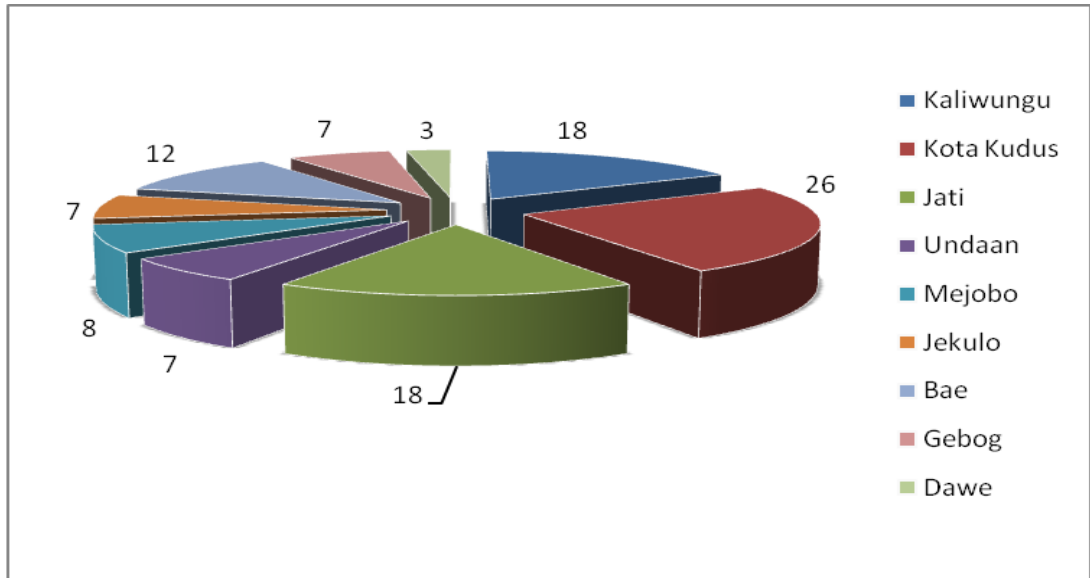
No	Komiditi	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kertas	13.401.715,57	13.092.922,80	26.681.999,50	16.370.572,00	22.287.039,26
2	Furnitur	14.796.450,81	12.045.708,95	7.837.386,97	4.506.669,00	8.556.673,23
3	Jumlah Negara Tujuan	89	90	90	90	90

Sumber : Dinas Perdagangan Tahun 2018

Perkembangan nilai ekspor dengan komoditi Kertas mengalami peningkatan nilai ekspor Furnitur mengalami penurunan dari tahun 2013 – 2016. Adapun tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Perkembangan realisasi ekspor menunjukkan adanya peningkatan jumlah negara yang menjadi tujuan eksport dari 89 negara di tahun 2013 meningkat menjadi 90 negara tujuan di tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017.

Pasar di Kabupaten Kudus berjumlah 106 pasar terinci per kecamatan sebagaimana Gambar berikut ini :

Gambar 2.20. Jumlah Pasar Menurut Kecamatan Tahun 2017



Sumber : Dinas Perdagangan Tahun 2018

Potensi unggulan perdagangan yang berkembang cukup dinamis dapat dilihat dari banyaknya pasar modern dan pasar daerah diberbagai sudut kota. Jumlah pasar yang paling banyak di Kecamatan Kota dan paling sedikit di Kecamatan Dawe. Untuk meningkatkan produktifitas perdagangan dan arus distribusi barang, serta memperluas kesempatan kerja masyarakat, telah diupayakan peningkatan kapasitas. Peningkatan yang dilakukan antara lain penambahan kios, los, jaringan drainase dan tempat parkir.

Kegiatan rehabilitasi dan pembangunan tentunya membawa dampak positif terhadap peningkatan perekonomian daerah hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah pedagang dan jumlah konsumen di pasar-pasar tersebut.

2.3. 3.5 PERINDUSTRIAN

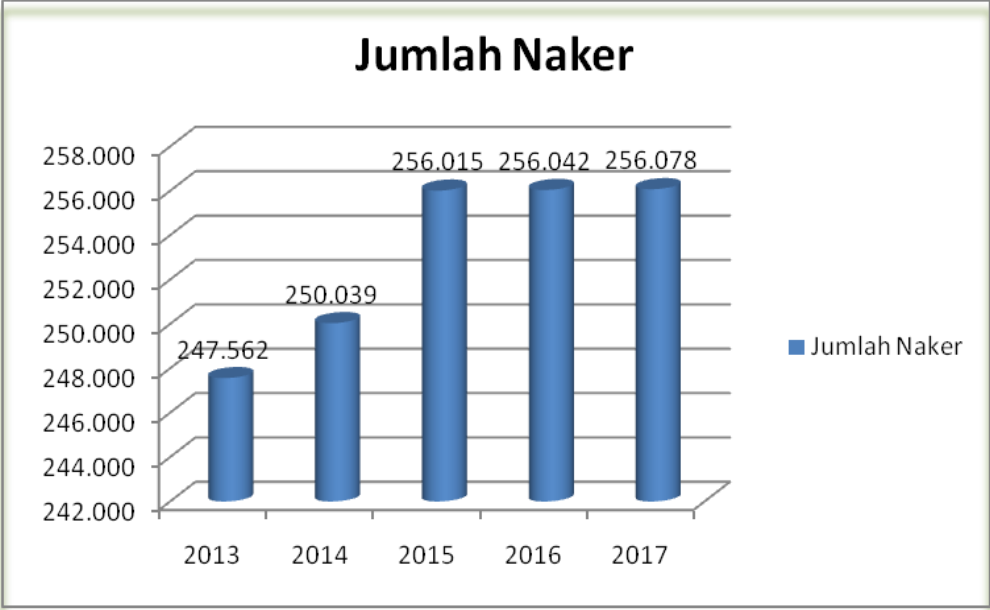
Industri merupakan faktor penyangga utama perekonomian Kabupaten Kudus, terbukti dengan sumbangan kontribusi PDRB terbesar dibandingkan sektor yang lain. Sektor industri ini didominasi oleh industri rokok, konveksi dan kertas yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Banyak perusahaan yang telah didirikan di Kabupaten Kudus, salah satunya adalah perusahaan industri antara lain industri anyaman, industri sepatu dan sandal, industri bandeng presto, dan sebagainya. Perusahaan Industri tersebut yang menjadi *leading sector* (penggerak ekonomi) di Kabupaten Kudus.

Tabel 2.102
Jumlah Perusahaan Industri dan Jumlah Tenaga Kerja
Tahun 2013 – 2017 Kabupaten Kudus

No	Kecamatan	2013		2014		2015		2016		2017	
		Perus./ Unit Usaha	Tenaga Kerja	Perus./ Unit Usaha	Tenaga Kerja	Perus./ Unit Usaha	Tenaga Kerja	Perus./ Unit Usaha	Tenaga Kerja	Perus./ Unit Usaha	Tenaga Kerja
1	Kaliwungu	1.830	13.314	1.848	13.447	1.851	14.764	1.854	14.768	1.856	14.772
2	Kota	2.159	137.213	2.180	138.585	2.182	138.789	2.185	138.791	2.188	138.798
3	Jati	1.575	27.768	1.591	28.046	1.593	28.244	1.595	28.244	1.597	28.248
4	Undaan	472	2.028	477	2.049	478	2.094	486	2.108	487	2.110
5	Mejobo	1.804	4.606	1.822	4.652	1.825	5.284	1.827	5.284	1.829	5.208
6	Jekulo	1.065	5.518	1.076	5.574	1.078	6.190	1.080	6.192	1.082	6.196
7	Bae	1.270	30.555	1.283	30.861	1.285	32.251	1.287	32.251	1.288	32.253
8	Gebog	1.237	20.224	1.249	20.426	1.252	21.973	1.255	21.978	1.257	21.983
9	Dawe	1.398	6.336	1.412	6.399	1.413	6.426	1.413	6.426	1.415	6.430
	Jumlah	12.810	247.562	12.938	250.039	12.957	256.015	12982	256.042	12.999	256.078

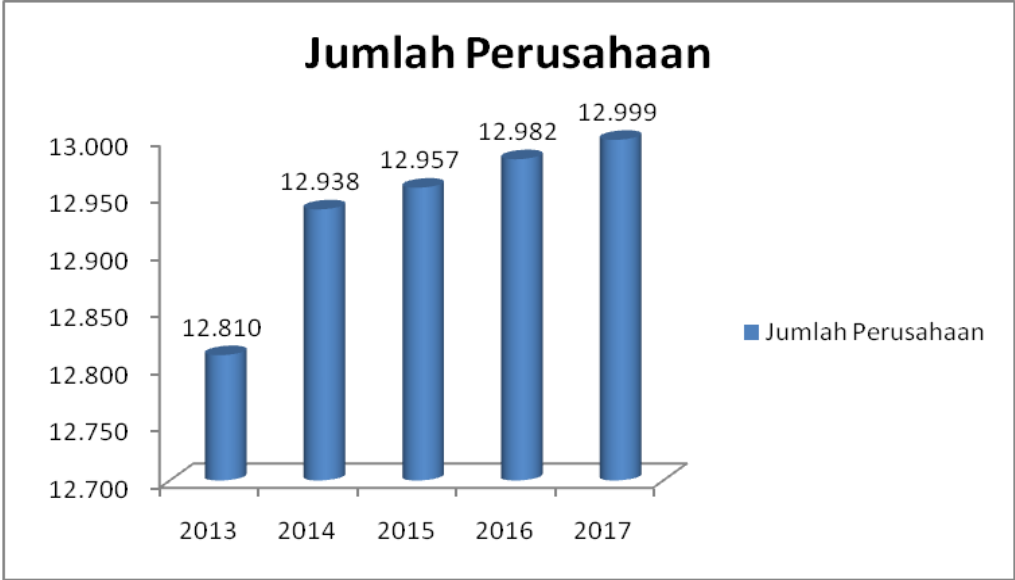
Sumber : Sumber : Dinas Naker, Perinkop dan UKM Tahun 2018

Gambar 2.21. Jumlah Tenaga Kerja di Perusahaan Tahun 2013 – 2017



Sumber : Dinas Naker, Perinkop dan UKM Tahun 2018

Gambar 2.22. Jumlah di Perusahaan Tahun 2013 - 2017



Sumber : Dinas Naker, Perinkop dan UKM Tahun 2018

Tabel dan Gambar di atas menunjukkan perkembangan perusahaan industri dan tenaga kerja di Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2017 yang dalam perkembangannya selalu mengalami perubahan ke arah yang lebih maju dan meningkat jumlahnya. Perusahaan terbanyak pada tahun 2017 terdapat di Kecamatan Kota Kudus dengan jumlah 2.188 perusahaan. Sedangkan Kecamatan dengan jumlah perusahaan industri terkecil adalah pada Kecamatan Undaan pada tahun 2017 sebanyak 487 unit.

Jumlah Perusahaan Industri dan Nilai Produksi Tahun 2013 – 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.103
Jumlah Perusahaan Industri dan Nilai Produksi Tahun 2013 – 2017

No	Kecamatan	2013		2014		2015		2016		2017	
		Perus. (unit)	Nilai Produksi (Juta Rp.)	Perus. (unit)	Nilai Produksi (Juta Rp.)	Perus. (unit)	Nilai Produksi (Juta Rp.)	Perus. (unit)	Nilai Produksi (Juta Rp.)	Perus. (unit)	Nilai Produksi (Juta Rp.)
1	Kaliwungu	1.830	6.620.537,17	1.848	6.686.742,54	1.851	6.887.345,82	1.854	6.898.345,83	1.856	7.379.710
2	Kota	2.159	31.617.568,52	2.180	31.933.744,21	2.182	32.891.757,53	2.185	32.934.477,53	2.188	34.889.930
3	Jati	1.575	78.934.740,14	1.591	79.724.087,54	1.593	82.115.811,17	1.595	82.217.811,17	1.597	86.123.109
4	Undaan	472	588.177,94	477	594.059,72	478	611.882,51	486	621.582,62	487	592.193
5	Mejobo	1.804	677.037,38	1.822	683.807,75	1.825	704.322,99	1.827	708.412,65	1.829	883.447
6	Jekulo	1.065	1.019.608,57	1.076	1.029.804,66	1.078	1.060.699,80	1.080	1.256.699,81	1.082	1.088.943
7	Bae	1.270	7.833.021,43	1.283	7.911.351,64	1.285	8.148.693,20	1.287	9.414.693,30	1.288	8.539.775
8	Gebog	1.237	3.334.080,76	1.249	3.367.421,57	1.252	3.468.445,22	1.255	3.551.345,31	1.257	3.583.380
9	Dawe	1.398	1.628.979,07	1.412	1.645.268,86	1.413	1.694.627,93	1.413	1.694.628,98	1.415	1.696.601
	Jumlah	12.810	132.253.750,97	12.938	133.576.288,49	12.957	137.583.586,17	12982	139.297.997,20	12.999	144.777.088

Sumber : Dinas Naker, Perinkop dan UKM Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai produksi dari perusahaan industri di Kabupaten Kudus Tahun 2013-2017 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 nilai produksi sebesar Rp. 144.777.088 juta rupiah yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 139.297.997,2 juta rupiah.

2.3.3.6 TRANSMIGRASI

Pengiriman calon transmigran sejak tahun 2013–2017 mencapai 8 KK. Kendala pelaksanaan urusan ini adalah jumlah kuota yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat sangat terbatas dan tidak sebanding dengan animo masyarakat yang mendaftar sebagai calon transmigran, serta belum adanya kepastian lokasi daerah calon penerima transmigran karena penentuan lokasi dilaksanakan oleh Pemerintah dalam hal ini oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Capaian pengiriman transmigran Kabupaten Kudus tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.104 Capaian Pengiriman Transmigran Tahun 2013-2017						
No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah (KK)	5	3	-	-	-
2	Tujuan	UPT Siong SP.1 Desa Siong Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah	UPT Majuria Desa Sungai Bulan Kabupaten Banyuasin Sumsel	-	-	-

Sumber :Sumber : Dinas Naker, Perinkop dan UKM Tahun 2018

Dari hasil evaluasi dinas terkait, kegiatan transmigrasi tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 Kabupaten Kudus tidak direalisasikan karena lokasi tujuan setelah ditinjau kurang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki calon transmigran.

2.3. 3.3 KELAUTAN DAN PERIKANAN

Layanan Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kudus dilaksanakan dengan pembinaan dan pengembangan perikanan, melalui peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana perikanan, baik budidaya, tangkap maupun Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP).

Tabel 2.105
Produksi Perikanan Tahun 2013 – 2017

No.	Jenis Usaha	Produksi (ton)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Budidaya air tawar	1.495,53	2.069,35	2.079,91	2.107,51	2.706,00
2.	Perairan Umum	409,94	458,10	466,42	582,215	582,97
3.	Pengolahan Ikan	459,50	850,00	1.520,00	1.625,92 5	1.666,00

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2018

Berdasarkan Tabel diatas, produksi perikanan budidaya mencapai 2.706 ton pada tahun 2017, meningkat sebesar 598 ton dibandingkan produksi budidaya pada tahun 2016 sebanyak 2.107,51 ton. Jenis ikan budidaya air tawar meliputi ikan lele dan jenis ikan bersisik (nila, gurami, karper dan bandeng) yang banyak diusahakan oleh Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), baik di kolam tanah, kolam terpal, kolam permanen, maupun tambak. Produksi perikanan perairan umum relatif kecil, hanya sebesar 582,97 ton pada tahun 2017. Sementara itu produksi ikan olahan pada tahun 2017 sebanyak 1.666 ton, tidak ada perubahan berarti dari tahun 2016 sebanyak 1.625,925 ton.

Selain usaha budidaya, juga ada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dengan produk olahan seperti pengasapan ikan di Desa Kalirejo Kecamatan Undaan, pemindangan di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo dan Desa Padurenan Kecamatan Gebog, olahan bandeng (presto, otak-otak, bakso, sosis, nugget, kaki naga) di Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Desa Kramat dan Rendeng Kecamatan Kota, Desa Padurenan Kecamatan Gebog, Desa Cendono Kecamatan Dawe, Desa Jekulo Kecamatan Jekulo, serta Desa Gulang dan Payaman Kecamatan Mejobo. Usaha pengolahan ikan yang ada saat ini sebagian besar masih bersifat tradisional dengan skala produksi yang masih kecil. Berbagai upaya sudah dilakukan guna persiapan MEA 2016. Dimana produk olahan ikan harus memenuhi Sertifikasi Kelayakan Produk (SKP) untuk dapat bersaing di pasar bebas. SKP menitikberatkan pada cara pengolahan yang baik (*Good Manufacturing Procces/GMP*), sehingga dihasilkan produk yang aman, layak dikonsumsi, higienis, tanpa meninggalkan limbah (*zero waste*). Saat ini juga sudah dibentuk Asosiasi Pengolah dan Pemasar Ikan Kabupaten Kudus (APPI) yang diberi nama Mina Muria Sejahtera dengan tujuan untuk menjembatani Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan (Poklahsar) dengan *stake holders* terkait, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat, serta mendukung Program Gemar Makan Ikan (Gemarikan) dan Ketahanan Pangan Nasional.

2.3. 4. Fokus Penunjang Urusan

2.3. 4.1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangatlah diperlukan dalam suatu kebijakan pembangunan. Pada kondisi sekarang ini, masyarakat berperan sebagai obyek pembangunan dan subyek dalam pembangunan sehingga diharapkan pelaksanaan pembangunan lebih berpihak kepada masyarakat secara transparan akuntabel, dan berkelanjutan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, bahwa pemerintah harus memfasilitasi terlaksananya proses partisipatif dalam perencanaan pembangunan. Mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, maka pada tahun 2016 di *break down* program dan kegiatannya menjadi Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kudus. Rancangan awal RKPD ini, dijadikan pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan mulai dari musrenbang secara berjenjang untuk menghasilkan RKPD, yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan KUA PPAS sampai dengan penyusunan APBD. Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani, dan masalah-masalah serta tantangan yang dihadapi.

Tabel 2.106
Kinerja Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	90 %	99,64 %	98,2 %	97,9 %	98,2%
6	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100%	100%	100%	100%	100%
8	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2018

Hal-hal yang terkait dengan analisa jabatan, evaluasi jabatan dan tambahan penghasilan/tunjangan kinerja pegawai adalah sebagai Pada Tabel di atas, dapat dilihat Kinerja Indikator Perencanaan Pembangunan

Daerah Tahun 2013-2017 Kabupaten Kudus dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Perbaikan kualitas perencanaan dilaksanakan melalui aplikasi *E-Planning* yang dibangun sejak tahun 2012, dan setiap tahunnya dilakukan pengembangan. Pada saat ini, sistem *e-planning* terdiri dari menu RPJMD, renstra, simrenbang dan e-monev. Konsistensi dan akurasi perencanaan pembangunan daerah telah dilaksanakan mulai tahun 2017 dengan dukungan aplikasi yang berbasis teknologi informasi, yang berupa Sistem informasi perencanaan pembangunan (Simrenbang). Simrenbang mencakup menu musrenbang desa, musrenbang kecamatan, ranwal, usulan OPD, pokok-pokok pikiran DPRD, forgab, musrenbang, RKPD, dan KUA PPAS.

Pada tahun 2018 simrenbang dikembangkan dengan menambahkan modul baru yaitu sistem musrenbang desa dan sistem musrenbang kecamatan. Sistem Musrenbang Desa dibangun untuk mengakomodasi hasil musrenbang desa yang diinput oleh tiap – tiap desa yang ada di Kabupaten Kudus. Hasil Musrenbang Desa akan diusulkan dan dijadikan sebagai data awal dari Sistem Musrenbang Kecamatan. Sistem Musrenbang Kecamatan dibangun selain untuk mengakomodasi usulan dari Kecamatan sendiri, juga berperan sebagai modul verifikasi Hasil Musrenbang Desa yang akan diusulkan ke tahap perencanaan selanjutnya. Hasil verifikasi dari sistem musrenbang kecamatan akan dibawa ke tahap Forum Gabungan di Simrenbang untuk diverifikasi oleh OPD terkait sesuai dengan usulan – usulan hasil musrenbang kecamatan.

2.3. 4.2 KEUANGAN

Pengelolaan pendapatan daerah terutama yang bersumber dari hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Tabel 2.107
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2013-2017
Kabupaten Kudus

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Realisasi (Rp)	144.995.092.035	234.073.380.352	59.295.905.248,86	279.239.106.717	366.031.203.778
2	Kenaikan (%)	19,81	61,44	10,78	7.69	31.08

Sumber : BPPKAD Tahun 2018

Jumlah PAD Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan PAD. Pada tahun 2017 PAD meningkat sebesar 31,08%.

Peningkatan tersebut karena di tahun 2017 terdapat dana bos yang dianggarkan dalam pos lain – lain PAD yang sah.

Di tahun 2016 juga mulai dilakukan pemeriksaan pajak yang berdampak pada kenaikan pajak. Selain itu juga adanya penambahan obyek pajak baru (rumah kos). Pengelolaan keuangan desa perlu mendapatkan perhatian bersama. Terutama dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dari Pemerintah Pusat melalui APBD, pengelolaan keuangan harus dapat dilaksanakan dengan transparans, akuntabel, partisipasif serta tertib dan disiplin. Peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya di tingkat Pemerintah Desa sebagai pengelola keuangan desa perlu mendapat perhatian yang serius, sehingga nantinya tidak ada permasalahan hukum yang terjadi serta diharapkan program-program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan dapat dilaksanakan secara efektif, untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Indikator keuangan di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.108
Indikator Keuangan Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2	Besaran SILPA (dlm juta rp)	323.863	420.502,50	446.159,67	182.034,30	138.933,94
2.3	Persentase SILPA terhadap APBD	24,77	23,16	20,96	7,42	6,41
2.4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	11,64	16,91	19,62	13,33	7,44
2.5	Persentase belanja pendidikan (20%)	38,16	30,67	29,97	26,36	30,03
2.6	Persentase belanja kesehatan (10%)	12,2	10,71	11,67	14,67	12,96
2.7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	0,56	0,78	0,84	1,05	0,89
2.8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa (dlm juta rp)	74958,69515	95320,9885	112356,678	113828,8738	134625,008
	Persentase Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	5,73	5,25	5,28	4,64	6,21
2.9	Penetapan APBD	tdk tepat t	tepat t	tepat t	tepat t	tepat t

Sumber : BPPKAD Tahun 2018

2.3. 4.3 KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terjadi perubahan konsep manajemen dan pengaturan kepegawaian. PNS dituntut untuk lebih profesional, berdayaguna, memiliki integritas dan memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang dimiliki dan juga harus mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara optimal.

Di samping itu, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga berdampak munculnya beberapa implikasi, salah satunya adalah perubahan manajemen penggajian. PNS mendapatkan gaji dan tunjangan sesuai beban kerja, tanggungjawab, pencapaian kinerja dan kompetensi masing-masing jabatan. Untuk mengukur beban kerja dan tanggungjawab tersebut, dilakukan pemeringkatan jabatan/pekerjaan pada PNS dalam nilai dan kelas jabatan yang disebut dengan Evaluasi Jabatan. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dilakukan pada Tahun 2015 pada 15 SKPD berikut :

1. Analisis Jabatan yang memuat informasi jabatan yang lengkap dan akurat akan digunakan sebagai dasar melaksanakan evaluasi jabatan.
2. Evaluasi Jabatan lebih difokuskan untuk menentukan bobot jabatan dan tingkat jabatan.
3. Hasil Evaluasi Jabatan yang berupa klasifikasi dan peringkat jabatan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan kebijakan tambahan penghasilan dan tunjangan kinerja pegawai.

Langkah-langkah konkrit untuk perbaikan kinerja aparatur pemerintah daerah sebagai penyedia layanan terhadap masyarakat dilaksanakan melalui peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah secara professional dan terencana. Peningkatan kualitas SDM aparatur antara lain melalui penyelenggaraan diklat aparatur baik teknis, kepemimpinan maupun fungsional, pengiriman tugas belajar dan fasilitasi ijin belajar, pelaksanaan bintek dan kursus keahlian. Perkembangan komposisi aparatur pada Pemerintahan Kabupaten Kudus tahun 2013-2017 sebagaimana tertera pada Tabel berikut.

Tabel 2.109
Rekap Jumlah Pegawai Kabupaten Kudus Tahun 2013-2017

No	Tahun		2013	2014	2015	2016	2017
1	Struktural		562	556	549	560	566
2	Fungsional	5.196	5.056	4.408	4.408	4.004	3.868
		1.042	955	1.372	1.372	1.014	979
		2.461	2.425	2.496	2.496	2.236	2.037
3	PNS		9.261	8.992	8.825	7.814	7.450
4	CPNS		-	59	121	-	118
	Jumlah		9.261	9.051	8.946	7.814	7.568

Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018

Jumlah PNS dan CPNS Tahun 2013-2017 terbagi dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional sebagaimana dalam tabel di atas. Untuk Jabatan Fungsional terbagi dalam Guru, Non Guru (misal: Auditor, Dokter, Bidan, Perawat, Penguji Kendaraan Bermotor, Penyuluh Pertanian, dan lain-lain) dan Staf. Dari tahun 2013 sampai dengan 2017 jumlah keseluruhan pegawai (PNS dan CPNS) terlihat mengalami penurunan setiap tahunnya dikarenakan banyaknya pegawai yang pensiun, penerimaan CPNS yang sedikit pada tahun 2014 dan 2015 dibandingkan dengan jumlah pegawai yang pensiun semakin menjadikan banyak penurunan. Tahun 2014 CPNS yang masuk 59 orang terdiri dari 50 formasi tenaga pendidik (guru) dan 9 formasi tenaga kesehatan (dokter). Tahun 2015 terdapat CPNS yang masuk sebanyak 121 orang dari CPNS K2 formasi tahun 2013. Di tahun 2016 terdapat penurunan yang signifikan pada Jabatan Fungsional Guru disebabkan karena perubahan status Guru SMA/SMK Kabupaten menjadi Guru SMA/SMK Provinsi berdasarkan amanat UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan pada pengelolaan pendidikan menengah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, dan ditahun 2017 CPNS yang masuk 118 orang.

Tabel 2.110
Indikator Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	11 JP	10 JP	8 JP	4 JP	35 JP
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0,29	0,28	0,09	0,09	0,42
3	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	12,1	6,45	6,61	0,48	0
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	16	19	24	26	27
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	2.506	2.884	2.498	2.236	2.009
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	6.205	6.011	5.939	5.018	4.847

Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018

2.3. 4.4 **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Tabel 2.111
Persentase implementasi rencana kelitbangan

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Kelitbangan RKPD	-	-	2	2	2
2	Jumlah Kelitbangan RPJMD	-	-	2	2	2
3	Presentase	0	0	100	100	100

Sumber : Bappelitbangda Kab Kudus 2018

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kelitbangan di Kabupaten Kudus dilaksanakan mulai Tahun 2015 s.d. 2017 dan terlaksana 100%.

Tabel 2.112
Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Perangkat Daerah Yang Difasilitasi	21	25	30	35	49
2	Jumlah Total Perangkat Daerah	53	53	53	53	50
3	Presentase	40	47	57	67	98

Sumber : Bappelitbangda Kab Kudus 2018

Tampak pada tabel diatas bahwa jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah meningkat, dari 21 perangkat daerah di tahun 2013 menjadi 49 perangkat daerah, artinya setiap tahun menunjukkan peningkatan presentase cakupan penerapan inovasi, hanya di tahun 2017 masih kuran satu perangkat daerah saja, yaitu Kecamatan Dawe, dikarenakan tidak adanya data yang tersedia.

Tabel 2.113
Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan Di Daerah

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan	-	-	-	-	109
2	Jumlah Inovasi Yang Diusulkan	-	-	-	-	109
3	Presentase	-	-	-	-	100

Sumber : Bidang Litbang, Bappelitbangda Kab Kudus 2018

Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Kudus sangat konsen terhadap inovasi di daerah, hal ini dapat diketahui adanya inovasi yang diterapkan pada tahun 2017, Pada tahun-tahun sebelumnya sebenarnya terdapat inovasi namun belum dokumen dalam data.

2.3. 4.5 **PENGAWASAN**

Penyelenggaraan pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan internal dengan didukung oleh tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang profesional.

Tabel 2.114
Indikator Pengawasan Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase tindak lanjut temuan					
2	Persentase pelanggaran pegawai	0,10	0,10	0,10	0,06	0,24
3	Jumlah temuan BPK					

Sumber : Inspektorat Tahun 2018

Persentase pelanggaran pegawai di Kabupaten Kudus sedikit mengalami kenaikan dari tahun 2013 yang sebesar 0,10% menjadi 0,24% di tahun 2017.

2.3. 4.6 **SEKRETARIAT DEWAN**

Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus salah satunya dapat diukur melalui jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus yang dihasilkan untuk periode Tahun 2013-2017, sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.115
Jumlah Peraturan Daerah Tahun 2013-2017 Kabupaten Kudus

No	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Perda Kab. Kudus No. 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Perda Kab. Kudus No. 1 Tahun 2014 tentang APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014	Perda Kab. Kudus No. 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan atau Kelurahan Menjadi Desa.	Perda No. 1 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban APBD Kab. Kudus TA 2015	Perda No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus
2	Perda Kab. Kudus No. 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak	Perda Kab. Kudus No. 2 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018	Perda Kab. Kudus No. 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa	Perda No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan APBD Tahun 2016	Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
3	Perda Kab. Kudus No. 3 Tahun 2013 tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah	Perda Kab. Kudus No. 3 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2013	Perda Kab. Kudus No. 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata kerja Pemertintah desa	Perda No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kab. Kudus	Perda No. 3 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal
4	Perda Kab. Kudus No. 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengendalian dan Pengawasan Warung Internet.	Perda Kab. Kudus No. 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung	Perda Kab. Kudus No. 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan pemberhentian Perangkat Desa	Perda No. 4 Tahun 2016 tentang APBD Kab. Kudus TA 2017	Perda No. 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah
5	Perda Kab. Kudus No. 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2010 tentang	Perda Kab. Kudus No. 5 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar	Perda Kab. Kudus No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa		Perda No. 5 Tahun 2017 tentang Pencabutan 6 (enam) Peraturan daerah Kabupaten Kudus

No	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
	Izin Usaha Jasa Kontruksi	Kabupaten Kudus			
6	Perda Kab. Kudus No. 6 Tahun 2013 tentang Perpasaran Swasta	Perda Kab. Kudus No. 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lemtekda, Satpol PP dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus.	Perda Kab. Kudus No. 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di kabupaten Kudus		Perda No. 6 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
7	Perda Kab. Kudus No. 7 Tahun 2013 tentang Penyertaan Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Usaha Mikro dan Koperasi di Kabupaten Kudus	Perda Kab. Kudus No. 7 Tahun 2014 tentang Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014	Perda Kab. Kudus No. 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kudus		Perda No. 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa
8	Perda Kab. Kudus No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Perda Kab. Kudus No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan ketertiban dalam Wilayah Kabupaten daerah Tingkat II			Perda No. 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala desa

No	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
		Kudus			
9		Perda Kab. Kudus No. 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015	Perda Kab. Kudus No. 9 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014		Perda No. 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
10			Perda Kab. Kudus No. 10 Tahun 2015 tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, dan Penataan Hiburan Karaoke		Perda No. 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa
11			Perda Kab. Kudus No. 11 Tahun 2015 tentang Perubahan APBD Kab. Kudus Th 2015		Perda No. 11 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
12			Perda Kab. Kudus No. 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kudus Tahun Anggaran 2016		Perda No. 12 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan di Kabupaten Kudus
13			Perda Kab. Kudus No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan		Perda No. 13 Tahun 2017 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
			Olah raga		
14			Perda Kab. Kudus No. 14 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin mendirikan Bangunan		Perda No. 14 Tahun 2017 tentang Fasilitas Pencegahan dan penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan/atau Peredaran Gelap Narkotika di kabupaten Kudus
15					Perda No. 15 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Gelandangan, pengemis dan Anak Jalanan
16					Perda No. 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama Desa
17					Perda No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
18					Perda No. 18 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus TA. 2016
19					Perda No. 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kudus
20					Perda No. 20 Tahun 2017 tentang Perubahan

No	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
					APBD Kab. Kudus Tahun Anggaran 2017
21					Perda No. 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Tahun 2018

Penetapan Perda pada tahun 2013 sebanyak 8 Perda, Tahun 2014 sebanyak 9 Perda dan Tahun 2015 sebanyak 15 Perda, dan tahun 2016 sebanyak 4 Perda dan tahun 2017 sebanyak 21 perda. Pada Tahun 2014 Perda yang dihasilkan relatif lebih banyak dibandingkan Tahun 2013, hal ini disebabkan Tahun 2014 merupakan masa transisi/peralihan DPRD lama (periode 2009-2014) dengan DPRD baru (periode 2014-2019) sehingga pembahasan beberapa Ranperda tidak efektif. Perubahan pola yang baik terjadi pada penetapan Perda APBD pada Tahun 2015, dimana Perda APBD Tahun Anggaran 2015 telah tersusun dan ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula pada penetapan Perda APBD tahun 2016 yang ditetapkan pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 telah dihasilkan sebanyak 21 Perda. Tingkat kepuasan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat dipengaruhi oleh beberapa variabel, antara lain variabel: jumlah Desa/Kelurahan per Kecamatan, jumlah RT/RW per Kecamatan, jumlah Alokasi Dana Desa (ADD), serta jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (termasuk Bagi Hasil Pasar Desa). Perkembangan jumlah penduduk mendorong peningkatan aktivitas masyarakat, sehingga Pemerintah harus meningkatkan mutu layanan.

Tabel 2.116
Indikator Sekretariat Dewan Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat DPRD Tahun 2018

Rencana kerja tahunan pada alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kudus yang telah tersusun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dapat terintegrasi pada program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran dalam dokumen RPJM, RKPD serta dokumen perencanaan dan anggaran Setwan DPRD.

2. 4. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4. 1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah merupakan kapasitas ekonomi daerah yang memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiflier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Kemampuan ekonomi daerah ini dapat dilihat dari :

2.4.1. 1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Tabel 2.117
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2013—2017

Uraian	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	17.826,95	19.533,44	21.176,45	22.702,15	24.622,82
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	15.387,83	16.032,86	16.761,98	17.544,88	18.329,98
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	25,35	24,79	25,17	25,24	25,25
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB	17.826,95	19.533,44	21.176,45	22.702,15	24.622,82
b. ADHK 2010	15.387,83	16.032,86	16.761,98	17.544,88	18.329,98
Rata-rata konsumsi per-kapita/ tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB	88.157,94	95.382,32	102.139,35	108.240,00	115.945,75
b. ADHK 2010	76.095,99	78.288,89	80.847,25	83.651,01	86.313,56
Pertumbuhan ADHK 2010					
a. Total konsumsi RT	4,57	4,19	4,55	4,67	4,47
b. Per-RT	3,23	2,88	3,27	3,47	3,18
c. Perkapita	3,22	2,89	3,26	3,40	4,47
Jumlah RT (unit)	202.216	204.791	207.329	209.739	209.739
Jumlah penduduk	810.893	821.109	831.303	841.499	841.499
*) Angka Sementara					
**) Angka Sangat Sementara					

Sumber : PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2013 – 2017, BPS Kudus 2018

Berdasarkan tabel di atas, tercermin bahwa dalam kurun waktu 2013 – 2017 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan. Kenaikan konsumsi rumah tangga secara riil meningkat sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, tetapi laju pertumbuhan untuk konsumsi akhir rumah tangga cenderung menurun. Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 cenderung meningkat meskipun tidak signifikan.

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, secara umum setiap

rumah tangga di Kabupaten Kudus menghabiskan dana sekitar Rp.88.157,94 ribu rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi Rp.95.382,32 ribu rupiah (2014); 102.153,29 ribu rupiah (2015); 108.129,72 ribu rupiah (2016); dan menjadi 115.945,75 ribu rupiah (2017).

2.4.1. 2 Nilai Tukar Petani

Perkembangan Nilai Tukar Petani di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.118
Perkembangan NTP Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	103,41	105,41	101,1	101,1	100,17

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, NTP pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya 2016, hal ini dipengaruhi oleh naiknya beberapa kebutuhan bahan pokok, Perkembangan Nilai Tukar Petani dirinci per bulan pada tahun 2016 dan tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.119
Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2016 & Tahun 2017

No	Bulan	NTP 2016	NTP 2017
1.	Januari	101,46	97,27
2.	Pebruari	102,28	97,28
3.	Maret	98,30	96,82
4.	April	97,29	97,40
5.	Mei	98,10	98,25
6.	Juni	99,21	98,95
7.	Juli	98,93	99,84
8.	Agustus	98,67	101,22
9.	September	99,41	102,54
10.	Oktober	102,43	103,83
11.	Nopember	102,85	104,23
12.	Desember	102,25	104,38

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Tahun 2018

Rata-rata NTP tahun 2017 sebesar 100,17. Ini berarti bahwa selama tahun 2017 petani di Kabupaten Kudus mengalami sedikit surplus, atau dengan kata lain nilai yang diterima petani dari hasil produk pertaniannya sedikit lebih besar jika dibanding nilai yang dibayar petani untuk konsumsi rumah tangga, biaya produksi dan penambahan barang modalnya.

2.4.1.3 **Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita**
(Persentase Konsumsi Rumah Tangga Non-Pangan)

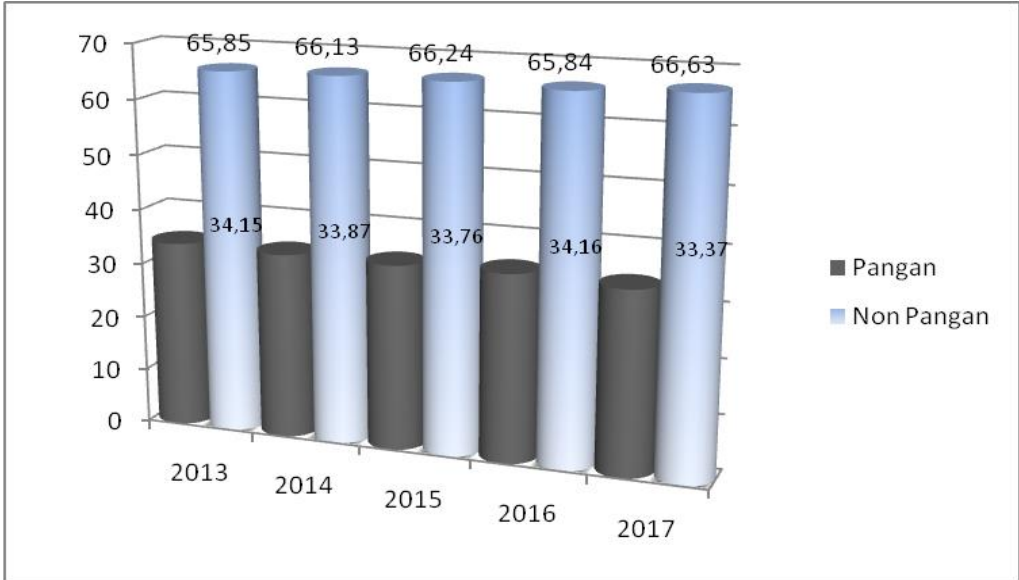
Tabel 2.120
Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun2013 – 2017
(Atas Dasar Harga Berlaku) dalam Persen

Kelompok Konsumsi	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman dan Rokok	34,15	33,87	33,76	34,16	33,37
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,48	4,42	4,38	4,40	4,37
c. Perumahan, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	13,71	13,84	13,55	13,44	13,50
d. Kesehatan dan Pendidikan	8,06	8,14	8,19	8,27	8,31
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	29,66	29,58	29,82	29,15	29,88
f. Hotel dan Restoran	7,14	7,41	7,53	7,79	7,82
g. Lainnya	2,80	2,74	2,77	2,78	2,74
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

^{*)} Angka Sementara
^{**)} Angka Sangat Sementara

Sumber : PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2013 – 2017, BPS Kudus 2018

Gambar 2.23. Perbandingan Pola Konsumsi Pangan dan Non Pangan



Sumber : PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2013 – 2017, BPS Kudus 2018

Sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, kontribusi konsumsi bukan makanan terhadap total konsumsi lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan / pangan selama periode tersebut cenderung berada pada kisaran yang terus menurun, yaitu 34,85 persen (2012); 34,15 persen (2013); 33,87 persen (2014); 33,65 persen (2015); 34,05 persen (2016); dan 33,05 persen (2017).. Hal ini mengindikasikan kondisi perekonomian modern.

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan pergeseran yang relatif kecil antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan. Walaupun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

2.4. 2. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator:

Tabel 2.121
Kinerja infrastruktur tahun 2013 – 2017 di Kabupaten Kudus

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
2	Persentase panjang jalan kondisi baik	73,7	81,1	88,1	73,6	83,9
3	Presentase rumah tinggal bersanitasi	93,17	96,13	94,13	95,05	96,88
4	Presentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	60,07	77,34	80,48	81,17	86,00
5	Presentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	61,37	71,19	75,67	77,15	79,42
6	Rasio Jaringan irigasi	0,0018	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016
7	Presentase penduduk berakses air minum	76,42	82,00	85,40	87,99	91,00

Sumber : SIPD – Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2018

2.4. 2. Fokus Iklim Berinvestasi

Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilihat dari indikator angka kriminalitas dan unjuk rasa yang menggambarkan kondusivitas wilayah di Kabupaten Kudus.

2.4.3. 1. Kriminalitas

Tabel 2.122
Jumlah Tindak Kriminal, Jumlah Tindak Kriminal yang ditangani dan Angka Kriminalitas Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
I	Jumlah Tindak Kriminal	294	272	218	244	209
	1. Jumlah kasus narkoba	6	7	13	16	19
	2. Jumlah kasus pembunuhan	0	0	2	2	1

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
	3. Jumlah kasus seksual	16	16	12	14	9
	4. Jumlah kasus penganiayaan	45	60	42	31	31
	5. Jumlah kasus pencurian	164	139	117	148	120
	6. Jumlah kasus penipuan	62	49	26	33	29
	7. Jumlah kasus pemalsuan uang	1	1	6	0	0
II	Jumlah Tindak Kriminal yang Ditangani	114	134	109	113	137
	1. Jumlah kasus narkoba	6	7	13	16	19
	2. Jumlah kasus pembunuhan	0	0	2	1	0
	3. Jumlah kasus seksual	13	11	10	10	10
	4. Jumlah kasus penganiayaan	35	55	27	23	26
	5. Jumlah kasus pencurian	38	46	44	53	66
	6. Jumlah kasus penipuan	22	14	7	10	16
	7. Jumlah kasus pemalsuan uang	0	1	6	0	0
III	Jumlah Penduduk	799.435	802.239	803.145	830.221	835.318
IV	Angka Kriminalitas	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02

Sumber : SIPD – Polres Kudus Tahun 2018

2.4.3. 2. Unjuk Rasa

Tabel 2.123
Jumlah Unjuk Rasa Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
	Unjuk Rasa					
1	Bidang Politik	7	9	2	9	2
2	Bidang Ekonomi	11	7	12	2	2
3	Bidang lainnya	8	22	16	18	17
4	Jumlah	26	38	30	29	21

Sumber : SIPD – Polres Kudus Tahun 2018

Iklim investasi merupakan pertimbangan bagi investor dalam rangka penanaman modal. Iklim investasi dapat dilihat dari angka kriminalitas, pelayanan perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, banyaknya demonstrasi, perda yang mendukung usaha. Kabupaten Kudus relatif kondusif sebagai daerah tujuan investasi terlihat dari jumlah demo (politik, ekonomi dan Lainnya) rata-rata 28,8 kasus, namun dampaknya terhadap investasi kurang signifikan mengingat realisasi investasi tetap meningkat. Adapun angka kriminalitas di Kudus cenderung relatiif stabil.

2.4. 4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia diukur diantaranya dengan kualitas tenaga kerja dan rasio ketergantungan sebagaimana berikut :

Tabel 2.124
Rasio Lulusan Akademi/S1/S2/S3 Kabupaten Kudus

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah lulusanAkademi/ S1/S2/S3	37.862	36.813	37.175	39.497	40.411
2.	Jumlah penduduk	799.435	802.239	803.145	830.221	835.318
3.	Rasio lulusan Akademi/S1/S2/S3 (4/5)	4,74	4,59	4,63	4,76	4,84

Sumber : SIPD - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, diketahui rasio lulusan Akademi / S1 / S2 / S3 di Kabupaten Kudus meningkat dari tahun 2013 dengan jumlah 4,74% menjadi 4,84% pada tahun 2017. Hal ini menggambarkan peningkatan tenaga kerja di Kabupaten Kudus yang memenuhi kualifikasi pendidikan Akademi/S1/S2/S3.

Tabel 2.125
Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur Tahun 2013-2017

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
0-14	169.375	191.371	187.285	195.310	190.543
15-64	584.623	567.060	569.499	584.169	592.830
>65	45.437	43.808	46.361	50.742	51.945
Jumlah	799.435	802.239	803.145	830.221	835.318
Rasio Ketergantungan	36,74	41,47	41,03	42,12	40,9

Sumber : SIPD - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2018

Komposisi penduduk menurut kelompok umur, merupakan potret struktur penduduk setempat yang menggambarkan potensi penduduk produktif dan rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Rasio ketergantungan merupakan rasio antara kelompok penduduk usia tidak produktif (usia 0 – 14 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap penduduk kelompok penduduk usia produktif (usia 15 – 65 tahun). Rasio Ketergantungan di Kabupaten Kudus pada tahun 2013 - 2017 relatif fluktuatif, yaitu pada tahun 2013 sebesar 36,74%, dan pada tahun 2017 menjadi sebesar 40,90%.

2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2017 dan Realisasi RPJMD sampai dengan Tahun 2017

Evaluasi ini mencakup uraian evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah meliputi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2017 dengan realisasi RPJMD sampai dengan tahun 2017. Evaluasi pelaksanaan program RKPD tahun 2017 dan realisasi RPJMD tahun 2017 meliputi seluruh program yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan dan Perangkat Daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD baik urusan wajib maupun pilihan.



















Selanjutnya evaluasi pelaksanaan urusan dan program RKPD tahun 2017 dan realisasi RPJMD sampai dengan tahun 2017dijabarkan sebagai berikut.


















2.5.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar











































1. Pendidikan



Kinerja penyelenggaran urusan Pendidikan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 45 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel.

Tabel 2.115
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Terhadap Target RKPD Tahun 2017 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)											
1.	APK PAUD	50%	52%	55,46%	57,98	58%	60%	60%	76,55%			Disdikpora
II	PROGRAM PENDIDIKAN DASAR											
2.	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	95%	100%	105,89 %	107,52	100%	100%	100%	107,78%			Disdikpora
3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	95%	>95%	98,66%	98,7%	> 95%	> 95%	> 95%	99,83%			Disdikpora
4.	Bangunan SD/MI dalam kondisi baik	91,80%	93,80%	91,31%	92,52	99,80%	100%	100%	91,09%			Disdikpora
	a. Bangunan SD dalam kondisi baik	91,89%		89,2%	91,82	99,89%	100%	100%	96,02%			Disdikpora
	b. Bangunan MI dalam kondisi baik	91,53%		93,42%	94,39	99,53%	100%	100%	78,80%			Disdikpora
5.	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,03%	0,03%	0,02%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%			Disdikpora
6.	Rata-rata Kelulusan SD/MI	99%	99%	100%	100	99%	99%	99%	100%			Disdikpora
7.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100%	100%	110,13 %	109,62	100%	100%	100%	112,09			Disdikpora

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	PersentaseSD/MI yang mempunyai Perpustakaan	85,81	86,81%	68,6	71,99	89,81	90,81	90,81	75,90			Disdikpora
	a. persentase SD yang mempunyai perpustakaan	89,10		68,62	70,95	93,10	94,10	94,10	74,32			Disdikpora
	b. persentase MI yang mempunyai perpustakaan	74,64		70,21	74,47	78,64	79,64	79,64	80,85			Disdikpora
9.	Rata-rata nilai UN SD/M	7,2	7,21	7,03	7,87	7,24	7,25	7,25	7,20			Disdikpora
10.	Persentase SD/MI yang terakreditasi	99,78	99,78	100%	100	100	100	100	100			Disdikpora
11.	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	95%	100%	105,49 %	106,79	100%	100%	100%	107,22			Disdikpora
12.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	95%	>95%	96,80%	97,69	> 95%	> 95%	> 95%	97,97			Disdikpora
13.	Bangunan SMP kondisi baik	91,22%	91,22%	99,47%	95,74	91,86%	92,02%	92,02%	93,38			Disdikpora
14.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,11%	0,11%	0,07%	0,07	0,10%	0,10%	0,10%	0,09			Disdikpora
15.	Rata-rata Kelulusan SMP/MTs	99%	99%	99,97%	99,99	99%	99%	99%	99,99%			Disdikpora
16.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	90,00%	90,10%	98,22%	97,56	93%	95%	95%	100,83%			Disdikpora
17.	Rasio ketersediaan sekolah (SMP/MTs) terhadap penduduk usia sekolah	27,76%	27,81%	27,33%	28,93	27,96%	28,01%	28,01%	27,65			Disdikpora
18.	persentaseSMP/MT s yang mempunyai Perpustakaan	60,00	61,80	60,52	76,52	67,53	90,00	90,00	80,70			Disdikpora
19.	Rata-rata nilai UN SMP/MTs	7,01	7,1	59,44	5,6	7,4	7,5	7,5	5,56			Disdikpora
20.	persentaseSMP/MT s yang terakreditasi	100	100	100	100	100	100	100	100			Disdikpora
III	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH											
21.	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/ Paket C	86,79%	86,79%	91,74%	93,33	88%	90,00%	90,00%	95,36			Disdikpora
22.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C	75%	76 %	84,23%	84,33	79%	80%	80%	84,54%			Disdikpora
23.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,12%	0,12 %	0,07%	0,06	0,11%	0,11%	0,11%	0,07%			Disdikpora
24.	Rata-rata Kelulusan SMA/SMK/MA	99,00%	99 %	99,99%	99,98	99,00%	99,00%	99,00%	99,98%			Disdikpora
25.	Bangunan SMA/SMK kondisi baik	95,68%	95,68%	92,94%	92,53	95,92%	95,98%	95,98%	93,76%			Disdikpora
26.	persentaseSMA/MA /SMK yang mempunyai Perpustakaan	55,84	57,52	55	54,88	62,85	64,73	64,73	64,63%			Disdikpora
27.	Rata-rata nilai UN SMA/MA/SMK	7,56	7,57	65,74	60,97	7,60	7,6	7,6	-	-		Disdikpora
28.	persentaseSMA/MA /SMK yang terakreditasi	96,69	96,69	100	100	100	100	100	100			Disdikpora

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL											
29.	Angka Melek Huruf	100%	100%	99,87%	99,888	100%	100%	100%	99,87%			Disdikpora
30.	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)											Disdikpora
	- SD + MI	6	6	6	6	6	6	6	6			Disdikpora
	- SMP + MTs	3	3	3	3	3	3	3	3			Disdikpora
	- SMA+MA	3	3	3	3	3	3	3	3			Disdikpora
	- SMK	3	3	3	3	3	3	3	3			Disdikpora
	- SM+MA	3	3	3	3	3	3	3	3			Disdikpora
	- SD+MI+SMP+MT S+SMA+SAMK+ MA	12	12	12	12	12	12	12	12			Disdikpora
31.	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun	> 95%	>95%	102,19 %	102,4	> 95%	> 95%	> 95%	103,79%			Disdikpora
32.	Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun	80%	>95%	103,75 %	106,27	> 95%	85%	85%	102,27%			Disdikpora
33.	Angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun	80%	81 %	86,17%	85,95	84%	85%	85%	85,94%			Disdikpora
34.	Jumlah kegiatan penunjang program pendidikan dan dokumen perencanaan pendidikan	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%			Disdikpora
V	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN											
35.	Rasio Guru/Murid SD/MI	829,08	829,28	805,19	801,42	829,88	830,08	830,08	777,56%			Disdikpora
36.	Rasio Guru/Murid SMP/MTs	759,31	759,51	690,60	697,64	760,11	760,31	760,31	686,43%			Disdikpora
37.	Rasio Guru/Murid SMA	781,12	819,27	726,91	690,13	792,95	793,15	793,15	671,64%			Disdikpora
38.	Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	59,60%	59,80%	87,84%	91,45	61,00	61,60%	61,60%	93,49%			Disdikpora
39.	Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	93,05%	93,25%	94,93	95,56	94,45%	95,05%	95,05%	96,10%			Disdikpora
40.	Guru SMA yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	93,91%	94,11%	95,49	96,09	95,81%	95,91%	95,91%	96,83%			Disdikpora
41.	Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	94,34%	94,54%	95,44	95,45	95,74%	96,34%	96,34%	95,78%			Disdikpora
42.	Jumlah guru TK tersertifikasi	412	419	354	335	440	447	447	447			Disdikpora
43.	Jumlah guru SD tersertifikasi	2.807	2.821	3.020	2486	2.863	2.877	2.877	2421			Disdikpora
44.	Jumlah guru SMP tersertifikasi	975	982	912	837	1.003	1.010	1.010	829			Disdikpora

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45.	Jumlah guru SMA/SMK tersertifikasi	955	961	806	820	979	985	985	985			Disdikpora

Keterangan:

<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target RKPD Tahun 2018: 		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2017 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 perlu upaya keras

































Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Pendidikan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017, dari sejumlah 45 target indikator, sebanyak 29 target berstatus telah tercapai, 15 target tidak tercapai, dan 1 target tidak terdapat datanya, karena SMA/SMK sudah menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 45 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 29 target indikator berstatus telah tercapai, 4 target berstatus akan tercapai dan sejumlah 12 target indikator berstatus perlu upaya keras.


2. Kesehatan





















Kinerja penyelenggaran urusan Kesehatan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 52 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel.

Tabel 2.116
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Terhadap Target RKPD Tahun 2017
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT											
1.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA (+)	69%	80%	70%	100%	> 70%	> 70%	> 70%	80%			Dinkes

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Dinkes
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit :											
3.	1) Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun	≥ 2	≥ 2	4 kasus	4 kasus	≥ 2	≥ 2	≥ 2	5			Dinkes
4.	2) Penemuan penderita pneumonia balita	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Dinkes
5.	3) Penemuan penderita diare	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Dinkes
6.	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Dinkes
7.	Angka kesakitan DBD per 100.000 Penduduk	58	53,34	9,14	93	< 20	< 20	< 20	13			Dinkes
8.	Persentase penderita HIV AIDS yang Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Dinkes
9.	Prevalensi HIV	2,3/100 .000	0,076 %	0,05/ 100.000	<10/100 .000	<9/100.000	<9/100.000	<9/100.000	<9/100.000			Dinkes
10.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit tidak menular	-	100%	100%	100%	54%	56%	56%	54%			Dinkes
11.	Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Dinkes
II	PROGRAM FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN											
12.	Persentase ketersediaan obat sesuai Kebutuhan	100%	103%	90,43	100%	100%	100%	100%	96,55%			Dinkes
13.	Cakupan ketersediaan alat-alat kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Dinkes
14.	Terpenuhinya kebutuhan sarpras puskesmas/pustu dan jaringannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Dinkes
15.	Persentase industri pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	7,69%	85%	91,11	100%	7,99%	8,07%	8,07%	60,6%			Dinkes
16.	Cakupan tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	71%	78%	78%	91,78%	80%	82%	82%	85.5%			Dinkes
III	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN											
17.	Angka usia harapan hidup	76,39	76,40	76,41	76,41	69,69	69,7	69,7	76.44			Dinkes

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	7,1	7,5	9,75	8,05	6,6	6,5	6,5	6,07			Dinkes
19.	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidu	132,68	164,87	115,5	103,5	96	96	96	72,59			Dinkes
20.	Persentase balita gizi buruk (BB/TB)	0,76%	0,016 %	0,02 %	0,79	0,71%	0,70%	0,70%	0.11%			Dinkes
21.	Cakupan puskesmas	211,1%	211,1 %	211%	211,1%	211,1%	211,1%	211,1%	211.1%			Dinkes
22.	Cakupan puskesmas pembantu (pustu)	28,79%	32,58 %	32,58 %	32,57%	28,79%	28,79%	28,79%	28,80%			Dinkes
23.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Dinkes
24.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Dinkes
25.	Rasio puskesmas per 100.000 penduduk	2,40	2,31	2,29	2,26	2,40	2,40	2,40	2,29			Dinkes
26.	Rasio pustu per 100.000 penduduk	5,05	5,24	5,17	4,9	5,05	5,05	5,05	4,93			Dinkes
27.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100.000 jumlah penduduk)	1,26	1,22	1,26	1,20	1,26	1,26	1,26	1,20			Dinkes
28.	Rasio BP/RB (klinik) per 100.000 penduduk	3,42	3,65	5,14	4,57	3,46	3,47	3,47	5,15			Dinkes
29.	Rasio posyandu per satuan balita	87	86	89	88	50	44	44	83			Dinkes
30.	Cakupan balita gizi buruk mendapat Perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Dinkes
31.	Cakupan pemberian MP-ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	100%	100%	100%	60,4%	100%	100%	100%	100%			Dinkes
32.	Prevalensi balita gizi buruk	0,76%	0,016 %	0,03 %	0,79%	0,71%	0,70%	0,70%	0,75%			Dinkes
33.	Prevalensi balita gizi kurang	5,82%	0,35%	0,43 %	3,01%	5,65%	5,60%	5,60%	3,21%			Dinkes
34.	Cakupan kunjungan bayi	90%	97,85 %	94,77 %	96,25%	100%	100%	100%	96,99%			Dinkes
35.	Cakupan pelayanan anak balita	83%	93,57 %	81,64 %	82,91%	85%	85%	85%	91,53%			Dinkes
36.	Cakupan kunjungan neonatal pertama	100%	97,85 %	98,78 %	98,37	100%	100%	100%	100%			Dinkes
37.	Cakupan pelayanan kesehatan pra usila dan usia lanjut	78%	80%	79,89 %	98,75%	80%	80%	80%	81,66%			Dinkes
38.	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	95%	95,04 %	94,37 %	93,29%	95%	96,20%	96,20%	96,02			Dinkes
39.	Cakupan pelayanan nifas	94,30%	95,90 %	94,30 %	93,07%	95%	96,5%	96,5%	99,36%			Dinkes
40.	Cakupan peserta KB aktif	79,0%	80,71 %	80,4 %	80%	81%	82%	82%	80%			Dinkes
41.	Cakupan komplikasi kebidanan yang Ditangani	100%	92,96 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Dinkes
42.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang Ditangani	90,0%	92,33 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Dinkes

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90,0%	95,94 %	94,70	93,59%	95,7%	96,0%	96,0%	100%			Dinkes
IV	PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN											
44.	Cakupan penduduk menggunakan air bersih	79%	82%	87%	89,91%	88%	90%	90%	90%			Dinkes
45.	Cakupan penduduk yang menggunakan jamban sehat	69%	70%	77%	84%	80%	83%	83%	95%			Dinkes
46.	Cakupan rumah sehat	72%	80,8%	80,8 %	81,53%	80%	82%	82%	90%			Dinkes
47.	Cakupan tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	70%	78,5%	91%	75,53%	80%	82%	82%	80%			Dinkes
VI	PROGRAM PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN											
48.	Cakupan desa siaga aktif	30%	100%	100%	100%	55%	60%	60%	29,54%			Dinkes
49.	Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	100%	100%	98,88%	100%	100%	100%	98,88%			Dinkes
VII	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PELAYANAN											
50.	Cakupan Pelayanan BLUD	100,0%	66,55 %	100,0 %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100%			RSUD
VII	PROGRAM MANAJEMEN, INFORMASI DAN REGULASI											
51.	Pelayanan perijinan bidang kesehatan	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan			Dinkes
52.	Cakupan puskesmas yang telah terakreditasi	0	0	0	5 Pusk	15 puskesmas	19 Pusk	19 Pusk	19 Pusk			Dinkes

Keterangan:

<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target RKPD Tahun 2018: 		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2017 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 perlu upaya keras
























Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Kesehatan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017, dari sejumlah 52 target indikator, sebanyak 42 indikator berstatus telah tercapai dan 10 indikator berstatus tidak tercapai. Dari indikator yang tercapai dan masuk

































dalam RPJMD Tahun 2013-2018 sebanyak 42 target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 3 target indikator berstatus akan tercapai dan 7 indikator perlu upaya keras.





















3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaran urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 39 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel.

Tabel 2.117
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Terhadap Target RKPD Tahun 2017dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan											
1	Panjang jalan kabupaten yang dibangun	-	-	-	3795,66 m	1.818 m	2.222 m	9.490 m	22.075,55 m			D PUPR
2	Jumlah jembatan kabupaten yang dibangun	-	6 unit	2 unit	2 unit	1 unit	4 unit	4 unit	10 unit			D PUPR
3	Peningkatan jalan kabupaten	-	13.675 m	-	-	-	-	-	-			D PUPR
4	Penggantian jembatan kabupaten	-	5 unit	15 unit	-	-	-	-	-			D PUPR
5	Panjang saluran drainase yang dibangun	4,44 km	15,22 km	1,679k m	6,78 km	30 km	14,25 km	80,23 km	7,006 km			D PUPR
6	Panjang talud jalan kabupaten yang dibangun	-	400 m	1.383 m	4717,12 m	200 m	200 m	750 m	5.909,82 m			D PUPR
7	Panjang talud yang dibangun	-	9,15 km	-	Kewenang an lokal desa	5,5 km	7 km	19,8 km	Kewenang an lokal desa	-		D PUPR
8	Panjang jalan perdesaan yang dibangun	32,2 5 km	79,19 km	-	Kewenang gan lokal desa	176 km	180 km	664 km	Kewenang gan lokal desa	-		D PUPR
9	Jumlah jembatan perdesaan yang dibangun	7 unit	19 unit	-	Kewenang gan lokal desa	12 unit	13 unit	66 unit	Kewenang gan lokal desa	-		D PUPR
10	Cakupan perbaikan jalan dan jembatan akibat bencana	100 %	100%	-	BPBD	-	100%	100%	-			BPBD
II	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan											
11	Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik/ sedang	73,6 5%	81,11%	88,09 %	73,55	74,22%	80,15%	80,15%	83,59%			D PUPR
12	Proporsi jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik	77,2 7%	77,68%	53,33 %	54,63	85,84%	87,67%	87,67%	91,64%			D PUPR
13	Panjang talud/bronjong yang	419 m	943,6 m	1.135 m	2806,80 m	1650 m	2150 m	7200 m	4.343,6 m			D PUPR

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dipelihara											
14	persentasealat-alat berat dalam kondisi baik	64 %	67%	68%	80%	71%	74%	74%	82%			D PUPR
15	persentasePanjang saluran irigasi dalam kondisi baik	59,50%	62%	68,46 %	77,15%	64,50%	65,00%	65,00%	79,42%			D PUPR
16	Proporsi talud dalam kondisi baik	44,40%	45%	45,44%	Kewenang gan lokal desa	47,36%	48,13%	48,13%	Kewenang an lokal desa			D PUPR
III	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya											
17	Sistem informasi/database jaringan irigasi	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			D PUPR
18	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	61,08%	70,65%	75,94%	77,42	65,78%	65,80%	65,80%	79,42%			D PUPR
19	Berfungsinya embung dan bangunan penampung air lainnya	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			D PUPR
20	Embung dan bangunan penampung air lainnya dalam kondisi baik	40%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			D PUPR
21	Drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	60,07%	77,34%	80,48%	81,17%	63,82%	65,47%	65,47%	86,00%			D PKPLH
22	Sistem informasi drainase	-	100%	100%	100%		100%	100%	100%			D PKPLH
23	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air	16 km	16,5 km	16,44 km	38 km	18 km	21 km	21 km	1,47 km			D PKPLH
24	Berfungsinya reservoir pengendali banjir	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			D PUPR
IV	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku											
25	Cakupan pelayanan jaringan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	83%	83%	83%	91,98%	86%	87%	87%	89,60%			D PUPR
26	Cakupan pelayanan perpipaan air minum	82,01%	82,01%	85,40%	91,98%	85,57%	86,31%	86,31%	90,23%			D PKPLH
V	Program Pembangunan Dan Pengelolaan Bangunan Gedung Serta Pengembangan Jasa Konstruksi											
27	Penyediaan Gedung kantor terpadu	-	5%	-	5%	100%	100%	100%	-			D PKPLH
28	Persentase rumah tinggal bersanitasi	93,17%	94,13%	94,13 %	89,57%	95,05%	95,53%	95,53%	87,27%			D PKPLH
29	Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan	100 %	100%	100%	100%		100%	100%	100%			D PUPR

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	Sistem Informasi database Jalan lingkungan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-			D PKPLH
31	Sistem Informasi Database Jembatan desa	-	100%	100%	100%	-	100%	100%	-			D PKPLH
VI	Program Perencanaan Tata Ruang											
32	Jumlah dokumen tata ruang	-	3 dokumen	5 dokumen	3 Dokumen	1 dokumen/ 2 dokumen	2 dokumen	16 dokumen	2 dokumen			D PUPR
33	Jumlah rancangan perda tata ruang	6 raperda	6 raperda	6 raperda	6 raperda	2 raperda	-	10 raperda	2 raperda			D PUPR
34	Penyebarluasan informasi penataan ruang	100 %	100%	-	100%	-	100%	100%	-			D PUPR
35	Pelibatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang	100 %	-	-	100%	-	100%	100%	-			D PUPR
VII	Program Pemanfaatan Ruang											
36	Jumlah sosialisasi dan laporan pemanfaatan Ruang	2 kali	2 kali	2 kali	1 kali	2 kali	2 kali	10 kali	4 kali			D PUPR
37	Jumlah dokumen data pemanfaatan ruang	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4 dokumen	1 dokumen			D PUPR
VIII	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang											
38	Jumlah dokumen prosedur dan manual pengendalian tata ruang	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5 dokumen	1 dokumen			D PUPR
39	Jumlah koordinasi pengendalian tata ruang, manual dan laporan pengendalian pemanfaatan ruang	12 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	20 kali	12 kali			D PUPR

Keterangan:

<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target RKPD Tahun 2018: 		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2017 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 perlu upaya keras

















Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017, dari sejumlah 39 target indikator, 3 indikator merupakan kewenangan lokal desa, 29 sebanyak indikator berstatus tercapai, 7 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 39 target

indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 3 indikator merupakan kewenangan lokal desa, 22 target indikator berstatus telah tercapai, 13 sejumlah target indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator perlu upaya keras.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel.

Tabel 2.118
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Terhadap Target RKPD Tahun 2017dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	persentaserumah layak huni	87,36%	87,97 %	88,58%	97,82	89,80%	90,41%	90,41%	95,85%			DPKPLH
2	Persentaserumah tangga bersanitasi	93,17%	93,17%	94,13%	89,57	95,05%	95,53%	95,53%	96,88%			DPUPR
3	Fasilitasi dan replikasi PLPBK	1 desa	-	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	-			DPUPR
4	Jumlah rehab rumah akibat bencana alam	-	-	-		25 unit	25 unit	100 unit	0			BPBD / Dinsos
5	Persentase penyediaan sarana evakuasi	-	-	-		13,64%	14,39%	14,39%	0			BPBD
6	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	33%	33 %	95%	100	100%	100%	100%	90%			PoI PP / UPT Damkar
7	Persentaseaparatut pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	33%	33%	95%	94	50%	61%	61%	54%			PoI PP / UPT Damkar
8	Rasio tempat pemakaman umum per satuan Penduduk	1,655	1,655	1,648	1,650	1,657	1,662	1,662	1,650			DPKPLH

Keterangan:















• Status terhadap Target RKPD Tahun 2018:		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai
• Status terhadap Target Akhir RPJMD:		Capaian Target RPJMD s/d 2017 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 perlu upaya keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Perumahan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017, dari sejumlah 8 target indikator, sebanyak 3 indikator berstatus telah tercapai, dan 5 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 8 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 2 target indikator berstatus telah tercapai, 3 target indikator berstatus akan tercapai, 3 indikator perlu upaya keras.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kinerja penyelenggaran urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 32 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel.

Tabel 2.119
Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Terhadap Target RKPD Tahun 2017 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentasepenurunan konflik di daerah	80%	10%	50%	50%	40%	30%	30%	50%			Kesbang / Pol PP
2	Rasio linmas per 10.000 penduduk	69,91	62,24	62,04	6	59	59	59	61			Kesbang / Pol PP
3	Persentasepenanganan gangguan keamanan	75%	100%	70%	100%	75%	75%	75%	100%			Kesbang / Pol PP
4	Persentase Penurunan tindak kriminalitas di Daerah	80%	10%	60%	28,37%	20%	10%	10%		-		Kesbang / Pol PP
5	jumlah aduan masyarakat tiap bulan	18	15	10	15	15	15	15	12			Kesbang / Pol PP
6	Persentasepelanggar HO	80%	60%	50%	60%	60%	60%	60%	50%			Pol PP
7	Persentasepelanggar Perda	80%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	65%			Pol PP
8	Jumlah pertemuan komunitas Intelegen Daerah	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	60 kali	12 kali			Kesbang
9	Jumlah demo, angka kriminalitas dan penegakan perda		70 kali	40 kali	42 kali	25 kali	10 kali	10 kali	21 kali			Kesbang / Pol PP
10	Rasio pol PP per 10.000 penduduk	0,7948	0,7948	0,8982	0,8672	0,7948	0,7948	0,7948	0,898			Pol PP
11	Jumlah operasi dan penegakan hukum terhadap rokok ilegal	-	-	40 kali	90 kali	6 kali	6 kali	24 kali	87 kali			Pol PP
12	Jumlah pembinaan FKUB, FPBI dan pendidikan wawasan kebangsaan	5 kali	15 kali	20 kali	23 kali	26 kali	25 kali	105 kali	30 kali			Kesbang
13	Jumlah pembinaan LSM,Ormas/OKP	75 LSM	45 LSM	114 LSM	47 LSM	50 LSM	52 LSM	52 LSM	52 LSM			Kesbang
14	Jumlah peserta penyuluhan pencegahan,	100 orang	200 orang	450 orang	540 Orang	400 orang	400 orang	1950 orang	450 orang			Kesbang / Pol PP

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	penyalahgunaan dan peredaran Narkoba											
15	Jumlah peredaran miras dan narkoba di Masyarakat	150	30	36	90	50	30	30	40			Kesbang / Pol PP
16	persentase operasi prostitusi	8,3%	7%	8%	10%	5%	7%	7%	8%			Kesbang / Pol PP
17	Jumlah pengguna miras dan narkoba di Masyarakat	320	100	250	227	150	100	100		-		Kesbang
18	Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu	70%	81,3%	81,3%	-	82%	85%	85%	-			Kesbang
19	Jumlah pembinaan politik daerah	1 kali	2 kali	3 kali	2 kali	1 kali	1 kali	5 kali	12 kali			Kesbang
20	Jumlah pendidikan politik masyarakat	1 kali	1 kali	3 kali	2 kali	2 kali	1 kali	19 kali	12 kali			Pol PP
21	Jumlah Desa Tangguh Bencana	7 desa	7 desa	28 desa		35 desa	42 desa	42 desa		-		BPBD
22	Jumlah Satgas Siaga Bencana	50 orang		70 orang		90 orang	100 orang	100 orang		-		BPBD
23	Persentase perbaikan fasilitas publik dan fasilitas penduduk akibat bencana	20%		2 %		90%	100%	100%		-		BPBD
24	Jumlah kegiatan upacara hari besar nasional		-	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	8 keg			Kesbang
25	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemilihan umum	25 buku	30 buku	-	-	20 buku	25 buku	60 buku	-			Kesbang
26	Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%			Pol PP
27	Cakupan patroli petugas Pol PP	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%			Pol PP
28	Jumlah peserta kegiatan pengembangan Wasbang	305 orang		1600 orang		40 orang	220 orang	1175 orang	1630 orang			Kesbang
29	Cakupan desa yang terpantau dalam pelaksanaan pemilu	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-			Kesbang
30	jumlah posko bencana	20 posko		17 posko		50 posko	35 posko	35 posko	59 posko			BPBD
31	Angka kriminalitas yang tertangani	12 kasus		12 kasus		-	-	12 kasus	288 kasus			Pol PP
32	persentase penyelesaian pelanggaran K3 di kelurahan (diluar perda)	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	96%			Pol PP

Keterangan:





















<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target RKPD Tahun 2018: 		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2017 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 perlu upaya keras













Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017, dari sejumlah 32 target indikator, sebanyak 23 indikator berstatus telah tercapai, 1 indikator berstatus tidak tercapai, dan 8 indikator tidak terdapat data pendukungnya. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 32 target indikator RPJMD Tahun 2013-2018, sebanyak 10 target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 17 target indikator berstatus akan tercapai, dan 5 indikator perlu upaya keras.

6. Sosial

Kinerja penyelenggaran urusan Sosial ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 16 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel.

Tabel 2.120
Capaian Kinerja Urusan Sosial Terhadap Target RKPD Tahun 2017
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan Pelatihan	90 KK R.90	90 KK	90 KK	-	90 KK	90 KK	450 KK	0			Dinsos
2	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelatihan ketrampilan.	75 orang R. 75	90 orang	90 orang		90 orang	90 orang	450 orang	25 orang			Dinsos
3	Jumlah PMKS yang terdata	10.000 orang	15.607 orang	15.607 orang		6000 orang	5000 orang	5000 orang	15.307 orang			Dinsos
4	Jumlah pusat informasi penyandang cacat dan trauma center		-	-	-	-	1 unit	1 unit	1 unit			Dinsos
5	Jumlah penyandang cacat dan trauma	0 orang	-	20 orang	-	25 orang	25 orang	100 orang	25 orang			Dinsos
6	Jumlah orang terlantar dan lansia yang ditampung	2000 orang	-		-	2000 orang	2000 orang	2000 orang	0			Dinsos
7	Jumlah eks penyandang penyakit sosial	355 orang	50 orang	70 orang	-	90 orang	100 orang	100 orang	25 orang			Dinsos
8	Cakupan orsos, PSM, karangtaruna yang mendapat bantuan ekonomi produktif	377 buah	9 orsos	-	-	-	-	377 buah	0			Dinsos
9	Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang menyediakan sarpras pelayanan kesejahteraan sosial		-		-	2 WKSB M	2 WKSB M	2 WKSBM	0			Dinsos
10	Jumlah kegiatan upacara hari besar nasional dan fasilitasi resepsi	3 kegiatan	4 kegiatan	-	4 kegiatan	-	-	4 kegiatan	8 kegiatan			Kesbang

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	kenegaraan											
11	Jumlah peserta dialog antar umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME	90 orang	90 orang	90 orang	-	100 orang	100 orang	445 orang	-			Kesra
12	Tingkat intensitas dan peran dalam melaksanakan ibadah agama		60%	70%	74%	85%	90%	90%	85%			Kesra
13	pelaksanaan Hisab dan Rukyat, penentuan arah kiblat dan pembuatan jadwal imsakiyah dan sholat fardlu	4 keg.	4 keg	4 keg.	4 Keg.	4 keg.	4 keg.	4 keg.	4 keg.			Kesra
14	jumlah pengajian selapanan	12 keg.	12 keg	12 keg.	12 keg.	12 keg.	12 keg.	12 keg.	12 keg.			Kesra
15	jumlah penyaluran hibah dan Bansos keagamaan	12 keg.	12 keg	12 keg.	-	12 keg.	12 keg.	12 keg.	12 keg.			Kesra
16	Cakupan peserta MTQ Tingkat Kecamatan		-	100%	Tercapai	100%	100%	100%	100%			Kesra

Keterangan:

<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target RKPD Tahun 2018: 		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2017 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 perlu upaya keras















Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Sosial, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017, dari sejumlah 16 target indikator, sebanyak 10 indikator berstatus telah tercapai dan 6 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 16 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 9 target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 3 target indikator berstatus akan tercapai, dan 4 indikator perlu upaya keras.

2.5.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Kinerja penyelenggaran urusan tenaga kerja ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel.

Tabel 2.121
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Terhadap Target RKPD Tahun 2017
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
1	Cakupan pencari kerja yang mendapatkan Pelatihan	0,14	0,16	0,13	0,3	0,24	0,13	0,13	0,3			Naker UMKM
2	Jumlah pencari kerja terdaftar	8.131 orang	5.526 orang	5.857 orang	7.075 orang	15.000 orang	15.000 orang	75.000 orang	10.681 orang			Naker UMKM
3	Jumlah pencari kerja ditempatkan	4.254 orang	2.273 orang	2.586 orang	2.490 orang	4.500 orang	4.500 orang	22.500 orang	4.338 orang			Naker UMKM
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	60,89	71,92	72,60	71,35	76,54	78,28	78,28	71,75			Naker UMKM
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,01	5,03	5,04	4,91	5,55	5,55	5,55	3,56			Naker UMKM
6	Jumlah penganggur yang memperoleh pekerjaan sementara	360 orang	1.980 orang	2.010 orang	2.490 orang	900 orang	1800 orang	5400 orang	4.338 orang			Naker UMKM
7	Jumlah kasus perselisihan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	5 kasus	18 kasus	13 kasus		5 kasus	5 kasus	25 kasus	6 kasus			Naker UMKM

Keterangan:



















<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target RKPD Tahun 2018: 		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2017 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 perlu upaya keras



Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Ketenagakerjaan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017, dari sejumlah 7 target indikator, sebanyak 3 indikator berstatus telah tercapai dan 4 berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 7 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 3 target indikator berstatus telah tercapai, 3 sejumlah target indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator perlu upaya keras.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 10 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel.

Tabel 2.122
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Terhadap Target RKPD Tahun 2017 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	persentase partisipasi perempuan di lembagaPemerint ah	5,04%	5,04%	5,04%	2%	5,04%	5,04%	5,04%	28,04%			Dinsos P4
2	persentase perempuan di lembaga legislatif	13,33%	6,66%	6,66%	6,66%	13,33%	13,33%	13,33%	6,7%			Dinsos P4
3	persentase kelompok PKK aktif (dari tingkatdarwis, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten)	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%			Dinsos P4
4	Partisipasi perempuan di lembaga swasta(ormas, orsos	11,77%	11,77%	24,33%	11	11,77%	11,77%	11,77%	17,58%			Dinsos P4
5	Cakupan KDRT yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Dinsos P4
6	Cakupan kasus kekerasan anak yangTertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Dinsos P4
7	Partisipasi angkatan kerja perempuan	94,63%	94,6%	90,91%	90%	94,65%	94,65%	94,65%	96,72%			Dinsos P4
8	Rata-rata jumlah kelompok PKK	9 kelompok	9 kelompok	-	-	-	9 kelomp ok	9 kelompok	9 kelompok			Dinas PMD
9	Jumlah anggota organisasi perempuan dikecamatan dalam hal kesetaraan gender dan perlindungan anak yang mendapatkan penyuluhan	100 orang	110 orang	-	-	-	-	110 orang	-			Dinsos P4

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	PKK aktif	9 organisasi	9 organisasi	-	-	-	-	9 organisasi	9 organisasi			Dinas PMD

Keterangan:


<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target RKPD Tahun 2018: 		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2017 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 perlu upaya keras











Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017, dari sejumlah 10 target indikator, sebanyak 9 indikator tersebut berstatus telah tercapai dan 1 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 10 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 9 target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 1 target indikator berstatus akan tercapai.

3. Pangan

Kinerja penyelenggaraan urusan Pangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 9 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 dan RPJMD Kabupaten Kudus tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel.

Tabel 2.123
 Capaian Kinerja Urusan PanganTerhadap Target RKPD Tahun 2017
 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Regulasi Ketahanan Pangan	-	1	-		-		-				Dinas Pertanian dan Pangan
2	Ketersediaan Pangan Utama	91%	162%	129%	112%	100%	100%	100%	117%			Dinas Pertanian dan Pangan
3	Ketersediaan energi dan Protein Per Kapita	61%	167%	72%	100%	100%	100%	100%	111%			Dinas Pertanian dan Pangan
4	Penguatan	64%	179%	82%	92%	80%	90%	90%	181%			Dinas

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Cadangan Pangan											Pertanian dan Pangan
5	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	86%	100%	100%	98%	100%	100%	100%	100%			Dinas Pertanian dan Pangan
6	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	70%	100%	100%	98%	100%	100%	100%	100%			Dinas Pertanian dan Pangan
7	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	89%	90%	90%	92%	92%	95%	95%	92%			Dinas Pertanian dan Pangan
8	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	79%	38%	67%	81%	84%	85%	85%	80%			Dinas Pertanian dan Pangan
9	Penanganan Daerah Rawan Pangan	67%	68%	48%	85%	70%	75%	75%	83%			Dinas Pertanian dan Pangan

Keterangan:









<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target RKPD Tahun 2018: 		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2017 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 perlu upaya keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Ketahanan Pangan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017, dari sejumlah 9 target indikator, sebanyak 8 indikator berstatus telah tercapai, 1 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 9 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak7 target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 1 target indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator perlu upaya keras.

4. Pertanahan

Kinerja penyelenggaran urusan Pertanahan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel .

Tabel 2.124
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Terhadap Target RKPD Tahun 2017
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Luas tanah bersertifikat milik Pemerintah Kabupaten	-	890.010 m ²	1.117.372 m ²	12.171.720 m ²	41.500 m ²	41.500 m ²	2.091.621 ,195 m ²	2.539 m ²			PUPR
2	Sistem informasi pertanahan	-	-	1 dokumen	1 doku men	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			PUPR
3	persentase luas lahan bersertifikat	-	7,2%	5,45%	5,45	5,45%	27,40%	27,40%	5,45%			BPPKAD
4	Jumlah kasus tanah Pemkab yang tertangani	3 kasus	5 kasus	7 kasus	3 kasus	3 kasus	3 kasus	15 kasus	3 kasus			BPPKAD

Keterangan:





<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target RKPD Tahun 2018: 		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2017 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 perlu upaya keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Pertanahan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017, dari sejumlah 4 target indikator, sebanyak 3 indikator berstatus telah tercapai dan 1 indikator tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 4 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 3 target indikator berstatus akan tercapai dan 1 indikator perlu upaya keras untuk tercapai.

5. Lingkungan Hidup

Kinerja penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 13 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel .

Tabel 2.125
 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Terhadap Target RKPD Tahun 2017
 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pencegahan pencemaran air	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			D PKPLH
2	Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			D PKPLH
3	Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa	40%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			D PKPLH
4	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			D PKPLH
5	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			D PKPLH
6	Meningkatnya luas tutupan lahan	0,37%	0,44 %	0,13%	0,54%	0,74%	0,84%	0,84%		-		D PKPLH
7	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	0,21%	0,22%	0,13%	0,88%	0,40%	0,45%	0,45%		-		D PKPLH
8	Penyediaan akses informasi lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		-		D PKPLH
9	Pencegahan pencemaran udara dari sumber Bergerak	100%		100%	100%	100%	100%	100%		-		D PKPLH
10	Meningkatnya kemampuan SDM di bidang LH	0,075	0,093	100%	0,22%	0,090	0,089	0,506		-		D PKPLH
11	persentase penanganan sampah	84,60%	84%	87,6%	87%	88%	89%	89%	87,79%			D PKPLH
12	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,270	0,308	0,614	0,685	0,429	0,454	0,454	0,681%			D PKPLH
13	Proporsi RTH Publik	5%	5,2 %	8,12%	8,1%	8%	9%	9%	9%			D PKPLH

Keterangan:

<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target RKPD Tahun 2018: 		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2017 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 perlu upaya keras















Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017, dari sejumlah 13 target

indikator, sebanyak 8 indikator berstatus telah tercapai, 5 indikator tidak terdapat datanya. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 13 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 8 target indikator berstatus telah tercapai dan 2 indikator akan tercapai.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel.

Tabel 2.126
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terhadap Target RKPD Tahun 2017 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rasio bayi berakte kelahiran	83%	75%	96,02 %	97%	95%	100%	100%	98,79%			Dinas Dukcapil
2	Rasio pasangan berakte nikah	13%	14%	100%	100%	17%	18%	18%	100%			Dinas Dukcapil
3	Kepemilikan e-KTP	93,50%	98%	95,12 %	96,65%	97,50%	100%	100%	97,42%			Dinas Dukcapil
4	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 Penduduk	687	600	694,9	526	900	950	950	409			Dinas Dukcapil
5	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Dinas Dukcapil
6	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Dinas Dukcapil
7	persentase aduan pelayanan kependudukan yang tertangani	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%			Dinas Dukcapil

Keterangan:

<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target RKPD Tahun 2018: 		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2017 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 perlu upaya keras

















Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017, dari sejumlah 7 target indikator, sebanyak 5 indikator berstatus telah tercapai, 2 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa



























dari sebanyak 7 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 4 target indikator berstatus telah tercapai, dan sejumlah 3 target indikator berstatus akan tercapai.

7. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kinerja penyelenggaran urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 21 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel 2.109.

Tabel 2.127
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Terhadap Target RKPD Tahun 2017 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada	Desa Swadaya: 85; Desa Swakarya: 47; Desa Swasembada: 0	Desa swadaya 85 desa; Desa swakarya 47 desa;	Desa Swadaya 85; Desa Swa karya:47; Desa Swasembada: 0	Desa Swadaya 85; Desa Swa karya:47; Desa Swasembada: 0	Desa Swadaya : 85; Desa Swakarya: 47; Desa Swasembada: 0	Desa Swadaya 85; Desa Swa karya:47; Desa Swasembada: 0	Desa Swadaya 85; Desa Swa karya:47; Desa Swasembada: 0	Desa Swadaya 0; Desa Swa karya:38; Desa Swasembada: 92			Dinas PMD
2	Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat	89	89 lembaga	132	89	89	89	89	89			Dinas PMD
3	persentase Posyandu aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Dinsos P4
4	persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	7%	7%	4,8%	9%	8%	9%	9%	8%			Dinas PMD
5	Jumlah desa yang mempunyai profil desa	132 desa/kel	132 desa/kel	132 desa/kel	132 desa/kel	132 desa/kel	132 desa/kel	132 desa/kel	132 desa/kel			Dinas PMD
6	persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten)		-	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Dinas PMD
7	persentase BKM berkinerja baik	50%	52%	42%	65%	65%	70%	70%	70%			Dinas PMD
8	persentase peningkatan kapasitas lembaga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Dinas PMD

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kemasyara katan											
9	Jumlah aparatur Pemdes yang mengikuti pelatihan / bintek	269 Orang	369 orang	1329 orang	369 orang	369 orang	369 orang	1476 orang	369%			Dinas PMD
10	Fasilitasi Pilkades	116 desa	-	1 desa	1 desa	1 desa	-	7 desa	6 desa			Dinas PMD
11	persentase desa dengan adminstras i sesuai dengan ketentuan	45%	50%	55%	60%	65%	55%	55%	70%			Dinas PMD
12	cakupan RT/RW dan desa terbina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Dinas PMD
13	Jumlah kelompok binaan petani	34 klmpk	3 klmpk	29 klmpk		3 klmpk	17 klmpk	102 klmpk	15 klmpk			Kec. Kaliwu ngu
14	persentase masyarakat yang berpartisipa sidllm musren bang	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%			Bappe lit bangda
15	Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat	21 keg	2 keg	8 keg	17 keg	1 keg	17 keg	90 keg	36 keg			Dinas PMD
16	Cakupan aparatur desa terbina	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	50%			Dinas PMD
17	Jumlah PKK Aktif	-	-	18 organisa si	-	1 organisa si	18 organisasi	18 organisa si	18 organisa si			Dinsos P4
18	Jumlah kegiatan sosial yang terfasilitasi	30 keg	30 keg	-	-	-	-	30 keg				Dinsos P4
19	Swadaya masyarakat terhadap program Pem berdayaan masyarakat	20%	20%	7%	-	-	-	20%	8%			Dinas PMD
20	Cakupan RT, RW terbina	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%			Dinsos P4
21	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	-	-	9 klmpk	-	1 klmpk	9 klmpk	9 klmpk	9 klmp			Dinsos P4

Keterangan:











• Status terhadap Target RKPD Tahun 2018:		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai
• Status terhadap Target Akhir RPJMD:		Capaian Target RPJMD s/d 2017 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 perlu upaya keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017, dari sejumlah 21 target indikator, sebanyak 19 indikator berstatus telah tercapai, dan 2 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 21 indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 17 target indikator berstatus telah tercapai, dan 4 indikator berstatus akan tercapai.


8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana





Kinerja penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel.

Tabel 2.128
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Terhadap Target RKPD Tahun 2017 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2016	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Cakupan peserta KB aktif	82,35 %	82,35%	77,78%	81%	83,45 %	83,45%	83,45%	82,31 %			Dinsos P4
2	persentase keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera I	31,31 %	31,31%	27,98%		31,29 %	31,29%	31,29%	13,56 %			Dinsos P4
3	Cakupan PUS yang istrinya di bawah usia 20 Tahun	1,62%	2,14%	2,15%	1,00%	1,60%	1,60%	1,60%	1,43%			Dinsos P4
4	Cakupan pelayanan kontrasepsi (MOP/MOW	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Dinsos P4
5	Jumlah penemuan penderita HIV AIDS	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	47 orang			Dinkes

Keterangan:

• Status terhadap Target RKPD Tahun 2018:		Target 2017 tercapai
---	---	----------------------













<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target Akhir RPJMD: 		Target 2017 tidak tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 perlu upaya keras























Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017, dari sejumlah 5 target indikator, sebanyak 4 indikator berstatus telah tercapai, 1 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 5 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 5 target indikator berstatus telah tercapai.

9. Perhubungan

Kinerja penyelenggaran urusan Perhubungan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 17 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel.

Tabel 2.129
 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Terhadap Target RKPD Tahun 2017 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1,86	1,65	1,78	1,58	1,49	1,39	1,39	1,47			Dishub
2	Jumlah arus penumpang angkutan umum	875.992 orang	876.084 orang	877.900 orang	803.783	879.501 orang	880.380 orang	4.393.117 orang	771.634 orang			Dishub
3	persentase PKB bagi Kab/Kota yang memiliki populasi minimal 4000 KBWU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Dishub
4	Rasio izin trayek	0,000733	0,000777	0,000767	0,000759	0,000766	0,000775	0,000775	0,000749			Dishub
5	persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan KA	60,14%	60,14%	60,14%	60,14%	62,59%	62,59%	62,59%	60,14%			Dishub
6	persentase halte yang telah dilayani angkutan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Dishub

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
	umum dalam trayek											
7	persentase angkutan darat	16,08%	16,08%	16,18%	16,19%	16,26%	16,27%	16,27%	16,22%			Dishub
8	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	35.600 orang	35.600 orang	35.299 orang	32.712 orang	35.600 orang	35.600 orang	35.600 orang	31.502 orang			Dishub
9	Jumlah Terminal Bis	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	6 lokasi	6 lokasi	6 lokasi	5 lokasi			Dishub
10	persentase terminal angkutan penumpang pada setiap Kab/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Dishub
11	Jumlah orang/barang melalui terminal per Tahun	1.125.289 orang	1.147.354 orang	1.161.037 orang	1.157.795 orang	1.217.581 orang	1.241.932 orang	5.970.876 orang	1.111.490 orang			Dishub
12	persentase fasilitas perlengkapan jalan pada jalan Kab	57,14%	64,32%	72,85%	97,21%	85,83%	93,01%	93,01%	99%			Dishub
13	Pemasangan rambu-rambu	2,22%	5,33%	19,96%	16,27%	5,33%	28,88%	28,88%	0,16%			Dishub
14	Kepemilikan KIR angkutan umum	11,04%	10,98 %	18,72%	10,70%	10,45%	10,21%	10,21%	16,64%			Dishub
15	persentase standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kab	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Dishub
16	Jumlah uji kir angkutan umum	17.900 unit	18.000	18.300 unit	18.086 unit	18.250 unit	18.300 unit	18.300 unit	17.698 unit			Dishub
17	Lama pengujian kelayakan angkutan umum - KIR	35 menit	35 menit	35 menit	35 menit	35 menit	35 menit	35 menit	35 menit			Dishub

Keterangan:

<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target RKPD Tahun 2018: 		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2017 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 perlu upaya

















	keras
--	-------



















Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Perhubungan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017, dari sejumlah 17 target indikator, sebanyak 6 indikator berstatus tercapai, 11 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 17 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 8 indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 4 target indikator berstatus akan tercapai, dan 5 indikator perlu upaya keras.

10. Komunikasi dan Informatika

Kinerja penyelenggaran urusan Komunikasi dan Informatika ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 17 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel.

Tabel 2.130
 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Terhadap Target RKPD Tahun 2017 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah yang dapat difasilitasi	11 sistem	11 sistem	37 sistem	37 sistem	13 sistem	13 sistem	13 sistem	48 sistem			Dinas Kominfo
2	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0,234	0,1570	0,069	0,066	0,225	0,223	0,223	-			Dinas Kominfo
3	Jumlah website milik pemerintah daerah	17 web	17 website	35 web	35	18 web	18 web	18 web	37 web			Dinas Kominfo
4	Jumlah surat kabar nasional dan lokal.	11 surat kabar	12 surat kabar	13 surat kabar	13 surat kabar	12 surat kabar	12 surat kabar	12 surat kabar	12 surat kabar			Dinas Kominfo
5	Jumlah penyiaran radio/tv yang sesuai standar penyiaran	24 stasiun	24 stasiun	34 stasiun	27 stasiun	24 stasiun	24 stasiun	24 stasiun	24 stasiun			Dinas Kominfo
6	Jumlah pameran/expo	1 kali	1 kali	-	-	1 kali	1 kali	1 kali	-			Dinas Kominfo
7	Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media massa (majalah, radio, TV)	275 kali	297 kali	217 kali	217 kali	305 kali	300 kali	1506 kali	473 kali			Dinas Kominfo
8	Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media baru (website,	setiap hari	setiap hari	setiap hari	Setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	Setiap hari			Dinas Kominfo

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	media online											
9	Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media tradisional (pertunjukan rakyat)	23 kali	9 kali	22 kali	1 kali	23 kali	23 kali	23 kali	11 kali			Dinas Kominfo
10	Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media interpersonal (ceramah, diskusi, lokakarya, sarasehan)	4 kali tiap kecamatan	3 kali tiap kecamatan	3 kali tiap Kecamatan	-	4 kali tiap kecamatan	4 kali tiap Kecamatan	4 kali tiap Kecamatan	3 kali			Dinas Kominfo
11	Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media luar ruang (buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, baliho)	2 kali	16 kali	18 kali	6 kali	12 kali	12 kali	12 kali	201 kali			Dinas Kominfo
12	persentase cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	100%	100%	300%	100 %	100%	100%	100%	100%			Dinas Kominfo
13	Jumlah penelitian iptek dan inovasi daerah	3 dokumen	2 dokumen	-	2 Dokumen	1 kali	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen			Bappelitbangda
14	Jumlah publikasi yang diterbitkan melalui media massa	178 kali	402 kali		122 kali	70 kali	71 kali	498 kali	1257 kali			Dinas Kominfo
15	Jumlah sarpras pendukung dokumentasi dan Publikasi	2 unit	10 unit	6 unit	21 unit	1 unit	1 unit	7 unit	0			Dinas Kominfo
16	Jumlah publikasi kegiatan dewan	1,500 eks	1.500 eks	1,500 eks	1500 eks	1,500 eks	1.500 eks	9,000 eks	1.500 eks			Setwan
17	Jumlah sarana media publikasi	2 jenis	2 jenis	-	-	-	-	2 jenis	2 jenis			Dinas Kominfo

Keterangan:

<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target RKPD Tahun 2018: 		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2017 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 perlu upaya keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Komunikasi dan Informatika, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017, dari sejumlah 17 target indikator, sebanyak 11 indikator berstatus telah tercapai dan 6 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 17 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 11 target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 3 target indikator berstatus akan tercapai, dan 3 indikator perlu upaya keras.

11. Koperasi dan UKM

Kinerja penyelenggaraan urusan Koperasi dan UKM ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 9 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel.

Tabel 2.131
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Terhadap Target RKPD Tahun 2017 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah UMKM	11.596	11.717	13.750	13.915	12.059	12.172	12.172	15.511			Naker UMKM
2	Jumlah Usaha Mikro	11.047	11.047	11.456	11.603	11.474	11.578	11.578	13.845			Naker UMKM
3	Jumlah Usaha Kecil	429	429	1.081	1089	449	454	454	565			Naker UMKM
4	Jumlah Usaha Menengah	120	120	1.213	1223	136	140	140	101			Naker UMKM
5	Cakupan UMKM yang difasilitasi	1,03	2,2	3	9,8%	1	0,99	4,93	2,3			Naker UMKM
6	Jumlah Pameran/ Ekspo produk UMKM	2	6	9	19	20	15	53	10			Naker UMKM
7	Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam Pameran	178	72	102	157	72	178	890	29			Naker UMKM
8	Cakupan UMKM yang difasilitasi dalam perkreditan		-	1,5	8,3	0,4	0,4	1,6	10,2			Naker UMKM
9	persentase koperasi aktif	87,33	87,55	87,66	89,75	93	94	94	87,94			Naker UMKM

Keterangan:

<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target RKPD Tahun 2018: 		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai

















<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2017 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 perlu upaya keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Koperasi dan UMKM, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017, dari sejumlah 9 target indikator, sebanyak 5 indikator berstatus telah tercapai, indikator 4 berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 9 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 5 target indikator berstatus telah tercapai, 1 indikator dan 3 indikator perlu upaya keras.





12. Penanaman Modal


Kinerja penyelenggaran urusan Penanaman Modal ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel.

Tabel 2.132
 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Terhadap Target RKPD Tahun 2017 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah investor	9	11	17	95	17	19	19	102			DPMPTSP
2	Jumlah penerbitan ijin investasi	12	24	65	160	60	72	72	262			DPMPTSP
3	Jumlah Investor berskala Nasional	11	12	16	16	15	16	16	16			DPMPTSP
4	Jumlah nilai investasi berskala nasional (dlm juta)	167.390	175.759	660.311	660,311	203.464	213.637	213.637	660,311			DPMPTSP
5	Daya serap tenaga kerja	33.762	35.450	13.324	16.317	41.038	43.089	43.089	16,317			DPMPTSP
6	Nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)	7.511	357,608	17.646	18.611	10.741	11.815	11.815	11,463			DPMPTSP
7	Jumlah lembaga keuangan bank/non bank	57	69	69	106	105	117	117	64			Bagian Perekonimian
8	Lama proses perijinan	10 hari	10 hari	10 hari	10	10 hari	10 hari	10 hari	10 hari			DPMPTSP

Keterangan:

<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target RKPD Tahun 2018: 		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2017 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 akan tercapai

























		Capaian Target RPJMD s/d 2017 perlu upaya keras
--	---	---

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Penanaman Modal, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017, dari sejumlah 8 target indikator, sebanyak 8 indikator belum ada datanya, 1 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 8 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 6 target indikator berstatus telah tercapai, sebanyak 1 target indikator berstatus akan tercapai, sejumlah 1 target indikator berstatus perlu upaya keras.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja penyelenggaraan urusan Kepemudaan dan Olahraga ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 12 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel.

Tabel 2.133
 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Terhadap Target RKPD Tahun 2017 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah kegiatan kepemudaan	13	15	15	15	15	13	13	12			Disdikpora
2	Jumlah organisasi pemuda	44	26	26	27	26	44	44	28			Disdikpora
3	Jumlah kegiatan olahraga	14	14	13	33	14	14	14	10			Disdikpora
4	Jumlah organisasi olahraga	36	36	36	33	36	36	36	38			Disdikpora
5	Jumlah Klub Olah Raga	132	132	132	132	132	132	132	132			Disdikpora
6	Jumlah gedung olahraga	7	7	7	7	7	7	7	7			Disdikpora
7	Jumlah Lapangan olahraga	248	248	248	358	248	248	248	248			Disdikpora
8	Jumlah gelanggang olahraga	1	1	1	1	1	1	1	1			Disdikpora
9	Jumlah balai remaja	132	1	1	1	132	132	132	1			Disdikpora
10	jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi penyalahgunaan narkoba	9 keg	8 keg	8 keg		-	-	8 keg	1 keg			Disdikpora
11	Jumlah kegiatan keolahragaan	3 keg	2 keg	13 keg	7 keg	2 keg	3 keg	14 keg	10 keg			Disdikpora
12	persentase pemenuhan kebutuhan sarpras Olahraga	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%			Disdikpora

Keterangan:

<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target RKPD Tahun 2018: 		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai

<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2017 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 perlu upaya keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017, dari sejumlah 12 target indikator, sebanyak 8 indikator berstatus telah tercapai, 4 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 12 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 7 target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 3 target indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator perlu upaya keras.

14. Statistik

Kinerja penyelenggaraan urusan Statistik ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel.

Tabel 2.134
 Capaian Kinerja Urusan Statistik Terhadap Target RKPD Tahun 2017 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah data/informasi statistik daerah	5 doku men	7 doku men	5 doku men	7 Dokum en	7 doku men	7 dokum en	7 dokumen	2 dokumen			Kominfo

Keterangan:



<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target RKPD Tahun 2018: 		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2017 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 perlu upaya keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Statistik, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017, dari sejumlah 1 target indikator, sebanyak 1 indikator tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 1 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 1 target indikator berstatus akan tercapai.

15. Persandian

Kinerja penyelenggaraan urusan Persandian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel.

Tabel 2.135
Capaian Kinerja Urusan Persandian Terhadap Target RKPD Tahun 2017 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah tanggapan masyarakat terhadap kebijakan Pemkab	84 kali	84 kali	55 kali	48 kali	72 kali	72 kali	360 kali	15 unit			Dinas Kominfo
2	Jumlah Sosialisasi cukai melalui media	-	1 paket	7 paket		1 paket	1 paket	5 paket	0			Dinas Kominfo

Keterangan:

• Status terhadap Target RKPD Tahun 2018:		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai
• Status terhadap Target Akhir RPJMD:		Capaian Target RPJMD s/d 2017 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 perlu upaya keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja Urusan Persandian, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017, dari sejumlah 2 target indikator, sebanyak 2 indikator tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 2 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 1 target indikator berstatus telah tercapai dan 1 target indikator berstatus akan tercapai.

16. Kebudayaan

Kinerja penyelenggaraan urusan Kebudayaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel.

Tabel 2.136
 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Terhadap Target RKPD Tahun 2017
 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah adat dan tradisi budaya daerah yang Diaktualisasi	32	33	40	39	38	40	40	12			Dinas Budpar
2	Jumlah tradisi desa	-	28	15	39	27	27	27	39			Dinas Budpar
3	Jumlah BCB yang direvitalisasi dan jumlah seni budaya yg dilestarikan	1	5	5	5	5	5	5	5			Dinas Budpar
4	Jumlah BCB	146	146	149	149	159	160	160	149			Dinas Budpar
5	Jumlah pembinaan etika kepada anak sekolah dan generasi muda	-	160	170	180	190	200	200	-			Dinas Budpar
6	Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	3	3	35	7	7	7	7	4			Dinas Budpar
7	Jumlah sarana disitus patiyam dan Taman Budaya	2	2	5	5	5	5	5	5			Dinas Budpar
8	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan Budaya	7 kali	9 Kali	17 kali	21	1 kali	12 kali	60 kali	22 kali			Dinas Budpar

Keterangan:

<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target RKPD Tahun 2018: 		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2017 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 perlu upaya keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Kebudayaan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017, dari sejumlah 8 target indikator, sebanyak 4 indikator berstatus telah tercapai, 4 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 8 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 5 target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 1 indikator akan tercapai dan sejumlah 2 target indikator berstatus akan tercapai.

17. Perpustakaan

Kinerja penyelenggaraan urusan Perpustakaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel.

Tabel 2.137
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Terhadap Target RKPD Tahun 2017
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah perpustakaan milik Pemda & Non Pemda (Perpus Pemda, Umum, Sekolah, Desa, dan Perpus Masyarakat)	163 perpus	168 perpus	163 perpus	163	180 perpus	184 perpus	184 perpus	167 perpus			Dinas Perpus dan Arsip

Keterangan:









• Status terhadap Target RKPD Tahun 2018:		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai
• Status terhadap Target Akhir RPJMD:		Capaian Target RPJMD s/d 2017 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 perlu upaya keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Perpustakaan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017, dari sejumlah 1 target indikator, sebanyak 1 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 1 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, berstatus akan tercapai.

18. Kearsipan

Kinerja penyelenggaraan urusan Kearsipan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel.

Tabel 2.138
 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Terhadap Target RKPD Tahun 2017
 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pengelolaan arsip secara baku	44 desa / kel	25 desa; 6 kecamatan; dan 9 kelurahan; 18 Perangkat Daerah	25 desa/ kelurahan, 9 kecamatan	38 desa/ kelurahan	18 desa/ kelurahan/ Perangkat Daerah	57 desa / Kelurahan / Perangkat Daerah	283 desa / Kelurahan / Perangkat Daerah	15 OPD 14 Desa			Dinas Perpus dan Arsip
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	60 orang	100 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	300 orang	400 orang			Dinas Perpus dan Arsip
3	Jumlah arsip kependudukan yang terdokumentasi	3,500 dokumen	2.000 dokumen	20.141 dokumen	22933 dokumen	5500 dokumen	6000 dokumen	6000 dokumen	55.992 dokumen			Dinas Dukcapil
4	persentase sarana prasarana kearsipan kependudukan dalam kondisi baik	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Dinas Dukcapil

Keterangan:

<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target RKPD Tahun 2018: 		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2017 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 perlu upaya keras








Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Kearsipan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017, dari sejumlah 4 target indikator, sebanyak 3 indikator berstatus telah tercapai, 1 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 4 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 3 target indikator berstatus telah tercapai, dan sejumlah 1 target indikator berstatus akan tercapai.

2.5.3. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Kinerja penyelenggaran urusan Kelautan dan Perikanan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel.

Tabel 2.139
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Terhadap Target RKPD Tahun 2017
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Produksi ikan kelompok pembudidaya	1.770 ton	1.827 Ton	2.079, 71 ton	2.208 ton	2.086 ton	2.157 ton	2.157 ton	2.706 ton			Dinas Pertanian dan Pangan
2	Terpenuhinya sarana dan prasarana perikanan budidaya	100 %	100%	86,46 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%			Dinas Pertanian dan Pangan
3	Terpenuhinya sarana dan prasarana perikanan tangkap	100 %	100%	85%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%			Dinas Pertanian dan Pangan
4	Terpenuhinya sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran	100 %	100%	90%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%			Dinas Pertanian dan Pangan

Keterangan:



















<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target RKPD Tahun 2018: 		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2017 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 perlu upaya keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Kelautan dan Perikanan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017, dari sejumlah 4 target indikator, sebanyak 4 indikator berstatus telah tercapai. Hal ini dikarenakan ada regulasi bahwa penerima hibah harus berbadan hukum sesuai ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 4 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 4 target indikator berstatus akan tercapai.






2. Pariwisata

Kinerja penyelenggaraan urusan Pariwisata ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel.

Tabel 2.140
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Terhadap Target RKPD Tahun 2017
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indika tor Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kunjungan wisata	1.178.835	1.344.046	1.503.012	1.504.515	1.403.375	1.459.510	1.459.510	1.550.999			Dinas Budpar
2	% Kenaikan PAD sektor pariwisata	7	7	7	7	7	7	7	7			Dinas Budpar
3	Jenis, kelas dan jumlah rumah Makan /Restoran	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4			Dinas Budpar
		7,1	11,1	18,2	20,4	24,5	28,6	28,6		-		Dinas Budpar
4	Jenis, kelas dan jumlah Penginapan/Hotel	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6			Dinas Budpar
		24	28	28	41	47	51	51	31	-		Dinas Budpar
5	Terpenuhi nya kebutuhan sarpras destinasi pariwisata		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Dinas Budpar
6	Jumlah obyek wisata	10	10	16	11	11	12	12	10			Dinas Budpar
7	Kontribusi sektor pariwisata thd PDRB (dalam ribuan)	2.368.399	2.467.500	2.842.040	787.137,1	3.229.635	3.444.944	3.444.944	787.137,1 (data tahun 2016)			Dinas Budpar
8	Tersedia nya sarpras promosi pariwisata	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Dinas Budpar

Keterangan:

















<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target RKPD Tahun 2018: 		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2017 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 perlu upaya keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Pariwisata, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017, dari sejumlah 8 target indikator, sebanyak 6 indikator berstatus telah tercapai, dan 2 data tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 8 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 6 target indikator berstatus telah tercapai, 1 indikator akan tercapai dan 1 indikator akan tercapai.

3. Pertanian

Kinerja penyelenggaraan urusan Pertanian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel.

Tabel 2.141
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Terhadap Target RKPD Tahun 2017
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
1	Cakupan produk unggulan pertanian yang difasilitasi dalam pameran	70 %	80%	90%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%			D. Pertanian dan Pangan
2	Cakupan bina kelompok tani	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	90%			D. Pertanian dan Pangan
3	Peningkatan produktifitas tanaman	5,75%	5,80 Ton/Ha	6,37%	6,52%	5,95%	6%	6%	6,14%			D. Pertanian dan Pangan
4	Terpenuhinya sarpras penyuluhan pertanian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			D. Pertanian dan Pangan
5	Cakupan kelompok tani yang mendapatkan pelayanan kesehatan ternak	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	90%			D. Pertanian dan Pangan
6	peningkatan produksi asal ternak	3.586.4 54 kg	3.709.9 89 Kg	4.391.660 kg	7.881.760 kg	4.536.75 6 kg	5.038. 904 kg	5.038. 904 kg	13.161.71 5 kg			D. Pertanian dan Pangan
7	Cakupan irigasi	9,75%	9,75%	0	0	26,95%	31,8%	31,8%	0			D. Pertanian dan Pangan
8	Nilai tukar petani	105,61	105,91	100,10	100,1	106,81	107,11	107,11	100,17			D. Pertanian dan Pangan

Keterangan:

• Status terhadap Target RKPD Tahun 2018:		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai
• Status terhadap Target Akhir RPJMD:		Capaian Target RPJMD s/d 2017 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 perlu upaya keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Pertanian, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017, dari sejumlah 8 target indikator, sebanyak 6 indikator berstatus telah tercapai, 2 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 8 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 4 target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 2 target indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator perlu upaya keras.

4. Kehutanan

Kinerja penyelenggaraan urusan Kehutanan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel.

Tabel 2.142
Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Terhadap Target RKPD Tahun 2017 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah pemanfaatan potensi sumber daya hutan (Ha)	25	25	25	0	25	25	125	Kewenangan propinsi	-	▼	Dinas Pertanian dan Pangan
2	Jumlah rehabilitasi hutan dan lahan (Ha)	300	450	180	90	600	650	2750	Kewenangan propinsi	-	▼	Dinas Pertanian dan Pangan
3	persentase kerusakan kawasan hutan	15,5%	13,5%	10,5 %	11,5%	7,5%	5,5%	5,5%	Kewenangan propinsi	-	▼	Dinas Pertanian dan Pangan
4	Terpenuhinya sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	Kewenangan propinsi	-	●	Dinas Pertanian dan Pangan

Keterangan:

• Status terhadap Target RKPD Tahun 2018:	■	Target 2017 tercapai
	▼	Target 2017 tidak tercapai
• Status terhadap Target Akhir RPJMD:	●	Capaian Target RPJMD s/d 2017 telah tercapai
	▶	Capaian Target RPJMD s/d 2017 akan tercapai
	▼	Capaian Target RPJMD s/d 2017 perlu upaya keras











Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Kehutanan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017, tidak dapat direalisasikan. Hal tersebut disebabkan adanya penarikan kewenangan urusan kehutanan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kinerja penyelenggaraan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel.

Tabel 2.143
Capaian Kinerja Urusan ESDM Terhadap Target RKPD Tahun 2017

dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	0.03	0,03	0,03	0,03	0.03	0.03	0.03	Kewenan gan propinsi	-		Dinas PUPR
2	Jumlah pertambangan berijin	3 lokasi	4 lokasi	-	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	Kewenan gan propinsi	-		Dinas PUPR
3	Pengendalian dan pengawasan kegiatan Pertambangan	100%	38 kali	100%	100%	100%	100%	100%	Kewenan gan propinsi	-		Dinas PUPR
4	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah	100%	63 kali	100%	100%	100%	100%	100%	Kewenan gan propinsi	-		Dinas PUPR
5	Berfungsinya LPJU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Dinas PUPR
6	Rasio elektrifikasi tingkat desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Dinas PUPR
7	Jumlah daerah rawan bencana alam tanah longsor yang dipantau	5 desa	5 desa	6 desa	6 desa	6 desa	6 desa	6 desa	6 desa			BPBD

Keterangan:





























• Status terhadap Target RKPD Tahun 2018:		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai
• Status terhadap Target Akhir RPJMD:		Capaian Target RPJMD s/d 2017 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 perlu upaya keras











Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017, dari sejumlah 7 target indikator, 3 indikator berstatus telah tercapai, 4 indikator merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 7 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 3 target indikator berstatus telah tercapai dan 4 indikator merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

6. Perdagangan

Kinerja penyelenggaraan urusan Perdagangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 19 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel.

Tabel 2.144
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Terhadap Target RKPD Tahun 2017
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah temuan barang/jasa yang tidak layak edar/jual	-	10 temuan	4 temuan	6 temuan	4 temuan	2 temuan	30 temuan	-			Disdag
2	Jumlah pengaduan konsumen	3 aduan	2 aduan	1 aduan	1	1 aduan	1 aduan	1 aduan	1 aduan			Disdag
3	Ekspor bersih perdagangan (Juta Rupiah)	(1.432.954)	120.997.647	90.274.719,68	484.948,99	164.022.296	211.625.641	211.625.641	1.360.975,74			Disdag
4	cakupan bina calon eksportir	-	3 orang	8 org	8	12 org	15 org	43 org	30			Disdag
5	Jumlah peserta pameran UMKM skala Regional	12 unit	10 unit	9 unit	25	15 unit	15 unit	70 unit	23			Inkop UMKM
6	kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (Juta Rupiah)	-	9.624.547	3.908.154,62	4.693.458,87	11.141.616	11.698.696	53.181.696	4.849.603,48			Disdag
7	Cakupan pembinaan pasar tradisional	-	940 pedagang	451	930	940	950	950	950			Disdag
8	persentase peningkatan PAD dari retribusi Pasar	-4,27	5,35 %	5,38	1,79	2,27	2,22	15,38	1,45			Disdag
9	cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal (jumlah pedagang di pasar tradisional)	10.501 pedagang kios dan los	10.501 pedagang kios dan los	10.501 pedagang kios dan los	10.501	10.501 pedagang kios dan los	10.501 pedagang kios dan los	10.501 pedagang kios dan los	13.200 pedagang kios dan los			Disdag
10	Jumlah pasar daerah dan pasar desa	23 unit	23 pasar	25 unit	30	23 unit	23 unit	23 unit	30 unit			Disdag
11	terpenuhinya kebutuhan sarpras perdagangan	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Disdag
12	partisipasi dalam pasar lelang	-	4 kali	-	0	-	4 kali	4 kali	-			Disdag
13	tersedianya data perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat	96 kali	96 kali	96 kali	96	96 kali	96 kali	480 kali	96			Disdag
14	terlaksananya sosialisasi penggunaan produk	-	-	30 orang	30	30 org	30 org	115 org	30			Disdag

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dalam negeri											
15	terlaksananya pengawasan distribusi dan harga barang strategis	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali			Disdag
16	terlaksananya temu usaha	-	-	10 unit	15 unit	15 unit	15 unit	55 unit	55 unit			Disdag
17	Jumlah PKL dan Asongan	975 PKL	1.100 PKL	1.226 PKL	1.996	1.400 PKL	1.500 PKL	1.500 PKL	1.400 PKL			Disdag
18	Jumlah Rakor Ekuinda	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali			Bagian Perekonimi an
19	Operasional Raskin		36.332 RTS	36,332R TS	36.332RT S	36,332 RTS	36,332R TS	36,332R TS	35,166 RTS			Bagian Perekonimi an

Keterangan:



















<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target RKPD Tahun 2018: 		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2017 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 perlu upaya keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Perdagangan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017, dari sejumlah 19 target indikator, sebanyak 13 indikator berstatus telah tercapai, 6 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 19 target indikator RPJMD Tahun 2013-2018, sebanyak 1 target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 12 target indikator berstatus akan tercapai, dan6 indikator perlu upaya keras.

7. Perindustrian

Kinerja penyelenggaraan urusan Perindustrian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 9 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel.

Tabel 2.145
 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Terhadap Target RKPD Tahun 2017
 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Cakupan IKM yang mendapatkan pelatihan	1,15	2	2	14	2	3	11	5			Naker & UMKM
2	Jumlah bina KUB	-	50	50		50	50	250	50			Naker & UMKM
3	Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	0,02	0,99	0,14	0,2	0,03	0,04	0,04	0,19			Naker & UMKM
4	Jumlah IKM yang difasilitasi dalam aksesibilitas permodalan	-	23	-	1157	20	20	80	213			Naker & UMKM
5	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	62,41	63%	81,56	81,09	63	62,6	62,6	81,06			Naker & UMKM
6	Jumlah IKM yang difasilitasi teknologi dalam proses produksi	-	-	-		5	65	80	-			Naker & UMKM
7	Jumlah Industri rokok yang telah mengujikan tar dan nikotin	-	-	-		10	10	10	4			Naker & UMKM
8	Jumlah kluster yang memiliki tempat Pameran	-	-	-		1	1	3	-			Naker & UMKM
9	Jumlah IKM yang difasilitasi dalam pameran	4	23	34	70	10	50	50	124			Naker & UMKM

Keterangan:

<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target RKPD Tahun 2018: 		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2017 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 perlu upaya keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Industri, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017, dari sejumlah 9 target indikator, sebanyak 6 indikator berstatus telah tercapai dan 3 indikator tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 9 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 5 target indikator berstatus telah tercapai, dan 4 target indikator perlu upaya keras.

8. Transmigrasi

Kinerja penyelenggaran urusan Transmigrasi ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel.

Tabel 2.146
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Terhadap Target RKPD Tahun 2017
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah calon transmigran terlayani	10 KK R.5	3 KK R.3	-	-	30 KK	30 KK	140 KK	-	-	▼	Dinas Naker inkop UKM

Keterangan:

<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target RKPD Tahun 2018: 	■	Target 2017 tercapai
	▼	Target 2017 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target Akhir RPJMD: 	●	Capaian Target RPJMD s/d 2017 telah tercapai
	▶	Capaian Target RPJMD s/d 2017 akan tercapai
	▼	Capaian Target RPJMD s/d 2017 perlu upaya keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Ketransmigrasian, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017, dari sejumlah 1 target indikator, target tidak dapat tercapai mengingat kewenangan Transmigrasi di wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

























2.5.4. Fungsi Penunjang

1. Administrasi Pemerintahan

Kinerja penyelenggaran Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 23 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel.

Tabel 2.147
Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Terhadap Target RKPD
Tahun 2017 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah rapat koordinasi pimpinan	6 kali	6 kali	5 kali	5 kali	6 kali	6 kali	30 kali	3 kali	▼	●	Bagian Tapem
2	Jumlah fasilitasi penerimaan kunjungan Kerja	25 kali	14 kali	25 kali	40 kali	25 kali	25 kali	125 kali	55 kali	■	●	Bagian Tapem
3	Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kudus	1 kali	-	-	-	-	1 kali	1 kali	-	■	●	Bagian Tapem

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Jumlah kecamatan yang tertib administrasi	9 kec	9 kec	9 kec	9 kec	9 kec	9 kec	9 kec	9 kec			Bagian Tapem
5	persentase Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Bagian Tapem
6	Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan	4 kali	3 kali	3 kali	2 kali	4 kali	4 kali	20 kali	1 kali			Bagian Tapem
7	Jumlah pelaksanaan kegiatan Dialog/Audiensi Bupati di Desa/Kelurahan	28 kali	20 kali	20 kali	33 kali	33 kali	33 kali	152 kali	1 8 kali			Dinas PMD
8	persentase kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap BUMD	-	-		24,3%	2%	2%	10%	15%			Bagian Perekonomian
9	persentase penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemda	100%	71,4%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Bagian Hukum
10	Jumlah Produk Hukum yang disusun dan didistribusikan	5 Ranperda, 25 Perbup., 100 Kep. Bupati, 260 buku	349 buku	12 Ranperda, 45 Perbup., 264 Kep. Bupati, HLD 198 Buku, HBD 235 Buku	49 Ranperda, 32 Perbup., 205 Kep. Bupati, 735 Buku	5 Ranperda, 25 Perbup., 100 Kep. Bupati, 260 buku	5 Ranperda, 25 Perbup., 100 Kep. Bupati, 260 buku	25 Ranperda, 125 Perbup., 500 Kep. Bupati, 1.300 Buku	22 ranperda, 44 perbup, 260 kep bupati, 1.320 buku			Bagian Hukum
11	Jumlah sosialisasi ketentuan cukai	5 kali	5 kali	-		5 kali	5 kali	25 kali		-		Bagian Hukum
12	Jumlah rapat koordinasi pimpinan	11 kali	10 kali	17 kali	9 kali	11 kali	11 kali	55 kali		-		Bagian Org
13	Jumlah Perangkat Daerah yang terevaluasi kelembagaannya	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	41 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	24 Perangkat Daerah		-		Bagian Org
14	Jumlah dokumen pelaksanaan reformasi Birokrasi	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	5 dok		-		Bagian Org
15	Tersedianya Pedoman IKM	44 Perangkat Daerah	44 Perangkat Daerah	44 Perangkat Daerah	13 Perangkat Daerah	44 Perangkat Daerah	44 Perangkat Daerah	44 Perangkat Daerah		-		Bagian Org
16	Jumlah unit pelayanan yang sudah di IKM	12 unit Pelayanan	14 unit pelayanan	40 unit pelayanan	13 unit pelayanan	20 unit pelayanan	20 unit pelayanan	40 unit pelayanan		-		Bagian Org
17	Jumlah Perda yang ditetapkan	18 perda	8 perda	15 perda		18 perda	18 perda	90 perda	21 perda			Bagian Hukum
18	persentase pengendalian,mo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Bagian

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	nev danpelaporan kegiatan Perangkat Daerah											Dalbang
19	persentase sistem informasi jasa konstruksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		-	●	PUPR
20	Fasilitasi proses pengadaan barang / jasa	0%		100%	100%	100%	90%	90%	100%	■	●	Bagian Dalbang
21	Lama proses perijinan Usaha Jasa Konstruksi	10 hari	10 hari	10 hari		10 hari	10 hari	10 hari		-	●	PUPR
22	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	■	●	Bagian Umum
23	persentase kelancaran pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100 %	100%	100%	100 %	100%	100 %	100 %	100%	■	●	Bagian Umum

Keterangan:

















<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target RKPD Tahun 2018: 	■	Target 2017 tercapai
	▼	Target 2017 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target Akhir RPJMD: 	●	Capaian Target RPJMD s/d 2017 telah tercapai
	▶	Capaian Target RPJMD s/d 2017 akan tercapai
	▼	Capaian Target RPJMD s/d 2017 perlu upaya keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017, dari sejumlah 23 target indikator, sebanyak 12 indikator berstatus telah tercapai, 3 indikator berstatus tidak tercapai dan 8 indikator belum memiliki data. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 25 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 20 target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 3 target indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator perlu upaya keras.

2. Pengawasan

Kinerja penyelenggaran Fungsi Penunjang Pengawasan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel.

Tabel 2.148
Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan Terhadap Target RKPD Tahun 2017
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	persentase penyelesaian TLHP Reguler	100%	88 %	97%	100%	100%	100%	100%	100%			Inspektor at
2	persentase penyelesaian penanganan kasus	100%	71,4	75%	140%	100%	100%	100%	100%			Inspektor at
3	persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Propinsi	100%	98 %	91%	89,5%	100%	100%	100%	100%			Inspektor at
4	Jumlah tenaga pemeriksa dan aparaturnya yang profesional	39 orang	39 orang	39 orang	39 orang	39 orang	39 orang	39 orang	39 orang			Inspektor at
5	persentase terpenuhinya laporan pajak-pajak pribadi (LP2P)	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Inspektor at
6	persentase terlaksananya PMPRB	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Inspektor at
7	persentase tersusunnya SOP	100%	100 %	100%	300%	100%	100%	100%	100%			Inspektor at
8	persentase terlaksananya penyelenggaraan SPIP	100%	100%	100%	1609%	100%	100%	100%	100%			Inspektor at

Keterangan:

<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target RKPD Tahun 2018: 		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2017 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 perlu upaya keras































Berdasarkan tabel capaian kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017, dari sejumlah 8 target indikator, sebanyak 8 indikator berstatus tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 8 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 8 target indikator berstatus telah tercapai.









3. Perencanaan

Kinerja penyelenggaran Fungsi Penunjang Perencanaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 19 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel .


Tabel 2.149

Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan Terhadap Target RKPD Tahun 2017
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	persentase keterisian data/informasi	94,74%	82,47%	98,21%	95,77%	76 %	80 %	80 %	98,2%			Bappelit bangda
2	persentase peningkatan obyek sasaran yang Ditangani	80 %	80 %	80 %	98,8%	80 %	80 %	80 %	80%			Bappelit bangda
3	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan wilayah perkotaan	2 doku men	2 dokumen	2 dokumen	4 dokumen	1 dokume n	1 dokum en	6 dokumen	1 dokumen			Bappelit bangda
4	Jumlah aparat perencanaan yang meningkat Kapasitasnya	165 orang	145 orang	-	-	-	150 orang	445 orang	12 Orang			Bappelit bangda
5	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	6 doku men	10 dokumen	10 dokumen	12 dokumen	10 dokume n	11 dokum en	50 dokumen	11 Dokumen			Bappelit bangda
6	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokume n	1 dokumen	6 dokumen	2 Dokumen			Bappelit bangda
7	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	90 %	99,64 %	98,2 %	97,9%	94 %	95 %	95 %	98,2 %			Bappelit bangda
8	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	2 doku men	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	4 dokume n	2 dokum en	12 dokumen	-			Bappelit bangda
9	Jumlah klaster yang difasilitasi FEDEP	6 klaster	7 klaster	8 klaster	8 klaster	8 klaster	9 klaster	9 klaster	8 Klaster			Bappelit bangda
10	Jumlah dokumen perencanaan sosbud	3 doku men	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	4 dokume n	4 dokum en	22 dokumen	3 Dokumen			Bappelit bangda
11	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah	2 doku men	2 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	1 dokume n	1 dokum en	9 dokumen	3 Dokumen			Bappelit bangda
12	Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola sumber daya air	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Bappelit bangda
13	jumlah dokumen perencanaan daerah rawan bencana	-	-	-	-	-	-	2 dok	-			Bappelit bangda
14	Jumlah Dokumen data perencanaan dan evaluasi capaian kinerja	-	-	-	1 dok	2 dok	1 dok	7 dok	2 Dokumen			Bappelit bangda
15	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	100%	1 dokumen	-	-	-	-	100%	-			Bappelit bangda

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Jumlah Dokumen Review RPIJM	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	-			Bappelit bangda
17	Jumlah buku laporan pelaksanaan Kerjasama	30 buku	30 buku	30 buku	30 buku	30 buku	30 buku	150 buku	10 buku			Bagian Tapem
18	Jumlah dokumen kinerja daerah	1 doku men	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokume n	2 dokum en	6 dokumen	1 dokumen			Bagian Tapem
19	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	5 doku men	5 dokumen	-	5 dokumen	-	-	5 dokumen	-			Bappelit bangda

Keterangan:

<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target RKPD Tahun 2018: 		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2017 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 perlu upaya keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017, dari sejumlah 19 target indikator, sebanyak 16 indikator berstatus telah tercapai, 3 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 19 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 13 target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 4 target indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator perlu upaya keras..

2. Keuangan

Kinerja penyelenggaran Fungsi PenunjangKeuangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel.

Tabel 2.150
Capaian Kinerja Fungsi PenunjangKeuangan Terhadap Target RKPD Tahun 2017
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah dokumen standart satuan harga	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	5 dok	5 dok			Bagian Organisasi
2	persentase Perangkat Daerah yang telah melakukan inventarisasi aset dengan tertib	100 %	100%	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100%			BPPKAD
3	Opini laporan keuangan (WTP, WDP)	100 %	100%	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100%			BPPKAD
4	Peningkatan PAD (%)	19,61 %	61,44 %	10,77%	1,64	17,03 %	17,94%	17,94%	31,08 %			BPPKAD
5	persentase tertib administrasi keuangan desa	45 %	100%	100%	100%	65%	70%	70%	65%			PMD
6	persentase Perdes APBdes yang tersusun sesuai regulasi	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Dinas PMD

Keterangan:

















<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target RKPD Tahun 2018: 		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2017 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 perlu upaya keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja Fungsi PenunjangKeuangan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017, dari sejumlah 6 target indikator dan sebanyak 6 indikator berstatus telah tercapai.. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 6 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 6 target indikator berstatus telah tercapai.

3. Kepegawaian

Kinerja penyelenggaran Fungsi Penunjang Kepegawaian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel.

Tabel 2.151
Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Kepegawaian
Terhadap Target RKPD Tahun 2017 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rasio PNS yang mengikuti diklat teknis	2,74	2,88	2,02	2,56	0,83	0,83	5,8	1,25			BKPP
2	Rasio S1 terhadap jumlah pegawai	40,67	49,36	69,57	51,14	41,91	42,22	42,22	51,66			BKPP
3	Rasio S2/S3 terhadap jumlah pegawai	2,45	3,33	3,39	3,58	2,65	2,71	2,71	3,57			BKPP
4	Rasio Pejabat struktural yang mengikuti Diklatpim	13,6	6,4	6,56	0,48	9,6	9,6	45,92	0			BKPP
5	Jumlah PNS yang mengikuti diklat prajab	-	59 orang	109 orang	0	130 orang	150 orang	985 orang	0			BKPP
6	Jumlah Perangkat Daerah yang sudah di Anjab, ABK	4 Perang kat Daerah	28 Perang kat Daerah	15 Perang kat Daerah	2 Perang kat Daerah	8 Perang kat Daerah	8 Perang kat Daerah	36 Perang kat Daerah	4 perang kat Daerah			Bagian Organisasi
7	Rasio penanganan pelanggaran disiplin	0,00	66,67	0,67	0,83	0,75	0,80	0,80	0,24			BKPP
8	Jumlah aparatur yang terbina dikembangkan sesuai kompetensi dan prestasi	12.603	10.874	10.804	9.900	12.163	12.163	61.029	7.568			BKPP

Keterangan:



<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target RKPD Tahun 2018: 		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> Status terhadap Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2017 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 perlu upaya keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja Fungsi Penunjang Kepegawaian, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017, dari sejumlah 8 target indikator, sebanyak 3 indikator berstatus telah tercapai, 5 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 8 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 4 target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 1 target indikator berstatus akan tercapai, dan 3 indikator perlu upaya keras.

4. Penelitian dan Pengembangan

Kinerja penyelenggaran Fungsi PenunjangPenelitian dan Pengembangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel.

Tabel 2.152
Capaian Kinerja Fungsi PenunjangPenelitian dan Pengembangan
Terhadap Target RKPD Tahun 2017 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal				Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2017	Status thdp Target RKPD Tahun 2017	Status thdp Target Akhir RPJMD	OPD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah penelitian iptek dan inovasi daerah		-	-	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	8 dokumen	2 dokume n			Bappelit bangda

Keterangan:

• Status terhadap Target RKPD Tahun 2018:		Target 2017 tercapai
		Target 2017 tidak tercapai
• Status terhadap Target Akhir RPJMD:		Capaian Target RPJMD s/d 2017 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2017 perlu upaya keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja Fungsi PenunjangPenelitian dan Pengembangan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan target RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017, dari sejumlah 1 target indikator sebanyak 1 indikator berstatus tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 1 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 1 target indikator berstatus perlu upaya keras.

2.6 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan rumusan usulan program dan kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil reses dan rangkuman dengar pendapat DPRD dengan Perangkat Daerah untuk agenda kerja DPRD tahun 2019.

Adapun pokok-pokok pikiran DPRD masing-masing komisi sebagaimana output eplanning, dijabarkan dalam Tabel berikut ini.

2.7 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Kudus yang teridentifikasi berdasarkan urusan pemerintahan adalah sebagai berikut :

- 1) Urusan Pendidikan
 - a. masih adanya anak putus sekolah;
 - b. belum tercapainya standar sarana dan prasarana;
 - c. belum meratanya akses TK Negeri; dan
 - d. belum optimalnya pembinaan pendidikan kemasyarakatan.
- 2) Urusan Kesehatan
 - a. belum optimalnya upaya pengendalian dan pencegahan penyakit HIV/AIDS;
 - b. masih tingginya angka kesakitan penyakit menular;
 - c. terbatasnya alat-alat kesehatan di BLUD RSUD;
 - d. meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular (hipertensi, Diabetus Melitus);
 - e. belum tercapainya target pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat;
 - f. masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI);
 - g. masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB)
 - h. angka capaian ASI Eksklusif yang masih rendah;
 - i. akses dan kepemilikan jamban yang belum mencapai 100 %.
- 3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. belum optimalnya penanganan banjir;
 - b. masih perlunya penanganan infrastruktur yang dapat menjangkau ke seluruh wilayah;
 - c. terbatasnya lahan non pertanian untuk kawasan budidaya;
 - d. belum adanya penetapan kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba).
 - e. masih perlunya penanganan penyediaan akses air minum layak;
 - f. masih perlunya penanganan penyediaan akses sanitasi layak; dan
 - g. belum optimalnya penanganan bangunan gedung.
- 4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - a. belum optimalnya pembinaan terhadap pengembang perumahan dan penanganan Prasarana Sarana Utilitas perumahan; dan
 - b. belum optimalnya penanganan kawasan kumuh.
- 5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - a. kurangnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi;
 - b. meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan minuman keras,

- narkoba dan penyakit masyarakat lainnya;
- c. belum optimalnya kemitraan pemerintah dengan organisasi masyarakat, LSM dan partai politik; dan
- d. belum optimalnya kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat.

6) Urusan Sosial

- a. kecenderungan peningkatan jumlah keluarga miskin;
- b. masih adanya anak terlantar, anak jalanan dan anak nakal;
- c. belum optimalnya penanganan penyandang cacat dan trauma;
- d. belum adanya panti singgah;
- e. masih adanya eks penyandang penyakit sosial;
- f. belum optimalnya penanganan PMKS; dan
- g. belum optimalnya fasilitasi terhadap penyandang cacat.

7) Urusan Tenaga Kerja

- a. belum optimalnya informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja;
- b. kurangnya produktifitas tenaga kerja; dan
- c. penyelenggaraan pembinaan dan sosialisasi kebijakan ketenagakerjaan belum optimal.

8) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. masih rendahnya peran perempuan di ranah publik;
- b. masih lemahnya kinerja dan eksistensi kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
- c. masih adanya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); dan
- d. masih adanya kasus kekerasan pada anak.

9) Urusan Pangan

- a. kurang terpenuhinya pangan secara cukup dalam mutu dan keamanan serta keterjangkauan harga; dan
- b. belum optimalnya pemakaian bahan pangan non beras non terigu sebagai bahan pangan utama dalam pola konsumsi masyarakat.

10) Urusan Pertanahan

Belum optimalnya administrasi pertanahan.

11) Urusan Lingkungan Hidup

- a. masih adanya potensi pencemaran lingkungan;
- b. belum optimalnya pengelolaan persampahan;
- c. keterbatasan lahan RTH dan keanekaragaman hayati; dan
- d. meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global.

- 12) Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
 - a. terbatasnya blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Pemerintah Pusat yang berakibat pada pelayanan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - b. belum optimalnya pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - c. kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan;
 - d. belum adanya petunjuk teknis tentang pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
 - e. belum optimalnya pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA).
- 13) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. belum optimalnya lembaga pemberdayaan masyarakat;
 - b. belum optimalnya kapasitas aparatur pemerintahan desa; dan
 - c. belum optimalnya organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa.
- 14) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a. masih tingginya Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) dan kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi (unmet need);
 - b. belum optimalnya pelayanan KB; dan
 - c. masih rendahnya pemakai metode kontrasepsi jangka panjang.
- 15) Urusan Perhubungan
 - a. belum optimalnya penanganan kemacetan pada jam-jam sibuk;
 - b. ketersediaan sarpras dan kelaikan sarpras pengaman lalu lintas yang kurang memadai; dan
 - c. belum optimalnya pembinaan keselamatan lalu lintas.
- 16) Urusan Komunikasi dan Informatika
 - a. belum optimalnya pengembangan e-government dan pengembangan smart city;
 - b. belum optimalnya integrasi data antar organisasi perangkat daerah;
 - c. belum optimalnya standar data center;
 - d. masih perlunya peningkatan kapasitas SDM aparatur bidang informasi;
 - e. kurang optimalnya informasi program-program pemerintah kepada masyarakat;
 - f. kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - g. belum optimalnya ketersediaan data statistik.

- 17) **Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Mengah**
 - a. belum tersedianya peta pengembangan industri di Kabupaten Kudus;
 - b. belum optimalnya upaya peningkatan kualitas kelembagaan dan manajemen koperasi dan UMKM;
 - c. terbatasnya pangsa pasar dan rendahnya modal UMKM; dan
 - d. kurangnya daya saing produk UMKM/IKM.
- 18) **Urusan Penanaman Modal**
 - a. belum optimalnya pelayanan perijinan yang dikarenakan terbatasnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk ruang gerak bagi investasi baru, khususnya untuk investasi bidang industri yang tercantum dalam RTRW;
 - b. belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik khususnya pelayanan perijinan dan penanaman modal yang disebabkan masih adanya disharmoni regulasi; dan
 - c. belum terbentuknya pelayanan perijinan online yang terintegrasi dengan Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait dalam penerbitan perijinan.
- 19) **Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**
 - a. belum optimalnya pembinaan kepemudaan;
 - b. belum optimalnya pembinaan olah raga;
 - c. belum terpenuhinya sarana prasarana olah raga yang memadai; dan
 - d. adanya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda.
- 20) **Urusan Statistik**
 - a. belum optimalnya ketersediaan data statistik; dan
 - b. belum optimalnya survey data statistik tematik.
- 21) **Urusan Persandian**

belum optimalnya penyelenggaraan urusan persandian.
- 22) **Urusan Kebudayaan**
 - a. menurunnya nilai-nilai etika, moral, dan budaya pada masyarakat;
 - b. belum optimalnya pembinaan dan pengembangan budaya; dan
 - c. belum optimalnya pelestarian benda cagar budaya.
- 23) **Urusan Perpustakaan**
 - a. masih rendahnya minat budaya baca masyarakat;
 - b. belum optimalnya pengelolaan perpustakaan;
 - c. terbatasnya jumlah literatur, dokumen buku-buku koleksi perpustakaan, otomasi perpustakaan dan e-library;
 - d. kondisi sarana dan prasarana yang belum maksimal; dan

- e. belum adanya tenaga fungsional pustakawan.

24) Urusan Kearsipan

- a. belum optimalnya pengelolaan arsip;
- b. kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai; dan
- c. kurangnya tenaga arsiparis.

25) Urusan Kelautan dan Perikanan

- a. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya perikanan air tawar; dan
- b. Masih terbatasnya ketersediaan ikan sebagai sumber protein.

26) Urusan Pariwisata

- a. belum optimalnya pengembangan jaringan dan promosi pariwisata;
- b. belum optimalnya pemanfaatan destinasi pariwisata; dan
- c. belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata yang baru.

27) Urusan Pertanian

- a. terbatasnya infrastruktur, sarana prasarana lahan dan sumber daya air untuk pertanian;
- b. kecenderungan alih fungsi lahan pertanian;
- c. terbatasnya akses petani terhadap sumber permodalan; dan
- d. belum optimalnya pengembangan agroindustri.

28) Urusan Perdagangan

- a. belum optimalnya perlindungan konsumen;
- b. belum optimalnya pengendalian pengembangan pasar modern;
- c. belum optimalnya pengembangan manajemen logistik;
- d. terbatasnya akses pemasaran; dan
- e. perlunya pengawasan peredaran barang-barang strategis/kebutuhan pokok masyarakat.

29) Urusan Perindustrian

- a. belum tersedianya peta pengembangan industri di Kabupaten Kudus;
- b. masih rendahnya produktifitas industri;
- c. masih banyaknya industri kecil dan menengah yang belum memiliki ijin usaha;
- d. terbatasnya akses permodalan bagi industri kecil;
- e. rendahnya penguasaan dan penggunaan teknologi dalam proses produksi;
- f. belum optimalnya pengembangan sentra industri;
- g. belum adanya pengembangan kawasan industri; dan

h. rendahnya daya saing produk non tembakau.

30) Urusan Transmigrasi

belum optimalnya penanganan transmigrasi.

31) Urusan Administrasi Pemerintahan

- a. belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- b. belum terbentuknya forum kerjasama antar pemerintah daerah; dan
- c. belum optimalnya tata kelola kelembagaan, tata laksana dan analisis jabatan.

32) Urusan Pengawasan

- a. Kurangnya jumlah Auditor yang sesuai dengan kompetensi pengawasan dibanding dengan cakupan tugas pengawasan;
- b. Kebutuhan percepatan penyesuaian bagi pejabat pengganti terkait dinamika peningkatan karier pemangku jabatan struktural di Inspektorat Daerah untuk melanjutkan dan mengembangkan profesi pengawasan di Inspektorat Daerah;
- c. belum semua APIP secara optimal menerapkan hasil pendidikan dan pelatihan profesi terkini dalam kegiatan kepengawasan di Inspektorat Daerah;
- d. perlunya optimalisasi peran penjamin mutu pengawasan intern;
- e. perlunya akselerasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengawasan dalam mengimbangi dinamika kebijakan pemerintah pusat; dan
- f. kurang efektifnya strategi percepatan program reformasi birokrasi, dalam rangka membangun Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

33) Urusan Perencanaan

- a. belum optimalnya perencanaan dengan penganggaran dalam pelaksanaan pembangunan;
- b. belum maksimalnya pengawasan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai perencanaan yang ada; dan
- c. belum adanya JFP (Jabatan Fungsional Perencana) pada Bappelitbangda dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya.

34) Urusan Keuangan

- a. pembayaran penerimaan pajak dan retribusi belum bisa on line dan belum bisa terbaca secara real time;
- b. pembayaran pajak dan retribusi belum dilaksanakan secara non tunai; dan
- c. belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah.

35) Urusan Kepegawaian

- a. Kurangnya profesionalisme sumber daya aparatur; dan
- b. Kurangnya pemerataan kompetensi ASN.

36) Urusan Pendidikan dan Pelatihan

- a. kurangnya tenaga pengajar diklat yang benar-benar menguasai bidangnya dari kalangan Pegawai Negeri Sipil;
- b. belum adanya widyaiswara ditingkat kabupaten;
- c. belum optimalnya pemanfaatan hasil diklat oleh peserta diklat; dan
- d. kurangnya materi materi diklat yang terbaru yang sesuai dengan kondisi dan kemajuan daerah.

37) Urusan Penelitian dan Pengembangan

- a. belum terbentuknya Dewan Riset Daerah (DRD); dan belum terjalinnya jaringan penelitian.

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Kudus yang berhubungan Prioritas dan Sasaran Pembangunan sebagai berikut:

- 1. Daya saing perekonomian daerah masih rendah;
- 2. Belum optimalnya mutu pendidikan;
- 3. Ketersediaan SDM pelayanan fasilitas kesehatan kurang memadai;
- 4. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran;
- 5. Pembangunan infrastruktur yang ego sektoral dan ketimpangan antar wilayah; dan
- 6. Belum optimalnya pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi Ekonomi Nasional

Sepanjang tahun 2016, kondisi perekonomian global berada pada kondisi ketidakpastian, yang ditunjukkan dengan menurunnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat. Hal tersebut dipengaruhi beberapa hal antara lain pemulihan ekonomi Amerika Serikat, dan normalisasi ekonomi Tiongkok yang masih berlangsung serta konflik internasional Israel. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus berlanjut di tahun 2019.

Mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan mempertimbangkan kondisi ekonomi global, maka pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2019 diproyeksikan sebesar 5,4 – 5,8 persen, dengan asumsi: (1) perekonomian dunia terus mengalami pemulihan, (2) tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baru yang terjadi, (3) berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana. Untuk mendukung stabilitas ekonomi yang kokoh maka laju inflasi direncanakan pada besaran 2,5 – 4,5 persen. Inflasi yang terkendali memungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif sehingga mendorong sektor riil bergerak dan berkembang dengan sehat.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu akan mengurangi tingkat kemiskinan menjadi 7,0 – 8,0 persen dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4 – 5 persen.

3.1.2 Kondisi Ekonomi Jawa Tengah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 ditujukan dalam rangka pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan

prioritas pada upaya pencapaian daya saing wilayah dan masyarakat Jawa Tengah yang berlandaskan keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan dasar yang makin luas, infrastruktur wilayah yang makin berkualitas dan kondusivitas wilayah yang makin mantap serta kemampuan ilmu dan teknologi yang makin meningkat.

Perekonomian Jawa Tengah tahun 2017 tumbuh sebesar 5,4 persen, lebih baik dibandingkan Tahun 2016 sebesar 5,28 persen dan perekonomian nasional sebesar 5,19 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen impor sebesar 24,11 persen, diikuti komponen ekspor sebesar 23,55 persen, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 7,48 persen.

Adapun inflasi sampai dengan akhir tahun 2017 mencapai 3,71 persen meningkat dibanding tahun 2016 sebesar 2,36 persen. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya harga berbagai kebutuhan bahan pokok masyarakat dan kelompok administred price. Prospek perekonomian Jawa Tengah tahun 2019 di proyeksikan tumbuh pada kisaran 5,2 – 5,6 persen dengan inflasi sebesar 4 ± 1 persen.

Untuk dapat mencapai proyeksi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Tahun 2019, salah satu yang didorong adalah investasi. Dengan proyeksi ICOR Jawa Tengah tahun 2019 sebesar 5 - 5,95, maka dibutuhkan investasi sebesar Rp. 263,50 Trilyun rupiah. Iklim investasi harus diciptakan kondusif agar dana yang masih ada di luar negeri bisa masuk dan dimanfaatkan untuk kegiatan yang memiliki daya pengganda. Salah satunya adalah melalui kebijakan pemberian kredit sektor komersial dan korporasi dengan suku bunga rendah, yang didukung kebijakan rencana tata ruang Jawa Tengah yang memberikan peluang ruang investasi lebih besar.

3.1.3 Kondisi Ekonomi Kabupaten Kudus

Untuk memperkuat perekonomian Indonesia termasuk perekonomian Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Kudus dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya gejolak perekonomian

global ke depan, diperlukan penguatan pada tiga hal yaitu pengeluaran pemerintah, investasi, dan konsumsi.

Perkembangan dan proyeksi perekonomian Kabupaten Kudus memperlihatkan adanya peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Perkembangan dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Kudus Tahun 2012-2019

NO	INDIKATOR	TAHUN						
		REALISASI					PROYEKSI*	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	4,36	4,43	3,90	2,53	n/a	3,46	2,50
2.	Laju Inflasi (%)	8,31	8,59	3,28	2,32	4,17	4 ± 1	4 ± 1
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,01	5,03	5,04	4,91	3,56	4,3	3,5
4.	Penduduk Miskin (%)	8,62	7,99	7,73	7,65	7,59	7,11	7,38

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2018,* Bappelitbangda (data diolah)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus cenderung fluktuatif. Kondisi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus tahun 2013 sebesar 4,36 persen kemudian meningkat pada tahun 2014 sebesar 4,43 persen. Sedangkan tahun 2015 pertumbuhan ekonomi sebesar 3,90 persen, tahun 2016 sebesar 2,53 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2018 dan 2019 sebesar 3,46 persen dan 2,50 persen.

3.1.4 Tantangan dan Prospek Ekonomi Tahun 2019

Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah sangat berpengaruh pada potensi kondisi perekonomian di Kabupaten Kudus. Sebagaimana diproyeksikan perekonomian Jawa Tengah, proyeksi perekonomian Kabupaten Kudus akan tercapai dengan asumsi – asumsi sebagai berikut :

1. ICOR tetap terjaga pada kisaran 5 – 5,95.
2. Stabilitas lingkungan global/nasional dan daerah tetap kondusif.
3. Terkelolanya kemajuan teknologi informasi dalam kebijakan perundang-undangan.
4. Permintaan domestik yang menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah terus meningkat.
5. Investasi yang diperkirakan akan meningkat sejalan dengan perbaikan kebijakan kemudahan berusaha.

6. Kebijakan rencana tata ruang yang memberikan peluang ruang investasi lebih baik dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
7. Ekspor yang diperkirakan semakin meningkat, meningkatnya harga komoditas dunia, dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai media pemasaran produk ekspor.
8. Stabilitasnya pertumbuhan lapangan usaha utama yaitu industri pengolahan, perdagangan dan pertanian.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

Arah kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dalam RKPD dimaksudkan untuk mengarahkan perencanaan pembangunan menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Arah dan kebijakan keuangan daerah tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam proses penyusunan APBD.

Penentuan arah kebijakan keuangan daerah perlu mempertimbangkan target RPJMD dan situasi dan kondisi saat ini, mengingat banyak hal yang mempengaruhi prediksi/asumsi yang telah ditetapkan dalam RPJMD pada tahun 2019. Kondisi yang mempengaruhi antara lain kondisi perekonomian daerah dan regulasi yang berdampak pada kebijakan pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

Perkembangan pendapatan daerah menjadi dasar dalam perhitungan kapasitas fiskal daerah. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015-2017 mencapai sebesar 6 %, yang terdiri dari PAD rata-rata meningkat sebesar 21 %, Dana Perimbangan rata-rata meningkat sebesar 13 % sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah rata-rata mengalami penurunan sebesar 17 %, hal ini dikarenakan pengalihan tunjangan profesi dan TPP guru yang semula menjadi komponen lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menjadi komponen Dana Perimbangan yaitu menjadi bagian dari Dana Alokasi Khusus pada tahun 2015 ke 2016 dan 2017 seperti terlihat pada Tabel 3.2

Tabel 3.2
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015-2017 Kabupaten Kudus

NOMOR URUT	URAIAN	Realisasi			
		2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	r (%)
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	1,759,781,233,001.86	1,880,999,970,783.00	1,992,367,226,197.00	0.06
1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	259,295,905,248.86	279,239,106,716.00	375,185,351,728.00	0.21
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	78,860,989,366.00	84,453,872,872.00	103,927,599,502.00	0.15
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	18,093,279,315.00	16,799,373,970.00	19,849,728,536.00	0.60
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8,051,589,485.00	6,437,703,100.00	17,677,058,831.00	0.77
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	154,290,047,082.86	171,548,156,774.00	233,730,964,859.00	0.24
1 . 2	DANA PERIMBANGAN	1,033,505,128,258.00	1,290,967,072,066.00	1,310,924,033,469.00	0.13
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	187,347,767,258.00	240,510,038,401.00	246,044,588,085.00	0.15
1 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	784,919,177,000.00	822,153,771,000.00	807,711,173,000.00	0.01
1 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	61,238,184,000.00	228,303,262,665.00	257,168,272,384.00	1.43
1 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	466,980,199,495.00	310,793,792,001.00	306,257,841,000.00	-0.17
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	16,282,282,537.00	10,322,044,000.00	8,388,252,000.00	-0.28
1 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	112,356,677,958.00	113,828,873,801.00	134,625,008,000.00	0.1
1 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	264,680,001,000.00	87,184,574,200.00	111,187,281,000.00	-0.20
1 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	73,661,238,000.00	99,458,300,000.00	52,057,300,000.00	-0.06

Proyeksi pendapatan tahun 2019 diprediksi meningkat dibanding penetapan APBD 2018 utamanya pada komponen Pendapatan Pajak Daerah, Dana perimbangan yaitu pada Dana ALokasi Khusus dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, sebagaimana tercantum pada tabel 3.3.

Tabel 3.3
Evaluasi/Catatan Atas Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah
RKPD Tahun 2019 Kabupaten Kudus

No	Uraian	APBD Tahun 2018 (Rp)	Proyeksi RKPD Tahun 2019
1	2	3	4
1	PENDAPATAN	2,012,459,415,000.00	2,236,517,205,000.00
1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	319,049,890,000.00	318,459,254,000.00
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	96,928,323,000.00	105,384,000,000.00
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	27,034,115,000.00	31,484,115,000.00
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,759,586,000.00	7,118,227,000.00
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	188,327,866,000.00	174,472,912,000.00
1 . 2	DANA PERIMBANGAN	1,350,661,611,000.00	1,458,456,851,000.00
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	284,131,664,000.00	278,590,893,000.00
1 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	807,711,173,000.00	807,711,173,000.00
1 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	258,818,774,000.00	372,154,785,000.00
1 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	342,747,914,000.00	459,601,100,000.00
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	60,971,600,000.00	60,971,600,000.00
1 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	123,074,010,000.00	128,239,932,000.00
1 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	144,216,044,000.00	144,216,044,000.00
1 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	14,486,260,000.00	126,173,524,000.00

Sumber :BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2018

Proyeksi pendapatan daerah pada RKPD Tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan APBD Tahun 2018. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah.

Kebutuhan keuangan dapat dilihat dari alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Berikut Perkembangan belanja langsung dan belanja tidak langsung selama tahun 2015-2017 terlihat dalam tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4
Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kudus 2015 - 2017

No	Uraian	2015	2016	2017	Rata-rata Per- tumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	929.054.238.904,00	1.039.564.876.540,00	1.059.277.096.963,00	6,90
1	Belanja Pegawai	752.900.556.127,00	795.248.819.214,00	767.403.149.313,00	1,06
2	Belanja Bunga	16.878.577,00	3.397.876,00	0,00	(89,93)
3	Belanja Hibah	11.465.425.000,00	20.654.425.000,00	50.701.785.000,00	112,81
4	Belanja Bantuan Sosial	20.244.810.000,00	24.507.720.000,00	7.579.640.000,00	(24,01)
5	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	9.183.182.300,00	9.467.435.000,00	11.195.355.700,00	10,67
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa	134.792.186.900,00	189.683.079.450,00	222.397.166.950,00	28,98
7	Belanja Tidak Terduga	451.200.000,00	0,00	0,00	(50,00)
B	BELANJA LANGSUNG	777.794.191.844,00	1.087.377.857.363,00	947.721.045.983,00	13,48
1	Belanja Pegawai	34.273.533.385,00	32.634.901.847,00	42.710.464.090,00	13,05
2	Belanja Barang dan Jasa	292.190.349.280,00	376.537.189.252,00	404.229.809.466,00	18,11
3	Belanja Modal	451.330.309.179,00	678.205.766.264,00	500.780.772.427,00	12,05
	Total Belanja	1.706.848.430.748,00	2.126.942.733.903,00	2.006.998.142.946,00	9,49

Sumber :BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2018

Perkembangan belanja daerah Kabupaten Kudus dari tahun 2015 ke 2017 menunjukkan peningkatan, yakni sebesar Rp.929.054.238.904,00 pada tahun 2015 menjadi Rp. 1.059.277.096.963,00 pada tahun 2017. Dimana penggunaan terbesar dari belanja daerah tersebut terdapat pada Belanja Tidak Langsung yang terus meningkat rata-rata meningkat 6,90%, dimana dominasi kenaikan belanja hibah dan belanja bantuan keuangan. Belanja bunga dianggarkan sesuai kebutuhan, begitu juga dengan belanja hibah dan bansos telah diatur sesuai Permendagri Nomor 32 Tahun 2011.

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Posisi keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Kudus tahun 2015-2017 sebagaimana atercantum pada Tabel 3.5

Tabel 3.5
Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Kudus tahun 2015-2017

URAIAN	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Kas Daerah	422.748.189.582,00	158.378.428.357,00	116.900.485.923,00	(44,36)
Kas di Bendahara Pengeluaran	64.623.322,00	12.983.057,00	34.575.768,00	43,20
Kas di Bendahara Penerimaan	86.584.636,86	22.380.823,00	54.743.640,00	35,22
Kas di BLUD	16.316.482.581,00	23.633.486.846,00	19.788.609.859,00	14,29
Kas di Bendahara FKTP	6.943.787.942,00	0,00	0,00	(50,00)
Kas BOS	0,00	827.381.834,60	2.155.523.522,00	80,26
Kas Lainnya	399.226.099,00	14.406.750,00	0,00	(98,20)
Piutang Pajak	18.038.858.021,00	18.256.541.430,00	20.406.356.260,00	6,49
Penyisihan Piutang Pajak	(10.797.625.151,35)	(11.849.937.115,25)	(12.719.757.852,00)	8,54
Piutang Pajak Netto	7.241.232.869,65	6.406.604.314,75	7.686.598.408,00	4,23
Piutang Retribusi	630.046.573,08	823.475.449,53	2.324.708.306,72	106,50
Penyisihan Piutang Retri- busi	(97.706.985,96)	(137.660.955,22)	(738.483.186,13)	238,67
Piutang Retribusi Net- to	532.339.587,12	685.814.494,31	1.586.225.120,59	80,06
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	4.156.688.662,00	0,00
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	14.560.260.182,84	10.725.603.745,34	31.791.187.203,00	85,03
Penyisihan Piutang Lain- Lain PAD Yang Sah	(548.794.831,23)	(1.052.567.524,17)	(998.712.007,95)	43,34
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Netto	14.011.465.351,61	9.673.036.221,17	30.792.475.195,05	93,68
Piutang Pendapatan Lainnya	54.150.000,00	47.517.000,00	35.250.000,00	(19,03)
Belanja Dibayar Dimuka	560.986.740,00	1.486.915.907,18	1.217.649.452,14	73,47
Persediaan	21.711.858.957,53	24.711.788.708,94	25.985.647.961,64	9,49
Jumlah Aset Lancar	490.670.927.668,77	225.900.744.313,95	210.394.473.511,42	(30,41)
INVESTASI JANGKA PANJANG				
Investasi Non Permanen				
Investasi Non Permanen Lainnya	386.245.980,00	311.683.480,00	449.675.711,00	12,48
Jumlah Investasi Non Permanen	386.245.980,00	311.683.480,00	449.675.711,00	12,48
Investasi Permanen				0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	113.971.173.839,89	116.868.479.539,07	138.156.652.551,98	10,38
Jumlah Investasi Permanen	113.971.173.839,89	116.868.479.539,07	138.156.652.551,98	10,38
Jumlah Investasi Jangka Panjang	114.357.419.819,89	117.180.163.019,07	138.606.328.262,98	10,38
ASET TETAP				
Tanah	890.750.952.830,00	957.185.198.019,00	1.104.178.546.507,00	11,41
Peralatan dan Mesin	532.769.306.789,00	528.701.895.347,46	572.773.238.642,46	3,79
Gedung dan Bangunan	1.106.476.833.528,61	1.326.256.567.789,61	1.458.130.049.810,36	14,90
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.183.524.829.556,76	1.498.183.090.556,76	1.873.738.295.786,76	25,83
Aset Tetap Lainnya	57.661.368.931,00	51.510.987.571,71	57.671.354.482,85	0,65
Konstruksi Dalam Pengerjaan	22.955.961.500,00	31.006.998.700,00	69.804.343.640,00	80,10
Akumulasi Penyusutan	(1.297.879.671.319,00)	(1.343.751.729.758,57)	(1.518.491.203.420,46)	8,27
Jumlah Aset Tetap	2.496.259.581.816,37	3.049.093.008.225,97	3.617.804.625.448,97	20,40
ASET LAINNYA				
Tuntutan Ganti Rugi	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	18.708.009.235,00	10.829.648.235,00	10.829.648.235,00	(21,06)
Aset Tidak Berwujud	1.640.770.264,00	4.888.219.940,00	6.757.269.449,00	118,08
Amortisasi Aset Tak Ber-	0,00	(3.157.474.164,00)	(4.246.883.554,00)	17,25

URAIAN	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
wujud				
Aset Tak Berwujud Netto	1.640.770.264,00	1.730.745.776,00	2.510.385.895,00	25,27
Aset Lain-lain	43.344.635.211,00	195.692.880.200,17	182.007.268.652,03	172,24
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	0,00	(109.467.231.768,00)	(96.034.030.270,00)	(6,14)
Aset Lain-lain Netto	43.344.635.211,00	86.225.648.432,17	85.973.238.382,03	49,32
Jumlah Aset Lainnya	63.701.114.710,00	98.793.742.443,17	99.320.972.512,03	27,81
JUMLAH ASET	3.164.989.044.015,03	3.490.967.658.002,16	4.066.126.399.735,40	13,39
KEWAJIBAN				0,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	12.982.773,00	2.050.534.856,00	7.847,14
Bagian lancar Utang Jangka Pan- jang	59.976.741,82	0,00	0,00	(50,00)
Pendapatan Diterima Dimuka	1.983.109.424,65	1.649.396.383,06	1.969.369.425,38	1,29
Utang Belanja	9.766.971.530,00	11.873.203.554,00	23.147.053.514,00	58,26
Utang Jangka Pendek Lainnya	841.269.550,00	14.406.750,00	0,00	(99,14)
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	12.651.327.246,47	13.549.989.460,06	27.166.957.795,38	53,80
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				0,00
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	12.651.327.246,47	13.549.989.460,06	27.166.957.795,38	53,80
EKUITAS				0,00
EKUITAS	3.152.337.716.768,56	3.477.417.668.542,10	4.038.959.441.940,02	13,23
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.164.989.044.015,03	3.490.967.658.002,16	4.066.126.399.735,40	13,39

Berdasarkan neraca daerah tersebut, dapat dianalisis kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio (Tabel 3.9). Rasio keuangan yang dianalisis yaitu Rasio Likuiditas yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasia Likuiditas yang digunakan dalam analisis ini yaitu:

1. *Current Ratio* (rasio lancar), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya. Dari tabel 3.4. dapat ketahui bahwa Rasio lancar Pemerintah kabupaten Kudus berada diatas angka 1, menunjukkan bahwa kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Kudus dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya tergolong tinggi.
2. *Quick Ratio* (rasio cair), yaitu ukuran kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang lebih likuid, dimana Persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak likuid sehingga ha-

rus dikeluarkan dari perhitungan. Dengan melihat tabel 3.4, Rasio Cair Pemerintah kabupaten Kudus lebih dari 1, artinya Pemerintah Daerah memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Hal tersebut menunjukkan kelebihan kas dan piutang untuk membayar kewajiban jangka pendek.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah. Dengan melihat realisasi pendapatan tahun sebelumnya, dan perkembangan kondisi perekonomian daerah, pendapatan daerah Kabupaten Kudus pada tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp.2.236.517.205.000,00 meningkat sebesar Rp. 224.057.790.000,00 atau naik sebesar 11,13% dari tahun sebelumnya Tahun 2018 sebesar Rp.2.012.459.415.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 diprediksikan sebesar Rp.318.459.254.000,00 menurun sebesar Rp. 590.636.000,00 atau 0,19% dari tahun 2018 sebesar Rp. 319.049.890.000,00. Penurunan tersebut karena adanya penurunan pada komponen Lain-lain PAD yang sah.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/ bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan diprediksikan meningkat sebesar Rp.107.795.240.000,00 atau 7,98% dari tahun 2018 sebesar Rp.1.350.661.611.000,00 sehingga menjadi Rp.1.458.456.851.000,00. Kenaikan tersebut antara lain berasal dari Dana Alokasi Khusus.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2019 diprediksikan sebesar Rp. 459.601.100.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 116.853.186.000,00 atau naik 34,09% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp. 342.747.914.000,00. Kenaikan tersebut berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya dan Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya.

Secara rinci perkembangan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah disajikan pada Tabel 3.6

Tabel 3.6
Realisasi Tahun 2015-2017 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2019

NO	U R A I A N	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Anggaran 2018(Rp)	RKPD 2019 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.759.781.233.001,86	1.880.999.970.784,00	1.992.367.226.197,00	2.012.459.415.000,00	2.236.517.205.000
1.1	Pendapatan Asli Daerah	259.295.905.248,86	279.239.106.717,00	375.185.351.728,00	319.049.890.000,00	318.459.254.000,
1.1.1	Pajak Daerah	78.860.989.366,00	84.453.872.873,00	103.927.599.502,00	96.928.323.000,00	105.384.000.000,
1.1.2	Retribusi Daerah	18.093.279.315,00	16.799.373.970,00	19.849.728.536,00	27.034.115.000,00	31.484.115.000,
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.051.589.485,00	6.437.703.100,00	17.677.058.831,00	6.759.586.000,00	7.118.227.000,
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	154.290.047.082,86	171.548.156.774,00	233.730.964.859,00	188.327.866.000,00	174.472.912.000
1.2	Dana Perimbangan	1.033.505.128.258,00	1.290.967.072.066,00	1.310.924.033.469,00	1.350.661.611.000,00	1.458.456.851.000
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	187.347.767.258,00	240.510.038.401,00	246.044.588.085,00	284.131.664.000,00	278.590.893.000,
1.2.2	Dana Alokasi Umum	784.919.177.000,00	822.153.771.000,00	807.711.173.000,00	807.711.173.000,00	807.711.173.000,
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	61.238.184.000,00	228.303.262.665,00	257.168.272.384,00	258.818.774.000,00	372.154.785.000,
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	466.980.199.495,00	310.793.792.001,00	306.257.841.000,00	342.747.914.000,00	459.601.100.000
1.3.1	Pendapatan Hibah	16.282.282.537,00	10.322.044.000,00	8.388.252.000,00	60.971.600.000,00	60.971.600.000,00
1.3.2	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	112.356.677.958,00	113.828.873.801,00	134.625.008.000,00	123.074.010.000,00	128.239.932.000,
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	264.680.001.000,00	87.184.574.200,00	111.187.281.000,00	144.216.044.000,00	144.216.044.000,
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	73.661.238.000,00	99.458.300.000,00	52.057.300.000,00	14.486.260.000,00	126.173.524.000,

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan pembiayaan. Kebijakan keuangan harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan bertanggungjawab serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Kudus berupaya dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan ditempuh melalui arah kebijakan sebagai berikut :

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.

Arah kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2019 yaitu :

1. Perencanaan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah
2. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
3. Melakukan penagihan piutang pajak daerah.
4. Membandingkan secara rasional hasil pengelolaan kekayaan daerah dengan nilai kekayaan yang disertakan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan.
6. Mengupayakan peningkatan dana perimbangan DAK.
7. Peningkatan sarpras dan SDM guna peningkatan pendapatan daerah.
8. meningkatkan kerjasama pemerintah dan swasta.

Upaya pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan dilakukan melalui :

1. Intensifikasi dengan cara :
 - Melakukan optimalisasi pajak daerah melalui penerapan Online sistem terhadap semua pajak daerah
 - Melakukan pemutakhiran data obyek pajak melalui pendataan wajib pajak.
 - Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak melalui self assesment dengan menggunakan perhitungan potensi pajak dan setoran pajak.
 - Melakukan penagihan piutang pajak PBB P2 dan jenis-jenis pajak daerah lainnya.

- Melakukan pemasangan stiker atau plang bagi penunggak pajak.
- Mengevaluasi proyeksi realisasi pendapatan daerah secara berkala melalui desk pajak dan retribusi daerah.
- Melakukan kerjasama dengan stakeholder terkait dan mitra pemerintah daerah dalam rangka mensinergikan kebijakan peningkatan pendapatan daerah.

2. Ekstensifikasi dengan cara :

- Melakukan perubahan tarif dan reklasifikasi obyek pajak daerah
- Melakukan perluasan basis obyek pajak baru melalui pendataan obyek pajak baru berbasis aplikasi.
- Memanfaatkan aset daerah untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga/swasta.
- Membangun sistem informasi terintegrasi terkait, retribusi daerah kepada seluruh OPD pengelola pendapatan.
- Melengkapi dan mereview regulasi pajak daerah dan retribusi daerah

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah.

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang akan dilaksanakan dapat dibaca kemana arah pembangunan di Kabupaten Kudus. Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran kinerja, sehingga membawa implikasi kepada struktur belanja daerah

Belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Sedangkan kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Penghitungan alokasi belanja langsung untuk pembangunan memperhitungkan kebutuhan pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat, baik pada unsur belanja daerah maupun pengeluaran pembiayaan daerah.

Arah pengelolaan Belanja Daerah tahun 2019 sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi :

1. Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang/jasa kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dan badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib, tidak mengikat, tidak terus menerus setiap tahun anggaran yang ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
3. Bantuan Sosial, adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;

4. Belanja Bagi Hasil, meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa;
5. Bantuan Keuangan yang bersifat umum maupun khusus kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

b. Belanja langsung

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik serta mendorong inovasi daerah. Belanja langsung terdiri dari:

1. Belanja Pegawai, Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan

dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan tersebut pada butir, pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Jenis belanja ini mencakup bahan pakai habis, bahan material, jasa kantor, sewa alat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya;
3. Belanja Modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Disamping hal tersebut di atas, Belanja daerah diharapkan dapat memberikan manfaat secara luas bagi masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip :

- 1) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan yang menjadi kewenangan daerah;
- 2) tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, ekonomis, efektif, bertanggung jawab

- dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- 3) Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dalam peraturan perundang-undangan;
 - 4) transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
 - 5) partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
 - 6) dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Proyeksi kebutuhan belanja dan pembiayaan tercantum pada tabel 3.7 di bawah ini.

Tabel 3.7
Perhitungan Kebutuhan Belanja dan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Kudus

No	Uraian	Proyeksi RKPD Tahun 2019
A	Belanja Tidak Langsung	1.267.806.844.000,00
1	Belanja Pegawai	883.718.539.000,00
3	Belanja Hibah	133.641.920.000,00
4	Belanja Bansos	11.203.016.000,00
5	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	13.686.812.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	222.556.557.000,00
7	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
B	Belanja Langsung	996.121.431.000,00
	Surplus/ (Defisit)	(27.411.070.000,00)
C	Pembiayaan Daerah	
	Penerimaan Pembiayaan	31.911.070.000,00
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	31.911.070.000,00
	Pengeluaran Pembiayaan	4.500.000.000,00
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.500.000.000,00

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018

Kebutuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Yang Wajib dan Mengikat pada Proyeksi RKPD tahun 2019 untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 957.754.871.000,-. Kebutuhan Belanja tidak langsung terutama untuk belanja Pegawai yang mencapai Rp. 715.315.702.000,- Belanja Hibah Rp. 14.406.800.000,- Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Rp.13.045.812.000,-, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa sebesar Rp.212.986.557.000,- dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.2.000.000.000,-. Kebutuhan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Yang Wajib dan Mengikat pada RKPD tahun 2019 sebesar Rp.4.500.000.000,- yaitu untuk penyertaan modal kepada PDAM Kabupaten Kudus sebesar Rp.4.000.000.000,- dan PD. BPR Bank Pasar Kab. Kudus sebesar Rp. 500.000.000,-.

Secara rinci Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Yang Wajib dan Mengikat Kabupaten Kudus Tahun 2015 s.d Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8
Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Yang Wajib dan Mengikat Kabupaten Kudus Tahun 2016 s.d Tahun 2019

No	Uraian	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Anggaran Tahun 2018	Proyeksi RKPD Tahun 2019
A	Belanja Tidak Langsung	1.039.564.876.540	1.059.277.096.963	1.111.027.253.000	1.267.806.844.000
1	Belanja Pegawai	795.248.819.214	767.403.149.313	833.773.717.000	883.718.539.000
2	Belanja Bunga	3.397.876	-	-	133.641.920.000
3	Belanja Hibah	20.654.425.000	50.701.785.000	33.391.977.000	133.641.920.000
4	Belanja Bansos	24.507.720.000	7.579.640.000	-	11.203.016.000
5	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	9.467.435.000	11.195.355.700	12.396.245.000	13.686.812.000
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	189.683.079.450	222.397.166.950	229.465.314.000	222.556.557.000
7	Belanja Tidak Terduga	-		2.000.000.000	3.000.000.000
B	Pengeluaran Pembiayaan	18.236.578.868	19.354.000.000	500.000.000	4.500.000.000
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	18.180.000.000	19.354.000.000	500.000.000	4.500.000.000
2	Pembayaran Pokok Utang	56.578.868	-	-	-
Jumlah		1.057.801.455.408	1.078.631.096.963	1.111.527.253.000	1.272.306.844.000

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018

Kemampuan Belanja untuk mendukung Perencanaan pembangunan tahun 2019 sebesar Rp.2.263.928.275.000,- dan untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 996.121.431.000,-. Adapun usulan kegiatan pembangunan sebagaimana telah dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sebagaimana terdapat pada aplikasi e-planning, teridentifikasi usulan sebesar Rp. 2.808.046.281.500,-. Mengingat kemampuan keuangan Daerah yang tidak sepadan dengan besaran usulan Musrenbang, guna mengakomodir usulan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada penyusunan RKPD Tahun 2019 maka usulan – usulan dirinci berdasarkan usulan prioritas pada Lampiran I, usulan yang dipertimbangkan pada Lampiran II dan Bantuan Hibah/Bantuan Sosial pada Lampiran III yang menjadi satu kesatuan dalam dokumen RKPD Tahun 2019.

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Proyeksi Pembiayaan Daerah

Proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Analisis proyeksi pembiayaan daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Sisa lebih pembiayaan diproyeksikan turun dengan rata-rata penurunan sebesar 51% seperti yang tergambar dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.9
Proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Kabupaten Kudus

NO	URAIAN	APBD 2018	RKPD 2019
3	PEMBIAYAAN DAERAH		
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	64,663,983,000.00	31,911,070,000.00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	64,663,983,000.00	31,911,070,000.00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	42,105,119,000.00	10,447,470,000.00
	Sisa Belanja Dana Penyesuaian	1,095,264,000.00	-
	Sisa Belanja Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	21,463,600,000.00	21,463,600,000.00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	64,663,983,000.00	31,911,070,000.00
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	64,663,983,000.00	31,911,070,000.00
	Badan Usaha Milik Daerah	64,663,983,000.00	31,911,070,000.00
	PD. BPR Bank Pasar Kab. Kudus	500,000,000.00	500,000,000.00
	PD. Apotik Kab. Kudus		
	PD. Percetakan Kab. Kudus		
	PDAM Kab. Kudus	-	4,000,000,000.00
	Badan Usaha Milik Swasta		
	Bank Jateng		
	PEMBIAYAAN NETTO	64,163,983,000.00	27,411,070,000.00

embiayaan Daerah Tahun 2019 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp.31.911.070.000,-, yaitu sisa Pengadaan Tanah Waduk Logung sebesar Rp.21.463.600.000,-, dan prediksi sisa kegiatan Tahun 2018 sebesar Rp.10.447.470.000,-.

Pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan pada penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, yaitu pada PD. BPR Bank Pasar sebesar Rp.500.000.000,-, dan PDAM sebesar Rp.4.000.000.000,-.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tahun 2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, namun hingga tersusunnya dokumen RKPD ini, RPJMD 2018-2023 belum ditetapkan, sehingga penyusunan dokumen RKPD 2019 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025, memperhatikan kesinambungan dengan dokumen RPJMD 2013-2018, serta mengacu pada RPJMN Tahun 2015 – 2019 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Tahun 2019 merupakan tahap ketiga (2015-2019) RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025. Visi pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2005-2025 adalah “Kudus yang Religius, Maju dan Adil”. Religius mengandung arti bahwa masyarakat diharapkan memiliki ketaatan pada agama dalam melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada kemajuan dan keadilan. Maju artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, professional serta berwawasan kedepan yang luas. Adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, kelompok, gender maupun wilayah.

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Kudus ditempuh melalui Misi pembangunan Kabupaten Kudus yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat bermoral, beretika dan berbudaya
2. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang taat pada agama dengan mengembangkan toleransi secara serasi dan seimbang
3. Mewujudkan masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan perkembangan global
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan

6. Mewujudkan keadilan bagi masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik
7. Mewujudkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
8. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang sejahtera
9. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum
10. Meningkatkan suasana demokratis dalam kehidupan berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Tahap ketiga RPJPD ditujukan untuk mewujudkan peningkatan, pengembangan dan penguatan pembangunan yang menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat serta penguatan daya saing perekonomian dengan mempertimbangkan keberlanjutan program pembangunan yang relevan dengan prioritas nasional, RKPD Provinsi Jawa Tengah dan Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kudus.

Pencapaian perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Kudus dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pokok, serta arah pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pokok, Arah Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Tahap III
RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005 – 2025

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD
	Visi :	Tujuan :		Tujuan :
	Kudus yang religius, maju dan adil	Mewujudkan Kudus yang religius, maju, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		Mewujudkan peningkatan, pengembangan, dan penguatan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.
	Misi :	Sasaran :	Arah Pembangunan :	Prioritas :
1	Mewujudkan masyarakat bermoral, beretika dan berbudaya	Terwujudnya Masyarakat Kudus yang Bermoral, Beretika dan Berbudaya	Mewujudkan masyarakat bermoral, beretika dan berbudaya	Penguatan masyarakat yang bermoral, beretika dan berbudaya
	a. memperkuat jati diri dan karakter masyarakat yang menerapkan nilai-nilai luhur budaya, enjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan, musyawarah, toleransi, bergotong-royong, dinamis, tangguh, inovatif dan kompetitif;	a. peningkatan karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, taat aturan hukum, berkembang dan dinamis;	a. terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia dan bermoral;	a. peningkatan kepedulian dan pemahaman masyarakat pada etika dan moral serta nilai-nilai keagamaan;
	b. penguatan moral dan etika dalam pembangunan masyarakat;	b. pengembangan kearifan lokal yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia serta menguatnya jati diri dan kepribadian masyarakat;	b. terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi tenggang rasa dan harmonis;	b. pelestarian dan pengembangan budaya serta kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai lokal dalam rangka memperkuat identitas masyarakat;

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD
	c. pelestarian benda cagar budaya dan situs pati ayam.	c. peningkatan pelestarian benda cagar budaya dan pengembangan situs pati ayam.	c. terciptanya kesadaran masyarakat akan budaya yang memberikan arah bagi perwujudan identitas masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya;	c. pengembangan suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi tenggang rasa dan harmonis;
			d. terciptanya iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu mencapai modernisasi secara positif;	d. peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengembangan dan pelestarian benda cagar budaya dan Situs Patiayam.
			e. meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian benda cagar budaya dan Situs Patiayam.	
2	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang taat pada agama dengan mengembangkan toleransi secara serasi dan seimbang	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Taat pada Agama dengan Mengembangkan Toleransi secara Serasi dan Seimbang	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang taat pada agama dengan mengembangkan toleransi secara serasi dan seimbang	Penguatan kehidupan masyarakat yang taat pada agama dengan mengembangkan toleransi secara serasi dan seimbang
	a. pembinaan agama sebagai identitas tindakan kesolehan; b. pembinaan kerukunan inter dan antar umat beragama.	a. peningkatan karakter masyarakat yang bercirikan dengan watak dan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berbudi luhur; b. pemantapan toleransi kehidupan masyarakat yang tercermin dalam meningkatnya kerukunan inter dan antar umat beragama.	a. terbentuknya karakter masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. mantapnya toleransi kehidupan masyarakat serta meningkatnya kerukunan inter dan antar umat beragama.	a. penguatan pembangunan karakter masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. peningkatan kepedulian masyarakat terhadap toleransi, kerukunan, internal dan antar umat beragama.
3	Mewujudkan masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan perkembangan global	Terwujudnya Masyarakat yang Dinamis, Modern, Berdaya Saing sesuai dengan Perkembangan Global	Mewujudkan masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan perkembangan global	Terwujudnya masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan perkembangan global

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD
	a. meningkatkan pembangunan ekonomi guna memacu pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal yang kompetitif;	a. peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas sektor basis dengan memperhatikan pergeseran struktur ekonomi;	a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan daya beli masyarakat;	a. penstabilan pertumbuhan dan pengembangan sektor basis dan sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif dan membangkitkan aktivitas ekonomi secara terstruktur;
	b. meningkatkan kualitas angkatan kerja yang kompetitif dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan berusaha;	b. peningkatan diversifikasi ketrampilan/keahlian angkatan kerja lokal sesuai kebutuhan pasar;	b. Pengurangan pengangguran, dan peningkatan daya saing angkatan kerja lokal;	b. penguatan basis ketenagakerjaan yang berpendidikan, berkeahlian, dan berkeahlian serta berdaya saing;
	c. memacu peningkatan investasi swasta;	c. Peningkatan daya saing industri lokal melalui pengembangan produk daerah yang kompetitif, peningkatan kapasitas produksi yang efisien dan fasilitasi UKM ke permodalan.	c. Peningkatan daya tarik investasi dan perlindungan usaha;	c. peningkatan perlindungan hukum dan penciptaan iklim investasi yang dapat diprediksi;
	d. meningkatkan pertumbuhan industri lokal melalui inovasi produk, pemanfaatan dan asimilasi teknologi serta komitmen pemerintah dalam fasilitasi UKM;	d. Penciptaan iklim investasi yang dapat diprediksi dan peningkatan sarana prasarana pendukung investasi;	d. Peningkatan daya saing produk daerah;	d. penciptaan kemitraan UKM dengan lembaga keuangan, peningkatan kualitas produk, dan diversifikasi ketrampilan SDM serta penerapan teknologi dalam produksi ramah lingkungan;
	e. meningkatkan pengendalian persebaran aktivitas komersial dan perlindungan usaha;	e. pengembangan kewirausahaan, perlindungan usaha, dan fasilitasi UKM;	e. Pengembangan jaringan distribusi perdagangan yang berkeadilan;	e. perluasan jaringan infrastruktur, informasi pasar, dan layanan distribusi yang, efisien dan berkeadilan;
	f. meningkatkan pemberdayaan lembaga ekonomi rakyat dan koperasi;	f. penguatan lembaga ekonomi rakyat dan koperasi;	f. Pemberdayaan dan pengembangan ekonomi rakyat;	f. pengembangan kerjasama lembaga ekonomi rakyat dengan lembaga perbankan;
	g. menciptakan akselerasi pengembangan pariwisata dengan pengembangan ekonomi wilayah;	g. pengembangan pariwisata dan sektor pendukung secara integral;	g. Peningkatan dan pengembangan pariwisata serta aktivitas komersial pendukung yang kompetitif;	g. peningkatan pengembangan pariwisata sebagai pemicu simpul perkembangan ekonomi baru;

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD
	h.meningkatkan daya saing pertanian guna mendukung ketahanan pangan	h.peningkatan produktivitas pertanian dan perbaikan nilai tukar petani (NTP)	h.Peningkatan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan daerah.	h. penguatan produktivitas, mengembangkan agribisnis, agroindustri, ketahanan pangan dan perbaikan nilai tukar petani.
4	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	Penguatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas
	a.meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, pengembangan, dan rekayasa teknologi di berbagai bidang pembangunan;	a. terwujudnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG);	a. pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah, wajib belajar serta peningkatan relevansi dan kompetensi pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pangsa kerja;	a. peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah, wajib belajar serta peningkatan relevansi dan kompetensi pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pangsa kerja;
	b.mengembangkan publikasi ilmiah dengan meningkatkan fasilitas sarana prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memasuki persaingan global;	b. terwujudnya peningkatan pemerataan pendidikan dan kesempatan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas dengan didukung pengembangan perpustakaan daerah yang modern;	b. peningkatan pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung peningkatan masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia sehingga mampu bersaing dalam era global yang berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat.	b. peningkatan kualitas pelayanan pendidikan semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang berorientasi pada IPTEK.
	c.meningkatkan sumber daya manusia dalam penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian, pengembangan, dan rekayasa teknologi;	c. terwujudnya peningkatan sumber daya manusia dalam pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian, pengembangan, dan rekayasa teknologi di berbagai bidang pembangunan.		c. peningkatan kualitas perpustakaan daerah.

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD
	d.meningkatkan akses pelayanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas			
5	Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Terwujudnya Peningkatan Pemerataan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan
	<p>a. mewujudkan pemerataan pembangunan dengan meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat melalui berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek;</p> <p>b.meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, sarana dan prasarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan;</p> <p>c. terpenuhinya cakupan layanan energi listrik dan telekomunikasi yang dapat diakses oleh seluruh lapisan</p>	<p>a. Terwujudnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang memadai guna menunjang perkembangan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, pemenuhan layanan jasa dan kenyamanan masyarakat seiring dengan perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat</p> <p>b. Terwujudnya Kudus yang asri dan lestari</p> <p>c. Terwujudnya penataan ruang yang sinergis, komprehensif, berkualitas dan konsisten serta pengurangan kesenjangan antar wilayah baik kesenjangan kualitas hidup, pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat</p>	<p>a. Sarana dan Prasarana</p> <p>b. Wilayah dan Tata Ruang</p> <p>c. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p>	<p>a. peningkatan kualitas rumah dan prasarana dasar permukiman guna menunjang pengembangan perekonomian masyarakat perdesaan dan perkotaan;</p> <p>b. peningkatan manajemen transportasi melalui peningkatan kualitas jalan, keterpaduan antar dan inter moda dan kualitas terminal guna mendukung efisiensi pembangunan transportasi;</p> <p>c. peningkatan kualitas dan penguatan kelembagaan pengelola sarana prasarana sumber daya air dan irigasi yang berkualitas, guna mendukung kegiatan pertanian, industri dan domestik;</p> <p>d. peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat melalui perbaikan jaringan distribusi energi listrik dan telekomunikasi.</p> <p>e. penyusunan rencana detail tata ruang kawasan;</p> <p>f. Pengendalian dan pemanfaatan ruang yang konsisten dan berkelanjutan;</p> <p>g. Penerapan sistem Manajemen Penatagunaan tanah Berbasis</p>

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD
	masyarakat; d. mewujudkan penataan ruang yang sinergis, komprehensif, berkualitas dan konsisten; e. meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkesinambungan untuk mendukung kualitas kehidupan; f. meningkatkan keindahan dan kenyamanan lingkungan, serta pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.			Masyarakat (MPBM); h. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
6	Mewujudkan keadilan bagi masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Terwujudnya Keadilan Bagi Masyarakat Melalui Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik	Mewujudkan keadilan bagi masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Peningkatan, pengembangan dan penguatan keadilan bagi masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang baik
	a. meningkatnya kapasitas pemerintahan daerah;	a. peningkatan kapasitas pemerintahan daerah;	a. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan wewenang aparatur daerah dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik pada semua kegiatan, serta meningkatkan kedisiplinan dan kesejahteraan pegawai;	a. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan wewenang aparatur daerah dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik pada semua kegiatan, serta meningkatkan kedisiplinan dan kesejahteraan pegawai;

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD
	b. meningkatnya kapasitas kelembagaan; c. meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah; d. meningkatnya partisipasi masyarakat.	b. peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah; c. pengembangan budaya kerja dan pengawasan melekat; d. menjamin pemberdayaan dan pengembangan partisipasi masyarakat; e. peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan.	b. optimalisasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan wewenang aparatur daerah dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik pada semua kegiatan, serta optimalisasi peningkatan disiplin dan kesejahteraan pegawai; c. optimalisasi peningkatan profesionalisme aparat Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab melalui pengembangan budaya kerja dan pengawasan melekat, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan dan pengembangan aparatur; d. optimalisasi peningkatan kapasitas pemerintahan daerah; e. pemberdayaan dan pengembangan partisipasi masyarakat serta peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan	b. profesionalisme aparat Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab melalui pengembangan budaya kerja dan pengawasan melekat, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan dan pengembangan aparatur; c. kapasitas pemerintahan daerah d. pemberdayaan dan pengembangan partisipasi masyarakat serta peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan.
7	Mewujudkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Terwujudnya Supremasi Hukum dan HAM	Mewujudkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM)

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD
	<ul style="list-style-type: none"> a. mewujudkan sistem hukum yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mencakup pembangunan struktur hukum, substansi hukum, kultur hukum dan penegakan hukum; b. mewujudkan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi; c. mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil; d. mewujudkan penerapan dan penegakan hukum dan HAM. 	<ul style="list-style-type: none"> a. sistem hukum yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mencakup pembangunan struktur hukum, substansi hukum, kultur hukum dan penegakan hukum; b. peningkatan pemahaman masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi; c. kehidupan masyarakat yang adil; d. kondusifitas situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan hukum dan HAM; e. kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. penerapan dan penegakan hukum dan HAM dilaksanakan secara legal, profesional, dan tidak diskriminatif dengan tetap berdasarkan pada penghormatan hak asasi manusia (HAM). 	<ul style="list-style-type: none"> a. pembangunan di bidang hukum untuk mendukung Sistem Hukum Nasional yang mencakup pembentukan dan pembaharuan produk hukum daerah, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan perlindungan HAM serta penguatan sistem jaringan dan dokumentasi hukum; b. pembangunan di bidang hukum dalam rangka penegakan hukum, perlindungan hukum dan HAM serta kepastian hukum guna mendukung perekonomian daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> a. peningkatan serta pengembangan kualitas dan kuantitas produk hukum daerah; b. peningkatan penataan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum; c. Pengembangan budaya tertib hukum dan HAM bagi aparat dan masyarakat.
8	Meningkatkan kehidupan masyarakat yang sejahtera	Terwujudnya Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera	Meningkatkan kehidupan masyarakat yang sejahtera	Pengembangan kehidupan masyarakat yang sejahtera

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD
	<ul style="list-style-type: none"> a. menekan laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu, dan efektif untuk menuju terbentuknya keluarga kecil yang sejahtera; b. menurunkan tingkat pengangguran; c. menurunkan jumlah penduduk miskin; d. meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat; e. meningkatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas; f. meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas. 	<ul style="list-style-type: none"> a. terpenuhinya kebutuhan dasar manusia; b. tercapainya keseimbangan pertumbuhan penduduk; c. meningkatnya kesempatan kerja; d. meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan; e. berkurangnya jumlah penduduk miskin; f. berkurangnya penyandang masalah kesejahteraan sosial; g. meningkatnya pemahaman masyarakat tentang budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 	<ul style="list-style-type: none"> a. peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial; b. pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu, dan efektif untuk menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas serta persebaran penduduk yang seimbang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; c. terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui pemeliharaan dan peningkatan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya; d. peningkatan kualitas tenaga kerja dan perluasan memperoleh kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> a. pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial; b. peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau bermutu dan efektif; c. pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau; d. melaksanakan penyuluhan hidup sehat, peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan dan sosialisasi budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); e. peningkatan kualitas tenaga kerja yang disertai dengan perluasan kesempatan memperoleh lapangan kerja; f. pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui penyediaan sarpras yang memadai (transportasi, perumahan, sumber daya air dan irigasi, air bersih dan sanitasi, listrik dan telekomunikasi); g. penguatan kewirausahaan dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya yang dimiliki.

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD
9	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Terwujudnya Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya kondisi yang aman, tentram, tertib dan teratur di daerah dengan memberdayakan masyarakat guna mengantisipasi terhadap kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem keamanan, ketentraman dan ketertiban umum yang mampu melindungi keseluruhan warga masyarakat dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang mungkin timbul.	Penguatan ketentraman dan ketertiban umum
	a. mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan mengoptimalkan kinerja aparat pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat;	a. penataan kehidupan yang harmonis dan sinergi melalui program dan kegiatan pemerintah dan masyarakat untuk terciptanya rasa aman, tertib, dan teratur;		a. Pengembangan kemampuan aparat dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif;
	b. mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya.	b. ketentraman dan ketertiban umum yang didukung kerjasama antar instansi pemerintah dan kerjasama antara aparat dengan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat dan masyarakat, termasuk kesadaran, kepedulian yang tinggi oleh seluruh lapisan masyarakat dan sarana operasional yang memadai;		b. Pemantapan stabilitas daerah;

No	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap III RPJPD
		c. perlindungan masyarakat dari berbagai ancaman dan gangguan, keamanan masyarakat termasuk penanggulangan bencana alam.		c. pengembangan serta penguatan ketentraman dan ketertiban masyarakat; d. peningkatan penegakan hukum (Peraturan Daerah), penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL); e. perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana alam; f. penanggulangan penyakit masyarakat.
10	Meningkatkan suasana demokratis dalam kehidupan berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Terwujudnya Peningkatan Suasana Demokratis dalam Kehidupan Berpolitik, Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	optimalisasi terwujudnya suasana demokratis dan adil dilakukan dengan memantapkan wawasan kebangsaan, penguatan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, dan memperkuat peran serta masyarakat.	Penguatan suasana demokratis dalam kehidupan politik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
	a. memperkuat peran masyarakat sipil dalam pembangunan; b. mewujudkan masyarakat yang demokratis dan adil dilakukan dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; c. mewujudkan stabilitas politik yang mantap dan iklim yang kondusif dalam segala aspek pembangunan; d. meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat.	a. meningkatnya peran serta masyarakat sipil untuk menumbuhkan semangat sukarela dan gotong royong dalam pembangunan; b. terwujudnya stabilitas politik yang mantap; c. meningkatnya kesadaran politik masyarakat yang demokratis, adil dan berwawasan kebangsaan; d. terwujudnya iklim yang kondusif bagi perkembangan kehidupan politik, bermasyarakat dan bernegara.		a. Peningkatan dan pengembangan kesadaran politik masyarakat; b. penguatan stabilitas politik yang mantap; c. memantapkan iklim yang kondusif bagi perkembangan kehidupan politik, bermasyarakat, dan bernegara; d. peningkatan dan pengembangan kehidupan politik yang demokratis dan adil serta berwawasan kebangsaan; e. penguatan solidaritas sosial di lingkungan masyarakat; f. Pengembangan peran serta masyarakat sipil dalam pembangunan.

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2019

a. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019

Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2019. Visi tersebut adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”, yang dilakukan melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut “Nawa Cita”, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakterbangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Implementasi kesembilan agenda prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu:

1. Dimensi pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, mental/karakter;
2. Dimensi pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri;
3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan yaitu antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah meliputi desa, pinggiran, luar Jawa, dan kawasan timur.

Ketiga dimensi tersebut perlu didukung oleh kondisi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.

Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2019, antara lain meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 – 5,8%;
2. Laju inflasi sebesar 3,5%;
3. PDB per kapita sebesar Rp. 72.217ribu;
4. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0 - 8,0%;
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,98;
6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,0 – 5,0%.

Perencanaan pembangunan nasional tahun 2019 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Tema RKP Tahun 2019 adalah “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan nasional tahun 2019 adalah Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial melalui penguatan kebijakan *Money Follow Program*.

Rencana pembangunan nasional tahun 2019 diprioritaskan pada :

1. Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2. Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif;
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air;
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

b. Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2019

Pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2019 diarahkan pada upaya pencapaian sasaran dan target akhir tahap III pembangunan jangka panjang tahun 2015-2019. Dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan tahun sebelumnya, berbagai permasalahan dan isu strategis serta kebijakan pembangunan nasional, maka kebijakan pembangunan daerah tahun 2019 ditujukan untuk “Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Pemerataan Pembangunan Dan Pemanfaatan Iptek”. Guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2019 tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2019, meliputi:

1. Penanggulangan kemiskinan
2. Penguatan daya saing ekonomi daerah
3. Kualitas hidup dan daya saing SDM
4. Pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup
5. Ketahanan pangan dan energi
6. Kesenjangan wilayah
7. Tata kelola pemerintahan

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 tersebut dijabarkan lebih rinci dalam fokus pembangunan, yaitu sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan, difokuskan pada:
 - a. Penyediaan *basic life access* untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan melalui penanganan perumahan dan penyehatan lingkungan permukiman (RTLH, sanitasi, air bersih, listrik); penanganan kawasan permukiman kumuh; peningkatan akses pendidikan, kesehatan, pangan; pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi PMKS; dan kepemilikan administrasi kependudukan.
 - b. Penguatan *sustainable livelihood* melalui keberantaraan akses terhadap asset, modal, manajemen dan pasar; peningkatan *start up* wirausaha baru; peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja berkelanjutan.
 - c. Penguatan basis data, basis spasial, berbasis komunitas dan pendampingan yang kontinyu, serta gotong royong pelibatan seluruh komponen potensi (swasta dan pihak lainnya) dalam kesetiakawanan sosial.
2. Penguatan daya saing ekonomi daerah, difokuskan pada:
 - a. Peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan melalui peningkatan kemampuan petani dalam budidaya pertanian; asuransi petani; peningkatan prasarana sarana pertanian termasuk jaringan irigasi; pengembangan teknologi tepat guna di bidang pertanian dan perkebunan; revitalisasi peran balai pertanian.
 - b. Peningkatan kualitas produk pertanian yang berdaya saing melalui peningkatan kemampuan petani dalam pengolahan produk pertanian untuk meningkatkan nilai tambah; serta didukung dengan pengembangan jejaring pemasaran berbasis kelompok (*corporate farming*).
 - c. Peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui peningkatan kapasitas nelayan; peningkatan prasarana dan sarana perikanan tangkap (alat tangkap ramah lingkungan, kapal, TPI); perbaikan kualitas benih dan pakan ikan mandiri;

peningkatan kualitas dan kapasitas unit pengolah ikan untuk ekspor.

- d. Optimalisasi potensi sumber daya hutan melalui peningkatan kualitas tata kelola kehutanan; penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK); peningkatan keterlibatan masyarakat sebagai mitra usaha kehutanan (hutan tanaman rakyat, hutan rakyat); peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengolahan hasil hutan; serta pemanfaatan sumber daya hutan non kayu.
- e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil, mikro, dan menengah melalui peningkatan nilai tambah dan diversifikasi produk; hilirisasi industri; mengembangkan inovasi teknologi produksi; keberantaraan akses modal dari perbankan dan lembaga keuangan non perbankan; peningkatan akses pasar dengan mengembangkan digital ekonomi; pengembangan kawasan industri; keberantaraan kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan industri besar; fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk UMKM; serta peningkatan infrastruktur jaringan produksi, distribusi, promosi perdagangan antar daerah provinsi di Indonesia.
- f. Pengembangan inovasi teknologi dengan pengembangan *Technopark* serta peningkatan kreativitas dan inovasi masyarakat.
- g. Peningkatan pariwisata berbasis masyarakat melalui perbaikan prasarana dan sarana, serta manajemen pengelolaan daerah wisata, dan meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata; peningkatan promosi wisata; kerjasama dengan pelaku wisata; aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata; serta peran serta swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata.
- h. Perbaikan iklim investasi yang semakin kondusif melalui pemberian kemudahan perijinan investasi (perijinan satu pintu, waktu perijinan, dan prosedur perijinan); perbaikan sistem dan layanan perijinan mudah, murah, cepat, tepat; kebijakan investasi sejalan dengan prioritas daerah untuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan daya saing wilayah;

pengembangan *digital investment promotion*; pengembangan investasi berbasis produk-produk unggulan kabupaten/kota; serta mendorong perwujudan investasi hijau.

3. Kualitas hidup dan daya saing Sumberdaya Manusia (SDM), difokuskan pada:

- a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan melalui peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan melalui sekolah gratis untuk pendidikan menengah dan khusus; pengembangan kurikulum berbasis *skill, knowledge, attitude*; pengembangan *learning culture*; penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi standar nasional dan/atau standar internasional; meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik; meningkatkan manajemen mutu penyelenggaraan pendidikan; mengoptimasi peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung pengembangan pendidikan; mengefektifkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membangun strategi peningkatan kualitas pendidikan; pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan pendidikan; dan peningkatan pengembangan pendidikan pendidikan khusus dan inklusi sesuai kewenangan provinsi.
- b. Peningkatan upaya promotif dan preventif dengan tetap memperbaiki upaya kuratif dan rehabilitatif melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan; peningkatan dan pemerataan prasarana dan sarana kesehatan; pengembangan SIM RS Rujukan *Online*; peningkatan kualitas dan pemerataan cakupan tenaga kesehatan; serta peningkatan capaian wilayah *Open Defecation Free* (tidak buang air besar sembarangan).
- c. Mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi melalui penguatan program pendidikan *link and match* berbasis *demand-driven*; mendorong peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja berbasis kompetensi (standar, pelatihan, sertifikasiberstandar nasional dan/atau internasional); sertifikasi kompetensi berstandar nasional dan / atau

internasional bagi lulusan pendidikan vokasi; memperluas akses informasi pendidikan kejuruan dan vokasi dalam mendukung *demand* tenaga kerja ke depan; mendorong kebijakan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru; mengembangkan budaya inovatif; dan mendorong kebijakan afirmatif untuk pemanfaatan tenaga kerja lokal.

- d. Pemanfaatan Bonus Demografi melalui peningkatan kualitas penduduk usia produktif (15-64 Tahun) yang didukung peran lintas sektor/program antara lain: pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan investasi;
- e. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak, serta pembangunan keluarga melalui peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik; peningkatan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak; peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hak anak; serta peningkatan bina keluarga balita, bina keluarga remaja dan bina keluarga lansia
- f. Peningkatan peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui penguatan pengetahuan dan ketrampilan dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- g. Pengembangan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi untuk peningkatan minat dan budaya baca masyarakat.
- h. Peningkatan kesadaran dan pemberdayaan kepemudaan melalui peningkatan dan pengembangan generasi muda mandiri dan berdikari, pengembangan kepedulian dan kepeloporan pemuda dalam pembangunan, peningkatan daya tangkal pemuda terhadap pengaruh destruktif, pemberdayaan organisasi kepemudaan dan kepramukaan.
- i. Pembibitan, pembinaan dan pemasyarakatan serta kelembagaan olahraga melalui penyelenggaraan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLOP), penyelenggaraan kuantitas dan kualitas kompetisi olahraga berkelanjutan, pengembangan olahraga unggulan daerah, peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dan pembudayaan/pemassalan olahraga, peningkatan kualitas sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan,

peningkatan mutu dan manajemen organisasi olahraga, dan pengembangan industri olahraga.

- j. Pembinaan dan pengembangan kebudayaan melalui pengembanganseni budaya, pelestarian cagar budaya, dan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, difokuskan pada:
- a. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial, konservasi daerah hulu dan tangkapan air berbasis pemberdayaan masyarakat; perkuatan Lembaga Masyarakat Di sekitar Hutan (LMDH); pengelolaan sumber daya air dengan konservasi sumber air, pengendalian banjir, pengendalian pemanfaatan air tanah; pengelolaan, pengendalian perijinan dan pengawasan usaha pertambangan; pengelolaan wilayah pesisir dengan rehabilitasi kawasan mangrove, terumbu karang dan pesisir; pengelolaan lingkungan dengan pengendalian pencemaran air, tanah, dan udara, pengelolaan limbah secara komunal berbasis kawasan dan masyarakat, serta peningkatan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Penanggulangan bencana berbasis pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas, memperkuat kebijakan dan kelembagaan, pengembangan sistem informasi, penanganan tematik daerah rawan bencana, memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat, serta mengembangkan sistem rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
5. Ketahanan Pangan dan Energi, dengan fokus pada:
- a. Perwujudan ketahanan pangan masyarakat dan daya saing pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan dengan mempertahankan luasan lahan pertanian; penyediaan infrastruktur pengolahan, penyimpanan, meningkatkan kewirausahaan, manajemen dan bisnis petani serta distribusi pangan; peningkatan aksesibilitas pangan dengan menjaga stabilitas harga dan pasokan; peningkatan konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dengan

pengembangan diversifikasi pangan, membangun kesadaran masyarakat terhadap pangan beragam, serta peningkatan kuantitas, nilai tambah dan keragaman produk pangan; peningkatan mutu dan keamanan pangan; pengembangan dan penerapan inovasi teknologi paska panen.

- b. Pemerataan akses energi dan listrik melalui penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan dengan meningkatkan koordinasi dengan PLN sebagai penyedia jaringan listrik dan pengembangan listrik perdesaan; pengembangan listrik murah dan hemat; pengembangan energi baru terbarukan dengan pemanfaatan biogas, biomassa, gas rawa, mikro hidro dan tenaga surya; serta budaya hemat energi.

6. Kesenjangan wilayah, dengan fokus pada:

- a. Penguatan infrastruktur konektivitas melalui peningkatan kehandalan dan keselamatan jalan - jembatan mendukung pengembangan kawasan strategis dan pemerataan antara wilayah,serta menghubungkan pantura–pansela dan daerah perbatasan; pengembangan angkutan umum lintas regional, perkotaan - perdesaan; peningkatan sarana prasarana simpul dan pepaduan moda transportasi (terminal, pelabuhan, bandara, dan stasiun).
- b. Pemerataan prasarana sarana dasar dan ekonomi melalui penyediaan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah; peningkatan jaringan air minum layak berbasis kawasan dan masyarakat; meningkatkan kualitas dan kapasitas pasar, pusat perdagangan, dan pusat jasa lainnya.
- c. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah selatan, barat dan timur yang diwujudkan dengan penetapan kawasan peruntukan industri baru wewenang provinsi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWP) dan dukungan dana untuk pengembangannya serta meningkatkan peran dan fungsi perkotaan yang semula Pusat Kegiatan Lokal (PKL) menjadi Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp).

7. Tata kelola Pemerintahan, difokuskan pada:

- a. Peningkatan pelayanan publik dengan membangun pemerintah yang melayani melalui upaya perkuatan

keterbukaan informasi, transparansi, serta mendorong partisipasi publik;

- b. Perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang inovatif, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi; membangun sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) dan perkuatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); meningkatkan pengendalian produk hukum, dan penegakkan perda; meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin, dan penataan ASN;
- c. Perwujudan kelembagaan birokrasi yang profesional melalui perbaikan tata laksana organisasi; peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan dengan melakukan evaluasi berkala pada kinerja kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja; peningkatan profesionalisme ASN dalam upaya - upaya *clean and clear government* dan menerapkan “keperantaraan dan *enterpreuneur*” dalam tata kelola pemerintahan.
- d. Peningkatan kualitas kehidupan demokrasi dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kondusivitas wilayah Jawa Tengah dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 merupakan upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan Tahun 2019 yang meliputi:

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 – 5,6%;
- b. Inflasi sebesar $4 \pm 1\%$;
- c. PDRB/Kapita sebesar Rp. 28,6 juta;
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,33 - 4,43%;
- e. Kemiskinan sebesar 11,01 - 12,01%.

c. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2019

Pembangunan daerah Kabupaten Kudus tahun 2019 diarahkan pada upaya pencapaian sasaran dan target akhir tahap III pembangunan jangka panjang tahun 2015-2019. Pembangunan jangka panjang tahap III diprioritaskan pada :

1. Penguatan masyarakat yang bermoral, beretika dan berbudaya melalui:
 - a. peningkatan kepedulian dan pemahaman masyarakat pada etika dan moral serta nilai-nilai keagamaan;
 - b. pelestarian dan pengembangan budaya serta kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai lokal dalam rangka memperkuat identitas masyarakat;
 - c. pengembangan suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi tenggang rasa dan harmonis;
 - d. peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengembangan dan pelestarian benda cagar budaya dan Situs Patiayam.
2. Penguatan kehidupan masyarakat yang taat pada agama dengan mengembangkan toleransi secara serasi dan seimbang melalui peningkatan, pengembangan dan penguatan melalui :
 - a. penguatan pembangunan karakter masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. peningkatan kepedulian masyarakat terhadap toleransi, kerukunan, internal dan antar umat beragama.
3. Terwujudnya masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan perkembangan global melalui:
 - a. penstabilan pertumbuhan dan pengembangan sektor basis dan sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif dan membangkitkan aktivitas ekonomi secara terstruktur;
 - b. penguatan basis ketenagakerjaan yang berpendidikan, berketrampilan, dan berkeahlian serta berdaya saing;
 - c. peningkatan perlindungan hukum dan penciptaan iklim investasi yang dapat diprediksi;
 - d. penciptaan kemitraan UKM dengan lembaga keuangan, peningkatan kualitas produk, dan diversifikasi ketrampilan SDM serta penerapan teknologi dalam produksi ramah lingkungan;
 - e. perluasan jaringan infrastruktur, informasi pasar, dan layanan distribusi yang, efisien dan berkeadilan;
 - f. pengembangan kerjasama lembaga ekonomi rakyat dengan lembaga perbankan;
 - g. peningkatan pengembangan pariwisata sebagai pemicu simpul perkembangan ekonomi baru;

- h. penguatan produktivitas, mengembangkan agribisnis, agroindustri, ketahanan pangan dan perbaikan nilai tukar petani.
4. Penguatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas melalui :
- a. peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah, wajib belajar serta peningkatan relevansi dan kompetensi pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pangsa kerja;
 - b. peningkatan kualitas pelayanan pendidikan semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang berorientasi pada IPTEK.
 - c. peningkatan kualitas perpustakaan daerah.
5. Pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan, melalui peningkatan, pengembangan dan penguatan melalui :
- a. peningkatan kualitas rumah dan prasarana dasar permukiman guna menunjang pengembangan perekonomian masyarakat perdesaan dan perkotaan;
 - b. peningkatan manajemen transportasi melalui peningkatan kualitas jalan, keterpaduan antar dan inter moda dan kualitas terminal guna mendukung efisiensi pembangunan transportasi;
 - c. peningkatan kualitas dan penguatan kelembagaan pengelola sarana prasarana sumber daya air dan irigasi yang berkualitas, guna mendukung kegiatan pertanian, industri dan domestik;
 - d. peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat melalui perbaikan jaringan distribusi energi listrik dan telekomunikasi.
 - e. penyusunan rencana detail tata ruang kawasan;
 - f. Pengendalian dan pemanfaatan ruang yang konsisten dan berkelanjutan;
 - g. Penerapan sistem Manajemen Penatagunaan tanah Berbasis Masyarakat (MPBM);
 - h. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
6. Peningkatan, pengembangan dan penguatan keadilan bagi masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui :
- a. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan wewenang aparatur daerah dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik pada semua kegiatan, serta meningkatkan kedisiplinan dan kesejahteraan pegawai;
 - b. profesionalisme aparat Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab melalui pengembangan budaya kerja dan pengawasan melekat, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan dan pengembangan aparatur;
 - c. kapasitas pemerintahan daerah

- d. pemberdayaan dan pengembangan partisipasi masyarakat serta peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan.
7. Penguatan supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM) melalui:
- a. peningkatan serta pengembangan kualitas dan kuantitas produk hukum daerah;
 - b. peningkatan penataan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum;
 - c. Pengembangan budaya tertib hukum dan HAM bagi aparat dan masyarakat.
8. Pengembangan kehidupan masyarakat yang sejahtera melalui peningkatan, pengembangan dan penguatan melalui :
- a. pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - b. peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau bermutu dan efektif;
 - c. pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau;
 - d. melaksanakan penyuluhan hidup sehat, peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan dan sosialisasi budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - e. peningkatan kualitas tenaga kerja yang disertai dengan perluasan kesempatan memperoleh lapangan kerja;
 - f. pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui penyediaan sarpras yang memadai (transportasi, perumahan, sumber daya air dan irigasi, air bersih dan sanitasi, listrik dan telekomunikasi);
 - g. penguatan kewirausahaan dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya yang dimiliki.
9. Penguatan ketentraman dan ketertiban umum melalui :
- a. Pengembangan kemampuan aparat dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif;
 - b. Pemantapan stabilitas daerah;
 - c. pengembangan serta penguatan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. peningkatan penegakan hukum (Peraturan Daerah), penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL);
 - e. perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana alam;
 - f. penanggulangan penyakit masyarakat.
10. Penguatan suasana demokratis dalam kehidupan politik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui :
- a. Peningkatan dan pengembangan kesadaran politik masyarakat;
 - b. penguatan stabilitas politik yang mantap;

- c. memantapkan iklim yang kondusif bagi perkembangan kehidupan politik, bermasyarakat, dan bernegara;
- d. peningkatan dan pengembangan kehidupan politik yang demokratis dan adil serta berwawasan kebangsaan;
- e. penguatan solidaritas sosial di lingkungan masyarakat;
- f. Pengembangan peran serta masyarakat sipil dalam pembangunan.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 1. Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,50%
- 2. Laju inflasi sebesar $4 \pm 1\%$
- 3. Persentase penduduk miskin sebesar 7,38%.
- 4. Tingkat Pengangguran Terbuka 3,50%

Dengan mendasarkan pada permasalahan pembangunan tahun 2019, maka dapat dirumuskan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kudus tahun 2019 sebagai berikut:

- 1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan
- 2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan
- 3. Penguatan ekonomi kerakyatan
- 4. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran
- 5. Peningkatan kualitas infrastruktur
- 6. Penguatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kudus tahun 2019 tersebut dijabarkan lebih rinci dalam fokus pembangunan, yaitu sebagai berikut:

- 1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan, dengan fokus pada:
 - a. Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD yang berkualitas
 - b. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kepastian layanan pendidikan dasar yang berkualitas.
 - c. Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan non formal yang berkualitas
- 2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan, dengan fokus pada:
 - a. Peningkatan ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
 - b. Peningkatan pengendalian penduduk melalui pelayanan Keluarga Berencana (KB)
- 3. Penguatan ekonomi kerakyatan, dengan fokus pada:
 - c. Peningkatan pelatihan kewirausahaan, kapasitas kelembagaan dan fasilitasi permodalan UMKM.
 - d. Fasilitasi pemasaran produk UMKM
 - e. Peningkatan realisasi investasi dengan pelayanan perijinan dan iklim investasi yang kondusif.
 - f. Peningkatan kualitas destinasi dan pemasaran pariwisata

- g. Pengembangan industri kecil dan menengah
 - h. Peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan
 - i. Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.
 - j. Peningkatan Ketahanan Pangan masyarakat.
4. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus pada:
- a. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kepastian layanan pendidikan dasar yang berkualitas.
 - b. Peningkatan ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
 - c. Peningkatan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
 - d. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan desa dalam penanggulangan kemiskinan
 - e. Peningkatan pelestarian nilai-nilai, adat dan budaya daerah, serta benda cagar budaya.
 - f. Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan
 - g. Peningkatan pelatihan tenaga kerja sesuai dengan kompetensinya dan perlindungan tenaga kerja.
5. Peningkatan kualitas infrastruktur, dengan fokus pada:
- a. Peningkatan kualitas jaringan transportasi secara merata
 - b. Pemenuhan sarana drainase untuk pencegahan banjir.
 - c. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman
 - d. Peningkatan pencegahan pencemaran lingkungan hidup
 - e. Peningkatan sistem pengelolaan persampahan
 - f. Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang.
 - g. Peningkatan pengelolaan pertanahan
6. Penguatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, dengan fokus pada:
- a. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah
 - b. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM aparatur.
 - c. Peningkatan pengawasan dalam Penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
 - d. Peningkatan pelayanan kepada pimpinan daerah
 - e. Meningkatnya kinerja SDM legislatif
 - f. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah
 - g. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil
 - h. Peningkatan supremasi hukum di daerah.
 - i. Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika
 - j. Peningkatan kerjasama antar daerah dalam percepatan pembangunan

- k. Peningkatan kesadaran politik, keamanan dan ketertiban masyarakat
- l. Peningkatan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana
- m. Peningkatan pelayanan arsip dan perpustakaan
- n. Peningkatan kerukunan antar umat beragama.

Penjabaran keterkaitan fokus pada masing-masing prioritas pembangunan, indikator dan target kinerja, serta program prioritas pembangunan daerah tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Keterkaitan Prioritas dan Fokus Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2019 dengan Prioritas Provinsi dan Nasional

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan Tahun 2019 Kabupaten Kudus	Prioritas RKPD 2019 Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional Tahun 2019
1	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, dengan fokus pada:	Prioritas 3 Kualitas hidup dan daya saing SDM	Prioritas 1 Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
	a) Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD yang berkualitas		
	b) Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kepastian layanan pendidikan dasar yang berkualitas.		
	c) Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan non formal yang berkualitas		
2	Peningkatan kualitas layanan kesehatan, dengan fokus pada:	Prioritas 3 Kualitas hidup dan daya saing SDM	Prioritas 1 Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
	a) Peningkatan ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat		
	b) Peningkatan pengendalian penduduk melalui pelayanan Keluarga Berencana (KB)		
3	Penguatan ekonomi kerakyatan, dengan fokus pada:	Prioritas 2 Penguatan daya saing ekonomi daerah	Prioritas 3 Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif
	a) Peningkatan pelatihan kewirausahaan, kapasitas kelembagaan dan fasilitasi permodalan UMKM.		
	b) Fasilitasi pemasaran produk UMKM		
	c) Peningkatan realisasi investasi dengan pelayanan perijinan dan iklim investasi yang kondusif.		
	d) Peningkatan kualitas destinasi dan pemasaran pariwisata		
	e) Pengembangan industri kecil dan menengah		
	f) Peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan		
	g) Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.	Prioritas 5 Ketahanan pangan dan energi	Prioritas 4 Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air
	h) Peningkatan Ketahanan Pangan masyarakat.		
4	Pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus pada:	Prioritas 1 Penanggulangan kemiskinan	Prioritas 1 Pembangunan manusia melalui pengurangan
	a) Peningkatan ketersediaan,		

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan Tahun 2019 Kabupaten Kudus	Prioritas RKPD 2019 Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional Tahun 2019
	keterjangkauan, kepastian layanan pendidikan dasar yang berkualitas.	Prioritas 6 Kesenjangan wilayah	kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
	b) Peningkatan ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat		
	c) Peningkatan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)		
	d) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan desa dalam penanggulangan kemiskinan		
	e) Peningkatan pelestarian nilai-nilai, adat dan budaya daerah, serta benda cagar budaya.		
	f) Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan		
	g) Peningkatan pelatihan tenaga kerja sesuai dengan kompetensinya dan perlindungan tenaga kerja.		
5	Peningkatan kualitas infrastruktur, dengan fokus pada:	Prioritas 4 Pengelolaan Sumberdaya Alam- LH dan penanggulangan bencana	Prioritas 2 Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
	a) Peningkatan kualitas jaringan transportasi secara merata		
	b) Pemenuhan sarana drainase untuk pencegahan banjir.		
	c) Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman		
	d) Peningkatan pencegahan pencemaran lingkungan hidup		
	e) Peningkatan sistem pengelolaan persampahan		
	f) Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang.		
	g) Peningkatan pengelolaan pertanahan		
6	Penguatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, dengan fokus pada:	Prioritas 7 Tata kelola pemerintahan	Prioritas 5 Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu
	a) Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah		
	b) Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM aparatur.		
	c) Peningkatan pengawasan dalam Penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.		
	d) Peningkatan pelayanan kepada pimpinan daerah		
	e) Meningkatnya kinerja SDM legislatif		
	f) Peningkatan pengelolaan keuangan daerah		
	g) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil		
	h) Peningkatan supremasi hukum di daerah.		
	i) Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika		

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan Tahun 2019 Kabupaten Kudus	Prioritas RKPD 2019 Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional Tahun 2019
	j) Peningkatan kerjasama antar daerah dalam percepatan pembangunan	Prioritas 4 Pengelolaan Sumberdaya Alam-LH dan penanggulangan bencana	
	k) Peningkatan kesadaran politik, keamanan dan ketertiban masyarakat		
	l) Peningkatan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana		
	m) Peningkatan pelayanan arsip dan perpustakaan		
	n) Peningkatan kerukunan antar umat beragama.		

Prioritas dan fokus pembangunan tahun 2019 Kabupaten Kudus telah disusun sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan dokumen ini juga telah memperhatikan visi – misi dan program kerja Bupati terpilih, sebagaimana Bab III Ketentuan Peralihan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan RKPD Tahun 2019.

Berikut Visi dan Misi Bupati Kudus terpilih sebagai berikut :

Visi :

“Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera”

Isian visi, Kabupaten Kudus menjadi pusat pembangunan daerah sekitarnya yang dilengkapi dengan fasilitas modern didukung masyarakat yang religious untuk mencapai kehidupan sejahtera.

Misi :

1. Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia.
2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.
3. Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif.
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.

Program unggulan :

1. Tunjangan 1 juta per bulan untuk semua guru non PNS di PAUD/TK/MADIN/RA/TPQ/SD/SMP/SMA/Madrasah.
2. Bantuan sosial santunan bagi warga yang sakit di rumah sakit kelas 3 dan santunan anak yatim piatu serta santunan kematian cair dalam satu hari lewat desa.
3. Pelatihan dan pendampingan 500 wirausahawan baru setiap tahun.
4. Bantuan sosial per bulan untuk khotib dan imam masjid/mushola serta semua pemuka agama/semua tempat ibadah.
5. Pendampingan dan pemberdayaan petani melalui inovasi bibit serta penguatan pemasaran hasil panen.
6. Pemberdayaan ekonomi dan usaha warga melalui penyaluran bantuan usaha.
7. Pembinaan olahraga, seni budaya dan komunitas kreatif untuk peningkatan sumber daya manusia.
8. Perlindungan dan pemberdayaan perempuan, kepala keluarga melalui pelatihan khusus kewirausahaan.
9. Pemberdayaan buruh melalui forum komunikasi PUK/SP/SB, Perusahaan dan Pemerintah Daerah.

Secara lengkap penjabaran rumusan visi – misi akan dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023, sebagaimana diatur dalam Undang – undang 23 Tahun 2014 Pasal 263 ayat (3) bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Kerangka Pendanaan Tahun 2019

Berdasarkan hasil analisis keuangan pada bab sebelumnya, maka kerangka pendanaan untuk tahun 2019 adalah sebagaimana Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019

No	Uraian	Proyeksi RKPD 2019 (Rp)
I	PENDAPATAN	2.236.517.205.000,00
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	318.459.254.000,00
	Pajak Daerah	105.384.000.000,00
	Retribusi Daerah	31.484.115.000,00
	Hasil pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.118.227.000,00
	Lain-Lain PAD yang sah	174.472.912.000,00
1.2.	Dana Perimbangan	1.458.456.851.000,00
	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	278.590.893.000,00
	Dana Alokasi Umum	807.711.173.000,00
	Dana Alokasi Khusus	372.154.785.000,00
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	459.601.100.000,00
	Hibah	60.971.600.000,00
	Dana Darurat	-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	128.239.932.000,00
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	144.216.044.000,00
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	126.173.524.000,00
II	BELANJA	2.263.928.275.000,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.267.806.844.000,00
	Belanja Pegawai	883.718.539.000,00
	Belanja Hibah	133.641.920.000,00
	Belanja Bansos	11.203.016.000,00
	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	13.686.812.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	222.556.557.000,00
	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
2.2	Belanja Langsung	996.121.431.000,00
	Surplus/ (Defisit)	(27.411.070.000,00)
III	PEMBIAYAAN	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	31.911.070.000,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	31.911.070.000,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	4.500.000.000,00
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.500.000.000,00

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018

5.2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2019

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2019 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan 6 (enam) fungsi penunjang urusan pemerintahan. Berikut ini diuraikan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

5.2.1 Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Fokus kegiatan pada Fasilitasi dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar. Indikator program ini adalah APK SD/MI/Paket A; APK SMP/MTs/Paket B; APM SD/MI/Paket A; APM SMP/MTs/Paket B; Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun; dan Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun.

b. Program Pendidikan Non Formal

Fokus kegiatan pada Fasilitasi dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini. Indikator program ini adalah Angka Melek Huruf (AMH); dan APK PAUD.

2. Kesehatan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Fokus kegiatan pada Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi. Indikator program ini adalah Angka Kematian Ibu per 100.000 KH, Angka Kematian Bayi per 1.000 KH, Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun, Cakupan pelayanan kesehatan Anak Usia Sekolah; dan Cakupan STBM.

b. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Fokus kegiatan pada Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular. Indikator program ini adalah Cakupan Desa/

kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dan IDL, Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV, Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberculosis (TB), Cakupan pelayanan kesehatan untuk penderita DBD, Cakupan pelayanan kesehatan Penyakit Tidak Menular dan kesehatan jiwa

c. Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Fokus kegiatan pada Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan. Indikator program ini adalah Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat, Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas; dan Cakupan pelayanan perizinan, sertifikasi dan pemetaan SDM Kesehatan.

d. Program Pelayanan Kesehatan BLUD

Fokus kegiatan pada Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah. Indikator program ini adalah Cakupan Pelayanan BLUD

e. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Fokus kegiatan pada ketersediaan alat-alat kesehatan. Indikator program ini adalah Cakupan ketersediaan alat-alat kesehatan.

f. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Fokus kegiatan pada ketersediaan alat-alat kesehatan. Indikator program ini adalah Cakupan ketersediaan alat-alat kesehatan.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Fokus kegiatan pada Pembangunan dan Pengelolaan SDA dan Jaringan Pengairan Lainnya. Indikator program ini adalah Presentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik.

b. Program Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Fokus kegiatan pada Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap. Indikator program ini adalah

Prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap; dan
Prosentase jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik/
sedang.

c. Program Pengembangan Infrastruktur di Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh

Fokus kegiatan pada Pembangunan/ Peningkatan Infastruktur.
Indikator program ini adalah Persentase panjang saluran drainase
perkotaan dalam kondisi baik; Persentase akses air minum layak;
dan Persentase akses sanitasi layak (air limbah domestik).

d. Program Perencanaan dan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang
Fokus kegiatan pada Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang.
Indikator program ini adalah Persentase ketaatan rencana tata
ruang.

e. Program Peningkatan sarana dan prasarana Kebinamargaan
Fokus kegiatan pada Operasional Pengelolaan UPT dan
Peningkatan Sarana dan prasarana Kebinamargaan. Indikator
program ini adalah Presentase alat - alat berat dalam kondisi
baik.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Fokus
kegiatan pada Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana
perumahan dan kawasan permukiman. Indikator program ini adalah
persentase rumah layak huni; dan Prosentase meningkatnya
kualitas lingkungan perumahan permukiman.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:

a. Program pembinaan kesatuan bangsa dan politik

Fokus kegiatan pada Peningkatan wawasan kebangsaan dan
ideologi. Indikator program ini adalah Prosentase penurunan
konflik antarkelompok di daerah; Prosentase demonstrasi yang
anarkhis; Prosentase kejadian penyalahgunaan narkoba; dan
Prosentase tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu.

- b. Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Trantibum
Fokus kegiatan pada Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Trantibum. Indikator program ini adalah Prosentase (%) pelanggaran Perda dan Perkada tentang Trantibum.
- c. Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Fokus kegiatan pada Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Indikator program ini adalah Rasio pol PP per 10.000 penduduk, dan prosentase (%) penurunan tindak kriminal di daerah.
- d. Program Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Fokus kegiatan pada Peningkatan Perlindungan Masyarakat. Indikator program ini adalah Rasio linmas per 10.000 penduduk, Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota, Tingkat Waktu tanggap (response time rate) dan Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi.

6. Sosial

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial
Fokus kegiatan pada Fasilitasi Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial. Indikator program ini adalah Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku setelah mendapat pelayanan sosial.
- b. Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keluarga Miskin
Fokus kegiatan pada Pemberdayaan Keluarga Miskin. Indikator program ini adalah Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Sosial.

c. Program Penanggulangan Bencana Daerah

Fokus kegiatan pada Penanganan kedaruratan dan penyediaan logistik. Indikator program ini adalah Cakupan pelayanan penanggulangan bencana.

5.2.2 Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program perluasan kesempatan kerja, penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja

Fokus kegiatan pada Fasilitasi dan Pembinaan tenaga kerja dalam negeri. Indikator program ini adalah Prosentase pencari kerja yang terfasilitasi pelatihan; dan Prosentase penempatan tenaga kerja.

b. Program pembinaan, perlindungan hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan

Fokus kegiatan pada Fasilitasi dan pembinaan hubungan industrial. Indikator program ini adalah Prosentase perselisihan ketenagakerjaan yang terselesaikan.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Fokus kegiatan pada Peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan. Indikator program ini adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dalam bekerja; dan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit pelayanan terpadu.

3. Pangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Fokus kegiatan pada Pengelolaan ketersediaan dan distribusi pangan. Indikator program ini adalah Persentase ketersediaan pangan utama.

4. Pertanahan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Penataan Penguasaan, kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan Penyelesaian Konflik Pertanahan. Fokus kegiatan pada Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan

tanah dan Penyelesaian Konflik Pertanahan. Indikator program ini adalah Persentase tersedianya tanah untuk Jalan lingkar Mijen – Klumpit; dan Persentase tersedianya tanah untuk Waduk Logung (pinjam pakai tanah Perhutani).

5. Lingkungan Hidup

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program pengendalian dan konservasi LH

Fokus kegiatan pada Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup. Indikator program ini adalah Indeks kualitas air; Indeks kualitas Udara; dan Indeks tutupan lahan.

b. Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kapasitas LH

Fokus kegiatan pada Pengembangan kapasitas lingkungan hidup. Indikator program ini adalah Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

c. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Fokus kegiatan pada Pengelolaan sampah dan limbah B3. Indikator program ini adalah Prosentase Penanganan sampah; dan Proporsi RTH.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Fokus kegiatan pada Fasilitasi dan peningkatan pelayanan identitas penduduk. Indikator program ini adalah Cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

b. Program Pelayanan Pencatatan Sipil

Fokus kegiatan pada Fasilitasi dan peningkatan pelayanan akta kelahiran dan kematian. Indikator program ini adalah Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Fokus kegiatan pada Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu. Indikator program ini adalah Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program peningkatan pemberdayaan masyarakat

Fokus kegiatan pada Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan. Indikator program ini adalah Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat.

b. Program fasilitasi pemerintahan desa

Fokus kegiatan pada Fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa. Indikator program ini adalah Persentase produk hukum yang didistribusikan; dan Prosentase pelaksanaan pelatihan/ bimtek aparatur pedesaan.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Keluarga Berencana. Fokus kegiatan pada Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Indikator program ini adalah Cakupan peserta KB Aktif; dan Total Fertility Rate (TFR rata-rata jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan yang dilahirkan oleh seorang wanita tiap 1000 penduduk hingga akhir masa reproduksinya).

9. Perhubungan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Fokus kegiatan pada Peningkatan Manajemen Pengelolaan Lalu Lintas. Indikator program ini adalah Rasio volume lalu lintas dengan kapasitas jalan (V/C Ratio) pada ruas jalan utama dan Perbandingan jumlah penumpang angkutan umum dengan kapasitas tempat duduk angkutan umum yang tersedia (*Load factor*).

b. Program Peningkatan Keselamatan dan Sarana Prasarana LLAJ

Fokus kegiatan pada Peningkatan Sarana Prasarana LLAJ. Indikator program ini adalah Presentase penyediaan perlengkapan jalan pada daerah rawan kecelakaan, dan Presentase kendaraan umum laik jalan.

c. Program Peningkatan Pengelola Perpustakaan dan Terminal

Fokus kegiatan pada Operasional Pengelolaan UPTD Perpustakaan dan Terminal. Indikator program ini adalah Persentase kelancaran pengelolaan perpustakaan dan terminal.

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program pengelolaan komunikasi dan informasi publik

Fokus kegiatan pada Penguatan SDM, sarana prasarana dan penyebarluasan informasi publik. Indikator program ini adalah Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan; Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media; dan Persentase pemohon memperoleh informasi publik dalam satu tahun secara memadai (sesuai kebutuhan pemohon).

b. Program pengembangan teknologi dan sistem informasi

Fokus kegiatan pada Pengelolaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi. Indikator program ini adalah Persentase Perangkat Daerah yang mengembangkan teknologi informasi; dan Persentase Perangkat Daerah yang telah mengupdate data di website Pemerintah Kabupaten.

11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Program peningkatan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah. Fokus kegiatan pada Peningkatan dan pengembangan Promosi, Produksi dan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah. Indikator program ini adalah Prosentase koperasi aktif; dan Prosentase UMKM naik kelas.

12. Penanaman Modal

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal
Fokus kegiatan pada Pengembangan iklim penanaman modal.
Indikator program ini adalah Tingkat pertumbuhan investasi.
- b. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
Fokus kegiatan pada Pembinaan dan pemantauan penanaman modal. Indikator program ini adalah prosentase investasi penanaman modal sesuai target.
- c. Program Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan
Fokus kegiatan pada Fasilitasi Pelayanan Perizinan Lingkungan.
Indikator program ini adalah Cakupan pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan.
- d. Program Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Jasa Usaha
Fokus kegiatan pada Fasilitasi Pelayanan Perizinan Perekonomian.
Indikator program ini adalah Cakupan pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Kepemudaan
Fokus kegiatan pada Peningkatan Kualitas Sumber Daya Kepemudaan. Indikator program ini adalah Persentase kenakalan pemuda; dan Persentase kegiatan kepemudaan.
- b. Program Peningkatan Kualitas dan Sarana Prasarana Olahraga
Fokus kegiatan pada Peningkatan Prestasi dan Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga. Indikator program ini adalah Persentase penghargaan olah raga; dan persentase kegiatan keolahragaan.

14. Statistik

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah. Fokus kegiatan pada Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik sektoral.

Indikator program ini adalah Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi; Buku "Kabupaten Dalam Angka"; Buku PDRB; dan Cakupan pelayanan data statistik sektoral.

15. Persandian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program pengelolaan persandian. Fokus kegiatan pada Pengelolaan persandian. Indikator program ini adalah Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah; dan Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian.

16. Kebudayaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program pengembangan dan pengelolaan kekayaan budaya dan cagar budaya. Fokus kegiatan pada Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah, museum dan purbakala. Indikator program ini adalah Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

17. Perpustakaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Peningkatan Pelayanan dan sistem administrasi perpustakaan. Fokus kegiatan pada Pengelolaan perpustakaan daerah. Indikator program ini adalah Minat baca masyarakat Kudus.

18. Kearsipan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Peningkatan Pelayanan dan sistem administrasi kearsipan. Fokus kegiatan pada Pengelolaan arsip daerah. Indikator program ini adalah Prosentase OPD/ unit kerja/ layanan publik menyelenggarakan tata kelola arsip secara baku.

5.2.3 Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan. Fokus kegiatan pada Peningkatan dan pengembangan produksi perikanan. Indikator program ini adalah persentase peningkatan produksi perikanan.

2. Pariwisata

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program peningkatan dan pengembangan pariwisata. Fokus kegiatan pada Peningkatan dan pengembangan destinasi pariwisata. Indikator program ini adalah Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata; dan Persentase PAD sektor pariwisata.

3. Pertanian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Produksi dan Sarana Prasarana Pertanian/Perkebunan

Fokus kegiatan pada Peningkatan produksi tanaman pangan. Indikator program ini adalah Nilai Tukar Petani dan peningkatan produktivitas pangan utama

b. Program Peningkatan Produksi dan Sarana Prasarana Peternakan

Fokus kegiatan pada Pembinaan dan pengembangan peternakan. Indikator program ini adalah persentase peningkatan produksi peternakan.

4. Kehutanan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program pengelolaan taman hutan raya. Fokus kegiatan pada Pengelolaan taman hutan raya. Indikator program ini adalah Proporsi RTH.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program pelayanan perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral. Fokus kegiatan pada Fasilitasi pelayanan perizinan pemanfaatan langsung panas bumi. Indikator program ini adalah studi komparasi

6. Perdagangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Fasilitas Perdagangan, Promosi dan Perlindungan Konsumen

Fokus kegiatan pada Fasilitas, Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan. Indikator program ini adalah cakupan pembinaan fasilitas perdagangan, pengendalian bahan pokok dan barang penting, pengawasan barang bersubsidi serta pelaksanaan promosi; dan cakupan fasilitas perlindungan konsumen.

b. Program Peningkatan dan Pengelolaan Pasar

Fokus kegiatan pada Penataan pembangunan dan Peningkatan Pengelolaan Sarana Prasarana Pasar. Indikator program ini adalah Cakupan pengelolaan, pendapatan, ketertiban, kebersihan serta penataan pembangunan dan sarpras pasar rakyat.

c. Program Pembinaan PKL dan asongan

Fokus kegiatan pada Pembinaan dan Penataan PKL. Indikator program ini adalah cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal.

7. Perindustrian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program peningkatan dan pengembangan perindustrian. Fokus kegiatan pada Peningkatan dan pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri. Indikator program ini adalah Prosentase peningkatan IKM.

8. Transmigrasi

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program fasilitas dan pengembangan wilayah penempatan transmigrasi. Fokus kegiatan pada Fasilitas perpindahan dan penempatan transmigrasi. Indikator program ini adalah Prosentase calon transmigran yang terfasilitasi.

5.2.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Administrasi Pemerintahan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program fasilitas tata pemerintahan

Fokus kegiatan pada Fasilitas Pemerintahan Daerah. Indikator program ini adalah Prosentase fasilitas tata pemerintahan.

- b. Program penataan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan penegakan HAM

Fokus kegiatan pada Fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Indikator program ini adalah Prosentase penataan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyelesaian penanganan kasus Pemda.

- c. Program Pengelolaan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Fokus kegiatan pada Pengelolaan administrasi pembangunan. Indikator program ini adalah Terwujudnya stabilitas perekonomian daerah; dan Prosentase pengendalian, monev dan pelaporan kegiatan OPD.

- d. Program Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

Fokus kegiatan pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Indikator program ini adalah Persentase Fasilitasi Proses Pengadaan Barang/Jasa

- e. Program peningkatan kesejahteraan rakyat

Fokus kegiatan pada Fasilitasi dan peningkatan kesejahteraan sosial. Indikator program ini adalah Cakupan fasilitasi peningkatan kesejahteraan rakyat.

- f. Program pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi

Fokus kegiatan pada Fasilitasi kelembagaan perangkat daerah. Indikator program ini adalah Cakupan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi

- g. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

Fokus kegiatan pada Penerimaan kunjungan dan pelaksanaan koordinasi kepala daerah/wakil kepala daerah. Indikator program ini adalah Persentase kelancaran pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

- h. Program penyelenggaraan kehumasan

Fokus kegiatan pada Fasilitasi kehumasan, publikasi dan protokol. Indikator program ini adalah cakupan penyelenggaraan kehumasan.

- i. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Fokus kegiatan pada Peningkatan kapasitas DPRD. Indikator program ini adalah cakupan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.
- j. Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan
Fokus kegiatan pada Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan. Indikator program ini adalah Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan

2. Pengawasan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Presentase laporan kinerja, keuangan dan aset Obrik yang akuntabel; Presentase penanganan kasus pengaduan dan pungli di lingkungan Pemda; Presentase penyelesaian TLHP Reguler; Cakupan pelayanan review LKPD, LKjIP, HPS, RKPD, RKA, KUA-PPAS; dan Cakupan pelayanan evaluasi SAKIP.
- b. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
Presentase ASN yang melaksanakan LKKS; Nilai PMPRB; Cakupan SOP; dan Level maturitas SPIP.

3. Perencanaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program perencanaan pembangunan daerah
Fokus kegiatan pada Penyusunan Perencanaan Pembangunan. Indikator program ini adalah Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD, Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD, dan Persentase keterisian data/informasi
- b. Program perencanaan Pemerintahan dan sosial budaya
Fokus kegiatan pada Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya. Indikator program ini adalah Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya

- c. Program perencanaan prasarana wilayah, Ekonomi dan sumber daya alam

Fokus kegiatan pada Penyusunan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam. Indikator program ini adalah Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam.

4. Keuangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program peningkatan pendapatan daerah

Fokus kegiatan pada Optimalisasi, monitoring dan evaluasi pendapatan daerah. Indikator program ini adalah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.

- b. Program fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah

Fokus kegiatan pada Fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah seluruh bidang. Indikator program ini adalah Penyelesaian APBD dan perubahan APBD.

- c. Program penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah

Fokus kegiatan pada Fasilitasi penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah seluruh bidang. Indikator program ini adalah Penyelesaian Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

- d. Program pengelolaan perbendaharaan daerah

Fokus kegiatan pada Fasilitasi pelaporan dan administrasi perbendaharaan daerah. Indikator program ini adalah Tertib administrasi perbendaharaan.

- e. Program pengelolaan aset daerah

Fokus kegiatan pada Peningkatan manajemen aset/barang daerah. Indikator program ini adalah Persentase OPD yang telah melakukan inventarisasi aset dengan tertib.

5. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program pengembangan, pendidikan dan pelatihan aparatur

Fokus kegiatan pada Pengembangan aparatur. Indikator program ini adalah Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

b. Program penyelenggaraan administrasi aparatur

Fokus kegiatan pada Penyelenggaraan pemindahan, pemberhentian dan pensiun aparatur. Indikator program ini adalah Prosentase penyelenggaraan pemindahan, pemberhentian dan pensiun aparatur; dan Prosentase penataan sistem administrasi kenaikan pangkat.

c. Program pembinaan pegawai dan dokumentasi aparatur

Fokus kegiatan pada Penyelenggaraan pembinaan disiplin aparatur. Indikator program ini adalah Prosentase penanganan pembinaan disiplin aparatur; dan Prosentase pembangunan/ pengembangan sistem informasi dan dokumentasi aparatur.

6. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Fokus kegiatan pada Pengembangan dan inovasi. Indikator program ini adalah Capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian daerah.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional Perangkat Daerah yaitu Program pelayanan administrasi umum. Fokus kegiatan pada Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan, Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur dan Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja. Indikator program ini adalah cakupan pelayanan administrasi umum.

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, daya saing dan pelayanan umum. Keberhasilan ditunjukkan dari pencapaian target indikator pembangunan daerah sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir tahun perencanaan dapat dicapai.

Indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan indikator keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2019. Keberhasilan indikator kinerja tersebut juga diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2019

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2019, maka ditetapkan target pada indikator kinerja utama daerah tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Angka Kemiskinan	%	7,38
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	2,50
3	Inflasi	%	4 \pm 1
4	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,60
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,50

6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kudus sebagaimana tertuang pada tabel berikut.

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2019

N O	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	OPD PELAK- SANA
A	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
1	PENDIDIKAN					Dinas Dikpora
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD/MI/Paket A	%	95	
			APK SMP/MTs/Paket B	%	95	
			APM SD/MI/Paket A	%	95	
			APM SMP/MTs/Paket B	%	95	
			Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun	%	95	
			Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun	%	95	
		Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf (AMH)	%	95	
			APK PAUD	%	60	
2	KESEHATAN					Dinas Kesehatan , RSUD
		Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH		110	
			Angka Kematian Bayi per 1.000 KH		10	
			Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun	%	28	
			Cakupan pelayanan kesehatan Anak Usia Sekolah	%	100	

N O	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	OPD PELAK- SANA
			Cakupan STBM	%	100	
		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dan IDL	%	100	
			Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	%	100	
			Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberculosis (TB)	%	100	
			Cakupan pelayanan kesehatan untuk penderita DBD	%	100	
			Cakupan pelayaan kesehatan Penyakit Tidak Menular dan kesehatan jiwa	%	100	
		Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat	%	100	
			Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	%	90	
			Cakupan pelayanan perizinan, sertifikasi dan pemetaan SDM Kesehatan	%	80	
		Program Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah	Cakupan pelayanan BLUD	%	100	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan ketersediaan alat-alat kesehatan	%	80	
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Cakupan ketersediaan alat-alat kesehatan	%	100	
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					Dinas PUPR
		Persentase alat - alat berat dalam kondisi baik	Presentase alat - alat berat dalam kondisi baik	%	83	

N O	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	OPD PELAK- SANA
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Presentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	80,63	
		Program Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	90,1	
			Prosentase jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik/ sedang	%	91,64	
		Program Pengembangan Infrastruktur di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase panjang saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik	%	87,72	
			Persentase akses air minum layak	%	93	
			Persentase akses sanitasi layak (air limbah domestik)	%	97	
		Program Perencanaan dan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	Persentase ketaatan rencana tata ruang	%	100	
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					Dinas PKPLH
		Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	persentase rumah layak huni	%	97,83	
			Prosentase meningkatnya kualitas lingkungan perumahan permukiman	%	92,03	
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					Kantor Kesbangpol, Satpol PP
		Program pembinaan kesatuan bangsa dan politik	Prosentase penurunan konflik antarkelompok di daerah	%	80	

N O	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	OPD PELAK- SANA
			Prosentase demonstrasi yang anarkhis	%	50	
			Prosentase kejadian penyalahgunaan narkoba	%	60	
			Prosentase tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu	%	85	
		Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Trantibum	Prosentase (%) pelanggaran Perda dan Perkada tentang Trantibum	%	30	
		Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Prosentase (%) penurunan tindak kriminal di daerah	%	30	
		Program Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Rasio linmas per 10.000 penduduk	%	100	
			Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	%	80	
			Tingkat Waktu tanggap (response time rate)	%	50	
			Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	60	
6	SOSIAL					Dinas SosP3AP2 KB, BPBD
		Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku setelah mendapat pelayanan sosial	%	37	
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keluarga Miskin	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Sosial	%	65	
		Program Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana	%	100	

N O	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	OPD PELAK- SANA
B	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR					
1	TENAGA KERJA					Dinas Nakerinko pUKM
		Program perluasan kesempatan kerja, penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja	Prosentase pencari kerja yang terfasilitasi pelatihan	%	0,30	
			Prosentase penempatan tenaga kerja	%	5	
		Program pembinaan, perlindungan hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan	Prosentase perselisihan ketenagakerjaan yang terselesaikan	%	80,00	
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					Dinas SosP3AP2 KB
		Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dalam bekerja	%	95	
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit pelayanan terpadu	%	100	
3	PANGAN					Dinas Pertanian dan Pangan
		Program peningkatan ketahanan pangan	Persentase ketersediaan pangan utama	%	100	
4	PERTANAHAN					Dinas PUPR

N O	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	OPD PELAK- SANA
		Program Penataan Penguasaan, pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan Penyelesaian Konflik Pertanahan	Persentase tersedianya tanah untuk Jalan lingkari Mijen - Klumpit	%	90	
			Persentase tersedianya tanah untuk Waduk Logung (pinjam pakai tanah Perhutani)	%	50	
5	LINGKUNGAN HIDUP					Dinas PKPLH
		Program pengendalian dan konservasi LH	Indeks kualitas air	%	37,30	
			Indeks kualitas Udara	%	89,37	
			Indeks tutupan lahan	%	58,18	
		Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kapasitas LH	Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	20,00	
		Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Prosentase Penanganan sampah	%	49,00	
			Proporsi RTH	%	8,15	
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					Dinas Dukcapil
		Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	100,00	
		Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun	%	87,00	

N O	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	OPD PELAK- SANA
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten		Ada	
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					Dinas PMD
		Program peningkatan pemberdayaan masyarakat	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat	%	100	
		Program fasilitasi pemerintahan desa	Persentase produk hukum yang didistribusikan	%	90	
			Prosentase pelaksanaan pelatihan/ bimtek aparatur pedesaan	%	100	
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB					Dinas SosP3AP2 KB
		Program Keluarga Berencana	Cakupan peserta KB Aktif	%	80	
			Total Fertility Rate (TFR rata-rata jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan yang dilahirkan oleh seorang wanita tiap 1000 penduduk hingga akhir masa reproduksinya)		2,3	
9	PERHUBUNGAN					Dishub
		Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rasio volume lalu lintas dengan kapasitas jalan (V/C Ratio) pada ruas jalan utama	-	0,425	
			Perbandingan jumlah penumpang angkutan umum dengan kapasitas tempat duduk angkutan umum yang tersedia (Load factor)	%	40	
		Program Peningkatan Keselamatan dan Sarana Prasarana	Presentase penyediaan perlengkapan jalan pada daerah rawan	%	82	

N O	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	OPD PELAK- SANA
		LLAJ	kecelakaan			
			Presentase kendaraan umum laik jalan	%	91	
		Program Peningkatan Pengelolaan Perparkiran dan Terminal	Persentase kelancaran pengelolaan perparkiran dan terminal	%	100	
1 0	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					Dinas Kominfo
		Program pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	%	100	
			Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media	%	100	
			Persentase pemohon memperoleh informasi publik dalam satu tahun secara memadai (sesuai kebutuhan pemohon)	%	100	
		Program pengembangan teknologi dan sistem informasi	Persentase Perangkat Daerah yang mengembangkan teknologi informasi	%	5	
			Persentase Perangkat Daerah yang telah mengupdate data di website Pemerintah Kabupaten	%	100	
1 1	KOPERASI DAN UKM					Dinas Nakerinko pUKM
		Program peningkatan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah	Prosentase koperasi aktif	%	75	
			Prosentase UMKM naik kelas	%	2	
1 2	PENANAMAN MODAL					DPMP TSP

N O	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	OPD PELAK- SANA
		Program perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal	Tingkat pertumbuhan investasi	%	5	
		Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	prosentase investasi penanaman modal sesuai target	%	100	
		Program Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan	Cakupan pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan	%	90	
		Program Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Jasa Usaha	Cakupan pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha	%	90	
1 3	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					Dinas Dikpora
		Program Kepemudaan	Persentase kenakalan pemuda	%	1	
			Persentase kegiatan kepemudaan	%	40	
		Program Peningkatan Kualitas dan Sarana Prasarana Olahraga	Persentase penghargaan olah raga	%	20	
			Persentase kegiatan keolahragaan	%	40	
1 4	STATISTIK					Dinas Kominfo
		Program pengembangan data/informasi/s tatistik daerah	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi		Ada	
			Buku "Kabupaten Dalam Angka"		Ada	
			Buku PDRB		Ada	
			Cakupan pelayanan data statistik sektoral	%	100	
1 5	PERSANDIAN					Dinas Kominfo
		Program pengelolaan persandian	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	%	100	

N O	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	OPD PELAK- SANA
			Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian	%	100	
1 6	KEBUDAYAAN					Dinas Budpar
		Program pengembangan dan pengelolaan kekayaan budaya dan cagar budaya	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%		
1 7	PERPUSTAKAAN					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Program Peningkatan Pelayanan dan sistem administrasi perpustakaan	Minat baca masyarakat Kudus	indek	8	
1 8	KEARSIPAN					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Program Peningkatan Pelayanan dan sistem administrasi kearsipan	Prosentase OPD/ unit kerja/ layanan publik menyelenggarakan tata kelola arsip secara baku	%	100	
C	URUSAN PILIHAN					
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN					Dinas Pertanian dan Pangan
		Program pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan	%	5	
2	PARIWISATA					Dinas Budpar
		Program peningkatan dan pengembangan pariwisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata	%		

N O	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	OPD PELAK- SANA
			Persentase PAD sektor pariwisata	%	7	
3	PERTANIAN					Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Peningkatan Produksi dan Sarana Prasarana Pertanian/Perkeb unan	Nilai Tukar Petani		102	
			Peningkatan produktivitas pangan utama	ton/ha	6,5	
		Program Peningkatan Produksi dan Sarana Prasarana Peternakan	Persentase peningkatan produksi peternakan	%	5	
4	KEHUTANAN					Dinas PKPLH
		Program pengelolaan taman hutan raya	Proporsi RTH	%	8,15	
5	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					DPMPTSP
		Program pelayanan perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral	Berfungsinya LPJU		100%	
6	PERDAGANGAN					Dinas Perdagang an
		Program Fasilitasi Perdagangan, Promosi dan Perlindungan Konsumen	cakupan pembinaan fasilitasi perdagangan, pengendalian bahan pokok dan barang penting, pengawasan barang bersubsidi serta pelaksanaan promosi	%	100	
			cakupan fasilitasi perlindungan konsumen	%	100	

N O	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	OPD PELAK- SANA
		Program Peningkatan dan Pengelolaan Pasar	Cakupan pengelolaan, pendapatan, ketertiban, kebersihan serta penataan pembangunan dan sarpras pasar rakyat	%	100	
		Program Pembinaan PKL dan asongan	cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	30	
7	PERINDUSTRIAN					Dinas Nakerinko pUKM
		Program peningkatan dan pengembangan perindustrian	Prosentase peningkatan IKM	%	5,00	
8	TRANSMIGRASI					Dinas Nakerinko pUKM
		Program fasilitasi dan pengembangan wilayah penempatan transmigrasi	Prosentase calon transmigran yang terfasilitasi	%	25,00	
D	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
1	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN					Setda, Set DPRD
		Program fasilitasi tata pemerintahan	Prosentase fasilitasi tata pemerintahan	%	100	
		Program penataan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan penegakan HAM	Prosentase penataan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyelesaian penanganan kasus Pemda	%	100	
		Program Pengelolaan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Terwujudnya stabilitas perekonomian daerah	%	100	
			Prosentase pengendalian, monev dan pelaporan kegiatan	%	100	

N O	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	OPD PELAK- SANA
			OPD			
		Program Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Fasilitasi Proses Pengadaan Barang/Jasa	%	100	
		Program peningkatan kesejahteraan rakyat	Cakupan fasilitasi peningkatan kesejahteraan rakyat	%	100	
		Program pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi	Cakupan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi	%	100	
		Program penyelenggaraan kehumasan	Cakupan penyelenggaraan kehumasan	%	100	
		Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Cakupan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	%	100	
		Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	%	100	
		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase kelancaran pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	%	100	
2	PENGAWASAN					inspektora t
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase laporan kinerja, keuangan dan aset Obrik yang akuntabel	%	100	
			Presentase penanganan kasus pengaduan dan pungli di lingkungan Pemda	%	100	
			Presentase	%	100	

N O	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	OPD PELAK- SANA
			penyelesaian TLHP Reguler			
			Cakupan pelayanan review LKPD, LKjIP, HPS, RKPD, RKA, KUA-PPAS	%	100	
			Cakupan pelayanan evaluasi SAKIP	%	100	
		Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Presentase ASN yang melaksanakan LKKS	%	100	
			Nilai PMPRB		B	
			Cakupan SOP	%	100	
			Level maturitas SPIP		3	
3	PERENCANAAN					Bappelitba ngda
		Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	%	100	
			Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD	%	100	
			Persentase keterisian data/informasi	%	60	
		Program perencanaan Pemerintahan dan sosial budaya	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya	%	100	
		Program perencanaan prasarana wilayah, Ekonomi dan sumber daya alam	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	%	100	
4	KEUANGAN					BPPKAD
		Program peningkatan pendapatan daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	%	7	
			Tercapainya pendapatan asli daerah	%	100	
		Program fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah	Penyelesaian APBD dan perubahan APBD	%	100	

N O	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	OPD PELAK- SANA
		Program penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah	Penyelesaian Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	%	100	
		Program pengelolaan perbendaharaan daerah	Tertib administrasi perbendaharaan	%	100	
		Program pengelolaan aset daerah	Persentase OPD yang telah melakukan inventarisasi aset dengan tertib	%	100	
5	KEPEGAWAIAN					BKPP
		Program pengembangan, pendidikan dan pelatihan aparatur	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	%	20	
		Program penyelenggaraan administrasi aparatur	Prosentase penyelenggaraan pemindahan, pemberhentian dan pensiun aparatur	%	20	
			Prosentase penataan sistem administrasi kenaikan pangkat	%	20	
		Program pembinaan pegawai dan dokumentasi aparatur	Prosentase penanganan pembinaan disiplin aparatur	%	20	
			Prosentase pembangunan/ pengembangan sistem informasi dan dokumentasi aparatur	%	20	
6	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					Bappelitbangda
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian daerah	%	100	
E	NON URUSAN					
		Program pelayanan administrasi umum	cakupan pelayanan administrasi umum	%	100	

BAB VII PENUTUP

RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah dan disusun dengan mendasarkan pada permasalahan dan tantangan pembangunan dan memperhitungkan potensi dan peluang yang dimiliki untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kudus. RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2019 menjadi acuan bagi pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2019.

Beberapa kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2019 yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. RKPD Tahun 2019 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2019 sesuai tugas pokok dan fungsinya.
2. RKPD Tahun 2019 menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2019 untuk menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019.
3. Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan termasuk dunia usaha dan masyarakat berkewajiban melaksanakan program-program RKPD Tahun 2019 dengan sebaik-baiknya.

Pelaksanaan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2019 perlu memperhatikan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, swasta maupun masyarakat.

BUPATI KUDUS,

RIENA RETNANINGRUM